



**PEMERINTAH
KABUPATEN BADUNG**

**LKjIP
KABUPATEN BADUNG**

**LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH
KABUPATEN BADUNG TAHUN 2024**



PERNYATAAN TELAH DI REVIU
ATAS LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH KABUPATEN BADUNG
TAHUN ANGGARAN 2024

Kami telah mereviu Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Badung untuk Tahun Anggaran 2024, sesuai Pedoman Reviu atas Laporan Kinerja. Substansi informasi yang dimuat dalam Laporan Kinerja menjadi tanggung jawab manajemen Pemerintah Daerah Kabupaten Badung.

Reviu bertujuan untuk memberikan keyakinan terbatas bahwa laporan kinerja telah disajikan secara akurat, andal, dan valid.

Berdasarkan reviu kami, tidak terdapat kondisi atau hal-hal yang menimbulkan perbedaan dalam meyakini keandalan informasi yang disajikan di dalam laporan kinerja ini.

Mangupura, 25 Maret 2025

Inspektur Kabupaten Badung



Luh Suryaniti, S.sos.,M.Si.

Pembina Utama Muda

NIP. 19690323 198903 2 012



KATA PENGANTAR

Om Swastyastu,

Atas Asung Kerta Wara Nugraha dari Ida Sang Hyang Widi Wasa/Tuhan Yang Maha Esa, sehingga penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Kabupaten Badung Tahun 2024 dapat diselesaikan, sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP).

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah serta Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 53 tahun 2014 tentang petunjuk teknis Perjanjian Kinerja, Laporan Kinerja dan Tata cara Reviu Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, bahwa paling lambat 3 (Tiga) bulan setelah tahun anggaran berakhir, Bupati wajib menyusun Laporan Kinerja (LKjIP).

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah tahun 2024 merupakan laporan kinerja tahun kedua dalam upaya mewujudkan tujuan dan sasaran pembangunan sesuai RPJMD Semesta Berencana 2021-2026. Sesuai Visi RPJMD Semesta Berencana 2021-2026 yaitu **“Melanjutkan Kebahagiaan Masyarakat Badung Melalui Pembangunan Yang Berlandaskan Tri Hita Karana”** akan



diwujudkan dengan 11 tujuan yang terdiri dari 19 sasaran strategis dan diukur dengan 22 indikator kinerja utama (IKU).

Laporan akuntabilitas kinerja Kabupaten Badung tahun 2024 berisikan laporan pertanggungjawaban kinerja yang telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Badung Tahun 2021–2026 kepada Pemerintah Provinsi, Pemerintah pusat serta kepada masyarakat sebagai perwujudan penyelenggaraan pemerintahan yang efektif, efisien, transparan dan akuntabel serta menciptakan *Good Governance* dan *Clean Government*.

Berbagai upaya yang telah dan akan dilakukan Pemerintah Kabupaten Badung untuk terus meningkatkan efektivitas program/kegiatan (*refocusing program*) dengan mengutamakan program prioritas sesuai RPJMD Semesta Berencana tahun 2021-2026 untuk meningkatkan efisiensi anggaran melalui perubahan *mindset* dan penyelarasan program/kegiatan sebagai bentuk komitmen untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien, akuntabel dan berorientasi pada hasil (*result oriented*). Upaya peningkatan tata kelola pemerintahan melalui penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja di Kabupaten Badung mulai dirasakan manfaatnya hal ini tampak dari perubahan *mindset* dan disiplin ASN sebagai tuntutan dari budaya kinerja yang lambat laun mulai tumbuh dan akan terus kami dorong serta *efisiensi* anggaran sebagai akibat adanya penyelarasan program/kegiatan dengan sasaran RPJMD.



Berkenaan dengan hal tersebut, kami menyampaikan apresiasi dan penghargaan kepada semua pihak yang telah bekerja keras dalam mewujudkan Akuntabilitas Kinerja khususnya kepada jajaran Kementerian PAN dan RB atas perhatian dan pembinaannya selama ini, untuk selanjutnya dengan komitmen dan kerja keras, kami bertekad untuk bisa lebih baik untuk mewujudkan implementasi akuntabilitas kinerja di Kabupaten Badung.

Sekian dan Terima kasih

Om Santih, Santih, Santih, Om

Mangupura, 25 Maret 2025

 **Wayan Adi Arnawa, SH**
Bupati Badung,



RINGKASAN EKSEKUTIF

Pemerintah Kabupaten Badung sangat berkomitmen dalam mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang *Good Governance* dan *Clean Government* dalam rangka mewujudkan suatu pemerintahan yang baik dan bersih dengan lebih mengedepankan prinsip partisipasi, transparansi dan akuntabilitas dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah. Akuntabilitas kinerja merupakan salah satu aspek penting dalam penerapan pertanggungjawaban penyelenggaraan pemerintahan dari penerima amanah kepada pemberi amanah yang dibuat dalam bentuk laporan kinerja instansi pemerintah (LKjIP).

Laporan kinerja instansi pemerintah (LKjIP) menguraikan tentang hasil capaian serta faktor pendorong dan penghambat dari visi, misi, tujuan dan sasaran strategis dan tolak ukur yang jelas atas rumusan perencanaan strategis organisasi dalam kurun waktu satu tahun yang tertuang dalam RPJMD.

RPJMD Semesta Berencana Kabupaten Badung 2021-2026 dengan visi “**Melanjutkan Kebahagiaan Masyarakat Badung Melalui Pembangunan Yang Berlandaskan Tri Hita Karana**” terdiri dari 9 (sembilan) misi, 11 (sebelas) Tujuan, 19 (sembilan belas) sasaran strategis dan 22 (dua puluh dua) indikator kinerja utama (IKU).

RPJMD Semesta Berencana Kabupaten Badung tahun 2021-2026 mencakup 9 misi yang dijabarkan menjadi 11 tujuan, 19 sasaran strategis dan 22 indikator kinerja utama (IKU). Pengukuran kinerja pada tahun 2024 dilakukan terhadap capaian sasaran strategis RPJMD. Hasil pengukuran kinerja terhadap sasaran strategis RPJMD

untuk tahun 2024 dari 22 indikator kinerja utama yaitu sebesar 2,659 dengan rata-rata capaian kinerja sebesar 121. Terdapat satu indikator dengan nilai minus diatas 100% yaitu persentase penduduk miskin sebesar -124%. Hasil pengukuran indikator sasaran sebanyak 22 indikator kinerja diperoleh hasil seperti berikut :

- a. Melebihi target (>100%) sebanyak 15 indikator kinerja utama
- b. Sesuai Target (100%) sebanyak 4 indikator kinerja utama
- c. Dibawah target (<100%) sebanyak 3 indikator kinerja utama

Hasil pengukuran indikator kinerja utama (IKU) terhadap 22 indikator menunjukkan indikator dengan capaian dibawah target yaitu sebanyak 3 indikator, sesuai target sebanyak 4 indikator dan 15 indikator diatas target ($\geq 100\%$). Hasil capaian indikator kinerja utama (IKU) RPJMD semesta berencana 2021-2026 untuk tahun 2024 seperti gambar berikut :





Alokasi anggaran untuk pencapaian sasaran strategis tahun 2024 sebesar Rp. 10.078.885.160.993,- dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 7.369.149.732.848,- sehingga persentase penyerapan sebesar 73,11%.

Rincian capaian kinerja untuk masing-masing indikator tiap sasaran strategis seperti berikut :

NO	SASARAN STRATEGIS		INDIKATOR KINERJA UTAMA (Perbup No. 11 Tahun 2022)	SATUAN	TARGET	REALISASI	PERSENTASE CAPAIAN KINERJA
1.	Meningkatnya toleransi hidup beragama	1.	Indek kerukunan umat beragama	Nilai	83 (Sangat Tinggi)	96,52	116
2.	Meningkatnya Birokrasi Yang Bersih dan Akuntabel	2.	Nilai SAKIP	Nilai	79,50 (BB)	76,33 (BB)	96
		3.	Opini BPK	Nilai	WTP	WTP	100 (data 2023)
3.	Meningkatnya Birokrasi Yang Kapabel	4.	Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)	Nilai	3,30 (Baik)	3,87 (Sangat Baik)	117
		5.	Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara (ASN)	Nilai	62,57 (Rendah)	83,61 (Tinggi)	134
4.	Meningkatnya Pelayanan Publik Menuju Pelayanan Yang Prima dan Berintegritas	6.	Indeks Kepuasan Masyarakat	Nilai	86,50 (Baik)	90,78 (Sangat Baik)	105
5.	Meningkatnya Kepatuhan Masyarakat Dalam Mentaati Perda dan Perkada	7.	Persentase Penegakan Perda dan Perkada	%	90,00%	100,00%	111
6.	Terwujudnya Pemenuhan HAM	8.	Capaian Atas Kepedulian HAM	Nilai	75,00 (Peduli HAM)	87,80 (Peduli HAM)	117



NO	SASARAN STRATEGIS		INDIKATOR KINERJA UTAMA (Perbup No. 11 Tahun 2022)	SATUAN	TARGET	REALISASI	PERSENTASE CAPAIAN KINERJA
7.	Meningkatnya kreativitas serta pelestarian seni dan budaya	9.	Persentase Pertumbuhan Seni dan Budaya	%	76,00%	100%	132
8.	Meningkatnya kualitas sumber daya manusia	10.	Indeks Pembangunan Manusia	Nilai	81,63 (Sangat Tinggi)	83,87 (Sangat Tinggi)	103
9.	Meningkatnya persentase koperasi sehat	11.	Persentase Jumlah Koperasi Sehat	%	8,00%	43,13%	539
10.	Meningkatnya jumlah wirausaha	12.	Persentase Pertumbuhan jumlah wirausaha	%	25,00%	26,10%	104
11.	Meningkatnya kontribusi sector perdagangan terhadap PDRB	13.	Persentase Kontribusi Sektor Perdagangan terhadap PDRB	%	10,48%	10,48%	100
12.	Meningkatnya kebahagiaan masyarakat	14.	Indeks Kebahagiaan	Nilai	76,89	78,86	103
13.	Menurunnya angka kemiskinan	15.	Persentase Penduduk Miskin	%	1,80%	2,23%	-124
14.	Meningkatnya pengembangan daya Tarik destinasi pariwisata berorientasi pertanian	16.	Persentase pengembangan daya Tarik destinasi pariwisata berorientasi pertanian	%	7,69%	7,69%	100



NO	SASARAN STRATEGIS		INDIKATOR KINERJA UTAMA (Perbup No. 11 Tahun 2022)	SATUAN	TARGET	REALISASI	PERSENTASE CAPAIAN KINERJA
15.	Meningkatnya pengembangan agroindustri yang berorientasi pada pelestarian sumber daya alam	17.	Persentase Pengembangan Agroindustri yang berorientasi pada Pelestarian Sumber Daya Alam	%	31,83%	50,33%	158
16.	Meningkatnya kuantitas, kualitas dan kontinuitas produk pertanian	18.	Nilai Tukar Usaha Petani (NTUP)	Nilai	100 (Impas)	120,49	120
		19.	Nilai Tukar Nelayan (NTN)	Nilai	100,50	118,51	118
17.	Meningkatnya kontribusi sector pariwisata terhadap PDRB	20.	Persentase Kontribusi Sektor Pariwisata terhadap PDRB	%	26,50%	25,72%	97
18.	Meningkatnya kualitas lingkungan hidup yang berkelanjutan	21.	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	Nilai	61,72 (Sedang)	69,44	113
19.	Meningkatnya Inovasi dan Kemandirian Daerah	22.	Indeks Daya Saing Daerah (IDSD)	Nilai	3.7673 (Sangat Tinggi)	3,7800	100 (data 2023, belum rilis dari BRIN)
	Total Kinerja						2,659
	Rata-rata Kinerja						121



Pemerintah Kabupaten Badung akan melakukan langkah-langkah perbaikan untuk meningkatkan capaian kinerja yang < 100%, sehingga tidak menjadi hambatan dalam implementasi RPJMD semesta berencana 2021-2026 antara lain:

1. Upaya perbaikan untuk pencapaian sasaran strategis Meningkatnya Birokrasi Yang Bersih dan Akuntabel dengan indikator nilai SAKIP melalui:
 - a. Menyusun pedoman pelaksanaan SAKIP di Kabupaten Badung melalui penyusunan peraturan bupati tentang implementasi SAKIP
 - b. Melaksanakan pembinaan/bimtek SAKIP kepada kepala perangkat daerah/pejabat yang membidangi SAKIP
 - c. Pelaksanaan evaluasi internal capaian kinerja masing-masing perangkat daerah
 - d. Pemanfaatan aplikasi e-SAKIP Badung dengan baik untuk implementasi SAKIP dan pemberian Reward dan punishment bagi perangkat daerah.
 - e. Menindaklanjuti rekomendasi-rekomendasi atas Hasil Evaluasi Tahun 2024 dari Kementerian PAN dan RB Bersama Tim SAKIP Kabupaten Badung, agar apa yang menjadi kekurangan dalam indikator nilai SAKIP dapat dioptimalkan ditahun berikutnya.
2. Upaya perbaikan untuk pencapaian sasaran strategis menurunnya angka kemiskinan melalui :
 - a. Memperluas akses kesejahteraan sosial
 - b. Peningkatan kuantitas dan kualitas program kesejahteraan sosial
 - c. Mengoptimalkan sarana dan prasarana kesejahteraan



sosial

- d. Memberikan Bantuan sosial kepada masyarakat Kabupaten Badung sebagai *social safety net* sebagai bentuk dukungan dalam mengurangi beban keluarga miskin dan rentan.
3. Upaya perbaikan untuk pencapaian sasaran strategis Meningkatnya Kontribusi Sektor Pariwisata Terhadap PDRB melalui :
- a. Melakukan perbaikan akses jalan menuju tempat pariwisata
 - b. Meningkatkan kunjungan wisatawan ke Kabupaten Badung
 - c. Meningkatkan kualitas SDM pariwisata dan ekonomi kreatif
 - d. Meningkatkan Pendapatan dari retribusi obyek wisata dan meningkatkan kualitas Industri Pariwisata



DAFTAR ISI

	<i>Halaman</i>
KATA PENGANTAR	i
RINGKASAN EKSEKUTIF	iv
DAFTAR ISI	xi
DAFTAR TABEL	xiii
DAFTAR GAMBAR	xv
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Gambaran Umum	3
1.3. Gambaran Perekonomian	8
1.4. Gambaran IPM	15
1.5. Gambaran Pemerintahan	16
1.6. Sumber Daya Manusia	21
1.7. Sumber Daya Keuangan	24
1.8. Isu Strategis	25
1.9. Arah Kebijakan	26
1.10. Sistematika Laporan	39
BAB II PERENCANAAN KINERJA DAN PERJANJIAN KINERJA	40
2.1. RPJMD Semesta Berencana 2021 – 2026	40
2.2. RKPD dan RKT Tahun 2024	46
2.3. Perjanjian Kinerja Tahun 2024	50
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	54
3.1. Potret Pengukuran dan Capaian Kinerja tahun 2024	54
3.2. Analisis Capaian Kinerja	57
3.3. Analisis Akuntabilitas Keuangan	175
3.4. Analisis Efisiensi Penggunaan Anggaran	178
3.5. Prestasi/Penghargaan	183
BAB IV PENUTUP	190
4.1. Kesimpulan	190
4.2. Upaya Perbaikan Kinerja	192



LAMPIRAN :

Lampiran I : Program Prioritas Sesuai Tabel 6.3 RPJMD Semesta Berencana Kabupaten Badung 2021-2026 beserta anggaran tahun 2024

Lampiran II : Formulasi Penghitungan Indikator Sesuai Peraturan Bupati Badung Nomor 11 Tahun 2022 tentang Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Badung Tahun 2021-2026



DAFTAR TABEL

	<i>Halaman</i>	
Tabel 1.1	Jumlah Desa/Kelurahan, Banjar dan Lingkungan Menurut Kecamatan Kabupaten Badung Tahun 2024	4
Tabel 1.2	Luas Wilayah Menurut Kecamatan Kabupaten Badung	5
Tabel 1.3	Data Curah Hujan, Hari Hujan dan Rata-Rata Penyinaran Matahari di Kabupaten Badung Tahun 2024	6
Tabel 1.4	Jumlah penduduk menurut Kecamatan dan Jenis kelamin di Kabupaten Badung Tahun 2024	7
Tabel 1.5	Jumlah Penduduk Menurut Kelompok Umur dan Jenis Kelamin di Kabupaten Badung tahun 2024	7
Tabel 1.6	Distribusi dan Persentase Penduduk Miskin Kabupaten/Kota di Provinsi Bali Tahun 2024	9
Tabel 1.7	Indeks Kedalaman Kemiskinan dan Indeks Keparahan Kemiskinan di Kabupaten Badung Tahun 2016-2024	10
Tabel 1.8	Perbandingan Gini Rasio Kabupaten/Kota di Provinsi Bali Tahun 2022- 2024	11
Tabel 1.9	Jumlah, Tipe dan Jumlah Struktural Di Kabupaten Badung Tahun 2024	18
Tabel 1.10	Distibusi Aparatur Sipil Negara	22
Tabel 1.11	Distibusi Aparatur Sipil Negara (ASN) menurut Kepangkatan di Kabupaten Badung Tahun 2024	22
Tabel 1.12	Distibusi Aparatur Sipil Negara (ASN) menurut Jenjang Jabatan di Kabupaten Badung Tahun 2024	23
Tabel 1.13	Realisasi APBD Kabupaten Badung Tahun 2024	24
Tabel 2.1	Visi, Misi, Tujuan, Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja Utama RPJMD Semesta Berencana Kabupaten Badung 2021-2026	40
Tabel 2.2	Rencana Kinerja Tahunan Pemerintah Kabupaten Badung Tahun 2024	48



Tabel 2.3	Perjanjian Kinerja Pemerintah Kabupaten Badung Tahun 2024	52
Tabel 3.1	Hasil Pengukuran Kinerja Sasaran Strategis Pemerintah Kabupaten Badung Tahun 2024	55
Tabel 3.2	Nilai Persepsi, Nilai Interval, Nilai Interval Konversi, Mutu Pelayanan dan Kinerja Unit Pelayanan	87
Tabel 3.3	Indeks Kepuasan Masyarakat Kabupaten Badung Tahun 2023-2024	90
Tabel 3.4	Jenis Potensi Pelanggaran yang dapat di Cegah Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Badung Tahun 2024	98
Tabel 3.5	Kategori Desa Adat dan Cagar Budaya di Kabupaten Badung Tahun 2024	108
Tabel 3.6	Kategori Subak Lestari dan Sekaa yang Berkembang di Kabupaten Badung Tahun 2024	109
Tabel 3.7	Distribusi Sekolah dan Siswa Menurut Kecamatan di Kabupaten Badung Tahun 2024	116
Tabel 3.8	Koperasi Sehat Per-Kecamatan Kabupaten Badung Tahun 2024	123
Tabel 3.9	Jumlah UMKM maju di Kabupaten Badung Tahun 2024	127
Tabel 3.10	Target dan Produksi Perikanan di Kabupaten Badung Tahun 2022-2024	155
Tabel 3.11	Jumlah kunjungan wisatawan pada tahun 2022-2024	159
Tabel 3.12	Jumlah usaha sarana pariwisata per kecamatan di Kabupaten Badung Tahun 2024	159
Tabel 3.13	Sasaran Strategis, Jumlah Program, Pagu dan Realisasi Anggaran Kabupaten Badung Tahun 2024	175
Tabel 3.14	Hasil analisis Efektivitas dan Efisiensi Program di Kabupaten Badung Tahun 2024	179
Tabel 3.15	Penghargaan/Prestasi Kabupaten Badung Tahun 2024	183



DAFTAR GAMBAR

	<i>Halaman</i>	
Gambar 1.1	Perbandingan Laju Pertumbuhan Ekonomi di Kabupaten Badung Tahun 2022-2024	8
Gambar 1.2	PDRB Atas Dasar Harga Berlaku Kabupaten Badung tahun 2022-2024	12
Gambar 1.3	Perbandingan Tingkat pengangguran terbuka (TPT) di Kabupaten Badung tahun 2022-2024	13
Gambar 1.4	Perbandingan Jumlah Kunjungan Wisatawan Ke Kabupaten Badung Tahun 2022-2024	14
Gambar 1.5	Lima Negara dengan Jumlah Wisata Terbanyak yang Berkunjung ke Kabupaten Badung Tahun 2024	15
Gambar 1.6	Indeks Pembangunan Manusia di Kabupaten Badung Tahun 2022-2024	16
Gambar 1.7	Bagan Struktur Organisasi Pemerintah Kabupaten Badung	17
Gambar 3.1	Perbandingan Indeks Kerukunan Umat Beragama Kabupaten Badung Tahun 2023-2024	60
Gambar 3.2	Target dan Capaian Indikator Nilai SAKIP Kabupaten Badung Tahun 2022-2024	66
Gambar 3.3	Nilai SAKIP Kabupaten/Kota di Provinsi Bali Tahun 2024	67
Gambar 3.4	Bobot Pada Setiap Komponen Penilaian Akuntabilitas Kinerja Tahun 2024	68
Gambar 3.5	Target dan Capaian Indikator Opini BPK Kabupaten Badung Tahun 2021-2023	73
Gambar 3.6	Penghargaan Opini WTP Tahun 2023	74
Gambar 3.7	Perbandingan Indeks SPBE Kabupaten Badung Tahun 2021-2024	78
Gambar 3.8	Perbandingan Indeks SPBE Kabupaten/Kota di Provinsi Bali Tahun 2024	79
Gambar 3.9	Rumus Penghitungan Indeks Profesionalitas ASN	82



Gambar 3.10	Kategori Tingkat IP ASN	82
Gambar 3.11	Perbandingan Indeks Profesionalitas ASN di Kabupaten Badung Tahun 2022 dan 2024	83
Gambar 3.12	Perbandingan IP ASN Kabupaten/Kota di Provinsi Bali Tahun 2024	84
Gambar 3.13	Target dan Realisasi Indikator Indeks Kepuasan Masyarakat di Kabupaten Badung Tahun 2022-2024	88
Gambar 3.14	Kategori Perangkat Daerah Berdasarkan Indeks Kepuasan Masyarakat di Kabupaten Badung Tahun 2022-2024	89
Gambar 3.15	Piagam Penghargaan Predikat Kepatuhan Pelayanan Publik dari Ombudsman Tahun 2024	92
Gambar 3.16	Target dan Realisasi Indikator Persentase Penegakan Perda dan Perkda di Kabupaten Badung Tahun 2022-2024	97
Gambar 3.17	Target dan Capaian Indikator Capaian Atas Kepedulian HAM di Kabupaten Badung Tahun 2022-2024	103
Gambar 3.18	Parameter Penilaian Capaian atas Kepedulian HAM di Kabupaten Badung	104
Gambar 3.19	Target dan Realisasi Indikator Persentase Pertumbuhan Seni dan Budaya Tahun 2022-2024	107
Gambar 3.20	Target dan Realisasi Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten Badung Tahun 2022-2024	114
Gambar 3.21	Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten/Kota, Provinsi Bali, dan Nasional Tahun 2024	115
Gambar 3.22	Target dan capaian indikator persentase koperasi sehat tahun 2022-2024	122
Gambar 3.23	Target dan Capaian Meningkatnya Jumlah Wirausaha di Kabupaten Badung Tahun 2022-2024	127
Gambar 3.24	Target dan capaian meningkatnya kontribusi sektor perdagangan terhadap PDRB tahun 2022-2024	131
Gambar 3.25	Target dan Capaian Indikator Indeks Kebahagiaan Kabupaten Badung Tahun 2022-2024	135
Gambar 3.26	Target dan Realisasi Indikator Persentase Penduduk Miskin di Kabupaten Badung Tahun 2022-2024	140
Gambar 3.27	Perbandingan Jumlah Penduduk Miskin Pada Kabupaten/Kota Di Wilayah Provinsi Bali Tahun 2024	141



Gambar 3.28	Capaian indikator Meningkatnya Pengembangan Daya Tarik Destinasi Pariwisata Berorientasi Pertanian tahun 2022-2024	144
Gambar 3.29	Capaian Sasaran Meningkatnya Pengembangan Agroindustri yang Berorientasi Pada Pelestarian Sumber Daya Alam tahun 2022-2024	147
Gambar 3.30	Capaian Indikator Nilai Tukar Usaha Petani (NTUP) Tahun 2022-2024	151
Gambar 3.31	Capaian Indikator Nilai Tukar Usaha Petani (NTUP) Tahun 2022-2024	155
Gambar 3.32	Target dan Capaian Sasaran Meningkatnya Kontribusi Sektor Pariwisata terhadap PDRB di Kabupaten Badung Tahun 2023-2024	160
Gambar 3.33	Target dan Capaian Indikator IKLH Kabupaten Badung Tahun 2022-2024	163
Gambar 3.34	Perbandingan IKLH Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Bali dan Nasional Tahun 2024	164
Gambar 3.35	Target dan Capaian indikator Indeks Daya Saing Daerah (IDSD) Tahun 2022-2023	172
Gambar 3.36	Perbandingan Indeks Daya Saing Daerah (IDSD) Kabupaten/Kota di Provinsi Bali Tahun 2023	172

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Tata kelola (*governance*) tidak dapat dilepaskan dari prinsip-prinsip dasar penyelenggaraan pemerintahan yang baik, yaitu transparansi, partisipasi dan akuntabilitas sebagai unsur utama yang merupakan prasyarat bagi setiap pemerintah daerah dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran pembangunan. Oleh karena itu diperlukan kesungguhan komitmen pemerintah dalam mewujudkan tujuan akhir penyelenggaraan pemerintahan, yaitu kesejahteraan masyarakat. Akuntabilitas kinerja dapat disusun berdasarkan penerapan manajemen kinerja dan pengembangan sistem pertanggungjawaban yang tepat, jelas, terukur dan *legitimate* sehingga penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dapat berlangsung secara efektif dan efisien, bertanggungjawab serta bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme.

Sesuai Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), maka setiap Pemerintah Daerah diwajibkan untuk menyampaikan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) kepada Presiden, sebagai perwujudan kewajiban suatu instansi Pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan/kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan melalui alat pertanggungjawaban secara periodik setiap akhir tahun anggaran.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) dibuat dalam rangka perwujudan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas pokok dan fungsi serta pengelolaan sumber daya dan pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan kepada setiap Instansi Pemerintah berdasarkan suatu sistem akuntabilitas yang memadai. Dalam perspektif yang lebih luas Laporan Kinerja Instansi



Pemerintah (LKjIP) berfungsi sebagai media pertanggungjawaban kepada publik.

Pencapaian kinerja disajikan dengan informasi ketercapaian sasaran strategis, realisasi pencapaian indikator sasaran disertai dengan penjelasan yang memadai atas kinerja dan perbandingan capaian indikator kinerja. Dengan demikian, Laporan Kinerja ini menjadi laporan kemajuan penyelenggaraan pemerintahan Kabupaten Badung sesuai RPJMD Semesta Berencana Tahun 2021-2026 kepada Presiden sesuai peraturan yang terbaru.

Dalam penyusunan LKjIP Kabupaten Badung Tahun 2024, berpedoman pada peraturan perundang-undangan antara lain :

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, Dan Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota;
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
5. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 77 Tahun 2020 Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah.;
7. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
8. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
9. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 89 Tahun 2021 tentang Penjenjangan Kinerja;
10. Peraturan Daerah Nomor 20 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas

- Peraturan Daerah Nomor 20 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 4 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Semesta Berencana Kabupaten Badung Tahun 2021-2026;
 12. Peraturan Bupati Badung Nomor 33 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Badung Nomor 2 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Nomor 33 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Perangkat Daerah;
 13. Peraturan Bupati Badung Nomor 11 Tahun 2022 tentang Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Badung Tahun 2021-2026.

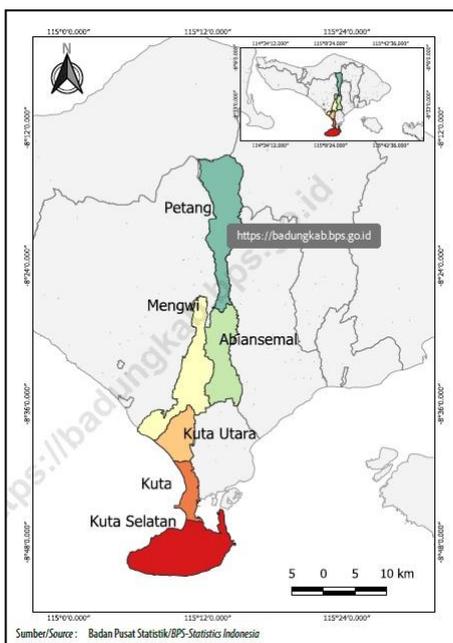
1.2 Gambaran Umum

1.2.1 Gambaran Geografis

Kabupaten Badung merupakan salah satu dari 8 kabupaten dan 1 kota di Provinsi Bali yang terletak dibagian tengah dan selatan dari pulau Bali. Secara geografis Kabupaten Badung terletak antara

8°14'20" - 8°50'52" Lintang Selatan dan 115°05'03" dan 115°26'51" Bujur Timur. Batas wilayah Kabupaten Badung berbatasan dengan Kabupaten Buleleng di sebelah utara, Kabupaten Gianyar, Bangli dan Kota Denpasar di sebelah Timur, Kabupaten Tabanan disebelah barat serta Samudera Indonesia di sebelah Selatan.

Secara administratif, terbagi atas 6 wilayah kecamatan terdiri dari 46 Desa dan 16 Kelurahan. Dari seluruh kecamatan yang ada, kecamatan Petang merupakan



kecamatan terluas dengan luas 92,20 Km² sedangkan kecamatan Kuta merupakan kecamatan yang terkecil dengan luas wilayah 22,19 km². Disamping memiliki desa/kelurahan, terdapat 124 desa adat, 550 Banjar adat dan Sekaa Teruna yaitu kelompok pemuda/pemudi (sekaa) yang bernaung dibawah desa adat sebagai bentuk kearifan lokal. Keberadaan desa dinas dan desa adat selama ini berjalan harmonis karena memiliki fungsi yang berbeda dimana desa dinas melayani administrasi pemerintahan sedangkan desa adat khusus melaksanakan fungsi pelestarian adat, agama dan budaya.

Tabel 1.1
Jumlah Desa/Kelurahan, Banjar Dinas, dan Lingkungan Menurut
Kecamatan Kabupaten Badung Tahun 2024

No.	Kecamatan	Kota Kecamatan	Jml Desa	Jml Kelurahan	Jml Banjar Dinas	Jml Lingkungan
1.	Kuta Selatan	Jimbaran	3	3	51	36
2.	Kuta	Kuta	0	5	0	26
3.	Kuta Utara	Kerobokan	3	3	67	46
4.	Mengwi	Mengwi	15	5	253	57
5.	Abiansemal	Blakiuh	18	0	269	0
6.	Petang	Petang	7	0	107	0
TOTAL			46	16	747	165

Sumber: Kabupaten Badung Dalam Angka Tahun 2025

Secara geografis Kabupaten Badung memiliki luas 398,75 km², dengan wilayah terluas Kecamatan Kuta Selatan sebesar 101,45 km² atau 25,44% dari total luas wilayah Kabupaten Badung. Sedangkan kecamatan Kuta dengan wilayah terkecil, yaitu seluas 22,19 km² atau 5,57 % dari total luas wilayah Kabupaten Badung. Secara rinci luas wilayah Kabupaten Badung menurut kecamatan seperti pada Tabel 1.2 berikut :

Tabel 1.2
Luas Wilayah Menurut Kecamatan Kabupaten Badung

No.	Kecamatan	Ibukota Kecamatan	Luas (Km ²)	Persentase (%)
1.	Kuta Selatan	Jimbaran	101,45	25,44
2.	Kuta	Kuta	22,19	5,57
3.	Kuta Utara	Kerobokan	34,72	8,71
4.	Mengwi	Mengwi	81,82	20,52
5.	Abiansemal	Blahkiuh	66,36	16,64
6.	Petang	Petang	92,20	23,12
TOTAL			398,75	100

Sumber: Kabupaten Badung Dalam Angka Tahun 2025

Kabupaten Badung mengalami 2 musim yaitu ; musim kemarau dan musim penghujan. Hal ini dipengaruhi oleh arus angin yang melintasi daratan serta banyaknya uap air yang dikandungnya. Curah Hujan dengan kondisi normal sampai cukup tinggi. Curah hujan yang paling tinggi pada bulan Desember sebesar 849,90 mm dan Curah hujan terendah terjadi pada bulan Mei sebesar 2,20 dikarenakan pada bulan tersebut hujan hanya berlangsung beberapa hari. Sedangkan untuk hari hujan paling tinggi pada bulan Agustus, Oktober dan Desember sebanyak 31 hari dan terendah bulan Mei sebanyak 4 hari. Sedangkan untuk rata-rata penyinaran matahari yang paling banyak pada bulan Mei, sedangkan terendah pada bulan Desember sebesar 3,0 jam. Kondisi iklim di Kabupaten Badung berdasarkan data curah hujan, hari hujan dan rata-rata penyinaran seperti tabel berikut :

Tabel 1.3
Data Curah Hujan, Hari Hujan dan Rata-Rata Penyinaran Matahari
di Kabupaten Badung Tahun 2024

No	Bulan	Jumlah Curah Hujan (mm/bulan)	Jumlah Hari Hujan (Hari)	Penyinaran Matahari (Jam)
1	Januari	163,10	15	6,9
2	Februari	173,90	24	7,6
3	Maret	338,20	18	7,4
4	April	260,80	16	7,7
5	Mei	2,20	4	9,0
6	Juni	47,40	9	8,0
7	Juli	66,90	26	7,1
8	Agustus	8,10	31	7,8
9	September	23,40	30	7,6
10	Oktober	113,70	31	8,0
11	November	158,00	30	7,6
12	Desember	849,90	31	3,0

Sumber data: Kabupaten Badung Dalam Angka Tahun 2025

1.2.2 Gambaran Demografi

Penduduk Kabupaten Badung pada Tahun 2024 sebanyak 532.500 jiwa, yang terdiri dari 264.973 jiwa penduduk laki-laki dan 267.527 jiwa penduduk perempuan. Distribusi Jumlah penduduk paling banyak terdapat di Kecamatan Mengwi yaitu sebanyak 132.937 jiwa atau 24,96% dari total penduduk Kabupaten Badung, sementara kecamatan Petang merupakan wilayah dengan jumlah penduduk paling sedikit yaitu 33,073 jiwa (6,21%). Jumlah penduduk menurut Kecamatan seperti tabel berikut :



Tabel 1.4
Jumlah penduduk menurut Kecamatan dan Jenis kelamin
di Kabupaten Badung Tahun 2024

NO	KECAMATAN	JENIS KELAMIN		JUMLAH	PERSEN TASE (%)
		Laki-Laki	Perempuan		
1	PETANG	16,675	16,398	33,073	6.21
2	ABIANSEMAL	49,407	50,282	99,689	18.72
3	MENGWI	66,204	66,733	132,937	24.96
4	KUTA UTARA	43,972	44,874	88,846	16.69
5	KUTA	28,818	28,519	57,337	10.77
6	KUTA SELATAN	59,897	60,721	120,618	22.65
BADUNG		264.973	267.527	532.500	100

Sumber data : Data Agregat Semester I Tahun 2024 Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Badung

Distribusi penduduk menurut kelompok umur menunjukkan bahwa kelompok umur yang paling banyak adalah kelompok umur 50-54 tahun. Adapun distribusi penduduk menurut kelompok umur secara lengkap seperti grafik berikut :

Tabel 1.5
Jumlah Penduduk Menurut Kelompok Umur dan Jenis Kelamin
di Kabupaten Badung tahun 2024

No	Kelompok Umur	Laki-Laki	Perempuan	Jumlah PDDK
1	00-04	13,543	12,511	26,054
2	05-09	18,481	17,114	35,595
3	10-14	20,282	18,946	39,228
4	15-19	20,989	19,437	40,426
5	20-24	23,675	22,531	46,206
6	25-29	21,909	21,168	43,077
7	30-34	17,590	17,873	35,463
8	35-39	14,702	15,908	30,610
9	40-44	17,138	19,783	36,921
10	45-49	19,782	22,169	41,951
11	50-54	23,026	24,019	47,045
12	55-59	19,338	18,441	37,779
13	60-64	12,579	12,320	24,899
14	65-69	8,525	9,089	17,614

No	Kelompok Umur	Laki-Laki	Perempuan	Jumlah PDDK
15	70-74	6,191	6,550	12,741
16	75+	7,223	9,668	16,891
TOTAL		264.973	267.527	532.500

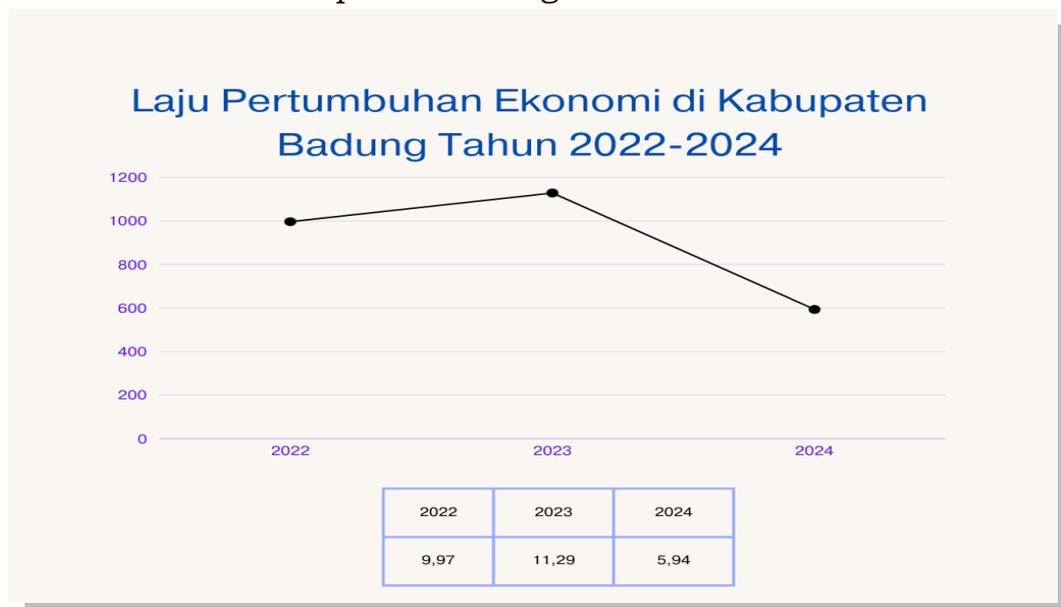
Sumber data : Data Agregat Semester I Tahun 2024 Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Badung

1.3 Gambaran Perekonomian

1.3.1. Laju Pertumbuhan ekonomi

Perkembangan Laju Pertumbuhan Ekonomi di Kabupaten Badung tahun 2024 tercatat sebesar 5,94%. Sektor dengan sumbangan terbesar terhadap laju pertumbuhan ini adalah Jasa Keuangan dan Asuransi. Perbandingan laju pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Badung Tahun 2022-2024 gambar berikut :

Gambar 1.1
Perbandingan Laju Pertumbuhan Ekonomi di Kabupaten Badung Tahun 2022-2024



Sumber data : Kabupaten Badung Dalam Angka Tahun 2025

1.3.2. Kemiskinan

Garis Kemiskinan digunakan sebagai batas untuk mengelompokkan penduduk dikategorikan sebagai miskin atau tidak miskin. Penduduk miskin didefinisikan sebagai penduduk dengan pengeluaran per kapita di bawah atau lebih rendah dari besaran yang disebut sebagai Garis Kemiskinan. Distribusi penduduk miskin di Kabupaten Badung cenderung mengalami penurunan dan terendah di seluruh Kabupaten di Provinsi Bali. Pada tahun 2023 terdapat 17,01 ribu jiwa penduduk miskin atau 2,3% dan mengalami penurunan pada Tahun 2024 yakni 16,87 ribu jiwa atau sekitar 2,23%. Secara lengkap Distribusi penduduk miskin di Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Bali Tahun 2024 seperti Tabel berikut :

Tabel 1.6
Distribusi dan Persentase Penduduk Miskin Kabupaten / Kota di Provinsi Bali Tahun 2024

No	Kabupaten/Kota	Jumlah Penduduk Miskin (ribu jiwa)		Persentase Penduduk Miskin (%)	
		2023	2024	2023	2024
1	Kab. Badung	17,01	16,87	2,3	2,23
2	Kab. Tabanan	21,42	20,16	4,7	4,4
3	Kab. Jembrana	14,12	12,9	4,96	4,51
4	Kab. Gianyar	23,76	21,45	4,47	4
5	Kab. Klungkung	10,22	9,68	5,61	5,3
6	Kab. Bangli	12,24	11,79	5,28	5,06
7	Kab. Karangasem	27,83	27,76	6,56	6,52
8	Kab. Buleleng	39,52	36,55	5,85	5,39
9	Kota Denpasar	27,69	27,27	2,68	2,59
Provinsi Bali		193,78	184,43	4,25	4

Sumber data : Dinas Sosial Kabupaten Badung Tahun 2024

Indikator lain yang bisa disampaikan mendampingi indikator tingkat kemiskinan wilayah, di antaranya adalah indeks kedalaman dan indeks keparahan kemiskinan. Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1)/*poverty gaps index* dimaksudkan untuk menunjukkan ukuran rata-rata kesenjangan atau jarak pengeluaran masing-masing penduduk miskin terhadap garis kemiskinan. Semakin tinggi nilai indeks maka semakin besar rata-rata

kesenjangan pengeluaran penduduk miskin terhadap kemiskinan. Untuk mengetahui masalah ketimpangan pengeluaran diantara penduduk miskin digunakan ukuran *poverty severity index*. Sedangkan Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) dimaksudkan untuk menunjukkan gambaran mengenai penyebaran pengeluaran di antara penduduk miskin. Secara rinci Perkembangan indeks kedalaman dan indeks keparahan kemiskinan seperti pada Tabel berikut :

Tabel 1.7
Indeks Kedalaman Kemiskinan dan Indeks Keparahan Kemiskinan
di Kabupaten Badung Tahun 2016-2024

No	Tahun	Indeks Kedalaman Kemiskinan	Indeks Keparahan Kemiskinan
1	2016	0,19	0,05
2	2017	0,21	0,05
3	2018	0,28	0,07
4	2019	0,16	0,03
5	2020	0,31	0,07
6	2021	0,43	0,10
7	2022	0,29	0,05
8	2023	0,11	0,01
9	2024	0,32	0,07

Sumber: Kabupaten Badung Dalam Angka Tahun 2025

Indikator lain yang biasa juga disertakan mendampingi indikator kemiskinan di antaranya adalah ukuran ketimpangan pendapatan penduduk. Salah satu ukuran ketimpangan yang biasa digunakan adalah Gini Ratio. Nilai gini ratio berkisar antara 0-1. Semakin tinggi nilai gini ratio menunjukkan ketimpangan yang semakin tinggi. *Koefisien Gini (Gini Ratio)* menjadi alat dalam mengukur ketidakmerataan atau ketimpangan agregat (secara keseluruhan) yang angkanya berkisar antara nol (pemerataan sempurna) hingga satu (ketimpangan yang sempurna). Adapun kategori nilai indeks gini rasio yaitu: $0 < 0,35$ menunjukkan tingkat ketimpangan yang rendah, kisaran $0,35-0,5$ menunjukkan tingkat ketimpangan sedang dan kisaran nilai indeks gini rasio $> 0,5$ menunjukkan tingkat ketimpangan

tinggi. Perkembangan gini rasio Kabupaten Badung pada Tahun 2021 hingga Tahun 2023 menunjukkan ketimpangan pendapatan tingkat rendah. Akan tetapi kondisi ini perlu diantisipasi melalui berbagai program pembangunan agar tidak bergerak naik menjadi ketimpangan sedang atau bahkan tinggi. Perkembangan gini ratio Kabupaten/Kota di Provinsi Bali Tahun 2022 – 2024 seperti pada Tabel berikut :

Tabel 1.8
Perbandingan Gini Rasio Kabupaten/Kota di Provinsi Bali Tahun 2022-
2024

No	Kabupaten	2022	2023	2024
1	Kab. Jembrana	0,33	0,33	0,29
2	Kab. Tabanan	0,30	0,35	0,30
3	Kab. Badung	0,32	0,28	0,28
4	Kab. Gianyar	0,31	0,32	0,29
5	Kab. Klungkung	0,35	0,34	0,31
6	Kab. Bangli	0,29	0,28	0,30
7	Kab. Karangasem	0,30	0,34	0,28
8	Kab. Buleleng	0,28	0,31	0,28
9	Kota Denpasar	0,37	0,34	0,34
Provinsi Bali		0,36	0,36	0,36

Sumber data: Kabupaten Badung Dalam Angka Tahun 2025

Untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat, Pemerintah Kabupaten Badung memiliki komitmen yang kuat untuk menekan angka kemiskinan. Selain itu pengentasan kemiskinan juga menjadi salah satu prioritas Kabupaten Badung dalam implementasi RB Tematik. Berikut rencana aksi yang telah dilakukan dalam pengentasan kemiskinan di Kabupaten Badung diantaranya : Mengurangi Beban Masyarakat, Meningkatkan Pendapatan Masyarakat , dan Meminimalkan Kantong Kemiskinan.

1.3.3 Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) merupakan nilai tambah bruto seluruh barang dan jasa yang tercipta atau dihasilkan di wilayah domestik suatu negara yang timbul akibat berbagai aktivitas ekonomi dalam suatu periode tertentu tanpa memperhatikan apakah faktor produksi yang dimiliki residen atau non-residen. Penyusunan PDRB dapat dilakukan melalui 3 (tiga) pendekatan yaitu pendekatan produksi, pengeluaran, dan pendapatan yang disajikan atas dasar harga berlaku dan harga konstan. PDRB atas dasar harga berlaku atau dikenal dengan PDRB nominal disusun berdasarkan harga yang berlaku pada periode penghitungan, dan bertujuan untuk melihat struktur perekonomian. Sedangkan PDRB atas dasar harga konstan disusun berdasarkan harga pada tahun dasar dan bertujuan untuk mengukur pertumbuhan ekonomi. Nilai PDRB Kabupaten Badung atas dasar harga berlaku pada tahun 2022-2024 menunjukkan peningkatan secara linier. Gambaran PDRB atas dasar harga berlaku pada tahun 2022-2024 seperti gambar berikut :

Gambar 1.2
PDRB Atas Dasar Harga Berlaku Kabupaten Badung
tahun 2022-2024



Sumber Data : Kabupaten Badung Dalam Angka Tahun 2025

1.3.4. Gambaran Tenaga Kerja

Tenaga kerja dapat diartikan sebagai penduduk dalam usia kerja yang siap melakukan pekerjaan, yaitu usia 15-65 tahun. Menurut Undang-Undang Nomor 13 tahun 2003, tenaga kerja merupakan setiap orang yang mampu melakukan pekerjaan guna menghasilkan barang dan jasa, baik untuk memenuhi kebutuhan sendiri maupun orang lain atau masyarakat.

Ukuran untuk menilai keberhasilan dalam ketenagakerjaan, salah satunya tingkat pengangguran terbuka (TPT). Angka pengangguran di Kabupaten Badung tahun 2023-2024 menurun. Berikut gambaran tingkat pengangguran di Kabupaten Badung tahun 2022-2024 seperti gambar:

Gambar 1.3
Perbandingan Tingkat pengangguran terbuka (TPT)
di Kabupaten Badung tahun 2022-2024



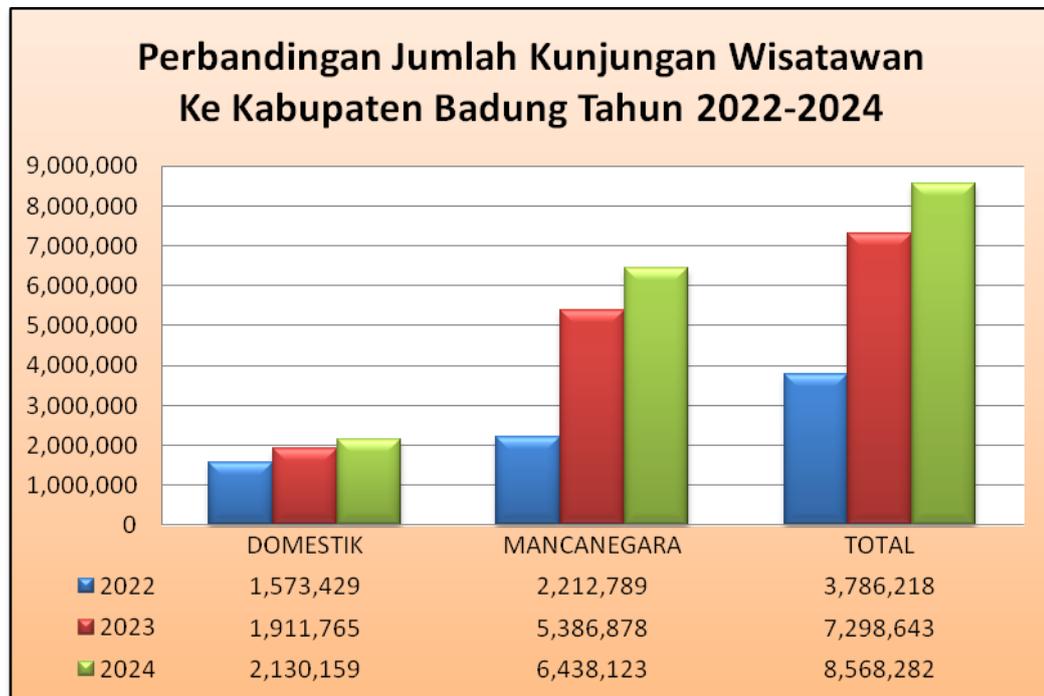
Sumber Data : Kabupaten Badung Dalam Angka Tahun 2025

1.3.5. Gambaran Kepariwisata

Kabupaten Badung merupakan pusat pengembangan dan tujuan wisata di Bali dan Nasional, karena memiliki banyak kawasan destinasi wisata yang sudah terkenal di manca negara. Adapun total kunjungan wisatawan ke Kabupaten Badung sepanjang Tahun 2024 sebanyak

8,568,282 terdiri atas 6,438,123 kunjungan wisata mancanegara dan 2,130,259 kunjungan wisata domestik, dimana mengalami kenaikan dari Tahun 2023 yakni sebesar 1,269,639. Berikut perbandingan jumlah kunjungan wisatawan ke Kabupaten Badung Tahun 2022-2024 seperti pada gambar berikut :

Gambar 1.4
Perbandingan Jumlah Kunjungan Wisatawan
Ke Kabupaten Badung Tahun 2022-2024



Sumber Data : Dinas Pariwisata Kabupaten Badung 2024

Kunjungan wisatawan ke Badung pada tahun 2024 didominasi wisatawan mancanegara. Adapun wisatawan mancanegara yang paling banyak berkunjung Tahun 2024 berasal dari Negara Australia sebanyak 141,130 orang. Lima Negara teratas berkenaan dengan kunjungan wisatawan mancanegara ke Kabupaten Badung pada tahun 2024 secara rinci seperti pada gambar berikut :

Gambar 1.5
Lima Negara dengan Jumlah Wisata Terbanyak yang Berkunjung ke
Kabupaten Badung Tahun 2024



Sumber Data : Dinas Pariwisata Kabupaten Badung 2024

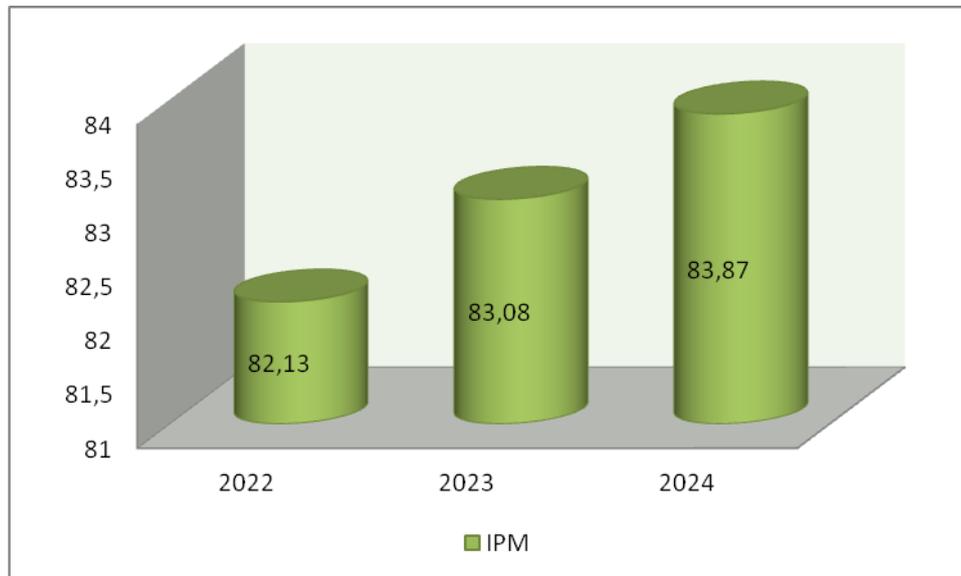
1.4 Gambaran Indeks Pembangunan Manusia (IPM)

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) merupakan pengukuran perbandingan dari harapan hidup, pendidikan, dan standar hidup untuk semua negara. IPM digunakan sebagai indikator untuk menilai aspek kualitas dari pembangunan dan untuk mengklasifikasikan negara termasuk negara maju, negara berkembang, atau negara terbelakang dan juga untuk mengukur pengaruh dari kebijakan ekonomi terhadap kualitas hidup.

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di Kabupaten Badung tahun 2022-2024 menunjukkan kualitas pembangunan manusia mengalami peningkatan setiap tahunnya, dan di tahun 2024 sebesar 83,87 termasuk kategori sangat tinggi melebihi pencapaian provinsi Bali yakni sebesar 78,63 serta nasional sebesar 75,02. Hal ini sebagai akibat dari pelaksanaan pembangunan yang dilaksanakan. Perkembangan secara lengkap Indeks

Pembangunan Manusia Kabupaten Badung dari tahun 2022-2024 seperti gambar berikut :

Gambar 1.6
Indeks Pembangunan Manusia di Kabupaten Badung
Tahun 2022-2024



Sumber Data : Disdikpora Kabupaten Badung Tahun 2024

1.5 Gambaran Pemerintahan

Sebagai amanat dari Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah khususnya berkenaan dengan pelaksanaan urusan pemerintahan wajib dan urusan pemerintahan pilihan yang menjadi kewenangan kabupaten, serta berpedoman pada Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, Pemerintah Kabupaten Badung telah menetapkan Peraturan Bupati Badung Nomor 2 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Nomor 33 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Perangkat Daerah. Berdasarkan peraturan tersebut maka susunan perangkat daerah telah mencerminkan kapasitas daerah dalam melaksanakan urusan pemerintahan wajib dan pilihan sesuai potensi daerah. Berdasarkan

peraturan ini dilakukan penataan kelembagaan perangkat daerah dengan mengacu prinsip efektivitas dan efisiensi serta Perangkat Daerah yang tepat fungsi dan tepat ukuran. Dibandingkan tahun 2016, jumlah Perangkat Daerah mengalami pengurangan dari 53 menjadi 37 Perangkat Daerah yang terdiri dari 2 sekretariat, 1 Inspektorat, 7 badan, 21 Dinas dan 6 kecamatan. Adapun bagan struktur organisasi Pemerintah Kabupaten Badung seperti gambar berikut :

Gambar 1.7

Bagan Struktur Organisasi Pemerintah Kabupaten Badung



Sumber data : Bagian Organisasi Setda. Kabupaten Badung

Berdasarkan Perangkat Daerah dan UPT yang dibentuk terdapat satuan organisasi atau jabatan struktural di lingkungan Pemerintah Kabupaten Badung Tahun 2024 sebanyak 471 jabatan struktural. Secara lengkap jumlah, tipe dan jumlah jabatan structural/eselon seperti tabel berikut:



Tabel 1.9
Jumlah, Tipe dan Jumlah Struktural
Di Kabupaten Badung Tahun 2024

NO	PERANGKAT DAERAH	TIPE	ESELON						JUM LAH
			II a	II b	III a	III b	IV a	IV b	
1	Sekretariat Daerah;	A	1	6	12		2		21
2	Sekretariat DPRD;	B		1	3		1		5
3	Inspektorat;	A		1	5		1		7
4	Dinas Pariwisata;	A		1	1	4	1		7
5	Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan;	A		1	1	4	2		8
6	Dinas Kebudayaan;	A		1	1	4	1		7
7	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;	A		1	1		1		3
8	Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja;	A		1	1	5	2		9
9	Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perdagangan;	A		1	1	4	2		8
10	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olah Raga;	A		1	1	4	7		13
11	Dinas Pertanian dan Pangan;	A		1	1	6	1		9
12	Dinas Komunikasi dan Informatika;	A		1	1	5	2		9



NO	PERANGKAT DAERAH	TIPE	ESELON						JUM LAH
			II a	II b	III a	III b	IV a	IV b	
13	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;	A		1	1	4	1		7
14	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan;	A		1	1	4	1		7
15	Satuan Polisi Pamong Praja;	A		1	1	4	11		17
16	Dinas Kesehatan;	A		1	1	4	2		8
17	Dinas Sosial;	B		1	1	3	1		6
18	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;	B		1	1	5	2		9
19	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;	B		1	1	3	2		7
20	Dinas Perikanan;	B		1	1	3	1		6
21	Dinas Perhubungan;	B		1	1	3	8		13
22	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;	B		1	1	3	2		7
23	Dinas Kebakaran dan Penyelamatan; dan	B		1	1	3	8		13
24	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman;	B		1	1	3	2		7



NO	PERANGKAT DAERAH	TIPE	ESELON						JUM LAH
			II a	II b	III a	III b	IV a	IV b	
25	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;	A		1	1	4	2		8
26	Badan Pendapatan Daerah	B		1	1	3	8		13
27	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia;	B		1	1	3	2		7
28	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah; dan	C		1	1	2	5		9
29	Badan Riset dan Inovasi Daerah	B		1	1	3	1		6
30	Badan Penanggulangan Bencana Daerah;			1		4	1		6
31	Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik;	A		1	1	3	1		6
32	Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Badung Mangusada	B		1	3	12			16
33	Kecamatan Petang;	A			1	1	5	2	9
34	Kecamatan Abiansemal;	A			1	1	5	2	9
35	Kecamatan Mengwi;	A			1	1	5	2	9
36	Kecamatan Kuta Utara;	A			1	1	5	2	9
37	Kecamatan Kuta; dan	A			1	1	5	2	9



NO	PERANGKAT DAERAH	TIPE	ESELON						JUM LAH
			II a	II b	III a	III b	IV a	IV b	
38	Kecamatan Kuta Selatan.	A			1	1	5	2	9
39	Kel. Kapal						1	4	5
40	Kel. Abianbase						1	4	5
41	Kel. Lukluk						1	4	5
42	Kel. Sading						1	4	5
43	Kel. Sempidi						1	4	5
44	Kel. Kerobokan Kaja						1	4	5
45	Kel. Kerobokan						1	4	5
46	Kel. Kerobokan Kelod						1	4	5
47	Kel. Seminyak						1	4	5
48	Kel. Legian						1	4	5
49	Kel. Kuta						1	4	5
50	Kel. Tuban						1	4	5
51	Kel. Kedonganan						1	4	5
52	Kel. Benoa						1	4	5
53	Kel. Tanjung Benoa						1	4	5
54	Kel. Jimbaran						1	4	5
55	UPTD						26	27	53
			II a	II b	III a		IV a	IV b	
	TOTAL JUMLAH		1	37	56		156	103	471

Sumber Data : Bagian Organisasi Setda Kabupaten Badung Tahun 2024

1.6 Sumber Daya Manusia

Sumber daya aparatur Pegawai Negeri Sipil (PNS) Pemerintah Kabupaten Badung menurut perangkat daerah sampai dengan 31 Desember 2024 sebanyak 6.011 orang. Jumlah pegawai ASN di Kabupaten Badung dalam 1 (satu) tahun telah berkurang sebanyak 448

orang dari tahun sebelumnya. Distribusi Aparatur Sipil Negara (ASN) secara lengkap seperti berikut:

Tabel 1.10
Distribusi Aparatur Sipil Negara

NO	TINGKAT PENDIDIKAN	2024		
		LAKI	WANITA	JUMLAH
1	SD	8	4	12
2	SMP	40	7	47
3	SMA	758	271	1029
4	DIPLOMA I/II	24	26	50
5	DIPLOMA III/IV	133	424	557
6	S1	1361	1948	3309
7	S2	504	489	993
8	S3	8	6	14
	JUMLAH	2836	3175	6011

Sumber data : BKPSDM Kab. Badung Tahun 2024

1.6.1. Distribusi Menurut Kepangkatan

Distribusi Aparatur Sipil Negara (ASN) menurut kepangkatan tercatat, kepangkatan pegawai yang paling banyak golongan III/b sebanyak 1.323 orang sedangkan pegawai dengan kepangkatan I/a tidak ada. Distribusi Aparatur Sipil Negara (ASN) menurut kepangkatan seperti berikut :

Tabel 1.11
Distribusi Aparatur Sipil Negara (ASN) menurut Kepangkatan di Kabupaten Badung Tahun 2024

NO	GOLONGAN	2024		
		LAKI	WANITA	JUMLAH
1	I/a	0	0	0
2	I/b	0	2	2
3	I/c	2	3	5
4	I/d	7	2	9
5	II/a	25	1	26
6	II/b	101	40	141
7	II/c	109	28	137
8	II/d	347	173	520
9	III/a	315	214	529
10	III/b	573	750	1323
11	III/c	309	414	723
12	III/d	472	848	1320

NO	GOLONGAN	2024		
		LAKI	WANITA	JUMLAH
13	IV/a	243	306	549
14	IV/b	262	325	587
15	IV/c	66	69	135
16	IV/d	5	0	5
Jumlah		2836	3175	6011

Sumber data : BKPSDM Kab. Badung Tahun 2024

1.6.2 Distribusi Menurut Jenjang Jabatan

Distribusi Aparatur Sipil Negara (ASN) menurut jenjang jabatan tercatat, jabatan yang paling banyak adalah fungsional tertentu sebanyak 3149 orang sedangkan untuk jabatan struktural yakni eselon IV.a yakni sebanyak 154 orang. Distribusi Aparatur Sipil Negara (ASN) menurut jenjang jabatan seperti tabel berikut:

Tabel 1.12

Distibusi Aparatur Sipil Negara (ASN) menurut Jenjang Jabatan di Kabupaten Badung Tahun 2024

Jabatan	2024		
	Laki-laki	Perempuan	Jumlah
Fungsional	925	1913	2838
Pelaksana	1612	1132	2744
Struktural			
Eselon II	30	5	35
Eselon III	107	47	154
Eselon IV	151	89	240
Eselon V	0	0	0
Jumlah/Total	2825	3186	6011

Sumber data : BKPSDM Kab. Badung Tahun 2024

1.7 Sumber Daya Keuangan

Anggaran pembangunan Pemerintah Kabupaten Badung disusun dengan target pendapatan sebesar Rp. 11.355.611.573.054,00 dengan realisasi sebesar Rp. 8.620.162.492.670,81 atau sebesar 75,91%. Sedangkan belanja direncanakan sebesar Rp. 12.095.222.811.292,00 dengan realisasi sebesar Rp. 8.982.940.749.786,65 atau sebesar 74,27%. Distribusi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Badung Tahun 2024 secara rinci seperti tabel berikut :

Tabel 1.13
Realisasi APBD Kabupaten Badung Tahun 2024

NO	URAIAN	ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	%
1	Pendapatan	11.355.611.573.054,00	8.620.162.492.670,81	75,91
	Pendapatan Asli Daerah	10.232.167.081.072,00	7.507.616.497.511,36	73,37
	Pendapatan Transfer	1.119.508.491.982,00	1.112.177.267.833,00	99,35
	Lain-lain Pendapatan yang sah	3.936.000.000,00	368.727.326,45	9,37
2	Belanja	12.095.222.811.292,00	8.982.940.749.786,65	74,27
	Belanja Operasi	7.004.538.936.527,00	5.282.727.057.332,65	75,42
	Belanja Modal	2.578.409.319.383,00	1.811.353.534.383,00	70,25
	Belanja Tak Terduga	75.000.000.000,00	8.010.617.892,00	10,68
	Transfer	2.437.274.555.382,00	1.880.849.540.179,00	77,17
3	Pembiayaan Daerah	739.611.238.238,00	743.909.492.620,76	100,58
	Penerimaan Pembiayaan Daerah	993.909.492.620,00	993.909.492.620,76	100,00
	Pengeluaran Pembiayaan Daerah	254.298.254.382,00	250.000.000.000,00	98,31

NO	URAIAN	ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	%
	Pembiayaan Netto	739.611.238.238,00	743.909.492.620,76	100,58
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN TAHUN BERKENAN	-	381.131.235.504,92	0,00

Sumber Data : BPKAD Kab. Badung Tahun 2024 (data *unaudited*)

1.8 Isu Strategis

Potensi permasalahan pembangunan daerah pada umumnya timbul dari kekuatan yang belum didayagunakan secara optimal, kelemahan yang tidak diatasi, peluang yang tidak dimanfaatkan, dan ancaman yang tidak diantisipasi. Untuk mendapatkan gambaran awal bagaimana permasalahan pembangunan dapat dipecahkan dan diselesaikan dengan baik, maka tiap-tiap permasalahan diidentifikasi faktor-faktor penyebab akar permasalahannya.

Faktor-faktor penentu keberhasilan adalah faktor kritis, hasil kinerja, dan faktor-faktor lainnya yang memiliki daya ungkit yang tinggi dalam memecahkan permasalahan pembangunan atau dalam mewujudkan keberhasilan penyelenggaraan urusan pemerintahan.

Isu-isu strategis adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan daerah karena dampaknya yang signifikan bagi daerah dengan karakteristik bersifat penting, mendasar, mendesak, berjangka panjang, dan menentukan tujuan penyelenggaraan pemerintahan daerah dimasa yang akan datang.

Beberapa isu strategis yang menjadi prioritas dalam upaya pencapaian target tujuan dan sasaran strategis yang telah ditetapkan dalam RPJMD Semesta Berencana Kabupaten Badung tahun 2021-2026, antara lain :

1. Kapasitas Pembangunan Daerah Pendukung Indeks Kebahagiaan Daerah Kabupaten Badung
2. Potensi Ekonomi Dan Daya Saing Daerah Kabupaten Badung
3. Tantangan infrastruktur dalam arti luas

1.9 Arah Kebijakan

Arah kebijakan pembangunan daerah mengacu pada rencana pembangunan jangka menengah daerah (RPJMD) Semesta Berencana Kabupaten Badung Tahun 2021-2026 yaitu :

1. Misi 1 : Memperkokoh kerukunan hidup bermasyarakat dalam jalinan keragaman adat, budaya dan agama.

Arah Kebijakan :

- a) Meningkatkan harmonisasi, kerukunan antar umat beragama dalam masyarakat
- b) Meningkatkan peran lembaga-lembaga agama dalam pembinaan keagamaan
- c) Melaksanakan rapat koordinasi secara berkala dengan Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) Kecamatan
- d) Melaksanakan rapat koordinasi secara berkala dengan Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) Kecamatan
- e) Melaksanakan pembinaan umat beragama dalam menciptakan toleransi hidup beragama
- f) Melaksanakan koordinasi dengan Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB)
- g) Melaksanakan monev. kepada umat beragama dengan Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB)



2. Misi 2 : Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Berdasarkan Prinsip Good Governance Dan Clean Government Yang Berbasis Teknologi Informasi Dan Komunikasi

Arah Kebijakan :

- a) Penguatan penerapan SAKIP di lingkungan Pemerintah Daerah
- b) Penguatan Manajemen Kinerja Perangkat daerah
- c) Penguatan Implementasi Perencanaan dan Penganggaran berbasis Kinerja yang terintegrasi (e-performance based budgeting)
- d) Penguatan Penerapan teknologi informasi dan komunikasi dalam manajemen kinerja
- e) Penguatan Sinkronisasi Perencanaan dan Penganggaran untuk mewujudkan efektifitas dan efisiensi Program Kegiatan
- f) Meningkatkan koordinasi antar perangkat daerah, baik secara vertikal maupun horisontal dalam melaksanakan kegiatan pembangunan daerah
- g) Melaksanakan Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi
- h) Melakukan pembinaan dan penilaian internal Zona Integritas menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM)
- i) Meningkatkan Maturitas SPIP
- j) Melaksanakan pemeriksaan pengaduan masyarakat
- k) Melaksanakan pemeriksaan investigatif
- l) Melakukan pembinaan, monitoring dan verifikasi atas LHKPN dan LHKASN
- m) Meningkatkan Kinerja Penyusunan Laporan Keuangan Daerah sesuai dengan SAP (Standar Akuntansi Pemerintah)
- n) Peningkatan Pengelolaan Barang Milik Daerah pada PD sesuai dengan Peraturan yang berlaku
- o) Meningkatkan pendidikan dan pelatihan aparatur
- p) Melaksanakan verifikasi administratif permohonan bantuan hibah



- q) Memfasilitasi penyusunan laporan pertanggungjawaban pemanfaatan dana hibah
- r) Monitoring pemanfaatan dan pengelolaan dana hibah
- s) Pemantauan program pelaksanaan pembangunan pembangunan
- t) Memfasilitasi pelaporan serapan belanja APBD
- u) Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan pembangunan
- v) Peningkatan kompetensi Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP) melalui pendidikan dan diklat teknis pengawasan maupun ilmu pendukung
- w) Mengoptimalkan pelaksanaan Pelatihan Kantor Sendiri (PKS)
- x) Penilaian kapabilitas Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP) secara mandiri (self assesment)
- y) Penjaminan kualitas (Quality Assurance) oleh BPK terhadap proses pengembangan kapabilitas Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP)
- z) Pengembangan secara mandiri (Self Improvement) kapabilitas Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP)
- aa) Memanfaatkan teknologi untuk memperlancar penatausahaan dan pelaporan Keuangan Sekretariat Daerah Kabupaten Badung
- bb) Meningkatkan Kuantitas dan Kualitas Sarana Prasarana Teknologi Informasi
- cc) Meningkatkan Kualitas dan Kuantitas SDM pengelola Teknologi Informasi
- dd) Meningkatkan Tata Kelola Persandian serta Operasional Pengamanan Informasi dan Komunikasi
- ee) Meningkatkan Kualitas Data Statistik Sektoral yang Akurat, Transparan dan Terintegrasi
- ff) Memberikan bimbingan teknis di bidang Pengadaan Barang dan Jasa kepada aparatur dan pemangku kepentingan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Badung
- gg) Memperbaharui sistem teknologi dan informasi pengadaan barang/jasa



- hh) Melakukan pengawasan internal
- ii) Mempercepat proses pelayanan melalui pemanfaatan teknologi informasi kearsipan
- jj) Mendorong dan Memfasilitasi Aparatur Sipil Negara (ASN) untuk Melanjutkan Pendidikan Formal
- kk) Memfasilitasi ASN untuk mengikuti Pengembangan Kompetensi Teknis, Manajerial dan Sosial Kultural
- ll) Memberikan Reward sesuai Kinerja Aparatur Sipil Negara (ASN)
- mm) Memberikan Punishment kepada Aparatur Sipil Negara (ASN) sesuai aturan
- nn) Peningkatan pelayanan publik berbasis elektronik dalam rangka memberikan pelayanan yang mudah, murah, cepat, dan terjangkau
- oo) Penciptaan dan pengembangan inovasi pelayanan publik dalam rangka percepatan peningkatan kualitas pelayanan publik
- pp) Peningkatan kapabilitas dan kapasitas penyelenggara, pelaksana pelayanan, dan Aparatur Sipil Negara (ASN)
- qq) Penyederhanaan prosedur perizinan terkait kemudahan berusaha
- rr) Mengoptimalkan pemanfaatan hasil kelitbangan dalam rangka meningkatkan kepuasan masyarakat dalam penyelenggaraan pemerintah daerah
- ss) Akreditasi fasilitas pelayanan kesehatan di Puskesmas dan Rumah sakit milik pemerintah dan swasta
- tt) Penataan Pelayanan Administrasi Kependudukan dan pencatatan sipil dengan menjadikan faktor kependudukan sebagai titik sentral pembangunan yang berkelanjutan
- uu) Meningkatkan SDM dan sarana prasarana berbasis teknologi informasi
- vv) Melaksanakan Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN)
- ww) Meningkatkan kapasitas SDM dan kinerja penyelenggaraan urusan bidang penanaman modal



- xx) Memberikan kemudahan pelayanan penanaman modal dan penyederhanaan persyaratan investasi
- yy) Mengembangkan Sistem Informasi Manajemen (SIM) penanaman modal berbasis Teknologi Informasi Komunikasi
- zz) Peningkatan sarana dan prasarana penunjang Pelayanan
- aaa) Meningkatkan kualitas pelayanan perijinan dan non perijinan
- bbb) Menyediakan sarana dan saluran informasi publik melalui berbagai media
- ccc) Meningkatkan kualitas SDM Set.DPRD
- ddd) Meningkatkan kualitas koordinasi antara DPRD dan Set.DPRD serta koordinasi antar staf Set.DPRD dalam menjalankan fungsi pelayanan
- eee) Mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan partisipatif
- fff) Meningkatnya pelayanan publik yang mudah cepat dan aman
- ggg) Mempercepat proses pelayanan adminduk melalui Teknologi Informasi (TI)
- hhh) Interpretasi hasil rata rata nilai Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) perangkat daerah
- iii) Peningkatan Kapasitas dan kapabilitas penanganan Pra Bencana, Kearuratan dan Pasca Bencana yang cepat, tanggap dan pulih
- jjj) Mempersiapkan SDM yang handal di bidang kebakaran dan non kebakaran
- kkk) Melaksanakan Bimtek dan sosialisasi terkait pencegahan kebakaran, gas beracun dan penyelamatan pada seluruh elemen masyarakat
- lll) Layanan response time penanggulangan kejadian kebakaran dan penyelamatan ≤ 15 menit
- mmm) Sarana dan prasarana pendukung layanan pelaksanaan pemadaman dan penyelamatan serta pengendalian, pencegahan kebakaran



- nnn) Meningkatkan standar mutu dan pengembangan sistem pelayanan dan pengaduan publik yang terintegrasi
- ooo) Meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat dengan pemanfaatan dan pengelolaan teknologi informasi untuk menciptakan layanan publik yang handal dan professional

- ppp) Memfasilitasi pelayanan administrasi permohonan bantuan kepada pemerintah pusat, pemerintah daerah lainnya, badan usaha milik negara, BUMD, dan/atau badan dan lembaga, organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum indonesia serta masyarakat sesuai ketentuan berlaku

3. Misi 3 : Mewujudkan Tatanan Masyarakat Yang Tertib, Taat Azas Serta Menjunjung Tinggi Penegakan Hukum Dan Hak Asasi Manusia (HAM)

Arah Kebijakan :

- a) Meningkatkan dan melibatkan berbagai komponen masyarakat dalam pengawasan pelaksanaan Perda dan Perkada
- b) Meningkatkan dan melibatkan berbagai komponen masyarakat dalam pengawasan dan pelaksanaan pembangunan
- c) Meningkatkan penegakan hukum yang konsisten dengan tetap memperhatikan Hak Asasi Manusia (HAM)
- d) Mengupayakan pembinaan yang intensif kepada masyarakat mengenai peraturan daerah yang berlaku
- e) Mengintensifkan Patroli wilayah untuk meningkatkan ketentraman dan ketertiban umum
- f) Melibatkan berbagai komponen masyarakat dalam Mentaati Perda dan Perkada
- g) Melaksanakan Pembinaan kepada lembaga masyarakat dalam mentaati Perda dan Perkada
- h) Monev. ketentraman dan ketertiban wilayah kecamatan
- i) Penegakan Hukum dan Hak Asasi Manusia (HAM)



- j) Cakupan continuum of care dengan melibatkan peran serta masyarakat
- k) Meningkatkan jumlah perusahaan yang mengesahkan peraturan perusahaan
- l) Merencanakan Peningkatan Kualitas Hidup Perempuan
- m) Meningkatkan Upaya Peningkatan Pemahaman Masyarakat Terhadap Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

4. Misi 4 : Memantapkan Kreativitas Seni Dan Budaya Masyarakat Yang Berorientasi Pada Pelestarian Kearifan Lokal

Arah Kebijakan :

- a) Mengaktifkan dan Membina Lembaga Seni
- b) Memantapkan koordinasi dan kerja sama dengan majelis alit, widya sabha dan dewan kesenian dalam pembinaan adat seni dan budaya
- c) Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam melestarikan adat seni dan budaya melalui pentas dan lomba-lomba
- d) Meningkatkan informasi kepada masyarakat tentang lomba yang dilaksanakan
- e) Memantapkan pelaksanaan pembinaan terhadap kreatifitas seni dan budaya daerah yang terdapat di masing-masing desa/kelurahan
- f) Memantapkan koordinasi dan kerjasama dengan majelis alit, widyasabha dan dewan kesenian dalam pembinaan adat, seni dan budaya
- g) Mendorong sektor-sektor pariwisata untuk menampilkan kelompok-kelompok budaya lokal
- h) Melaksanakan pembinaan di bidang seni dan budaya
- i) Menyelenggarakan Diklat di bidang seni dan budaya
- j) Menyelenggarakan lomba di bidang seni dan budaya
- k) Mendata warisan seni dan budaya



5. Misi 5 : Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia Yang Berlandaskan Pada Penguatan Pendidikan, Kesehatan Dan Perekonomian Masyarakat

Arah Kebijakan :

- a) Menuntaskan wajib belajar 9 tahun dan mendorong program wajib belajar 12 tahun
- b) Pemenuhan sarana prasarana yang berkualitas
- c) Meningkatkan profesionalisme/kualitas pendidik dan tenaga kependidikan
- d) Pemanfaatan teknologi untuk inovasi pembelajaran
- e) Meningkatkan kualitas dan daya saing masyarakat yang berprestasi
- f) Meningkatkan kesempatan kerja
- g) Peningkatan produksi perindustrian
- h) Peningkatan produksi pertanian
- i) Peningkatan produksi perternakan
- j) Peningkatan produksi perikanan
- k) Penguatan permodalan UMKM
- l) Peningkatan akses dan mutu pelayanan kesehatan ibu maternal (ibu hamil, ibu bersalin dan ibu nifas), bayi, remaja dan lanjut usia (continuum of care) dengan melibatkan peran serta masyarakat
- m) Peningkatan surveilans gizi, peningkatan akses dan mutu paket perbaikan gizi dan peran serta masyarakat untuk sadar gizi
- n) Mewujudkan SDM yang berkualitas dan memiliki daya saing
- o) Peningkatan upaya promotif dan preventif dalam pengendalian penyakit menular dan tidak menular
- p) Peningkatan kepesertaan masyarakat mengikuti jaminan kesehatan
- q) Pengembangan dan penerapan sistem akreditasi fasilitas pelayanan kesehatan di Puskesmas dan Rumah sakit milik pemerintah dan swasta
- r) Pembangunan/rehabilitasi sarana pelayanan kesehatan



- s) Peningkatan inovasi pelayanan kesehatan melalui pelayanan kesehatan bergerak (mobile), pelayanan primer dan rujukan serta pelayanan perawatan kesehatan masyarakat
- t) Peningkatan pemberdayaan masyarakat melalui Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) serta Upaya Kesehatan Berbasis Masyarakat (UKBM)
- u) 10 Peningkatan ketersediaan obat (obat esensial dan generik), vaksin, alat kesehatan dan bahan penunjang medis
- v) Peningkatan sistem informasi kesehatan yang valid, akurat dan berbasis data (evidence based)
- w) Peningkatan surveilans epidemiologi faktor resiko dan penyakit serta penanggulangan kejadian luar biasa (KLB)/wabah

6. Misi 6 : Pemberdayaan Ekonomi Kreatif Dan Usaha Mikro Kecil Dan Menengah (UMKM) Berdasarkan Potensi Wilayah Dan Masyarakat

Arah Kebijakan :

- a) Memfasilitasi perijinan usaha
- b) Meningkatkan pemberdayaan usaha koperasi
- c) Meningkatkan kualitas koperasi
- d) Meningkatkan kepatuhan terhadap peraturan Perundang-undangan koperasi
- e) Meningkatkan kapasitas SDM pelaku UMKM
- f) Meningkatkan pelaksanaan sosialisasi dan monev KUR
- g) Mengadakan promosi baik yang berskala lokal maupun nasional
- h) Meningkatkan pengetahuan/kemampuan SDM untuk pelaku usaha
- i) Melaksanakan pelatihan dalam rangka meningkatkan pengetahuan dan kemampuan dalam mengelola usaha
- j) Melaksanakan monitoring harga
- k) Melaksanakan Tera/Ulang Unit Pelayanan Terpadu Perdagangan



7. Misi 7 : Meningkatkan Kebahagiaan Masyarakat Melalui Sistem Jaminan Sosial Yang Komprehensif

Arah Kebijakan :

- a) Peningkatan kepesertaan masyarakat mengikuti jaminan kesehatan
- b) Menurunkan angka usia pernikahan dini
- c) Meningkatnya jumlah pekerja yang berkualitas pada sektor pariwisata dan sektor lainnya
- d) Meningkatkan sinergi dengan berbagai stakeholder dalam mewujudkan kesejahteraan sosial
- e) Pemberdayaan PMKS sesuai potensi dan kebutuhannya
- f) Peningkatan kualitas lembaga kesejahteraan social

8. Misi 8 : Memperkuat Sinergi Pariwisata Dengan Pertanian Yang Berorientasi Kepada Agroindustri Dan Pelestarian Sumber Daya Alam

Arah Kebijakan :

- a) Pembangunan Daya Tarik Wisata (DTW) yang berbasis Agrowisata
- b) Mengidentifikasi kebutuhan sarana dan prasarana
- c) Meningkatkan kapasitas pelaku SDM pariwisata dan Ekonomi Kreatif
- d) Pembinaan dan pelatihan manajemen pengelola Menetapkan kelembagaan pengelola
- e) Penyusunan data kunjungan wisatawan Melaksanakan Analisa pasar pariwisata Melaksanakan promosi pariwisata baik di dalam daerah, luar daerah maupun luar negeri Melaksanakan publikasi pariwisata dalam berbagai media
- f) Menyelenggarakan gathering meeting dan travel fair dengan stakeholder pariwisata
- g) Meningkatkan kapasitas pelaku dan kualitas produk agro industri yang berorientasi pada pelestarian sumber daya alam
- h) Meningkatkan Baku Mutu Lingkungan



- i) Meningkatkan produktivitas tanaman pangan, hortikultura perkebunan dan peternakan Penerapan teknologi tepat guna Meningkatkan perlindungan lahan pertanian
- j) Meningkatkan keanekaragaman produk komoditi pertanian
- k) Meningkatkan penganekaragaman konsumsi pangan
- l) Peremajaan tanaman, ternak yang sudah tua dan rusak/mati
- m) Pengembangan, peningkatan dan pemelihara sarana dan prasarana pertanian
- n) Penumbuhan dan pengembangan kelompok tani Penguatan dan peningkatan kapasitas SDM pertanian
- o) Meningkatkan perluasan akses pasar produk pertanian yang berbasis agroindustri
- p) Meningkatkan kualitas dan validitas data base pertanian
- q) Mengidentifikasi daerah rawan pangan
- r) Intensifikasi dan ekstensifikasi usaha perikanan
- s) Meningkatkan nilai tambah produk perikanan
- t) Mengendalikan pemanfaatan sumber daya perikanan
- u) Pembinaan dan Pengawasan terhadap Industri Pariwisata
- v) Penyusunan database industri pariwisata
- w) Peningkatan kapasitas usaha pariwisata dan ekonomi kreatif
- x) Verifikasi kesiapan tata kelola pariwisata di Kabupaten Badung pasca pandemi Covid-19
- y) Meningkatkan pelestarian fungsi lingkungan hidup

9. Misi 9 : Meningkatkan Daya Saing Daerah Yang Berbasis Kreativitas Dan Inovasi

Arah Kebijakan :

- a) Mengoptimalkan pendampingan inovasi kepada perangkat daerah dan kelompok masyarakat baik secara komunal maupun personal
- b) Mengoptimalkan peran dan fungsi kelitbangan dalam penyelenggaraan pemerintah daerah
- c) Optimalisasi Penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) untuk menunjang pembiayaan Daerah



- d) Memberikan kepastian hukum, keamanan dan keberlanjutan dalam berinvestasi
- e) Mengembangkan akses promosi dan kerjasama penanaman modal
- f) Mewujudkan ketaatan pelaku usaha dalam penyelenggaraan penanaman modal
- g) Peningkatan inovasi layanan kesehatan primer dan rujukan
- h) Meningkatkan kualitas dokumen kependudukan dengan menjadikan data kependudukan yang akurat dan transparan
- i) Meningkatnya inovasi pelayanan Adminduk
- j) Meningkatnya kualitas pelayanan Adminduk sampai ketinggian Desa/Kel dan Banjar
- k) Pembangunan, Peningkatan dan rehabilitasi Jaringan Jalan dan Jembatan untuk menunjang aktifitas perekonomian masyarakat
- l) Peningkatan Konservasi Sumber Daya Air, Peningkatan Penggunaan Sumber Daya Air, Peningkatan Pengendalian Daya Rusak Air, Pembangunan Infrastruktur Sumberdaya air dan Irigasi
- m) Peningkatan ketersediaan sarana dan prasarana air minum, Peningkatan cakupan pelayanan air limbah domestik, Peningkatan cakupan layanan persampahan,
- n) Peningkatan kualitas penyelenggaraan jasa konstruksi, Peningkatan pengelolaan bangunan gedung/rumah negara
- o) Perwujudan harmonisasi dalam pemanfaatan, penataan dan pengendalian ruang, peningkatan kinerja pemanfaatan ruang, peningkatan kinerja pengendalian pemanfaatan ruang
- p) Peningkatan kerjasama pembangunan melalui skema Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU)
- q) Peningkatan pembinaan dan pengembangan rumah/hunian yang layak
- r) Pemberdayaan masyarakat dalam peningkatan kualitas pembangunan rumah swadaya Pengendalian titik permukiman kumuh



- s) Peningkatan akses penduduk terhadap sanitasi layak (air limbah domestik, sampah dan drainase lingkungan
- t) Pembangunan sarana prasarana pengelolaan air limbah domestic
- u) Pembangunan sarana prasarana persampahan di kawasan
- v) Pembangunan infastruktur drainase lingkungan
- w) Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pelaporan dan Keuangan Tepat waktu
- x) Pelaksanaan Verifikasi terhadap permohonan hibah uang, barang/jasa dan verifikasi terhadap PSU perumahan di Kabupaten Badung sesuai dengan ketentuan
- y) Capaian realisasi pekerjaan fisik dan serapan anggaran sesuai target

Berpedoman pada arah kebijakan pembangunan daerah dalam RPJMD Semesta Berencana tahun 2021-2026 maka kebijakan pembangunan daerah Kabupaten Badung tahun 2024 yaitu :

1. Prioritas Pembangunan Daerah Kabupaten Badung selaras dengan prioritas kebijakan PPNSB Kabupaten Badung yaitu, Sandang, Pangan dan Papan, Kesehatan dan Pendidikan, Jaminan Sosial dan Ketenagakerjaan, Adat, Agama, Tradisi, Seni dan Budaya serta Bidang Pariwisata.
2. Penanggulangan masalah kesehatan, ekonomi dan sosial akibat dampak pandemi COVID 19
3. Pemulihan ekonomi akibat dampak pandemi COVID 19
4. Pelayanan publik yang berkualitas kepada masyarakat dengan memperluas pemanfaatan teknologi informasi.

1.10 Sistematika Laporan

Laporan akuntabilitas kinerja Pemerintah Kabupaten Badung tahun 2024 disusun dengan sistematika laporan sebagai berikut:

Ringkasan Eksekutif Menyajikan secara ringkas rencana dan capaian kinerja Kabupaten Badung Tahun 2024.

Bab I Pendahuluan Menyajikan latar belakang, data umum yang menyangkut gambaran Kabupaten Badung, aspek strategis serta arah kebijakan.

Bab II Perencanaan dan Perjanjian Kinerja Menyajikan mengenai RPJMD Semesta Berencana Kabupaten Badung 2021-2026, rencana kinerja tahunan dan perjanjian kinerja tahun 2024.

Bab III Akuntabilitas Kinerja Menyajikan capaian kinerja sasaran strategis tahun 2024 yang memuat hasil pengukuran kinerja dengan penjelasan keberhasilan dan permasalahan dalam pencapaian kinerja serta akuntabilitas keuangan

Bab IV Penutup Menyajikan kesimpulan atas capaian kinerja sasaran strategis tahun 2024 dan saran perbaikan atas permasalahan dalam pencapaian kinerja.

BAB II

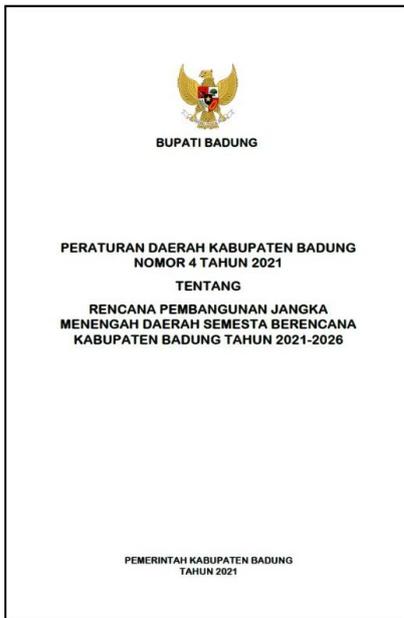
PERENCANAAN KINERJA DAN PERJANJIAN KINERJA

Dalam rangka mewujudkan tata kelola Pemerintahan yang baik, efektif dan efisien serta akuntabel, Pemerintah Kabupaten Badung dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan, berpedoman pada dokumen perencanaan jangka menengah dan jangka pendek seperti Rencana Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Semesta Berencana tahun 2021-2026, Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD), Rencana Kinerja Tahunan (RKT) dan Perjanjian Kinerja (PK).

2.1 RPJMD Semesta Berencana Kabupaten Badung 2021-2026

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) merupakan penjabaran dari visi, misi, dan program kepala daerah, memuat tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, pembangunan Daerah dan keuangan Daerah, serta program Perangkat Daerah dan lintas Perangkat Daerah yang disertai dengan kerangka pendanaan bersifat indikatif untuk jangka waktu 5 (lima) tahun yang disusun dengan berpedoman pada RPJPD dan RPJMN.

RPJMD Kabupaten Badung disusun sebagai penjabaran visi, misi dan program dari bupati dan wakil bupati terpilih sebagai dokumen perencanaan Pemerintah Daerah untuk periode (lima) tahun. Sesuai peraturan perundang-undangan maka setelah pasangan I Nyoman Giri Prasta dan I Ketut Suiasa dilantik sebagai Bupati dan Wakil Bupati Badung untuk periode Tahun 2021-2026 pada tanggal 26 Pebruari 2021 oleh Gubernur Bali atas nama Menteri Dalam Negeri, berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.51-259 Tahun 2021 tentang Pengesahan Pengangkatan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Hasil Pemilihan



Kepala Daerah Serentak Tahun 2020 di Kabupaten dan Kota Pada Provinsi Bali, telah menyusun RPJMD yang merupakan periode keempat dari RPJPD Kabupaten Badung Tahun 2005-2025.

Sasaran pokok dari RPJPD periode keempat tersebut yakni meningkatkan pembangunan secara menyeluruh di berbagai bidang guna terwujudnya kemajuan daerah dan kesejahteraan masyarakat. Untuk menjabarkan visi-misi dan program-program unggulan Bupati dan Wakil

Bupati dalam RPJMD, secara substansi berpedoman pada prinsip-prinsip Pola Pembangunan Nasional Semesta Berencana (PPNSB) yang merupakan implementasi dari Ajaran Tri Sakti yaitu : **BERDIKARI DI BIDANG EKONOMI, BERDAULAT DI BIDANG POLITIK DAN BERKEPRIBADIAN DI BIDANG KEBUDAYAAN.**

RPJMD Semesta Berencana Kabupaten Badung juga mengadopsi filosofis kehidupan dan kearifan lokal masyarakat Bali yaitu Tri Hita Karana serta paras paros sarpanaya sagilik-saguluk sanglunglung sabayantaka.

RPJMD Semesta Berencana 2021-2026 ditujukan untuk melanjutkan kembali kemajuan pembangunan daerah, meningkatkan kesejahteraan masyarakat serta meningkatkan kualitas pelayanan publik dan daya saing daerah. Sehubungan hal tersebut, untuk menjawab berbagai tantangan pembangunan yang dihadapi Kabupaten Badung dalam lima Tahun kedepan telah dirumuskan Visi dan Misi Kabupaten Badung sebagai berikut:

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN BADUNG
NOMOR 4 TAHUN 2021 TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA
MENENGAH DAERAH SEMESTA BERENCANA KABUPATEN BADUNG
TAHUN 2021 - 2026**

VISI

**MELANJUTKAN
KEBAHAGIAAN
MASYARAKAT BADUNG
MELALUI
PEMBANGUNAN YANG
BERLANDASKAN TRI
HITA KARANA.**

MISI

1. Memperkokoh Kerukunan Hidup Bermasyarakat dalam Bingkai Keragaman Adat, Budaya dan Agama.
2. Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Berdasarkan Prinsip *Good Governance* dan *Clean Government* yang berbasis teknologi informasi dan komunikasi.
3. Mewujudkan Tataan Masyarakat yang Tertib, Taat Azas Serta Menjunjung Tinggi Penegakan Hukum dan Hak Asasi Manusia (HAM).
4. Memantapkan Kreativitas Seni dan Budaya Masyarakat yang Berorientasi pada Pelestarian Kearifan Lokal.
5. Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Berlandaskan pada Penguatan Pendidikan, Kesehatan dan Perekonomian Masyarakat.
6. Memberdayakan Ekonomi Kreatif dan Usaha Mikro Kecil Dan Menengah (UMKM) Berdasarkan Potensi Wilayah dan Masyarakat.
7. Meningkatkan Kebahagiaan Masyarakat Melalui Sistem Jaminan Sosial yang Komprehensif.
8. Memperkuat Sinergi Pariwisata dengan Pertanian yang Berorientasi kepada Agroindustri dan Pelestarian Sumber Daya Alam.
9. Meningkatkan Daya Saing Daerah yang Berbasis Kreativitas dan Inovasi.

Tabel 2.1

Visi, Misi, Tujuan, Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja Utama RPJMD Semesta Berencana Kabupaten Badung 2021-2026

NO	TUJUAN	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA (Perbup No. 11 Tahun 2022)
1	2	3	4
VISI : “MELANJUTKAN KEBAHAGIAAN MASYARAKAT BADUNG MELALUI PEMBANGUNAN YANG BERLANDASKAN TRI HITA KARANA”			
Misi 1 : Memperkokoh Kerukunan Hidup Bermasyarakat Dalam Bingkai Keragaman Adat, Budaya dan Agama			
1.	Terwujudnya Kerukunan Hidup Bermasyarakat	1. Meningkatnya toleransi hidup beragama	1. Indek kerukunan umat beragama



NO	TUJUAN	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA (Perbup No. 11 Tahun 2022)
1	2	3	4
Misi 2 : Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Berdasarkan Prinsip Good Governance dan Clean Government Yang Berbasis Teknologi Informasi Dan Komunikasi			
2.	Terwujudnya Pemerintahan Yang Baik dan Bersih	1. Meningkatnya Birokrasi Yang Bersih dan Akuntabel	1. Nilai SAKIP 2. Opini BPK
		2. Meningkatnya Birokrasi Yang Kapabel	1. Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) 2. Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara (ASN)
		3. Meningkatnya Pelayanan Publik Menuju Pelayanan Yang Prima dan Berintegritas	1. Indeks Kepuasan Masyarakat
Misi 3 : Mewujudkan Tatanan Masyarakat Yang Tertib, Taat Azas Serta Menjunjung Tinggi Penegakan Hukum Dan Hak Asasi Manusia (HAM)			
3.	Terwujudnya Ketentraman dan Ketertiban Masyarakat	1. Meningkatnya Kepatuhan Masyarakat Dalam Mentaati Perda dan Perkada	1. Persentase Penegakan Perda dan Perkada
4.	Terwujudnya Penghormatan, Perlindungan, Pemenuhan, Penegakan dan Pemajuan HAM	1. Terwujudnya Pemenuhan HAM	1. Capaian Atas Kepedulian HAM
Misi 4 : Memantapkan Kreativitas Seni dan Budaya Masyarakat Yang Berorientasi Pada Pelestarian Kearifan Lokal			
5.	Terwujudnya Pelestarian Seni dan Budaya Lokal	1. Meningkatnya kreativitas serta pelestarian seni dan budaya	1. Persentase Pertumbuhan Seni dan Budaya



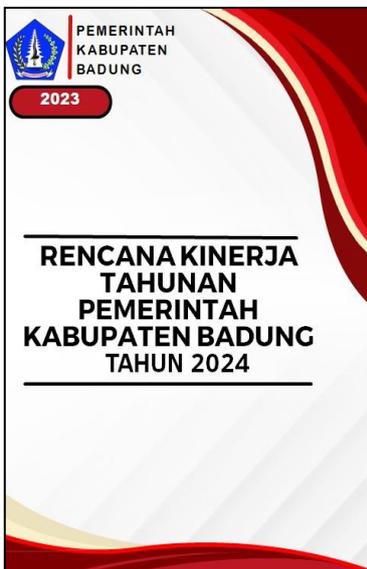
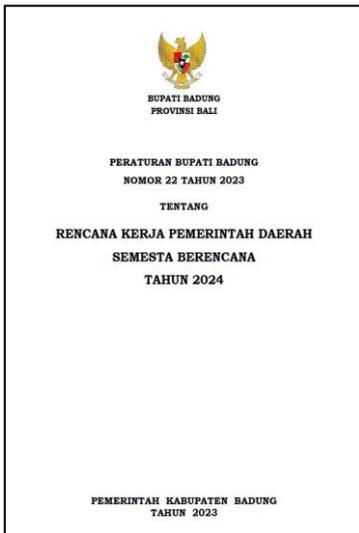
NO	TUJUAN	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA (Perbup No. 11 Tahun 2022)
1	2	3	4
Misi 5 : Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia Yang Berlandaskan Pada Penguatan Pendidikan, Kesehatan dan Perekonomian Masyarakat			
6.	Terwujudnya Sumber Daya Manusia yang Berkualitas	1. Meningkatnya kualitas sumber daya manusia	1. Indeks Pembangunan Manusia
Misi 6 : Pemberdayaan Ekonomi Kreatif Dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) Berdasarkan Potensi Wilayah dan Masyarakat			
7.	Terwujudnya UMKM sebagai Potensi Ekonomi Rakyat, Kreatif dan Berdayasaing	1. Meningkatnya persentase koperasi sehat	1. Persentase Jumlah Koperasi Sehat
		2. Meningkatnya jumlah wirausaha	2. Persentase Pertumbuhan jumlah wirausaha
		3. Meningkatnya kontribusi sector perdagangan terhadap PDRB	3. Persentase Kontribusi Sektor Perdagangan terhadap PDRB
Misi 7 : Meningkatkan Kebahagiaan Masyarakat Melalui Sistem Jaminan Sosial Yang Komprehensif			
8.	Terwujudnya kebahagiaan masyarakat	1. Meningkatnya kebahagiaan masyarakat	1. Indeks Kebahagiaan
		2. Menurunnya angka kemiskinan	2. Persentase Penduduk Miskin
Misi 8 : Memperkuat Sinergi Pariwisata Dengan Pertanian Yang Berorientasi Kepada Agroindustri dan Pelestarian Sumber Daya Alam			
9.	Terwujudnya Kepariwisata Berorientasi Pertanian dan Agroindustri	1. Meningkatnya pengembangan daya Tarik destinasi pariwisata berorientasi pertanian	1. Persentase pengembangan daya Tarik destinasi pariwisata berorientasi



NO	TUJUAN	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA (Perbup No. 11 Tahun 2022)
1	2	3	4
			pertanian
		2. Meningkatnya pengembangan agroindustri yang berorientasi pada pelestarian sumber daya alam	2. Persentase Pengembangan Agroindustri yang berorientasi pada Pelestarian Sumber Daya Alam
10.	Terwujudnya Pertumbuhan Sektor Pertanian sinergi dengan sektor Pariwisata Berkelanjutan	1. Meningkatnya kuantitas, kualitas dan kontinuitas produk pertanian	1. Nilai Tukar Usaha Petani (NTUP)
			2. Nilai Tukar Nelayan (NTN)
		2. Meningkatnya kontribusi sector pariwisata terhadap PDRB	1. Persentase Kontribusi Sektor Pariwisata terhadap PDRB
		3. Meningkatnya kualitas lingkungan hidup yang berkelanjutan	1. Indeks Kualitas Lingkungan Hidup
Misi 9 : Meningkatkan Daya Saing Daerah Yang Berbasis Kreativitas Dan Inovasi			
11.	Terwujudnya Daya Saing Daerah yang Tinggi	1. Meningkatnya Inovasi dan Kemandirian Daerah	1. Indeks Daya Saing Daerah (IDSD)

2.2 Rencana Kinerja Pemerintah Daerah (RKPD) dan Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Tahun 2024

Rencana Kinerja Pemerintah Daerah Semesta Berencana Kabupaten Badung merupakan dokumen perencanaan daerah untuk periode 1 (satu) tahun yang merupakan penjabaran Tahun ke-3 (Tahun ketiga) dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Semesta Berencana Kabupaten Badung Tahun 2021-2026, yang memuat rancangan kerangka ekonomi Daerah, prioritas pembangunan Daerah, serta rencana kerja dan pendanaan untuk jangka waktu 1 (satu) tahun yang disusun dengan berpedoman pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah Semesta Berencana Provinsi Bali dan Rencana Kinerja Pemerintah Daerah Kabupaten Badung Tahun 2024 serta program strategis nasional yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat.



Kepala Daerah mempunyai tugas menyusun dan menetapkan Rencana Kerja Pemerintah Daerah sesuai amanat Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Rencana Kerja Pemerintah Daerah Semesta Berencana Kabupaten Badung Tahun 2024 merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Semesta Berencana Kabupaten Badung Tahun 2016 – 2021, dan dalam penyusunannya juga berpedoman pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah Semesta Berencana Provinsi Bali serta Rencana Kerja Pemerintah untuk menjaga keselarasan sasaran dan prioritas pembangunan serta program dan kegiatan pembangunan Daerah kabupaten dengan

sasaran dan prioritas serta program dan kegiatan pembangunan Daerah provinsi dan nasional.

Dalam menyusun dokumen perencanaan tahunan, wajib mengacu pada Visi dan Misi Pembangunan Daerah. Adapun yang menjadi Visi dan Misi Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Badung Tahun 2021 – 2026. Sebagai penjabaran Visi dan Misi tersebut, maka setiap tahunnya disusun Tema dan Prioritas Pembangunan Daerah. Adapun tema Rencana Kerja Pemerintah Daerah Semesta Berencana Kabupaten Badung Tahun 2024 sebagai berikut :

"PERCEPATAN TRANSFORMASI EKONOMI DAN INVESTASI DAERAH DALAM RANGKA PENINGKATAN STABILITAS PEREKONOMIAN DAN DAYA SAING DAERAH"

Berdasarkan tema tersebut, terdapat 5 bidang prioritas Pola Pembangunan Nasional Semesta Berencana (PPNSB) yang akan dilaksanakan pada tahun 2024, yaitu :

1. Pangan, Sandang dan Papan
2. Kesehatan dan Pendidikan
3. Jaminan Sosial dan Ketenagakerjaan
4. Adat, Agama, Tradisi dan Budaya
5. Pariwisata

Selanjutnya dalam rangka mewujudkan sinergitas pembangunan nasional, provinsi dan kabupaten, maka selain kelima bidang prioritas tersebut, pembangunan daerah Kabupaten Badung juga diprioritaskan pada bidang-bidang antara lain:

6. Infrastruktur
7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik
8. Penataan Ruang, Kawasan Permukiman, dan Pengendalian Penduduk
9. Lingkungan Hidup dan Kebencanaan

Sedangkan Prioritas Pembangunan Nasional Semesta Berencana Tahun 2024, yaitu:

1. Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan Berkualitas dan Berkeadilan
2. Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan
3. Meningkatkan Sumber Daya Manusia berkualitas dan Berdaya Saing
4. Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan
5. Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar
6. Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana, dan Perubahan Iklim
7. Memperkuat Stabilitas Politik, Hukum, Pertahanan dan Keamanan, dan Transformasi Pelayanan Publik.

Sedangkan Prioritas Pembangunan Provinsi Bali Tahun 2024, yaitu :

1. Pertanian, Kelautan, IKM UMKM dan Pariwisata
2. Pendidikan, IPTEK dan Kesehatan
3. Tenaga Kerja dan Kesejahteraan Sosial
4. Adat, Tradisi, Seni dan Budaya
5. Lingkungan Hidup
6. Infrastruktur
7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi

Adapun Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Pemerintah Kabupaten Badung Tahun 2024 sesuai dokumen RKT dan dokumen RKPD Pemerintah Kabupaten Badung 2024 secara rinci, seperti tabel berikut:

Tabel 2.2

Rencana Kinerja Tahunan Pemerintah Kabupaten Badung Tahun 2024

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR	TARGET
1	Meningkatnya toleransi hidup beragama	Indeks Kerukunan Hidup Beragama	83
			(Sangat Tinggi)
2	Meningkatnya Birokrasi yang bersih dan Akuntabel	Nilai SAKIP	79.50
			(BB)
			WTP
		Opini BPK	



NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR	TARGET
3	Meningkatnya Birokrasi yang Kapabel	Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)	3.30
			(Baik)
		Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara (ASN)	62.57
			(Rendah)
4	Meningkatnya pelayanan publik menuju pelayanan yang prima dan berintegritas	Indeks Kepuasan Masyarakat	86.50
			(Baik)
5	Meningkatnya kepatuhan masyarakat dalam mentaati Perda dan Perkada	Persentase Penegakan Perda dan Perkada	90.00%
6	Terwujudnya Pemenuhan HAM	Capaian Atas Kepedulian HAM	75.00
			(Peduli HAM)
7	Meningkatnya kreativitas serta pelestarian seni dan budaya	Persentase Pertumbuhan Seni dan Budaya	76.00%
8	Meningkatnya kualitas sumber daya manusia	Indeks Pembangunan Manusia	81.63
			(Sangat Tinggi)
9	Meningkatnya persentase koperasi sehat	Persentase Jumlah Koperasi Sehat	8.00%
10	Meningkatnya jumlah wirausaha	Persentase Pertumbuhan jumlah wirausaha	25.00%
11	Meningkatnya kontribusi sector perdagangan terhadap PDRB	Persentase Kontribusi Sektor Perdagangan terhadap PDRB	10.48%
12	Meningkatnya kebahagiaan masyarakat	Indeks Kebahagiaan	76.89
13	Menurunnya angka kemiskinan	Persentase Penduduk Miskin	1.80%
14	Meningkatnya pengembangan daya Tarik destinasi pariwisata berorientasi pertanian	Persentase pengembangan daya Tarik destinasi pariwisata berorientasi pertanian	7.69%

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR	TARGET
15	Meningkatnya pengembangan agroindustri yang berorientasi pada pelestarian sumber daya alam	Persentase Pengembangan Agroindustri yang berorientasi pada Pelestarian Sumber Daya Alam	31.83%
16	Meningkatnya kuantitas, kualitas dan kontinuitas produk pertanian	Nilai Tukar Usaha Petani (NTUP)	100.00
		Nilai Tukar Nelayan (NTN)	(Impas) 100.50
17	Meningkatnya kontribusi sector pariwisata terhadap PDRB	Persentase Kontribusi Sektor Pariwisata terhadap PDRB	26.50%
18	Meningkatnya kualitas lingkungan hidup yang berkelanjutan	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	61.72
			(Sedang)
19	Meningkatnya Inovasi dan Kemandirian Daerah	Indeks Daya Saing Daerah (IDSD)	3.7673
			(Sangat Tinggi)

2.3 Perjanjian Kinerja Tahun 2024

Perjanjian Kinerja merupakan amanat dari Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Perjanjian kinerja merupakan pernyataan komitmen yang mempresentasikan tekad dan janji untuk mencapai kinerja yang jelas dan terukur dalam waktu 1 tahun, juga merupakan kesepakatan antara pengemban tugas (penerima amanah) dengan atasannya (pemberi amanah), selanjutnya merupakan Ikhtisar Rencana Kinerja Tahunan yang telah



disesuaikan dengan ketersediaan anggarannya serta realisasi perjanjian kinerja dilaporkan dalam laporan kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP). Melalui perjanjian kinerja, terwujudlah komitmen antara penerima dan pemberi amanah atas kinerja terukur tertentu berdasarkan tugas, fungsi dan wewenang serta sumber daya yang tersedia. Kinerja yang disepakati tidak dibatasi pada kinerja yang dihasilkan atas kegiatan tahun bersangkutan, tetapi termasuk kinerja (outcome) yang seharusnya terwujud akibat kegiatan tahun-tahun sebelumnya

dalam kerangka perencanaan kinerja jangka menengah. Dengan demikian target kinerja yang diperjanjikan juga mencakup outcome yang dihasilkan dari kegiatan tahun-tahun sebelumnya, sehingga terwujud kesinambungan kinerja setiap tahunnya.



Tujuan perjanjian kinerja adalah : 1) Sebagai wujud nyata komitmen antara penerima dan pemberi amanah untuk meningkatkan integritas, akuntabilitas, transparansi, dan kinerja Aparatur; 2) Menciptakan tolok ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja aparatur; 3) Sebagai dasar penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi 4) sebagai dasar pemberian penghargaan dan sanksi (*reward* dan *punishment*) 5) Sebagai dasar bagi pemberi

amanah untuk melakukan monitoring, evaluasi dan supervisi atas perkembangan/kemajuan kinerja penerima amanah; 6) Sebagai dasar dalam perjanjian sasaran kinerja pegawai.

Perjanjian kinerja tahun 2024 disusun mengacu pada Tujuan, Sasaran, indikator dan Target Kinerja sesuai RPJMD Semesta Berencana tahun 2021 – 2026, dan telah ditetapkan pada tanggal 24 Januari 2024 seperti berikut :

Tabel 2.3

Perjanjian Kinerja Pemerintah Kabupaten Badung Tahun 2024

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR	TARGET
1	Meningkatnya toleransi hidup beragama	Indeks Kerukunan Hidup Beragama	83 (Sangat Tinggi)
2	Meningkatnya Birokrasi yang bersih dan Akuntabel	Nilai SAKIP	79.50 (BB)
		Opini BPK	WTP
3	Meningkatnya Birokrasi yang Kapabel	Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)	3.30 (Baik)
		Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara (ASN)	62.57 (Rendah)
4	Meningkatnya pelayanan publik menuju pelayanan yang prima dan berintegritas	Indeks Kepuasan Masyarakat	86.50 (Baik)
5	Meningkatnya kepatuhan masyarakat dalam mentaati Perda dan Perkada	Persentase Penegakan Perda dan Perkada	90.00%
6	Terwujudnya Pemenuhan HAM	Capaian Atas Kepedulian HAM	75.00 (Peduli HAM)
7	Meningkatnya kreativitas serta pelestarian seni dan budaya	Persentase Pertumbuhan Seni dan Budaya	76.00%
8	Meningkatnya kualitas sumber daya manusia	Indeks Pembangunan Manusia	81.63 (Sangat Tinggi)
9	Meningkatnya persentase koperasi sehat	Persentase Jumlah Koperasi Sehat	8.00%
10	Meningkatnya jumlah wirausaha	Persentase Pertumbuhan jumlah wirausaha	25.00%



NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR	TARGET
11	Meningkatnya kontribusi sector perdagangan terhadap PDRB	Persentase Kontribusi Sektor Perdagangan terhadap PDRB	10.48%
12	Meningkatnya kebahagiaan masyarakat	Indeks Kebahagiaan	76.89
13	Menurunnya angka kemiskinan	Persentase Penduduk Miskin	1.80%
14	Meningkatnya pengembangan daya Tarik destinasi pariwisata berorientasi pertanian	Persentase pengembangan daya Tarik destinasi pariwisata berorientasi pertanian	7.69%
15	Meningkatnya pengembangan agroindustri yang berorientasi pada pelestarian sumber daya alam	Persentase Pengembangan Agroindustri yang berorientasi pada Pelestarian Sumber Daya Alam	31.83%
16	Meningkatnya kuantitas, kualitas dan kontinuitas produk pertanian	Nilai Tukar Usaha Petani (NTUP)	100.00
			(Impas)
		Nilai Tukar Nelayan (NTN)	100.50
17	Meningkatnya kontribusi sector pariwisata terhadap PDRB	Persentase Kontribusi Sektor Pariwisata terhadap PDRB	26.50%
18	Meningkatnya kualitas lingkungan hidup yang berkelanjutan	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	61.72
			(Sedang)
19	Meningkatnya Inovasi dan Kemandirian Daerah	Indeks Daya Saing Daerah (IDSD)	3.7673
			(Sangat Tinggi)

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

3.1 Potret Pengukuran dan Capaian Kinerja Tahun 2024

Dalam upaya mewujudkan Visi dan Misi Bupati yang efektif serta peningkatan Akuntabilitas Kinerja, telah dilakukan penyesuaian terhadap tujuan, sasaran, indikator kinerja utama dan target kinerja untuk mengarahkan agar program pembangunan daerah dapat difokuskan untuk mencapai sasaran strategis secara efisien serta semakin memacu keberhasilan pembangunan di Kabupaten Badung yang dilandasi dengan tata kelola pemerintahan yang semakin transparan dan akuntabel.

RPJMD Semesta Berencana Kabupaten Badung tahun 2021-2026 mencakup 9 misi yang dijabarkan menjadi 11 tujuan (15 indikator), 19 sasaran dan 22 indikator kinerja utama (IKU). Secara umum capaian indikator kinerja sasaran sesuai RPJMD 2021-2026 memiliki progres yang semakin baik dibandingkan tahun sebelumnya namun tidak bisa dipungkiri ada capaian kinerja yang tingkat kemajuannya perlu lebih ditingkatkan karena memang mengalami permasalahan yang beragam.

Pengukuran tingkat capaian kinerja Pemerintah Kabupaten Badung tahun 2024 dilakukan terhadap sasaran rencana strategis RPJMD tahun 2021-2026, dengan cara membandingkan antara target pencapaian indikator sasaran yang telah ditetapkan dalam dokumen Perjanjian Kinerja dengan realisasinya.

Pengukuran kinerja tahun 2024 merupakan periode ketiga dari RPJMD Semesta Berencana Kabupaten Badung Tahun 2021-2026 sehingga pengukuran kinerja dilakukan hanya terhadap capaian sasaran strategis jangka pendek Semesta Berencana Kabupaten Badung Tahun 2021-2026. Adapun hasil pengukuran tingkat keberhasilan capaian sasaran strategis RPJMD Semesta Berencana Kabupaten Badung dilakukan dengan mengukur

capaian indikator kinerja utama (IKU). Hasil pengukuran capaian kinerja sasaran strategis Kabupaten Badung tahun 2024 seperti pada tabel berikut:

Tabel 3.1
Hasil Pengukuran Kinerja Sasaran Strategis
Pemerintah Kabupaten Badung Tahun 2024

NO	SASARAN STRATEGIS		INDIKATOR KINERJA UTAMA (Perbup No. 11 Tahun 2022)	SATUAN	TARGET	REALISASI	PERSENTASE CAPAIAN KINERJA
1.	Meningkatnya toleransi hidup beragama	1.	Indek kerukunan umat beragama	Nilai	83 (Sangat Tinggi)	96,52	116
2.	Meningkatnya Birokrasi Yang Bersih dan Akuntabel	2.	Nilai SAKIP	Nilai	79,50 (BB)	76,33 (BB)	96
		3.	Opini BPK	Nilai	WTP	WTP	100 (data 2023)
3.	Meningkatnya Birokrasi Yang Kapabel	4.	Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)	Nilai	3,30 (Baik)	3,87 (Sangat Baik)	117
		5.	Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara (ASN)	Nilai	62,57 (Rendah)	83,61 (Tinggi)	134
4.	Meningkatnya Pelayanan Publik Menuju Pelayanan Yang Prima dan Berintegritas	6.	Indeks Kepuasan Masyarakat	Nilai	86,50 (Baik)	90,78 (Sangat Baik)	105
5.	Meningkatnya Kepatuhan Masyarakat Dalam Mentaati Perda dan Perkada	7.	Persentase Penegakan Perda dan Perkada	%	90,00%	100,00%	111
6.	Terwujudnya Pemenuhan HAM	8.	Capaian Atas Kepedulian HAM	Nilai	75,00 (Peduli HAM)	87,80 (Peduli HAM)	117
7.	Meningkatnya kreativitas serta pelestarian seni dan budaya	9.	Persentase Pertumbuhan Seni dan Budaya	%	76,00%	100%	132
8.	Meningkatnya kualitas sumber daya manusia	10.	Indeks Pembangunan Manusia	Nilai	81,63 (Sangat Tinggi)	83,87 (Sangat Tinggi)	103
9.	Meningkatnya persentase koperasi sehat	11.	Persentase Jumlah Koperasi Sehat	%	8,00%	43,13%	539



NO	SASARAN STRATEGIS		INDIKATOR KINERJA UTAMA (Perbup No. 11 Tahun 2022)	SATUAN	TARGET	REALISASI	PERSENTASE CAPAIAN KINERJA
10.	Meningkatnya jumlah wirausaha	12.	Persentase Pertumbuhan jumlah wirausaha	%	25,00%	26,10%	104
11.	Meningkatnya kontribusi sector perdagangan terhadap PDRB	13.	Persentase Kontribusi Sektor Perdagangan terhadap PDRB	%	10,48%	10,48%	100
12.	Meningkatnya kebahagiaan masyarakat	14.	Indeks Kebahagiaan	Nilai	76,89	78,86	103
13.	Menurunnya angka kemiskinan	15.	Persentase Penduduk Miskin	%	1,80%	2,23%	-124
14.	Meningkatnya pengembangan daya Tarik destinasi pariwisata berorientasi pertanian	16.	Persentase pengembangan daya Tarik destinasi pariwisata berorientasi pertanian	%	7,69%	7,69%	100
15.	Meningkatnya pengembangan agroindustri yang berorientasi pada pelestarian sumber daya alam	17.	Persentase Pengembangan Agroindustri yang berorientasi pada Pelestarian Sumber Daya Alam	%	31,83%	50,33%	158
16.	Meningkatnya kuantitas, kualitas dan kontinuitas produk pertanian	18.	Nilai Tukar Usaha Petani (NTUP)	Nilai	100 (Impas)	120,49	120
		19.	Nilai Tukar Nelayan (NTN)	Nilai	100,50	118,51	118
17.	Meningkatnya kontribusi sector pariwisata terhadap PDRB	20.	Persentase Kontribusi Sektor Pariwisata terhadap PDRB	%	26,50%	25,72%	97
18.	Meningkatnya kualitas lingkungan hidup yang berkelanjutan	21.	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	Nilai	61,72 (Sedang)	69,44	113

NO	SASARAN STRATEGIS		INDIKATOR KINERJA UTAMA (Perbup No. 11 Tahun 2022)	SAT UAN	TARGET	REALISASI	PERSENTASE CAPAIAN KINERJA
19.	Meningkatnya Inovasi dan Kemandirian Daerah	22.	Indeks Daya Saing Daerah (IDSD)	Nilai	3.7673 (Sangat Tinggi)	3,7800	100 (data 2023, belum rilis dari BRIN)
	Total Kinerja						2,659
	Rata-rata Kinerja						121

3.2 Analisis Capaian Kinerja

3.2.1 Analisis Capaian Kinerja Sasaran Strategis RPJMD Semesta Berencana Tahun 2024

Dalam rangka untuk mencapai visi dan misi dari kepala daerah terpilih selama lima tahun pemerintahannya maka kepala daerah dalam menyusun RPJMD merumuskan sasaran yang ingin dicapai sesuai peraturan perundang-undangan. Sasaran adalah sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu satu tahun. Sasaran ditetapkan dengan mengacu kepada visi, misi dan tujuan serta didasarkan pada isu-isu strategis. Berdasarkan visi, misi, tujuan dan isu-isu strategis, maka ditetapkan sasaran yang hendak dicapai dalam kurun waktu lima tahun yang bersifat prioritas sesuai *platform* kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih.

Dalam RPJMD Semesta Berencana Kabupaten Badung tahun 2021-2026 ditetapkan 19 sasaran yang akan dicapai pada setiap tahunnya. Hasil analisis capaian sasaran RPJMD Semesta Berencana Kabupaten Badung pada tahun 2024 diuraikan secara rinci per masing-masing sasaran.

**Analisis Kinerja Sasaran 1 :
Meningkatnya Toleransi Hidup Beragama**

Kabupaten Badung merupakan salah satu wilayah di Provinsi Bali yang masyarakatnya dinamis dan heterogen dari perspektif agama, sosial-budaya-politik sehingga sudah sepatutnya mendapatkan perhatian serius tentang kerukunan umat beragama untuk menjaga wilayah Kabupaten Badung. Kerukunan Umat beragama di Kabupaten Badung menjadi perhatian yang serius sehingga menjadi salah satu indikator pembangunan yang tertuang dalam RPJMD. Indikator Sasaran strategis RPJMD meningkatnya toleransi hidup beragama adalah Indeks Kerukunan Umat Beragama

Berdasarkan Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 tahun 2006/8 Tahun 2006, yang dimaksud kerukunan umat beragama adalah keadaan hubungan sesama umat beragama yang dilandasi toleransi, saling pengertian, saling menghormati, menghargai kesetaraan dalam pengamalan ajaran agamanya dan kerjasama dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara di dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Kerukunan hidup beragama adalah suatu kondisi sosial di mana semua golongan agama bisa hidup bersama-sama tanpa mengurangi hak dasar masing masing untuk melaksanakan kewajiban agamanya. Masing-masing hidup sebagai pemeluk agama yang baik, dalam keadaan rukun dan damai.

Indeks Kerukunan Umat Beragama dinilai dari tiga indikator yang digunakan dalam riset ini yaitu toleransi, kesetaraan, dan kerja sama. Kementerian Agama RI juga membuat kategori Indeks Kerukunan Umat Beragama menjadi beberapa kategori nilai, yaitu :

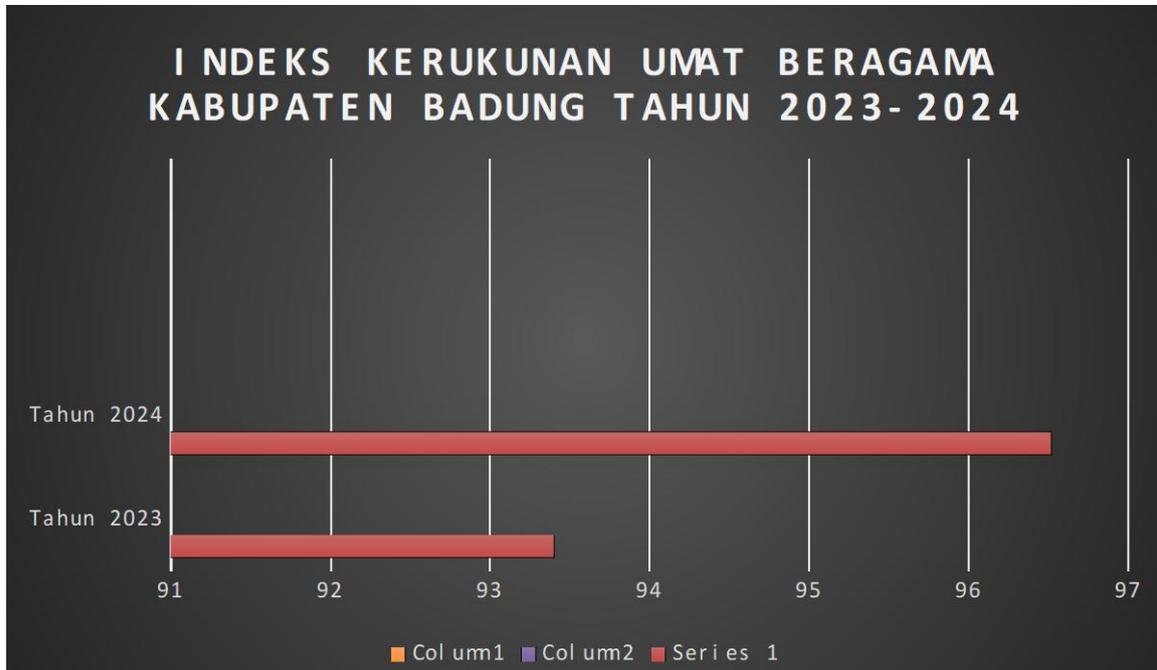


- a) Sangat Tinggi : > 80
- b) Tinggi : 60-80
- c) Sedang : 60-40
- d) Rendah : < 40

Sasaran meningkatnya toleransi hidup beragama dengan indikator Indeks Kerukunan Beragama pada tahun 2024 dari target 83 memiliki angka realisasi sebesar 96,52 dengan kategori sangat tinggi. Sasaran ini didukung 1 (satu) program. Program yang mendukung pencapaian target sasaran ini adalah Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi Sosial dan Budaya dengan pagu anggaran yang dialokasikan pada tahun 2024 sebesar Rp. 65,961,954,460,- dan terealisasi Rp. 41,962,593,394,- dengan serapan anggaran 63,62%

Sebagai perbandingan hasil pengukuran capaian kinerja sasaran meningkatnya toleransi hidup beragama dengan indikator Indeks Kerukunan Umat Beragama tahun 2023 dari target 82 memiliki angka realisasi sebesar 93,4 dengan kategori sangat tinggi. Data tersebut menunjukkan bahwa Nilai Indeks Kerukunan Umat Beragama di Kabupaten Badung setiap tahunnya mengalami peningkatan. Sebagai perbandingan dengan daerah lain yaitu Indeks Kerukunan Umat Beragama di Kabupaten Malinau Provinsi Kalimantan Utara pada tahun 2024 sebesar 80,18 dan Indeks Kerukunan Umat Beragama tingkat Nasional tahun 2024 sebesar 76,47. Hal ini menunjukkan bahwa capaian di kabupaten Badung jauh lebih tinggi dibandingkan Kabupaten Malinau dan Indeks tingkat Nasional. Dengan target dan capaian tahun 2024 Indeks Kerukunan Umat Beragama Kabupaten Badung termasuk kategori sangat tinggi (nilai >80).

Gambar 3.1
Perbandingan Indeks Kerukunan Umat Beragama Kabupaten Badung
Tahun 2023-2024



Sumber data : Badan Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Badung

Terciptanya kerukunan umat beragama yang tinggi di Kabupaten Badung tidak terlepas dari tingginya tingkat kesadaran masyarakat terhadap keberagaman. Adanya rasa saling menghargai antar sesama umat beragama, peran serta tokoh agama dalam memberikan pemahaman bagi umatnya, serta tingginya sinergitas tokoh adat dan tokoh masyarakat antar agama yang menciptakan suatu kerukunan umat beragama. Beberapa faktor pendorong yang mempengaruhi indeks kerukunan umat beragama dengan kategori nilai sangat tinggi di Kabupaten Badung meliputi :

- 1) Kesadaran terhadap konstitusi empat pilar pokok yang sudah disepakati bersama oleh seluruh rakyat Indonesia sebagai nilai-nilai perekat bangsa, yaitu Pancasila, UUD 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Bhinneka Tunggal Ika. Keempat nilai tersebut merupakan kristalisasi nilai-nilai yang digali dari budaya asli bangsa Indonesia. Kerukunan dan keharmonisan hidup seluruh masyarakat akan senantiasa terpelihara dan terjamin selama nilai-nilai tersebut

dipegang teguh secara konsekwen oleh semua lapisan masyarakat dalam keberagaman hidup beragama.

- 2) Peran tokoh agama, tokoh adat, tokoh masyarakat dan Pemerintah Kabupaten Badung senantiasa membangun sinergisitas agar terbangun keharmonisan yang baik di lingkungan desa dan kelurahan sehingga tercipta tri kerukunan umat beragama yaitu kerukunan intern umat beragama, kerukunan antar umat beragama, dan kerukunan antara umat beragama dengan pemerintah
- 3) Peran tokoh agama sebagai *opinion leader* terhadap umatnya sudah berjalan dengan baik sehingga kerawanan konflik yang akan muncul sangat rendah dan bahkan belum pernah muncul konflik tersebut.
- 4) Pemerintah Kabupaten Badung mempunyai kebijakan yang mengayomi seluruh agama dan aliran kepercayaan yang ada dengan membangun komunikasi dan kerukunan lintas agama dengan mengedepankan aspek-aspek persamaan bukan menggali perbedaan-perbedaan yang memang sudah pasti ada.
- 5) Berdasarkan aspek idiologis, historis serta sosiologis masyarakat Kabupaten Badung memiliki latar belakang pendidikan, wawasan dan pemahaman, serta tingkat intelektual yang baik menjadi nilai kekuatan pada aspek toleransi masyarakat Kabupaten Badung khususnya pada daerah yang heterogenitasnya tinggi.

Walaupun indeks kerukunan umat beragama di Kabupaten Badung termasuk kategori sangat tinggi namun ada beberapa faktor penghambat atau tantangan kedepan yang mempengaruhi kerukunan umat beragama di Kabupaten Badung antara lain :

1. Adanya kecenderungan umat beragama lebih eksklusif atau bersifat radikal dan intoleran dan pandangan subyektif dalam memandang kebenaran agama lain.
2. Munculnya sikap militan yang sangat berlebihan dalam kehidupan beragama.
3. Kondisi sosial budaya masyarakat yang membawa umat mudah melakukan otak-atik terhadap apa yang ia terima, sehingga kerukunan

dapat tercipta tetapi agama itu kehilangan arti, fungsi maupun maknanya.

4. Makin bergesernya pola hidup berdasarkan kekeluargaan atau gotong royong ke arah kehidupan individualistis.

Strategi yang akan dilakukan untuk lebih meningkatkan kerukunan umat beragama yaitu Pemerintah Kabupaten Badung akan meningkatkan perannya dalam tri kerukunan umat beragama di Kabupaten Badung yaitu kerukunan intern umat beragama, kerukunan antar umat beragama, serta kerukunan antara umat beragama dengan pemerintah.

Upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk meningkatkan kerukunan umat beragama meliputi :

- 1) Meningkatkan peran dan sinergitas FKUB, tokoh adat, tokoh agama, serta tokoh masyarakat guna meminimalisir konflik yang dipicu oleh sentimen keagamaan, baik itu yang bersifat *in-group* ataupun *out-group*.
- 2) Pemerintah Kabupaten Badung berperan lebih banyak dan lebih substantif dalam hal regulasi kehidupan umat beragama, memenuhi jaminan hak beragama, serta dalam hal penciptaan situasi toleransi yang kondusif seperti melalui penguatan pendidikan multikultural dari tingkat Kabupaten sampai ke Desa dan Kelurahan.
- 3) Membangun dan mengembangkan kegiatan lintas agama antar generasi muda dan masyarakat umumnya lintas agama sehingga akan tumbuh pemahanan ajaran agama secara komprehensif menjadikan interaksi sosial yang lebih akrab antar pemuda lintas agama dan masyarakat
- 4) Memperhatikan semua aspek, seperti aspek sosiologis, psikologis, budaya dan mayoritas pemeluk agama dalam memberikan bantuan sarana-prasana maupun dana sehingga tidak terjadi kecemburuan sosial pada masyarakat yang dapat memicu kerentanan hubungan antar umat beragama.
- 5) Memperkuat dasar-dasar tri kerukunan beragama antara lain: kerukunan internal umat beragama, antar umat beragama serta antar umat beragama dengan pemerintah.

- 6) Membangun harmoni sosial dan persatuan nasional dalam bentuk upaya mendorong dan mengarahkan seluruh umat beragama untuk hidup rukun dalam bingkai teologi dan implementasi dalam menciptakan kebersamaan dan sikap toleransi.
- 7) Menciptakan suasana kehidupan beragama yang kondusif yang mendukung pembinaan kerukunan hidup intern dan antar umat beragama.
- 8) Melakukan pendalaman nilai-nilai spiritual yang implementif bagi kemanusiaan yang mengarah kepada nilai-nilai ketuhanan agar tidak terjadi penyimpangan-penyimpangan nilai sosial kemasyarakatan maupun sosial keagamaan.
- 9) Meningkatkan pemahaman umat beragama untuk menyadari bahwa perbedaan adalah suatu realita dalam kehidupan bermasyarakat.

Pelaksanaan Survey dilaksanakan Badan Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Badung bekerjasama dengan Universitas Hindu Indonesia dengan hasil laporan yang ditandatangani tanggal 1 November 2024. Berikut beberapa foto tahapan pelaksanaan survey Kerukunan Umat Beragama di Kabupaten Badung.



Plt. Kepala Badan Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Badung didampingi kordinator tim perumus dan tim pelaksana dari universitas hindu indonesia Denpasar membuka dan memimpin rapat laporan antara pada kegiatan penelitian dan pengembangan partisipasi masyarakat berupa survey indeks kerukunan umat beragama kabupaten badung tahun 2024 pada tanggal 6 agustus 2024 yang diselenggarakan di ruang rapat kantor badan riset dan inovasi daerah Kabupaten Badung.



Prof. Dr. Ida Bagus Raka Suardana, S.E., M.M. selaku Tim Perumus Dan Evaluasi Kebijakan Riset Dan Inovasi Daerah Pemerintah Kabupaten Badung Memberikan Masukan Dalam Survei Kerukunan Umat Beragama Khususnya Di Kecamatan Kuta Dalam Menentukan Sampel Apakah Sampelnya Diacak Atau Ditunjuk Langsung Agar Dijelaskan Pada Laporan.



Kepala Badan Riset Dan Inovasi Daerah Kabupaten Badung Didampingi Kepala Lppm Universitas Hindu Indonesia Denpasar Serta Kepala Bidang Sosial Pemerintahan Pada Badan Riset Dan Inovasi Daerah Memberikan Sambutan Beserta Arahan Dalam Rapat Pembahasan Laporan Akhir Kegiatan Penelitian Dan Pengembangan Bidang Sosial Dan Kependudukan Pada Sub Kegiatan Penelitian Dan Pengembangan Partisipasi Masyarakat Tahun 2024.



Pelaksanaan Pengumpulan data lapangan Survey penyusunan indeks Kerukunan Umat Beragama di Kecamatan Kuta

**Analisis Kinerja Sasaran 2 :
Meningkatnya Birokrasi Yang Bersih dan Akuntabel**

Pemerintah Kabupaten Badung mempunyai komitmen yang tinggi untuk mewujudkan pemerintahan yang bersih, transparan dan akuntabel, hal ini terlihat dalam RPJMD 2021-2026 dengan perumusan sasaran strategis Meningkatkan Birokrasi Yang Bersih dan Akuntabel.

Indikator 1 : Nilai SAKIP

Akuntabilitas kinerja instansi pemerintah merupakan perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggung jawabkan keberhasilan/kegagalan pelaksanaan program dan kegiatan yang telah di amanatkan para pemangku kepentingan dalam rangka mencapai misi organisasi secara terukur dengan sasaran/target kinerja yang telah ditetapkan melalui laporan kinerja instansi pemerintah yang disusun secara periodik. Dengan demikian maka setiap instansi pemerintah wajib menyelenggarakan akuntabilitas kinerja atau dengan kata lainnya bahwa setiap instansi pemerintah wajib melaporkan hasil dari setiap anggaran yang dipergunakan serta faktor keberhasilan dan kegagalan yang dihadapi.

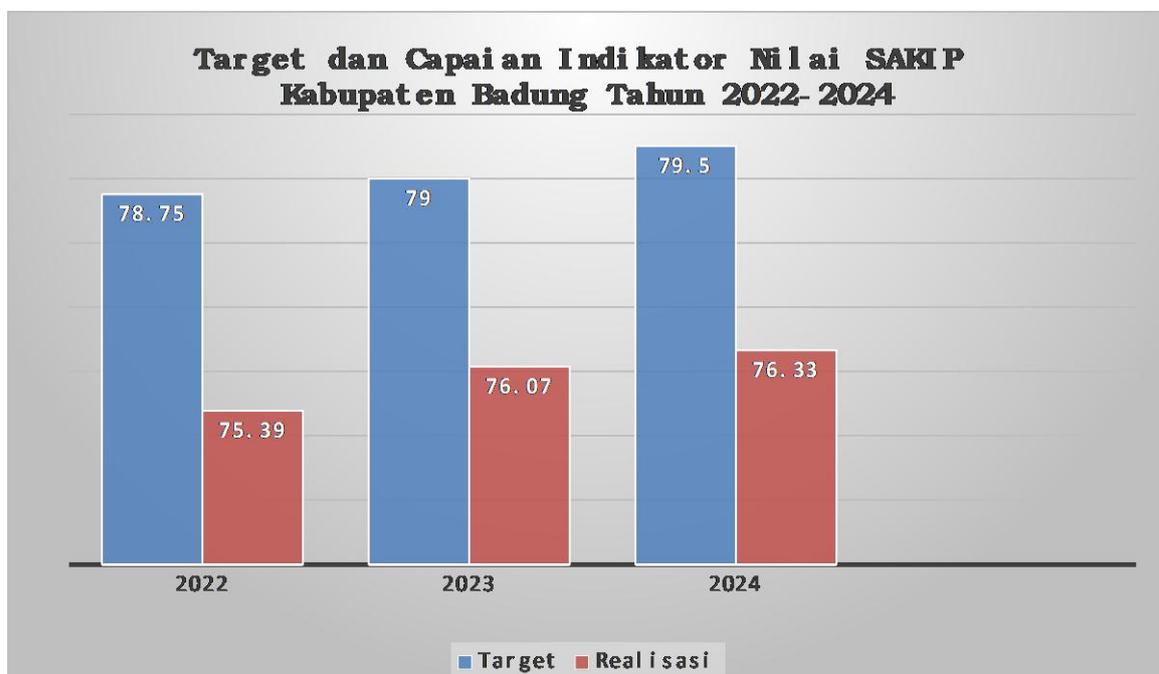
Hasil capaian sasaran meningkatnya birokrasi yang kapabel dengan indikator Nilai SAKIP tahun 2024 telah diterbitkan oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI yang tertuang dalam Laporan Hasil Evaluasi (LHE) pada tanggal 3 September 2024, untuk Kabupaten Badung mendapatkan nilai sebesar 76,33 dengan predikat “BB” dari target yang ditetapkan sebesar 79,50 dengan predikat “BB” sehingga hasil capaian kinerja menjadi 96% namun belum mencapai target. Jika dibandingkan dengan capaian kinerja salah satu Kabupaten lainnya di Provinsi Bali yaitu Kabupaten Buleleng, memperoleh nilai SAKIP sebesar 69,5 dengan kategori “B”. Dan jika dibandingkan dengan nilai rata-rata SAKIP

Pemerintah Kabupaten/Kota Tahun 2024 berdasarkan data dari website Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI sebesar 64,23 dengan jumlah yang dievaluasi yaitu 505 Kabupaten/Kota. Hal ini tidak membuat Kabupaten Badung untuk berhenti melakukan upaya-upaya perbaikan demi implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja yang lebih baik.

Sebagai bahan perbandingan dapat diinformasikan bahwa hasil capaian indikator nilai akuntabilitas kinerja Kabupaten Badung untuk tahun 2022 sebesar 75,39 dengan predikat “BB”. Pada tahun 2023 terjadi peningkatan nilai sebesar 0,68 menjadi 76,07 dan tahun 2024 mengalami peningkatan walaupun tidak signifikan menjadi 76,33 masih di kategori yang sama yaitu “BB”.

Secara lengkap target dan hasil capaian indikator nilai SAKIP pemerintah Kabupaten Badung tahun 2022-2024 seperti gambar berikut :

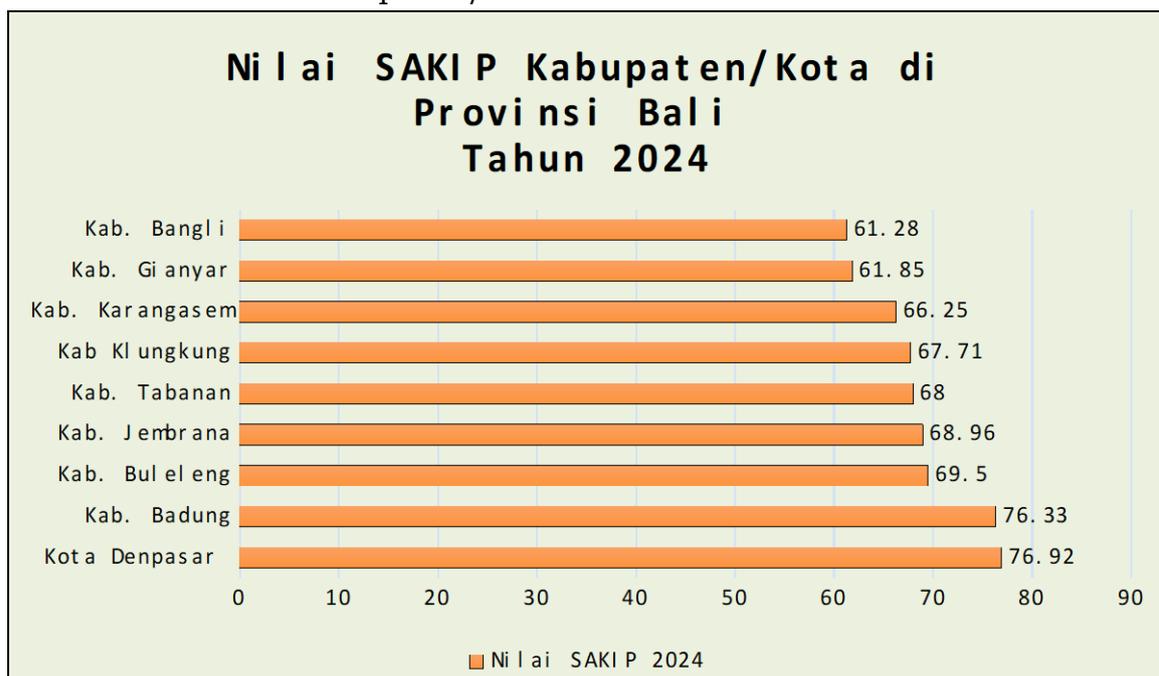
Gambar 3.2
Target dan Capaian Indikator Nilai SAKIP Kabupaten Badung
Tahun 2022-2024



Sumber data : Bagian Organisasi Setda Kabupaten Badung

Hasil capaian nilai SAKIP Kabupaten Badung dibandingkan dengan Kabupaten/Kota di Bali tahun 2024 menunjukkan nilai SAKIP Kabupaten Badung ada di peringkat ke-dua setelah Kota Denpasar. Perbandingan nilai SAKIP Kabupaten/Kota di Provinsi Bali tahun 2024 dapat dilihat seperti grafik berikut :

Gambar 3.3
Nilai SAKIP Kabupaten/Kota di Provinsi Bali Tahun 2024



Sumber data : Biro Organisasi Provinsi Bali

Pada tahun 2024 evaluasi dilaksanakan dengan berpedoman pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, dimana evaluasi menggunakan 4 komponen yang terdiri dari Komponen Perencanaan Kinerja, Pengukuran Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal, dimana pada masing-masing komponen memiliki bobot sebagai berikut :

Gambar 3.4
Bobot Pada Setiap Komponen Penilaian Akuntabilitas Kinerja Tahun 2024



Sumber data : Kementerian PAN &RB

Upaya untuk mewujudkan sasaran meningkatnya birokrasi yang bersih dan akuntabel dengan indikator pertama yaitu Nilai SAKIP didukung oleh 5 program. Program pendukung meliputi: Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota, Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah, Program Penyelenggaraan Pengawasan, dan Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asisten. Pagu anggaran yang dialokasikan untuk pencapaian sasaran strategis meningkatnya birokrasi yang bersih dan akuntabel dengan indikator pertama yaitu Nilai SAKIP sebesar Rp. 13.171.710.305,- dengan realisasi sebesar Rp. 4.948.321.858,- dengan serapan anggaran sebesar 37%.

Berbagai upaya dilakukan untuk mengimplementasikan SAKIP menjadi budaya kinerja melalui peningkatan kualitas perencanaan kinerja, pengukuran, pelaporan serta evaluasi kinerja serta secara bertahap mengubah mindset ASN agar lebih berorientasi kinerja melalui upaya penyelarasan program dan kegiatan agar sesuai dengan sasaran RPJMD. Melalui penerapan Pohon Kinerja dan *refocusing program* mampu mencegah *inefisiensi* anggaran dan kini telah dirasakan manfaatnya dengan adanya perubahan *mindset* dalam perencanaan dan penganggaran serta adanya efisiensi anggaran. Dengan adanya efisiensi program/kegiatan akan berdampak terhadap efisiensi anggaran.

Faktor pendorong terhadap pencapaian sasaran meningkatnya birokrasi yang bersih dan akuntabel dengan indikator pertama yaitu Nilai SAKIP antara lain: Adanya komitmen Pimpinan kepala daerah untuk meningkatkan SAKIP, Telah terbentuknya Sistem berbasis elektronik (aplikasi e-SAKIP Badung) yang digunakan dalam perencanaan, pengukuran dan pelaporan kinerja, Dukungan anggaran untuk implementasi kegiatan.

Faktor yang masih menjadi penghambat dalam implementasi SAKIP antara lain: komitmen beberapa pimpinan OPD masih belum optimal dimana implementasi SAKIP masih bersifat administratif (dokumen SAKIP), perubahan regulasi pada perencanaan dan keuangan seperti terbitnya permendagri 90 tahun 2019 dan pemberlakuan Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD) sehingga terjadinya ketidakselarasan dokumen, implementasi pohon kinerja kedalam dokumen anggaran belum dapat dilakukan, evaluasi internal kinerja oleh OPD belum optimal, belum optimalnya tindak lanjut OPD terhadap rekomendasi hasil evaluasi SAKIP, dan belum optimalnya kompetensi SDM tentang SAKIP.

Strategi dan upaya untuk lebih meningkatkan nilai SAKIP antara lain: revisi pedoman pelaksanaan SAKIP di Kabupaten Badung melalui penyusunan peraturan bupati tentang implementasi SAKIP, dibentuknya Tim Penguatan SAKIP dan Evaluasi Internal Kabupaten Badung, pembinaan/bimtek SAKIP kepada kepala perangkat daerah/pejabat yang membidangi SAKIP, pelaksanaan evaluasi internal capaian kinerja masing-masing perangkat daerah lebih ditingkatkan, mengintegrasikan aplikasi e-SAKIP Badung hingga penilaian level individu dan dimanfaatkan dengan baik untuk implementasi SAKIP dan pemberian *Reward dan punishment* bagi perangkat daerah.

Berikut beberapa foto dokumentasi dalam pelaksanaan Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Kabupaten Badung. *huruf Italic*



Deft Evaluation Akuntabilitas Kinerja Kabupaten Badung oleh Kementerian PAN dan RB pada bulan Juni Tahun 2024



Rapat Tim Penguatan dan Evaluasi Internal SAKIP Kabupaten Badung membahas Matriks Rencana Tindaklanjut atas Rekomendasi dan Persipan pelaksanaan evaluasi SAKIP Perangkat Daerah



Pendampingan SAKIP oleh Biro Organisasi Provinsi Bali terkait Monitoring Tindak lanjut dan penyusunan dokumen SAKIP di Kabupaten Badung



Desk evaluasi data indikator kinerja utama dengan Perangkat Daerah pengampu dalam rangka penyusunan dokumen LKjIP Tahun 2024

Indikator 2 : Opini BPK (belum rilis)

Opinii Badan Pemeriksa Keuangan (Opini BPK) merupakan pernyataan profesional pemeriksa mengenai kewajaran informasi keuangan yang disajikan dalam laporan keuangan yang didasarkan pada empat kriteria yakni kesesuaian dengan standar akuntansi pemerintahan, kecukupan pengungkapan (*adequate disclosures*), kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, dan efektivitas sistem pengendalian intern.

Tujuan pemeriksaan atas laporan keuangan adalah untuk memberikan pendapat/opini atas kewajaran informasi keuangan yang disajikan dalam laporan keuangan. Menurut Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara, opini merupakan pernyataan profesional pemeriksa mengenai kewajaran informasi keuangan yang disajikan dalam laporan keuangan.

BPK dapat memberikan empat jenis opini, yaitu Wajar Tanpa Pengecualian (*WTP/unqualified Opinion*), Wajar Dengan Pengecualian (*WDP/Qualified Opinion*), Tidak Memberikan Pendapat (*TMP/Disclaimer Opinion*) dan Tidak Wajar (*TW/Adverse Opinion*).

1. **Opini WTP** diberikan dengan kriteria: sistem pengendalian internal memadai dan tidak ada salah saji yang material atas pos-pos laporan keuangan. Secara keseluruhan laporan keuangan telah menyajikan secara wajar sesuai dengan SAP.
2. **Opini WDP** diberikan dengan kriteria: sistem pengendalian internal memadai, namun terdapat salah saji yang material pada beberapa pos laporan keuangan. Laporan keuangan dengan opini WDP dapat diandalkan, tetapi pemilik kepentingan harus memperhatikan beberapa permasalahan yang diungkapkan auditor atas pos yang dikecualikan tersebut agar tidak mengalami kekeliruan dalam pengambilan keputusan.

3. **Opini TMP** diberikan apabila terdapat suatu nilai yang secara material tidak dapat diyakini auditor karena ada pembatasan lingkup pemeriksaan oleh manajemen sehingga auditor tidak cukup bukti dan atau sistem pengendalian intern yang sangat lemah. Dalam kondisi demikian auditor tidak dapat menilai kewajaran laporan keuangan. Misalnya, auditor tidak diperbolehkan meminta data-data terkait penjualan atau aktiva tetap, sehingga tidak dapat mengetahui berapa jumlah penjualan dan pengadaan aktiva tetapnya, serta apakah sudah dicatat dengan benar sesuai dengan SAP. Dalam hal ini auditor tidak bisa memberikan penilaian apakah laporan keuangan WTP, WDP, atau TW.
4. **Opini TW** diberikan jika sistem pengendalian internal tidak memadai dan terdapat salah saji pada banyak pos laporan keuangan yang material. Dengan demikian secara keseluruhan laporan keuangan tidak disajikan secara wajar sesuai dengan SAP.

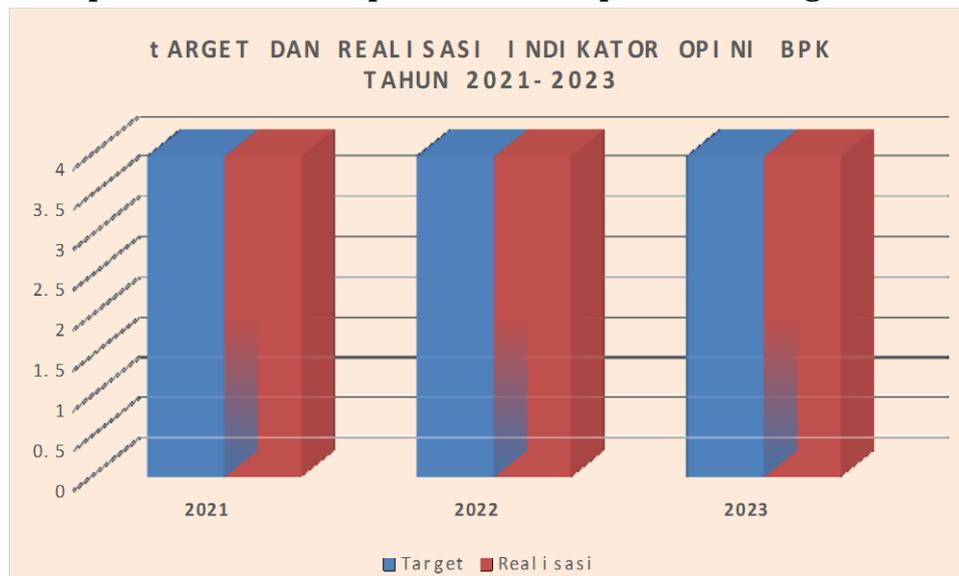
Kriteria pemberian opini, adalah: (a) kesesuaian dengan standar akuntansi pemerintahan; (b) kecukupan pengungkapan (*adequate disclosures*); (c) kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan; dan (d) efektivitas sistem pengendalian intern (SPI). Keempat jenis opini yang bisa diberikan oleh BPK tersebut dasar pertimbangan utamanya adalah kewajaran penyajian pos-pos laporan keuangan sesuai dengan SAP. Kewajaran disini bukan berarti kebenaran atas suatu transaksi. Opini atas laporan keuangan tidak mendasarkan kepada apakah pada entitas tertentu terdapat korupsi atau tidak.

Hasil capaian kinerja sasaran meningkatnya birokrasi yang bersih dan akuntabel dengan indikator ke-dua yaitu Opini BPK tahun 2024 belum tersedia karena sampai dengan penyusunan dokumen LKjIP Kabupaten Badung Tahun 2024 tanggal 11 Maret 2024, Badan Pemeriksa Keuangan masih melaksanakan entry di wilayah Pemerintah Kabupaten Badung. Sehingga data yang tersedia sampai dengan disusunnya dokumen LKjIP Kabupaten Badung merupakan Opini BPK tahun 2023, dimana Kabupaten Badung memperoleh predikat WTP atas pemeriksaan Laporan Keuangan

Pemerintah Daerah (LKPD) sehingga capaian kinerjanya sebesar 100%, berarti telah mencapai target yang ditetapkan. Target dan capaian indikator kinerja opini BPK dari tahun 2021 - 2023 seperti gambar berikut:

Gambar 3.5

Target dan Capaian Indikator Opini BPK Kabupaten Badung Tahun 2021-2023



Keterangan : 1. Tidak Wajar (TW/Adverse Opinion) 2. Tidak Memberikan Pendapat (TMT/Disclaimer Opinion) 3. Wajar Dengan Pengecualian (WDP/Qualified Opinion) 4.Wajar Tanpa Pengecualian (WTP/unqualified Opinion).

Sumber Data : Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah, 2023

Kabupaten Badung pada tahun 2021-2023 telah berhasil mempertahankan opini WTP sesuai dengan target yang ditetapkan. Opini Wajar Tanpa Pengecualian (biasa disingkat WTP) berarti opini audit terhadap laporan keuangan yang diterbitkan dianggap memberikan informasi yang bebas dari salah saji material. Laporan keuangan Pemerintah Kabupaten Badung oleh auditor meyakini berdasarkan bukti-bukti audit yang dikumpulkan, perusahaan/pemerintah dianggap telah menyelenggarakan prinsip akuntansi yang berlaku umum dengan baik, dan walaupun ada kesalahan, kesalahannya dianggap tidak material dan tidak berpengaruh signifikan terhadap pengambilan keputusan.

Gambar 3.6
Penghargaan Opini WTP Tahun 2023



Sumber data : Bagian Prokompim Kabupaten Badung

Upaya untuk mewujudkan sasaran meningkatnya birokrasi yang bersih dan akuntabel dengan indikator ke-dua yaitu Opini BPK didukung oleh 4 program. Program pendukung meliputi: Program Pengelolaan Keuangan Daerah, Program Pengelolaan Barang Milik Daerah, Program Perekonomian dan Pembangunan, Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota dan Program Penyelenggaraan Pengawasan. Pagu anggaran yang dialokasikan sebesar Rp. 2.638.906.486.392,- dengan realisasi sebesar Rp. 1.946.702.057.672,- dengan serapan anggaran sebesar 73,77%.

Faktor pendorong dalam pencapaian sasaran meningkatnya birokrasi yang bersih dan akuntabel dengan indikator ke-dua yaitu Opini BPK meliputi : komitmen yang kuat dari pimpinan daerah, telah memiliki kebijakan tentang risiko yaitu Peraturan Bupati Badung Nomor 35 Tahun 2022 tentang Pedoman Pengelolaan Risiko di Lingkungan Pemerintah Daerah, adanya pendampingan dan kerjasama dengan BPKP perwakilan Bali dan Kementerian Dalam Negeri, pembinaan dan rekonsiliasi dilakukan secara berkala dengan seluruh OPD baik akutansi pelaporan dan asset, pengembangan teknologi informasi dalam pengelolaan keuangan dan asset daerah, memberikan solusi yang tepat kepada Perangkat Daerah dalam menyelesaikan data-data pendukung Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) misalnya persediaan, piutang pajak dan asset.

Faktor penghambat dalam pencapaian sasaran meningkatnya birokrasi yang bersih dan akuntabel dengan indikator ke-dua yaitu Opini BPK meliputi : masih adanya temuan dalam pengelolaan keuangan dan asset daerah, keterlambatan akumulasi data asset sehingga terjadinya keterlambatan penyusunan LKPD (Laporan Keuangan Pemerintah Daerah), belum optimalnya pengelolaan keuangan daerah dengan menggunakan SIMDA NG dan belum terintegrasinya sepenuhnya Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan dengan SIMDA BMD.

Upaya-upaya yang telah dilakukan untuk pencapaian sasaran strategis ini dengan indikator opini BPK terhadap laporan keuangan daerah antara lain : Melakukan rekonsiliasi secara periodik dengan seluruh OPD, penerapan pengelolaan keuangan berdasarkan Standar Akutansi Pemerintah (SAP), prioritas transaksi keuangan secara non tunai, realisasi anggaran disesuaikan dengan anggaran kas, pembinaan tentang penatausahaan SIMDA NG dan pembinaan tentang akutansi pelaporan pada SIMDA NG.

Berikut foto-foto kegiatan pelaksanaan program yang mendukung pada indikator Opini BPK di Kabupaten Badung.



Pelaksanaan Rekonsiliasi
Laporan Realisasi
Anggaran Triwulan I Tgl
16 April 2024



Pelaksanaan Rekonsiliasi
Laporan Realisasi
Anggaran Triwulan III Tgl
7 Oktober 2024

Analisis Kinerja Sasaran 3 : Meningkatnya Birokrasi Yang Kapabel

Birokrasi pemerintah harus dikelola berdasarkan prinsip tata pemerintahan yang baik dan profesional. Pemerintah Kabupaten Badung mempunyai komitmen yang tinggi untuk mewujudkan Birokrasi yang sepenuhnya mengabdikan pada kepentingan rakyat dan bekerja untuk memberikan pelayanan prima, transparan, akuntabel, dan bebas dari praktek Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN). Semangat inilah yang mendasari perumusan sasaran strategis Meningkatkan Birokrasi Yang Kapabel dalam RPJMD Semesta Berencana Kabupaten Badung Tahun 2021-2026.

Indikator 1 : Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)

SPBE merupakan singkatan dari Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik, Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) adalah penyelenggaraan Pemerintahan yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk memberikan layanan kepada pengguna SPBE. Hal ini tertuang pada Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik. SPBE ditujukan untuk mewujudkan tata

kelola pemerintahan yang bersih, efektif, transparan, dan akuntabel serta pelayanan publik yang berkualitas dan terpercaya. Revolusi teknologi informasi dan komunikasi (TIK) memberikan peluang bagi pemerintah untuk melakukan inovasi pembangunan aparatur negara melalui penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) atau *E-Government*, yaitu penyelenggaraan pemerintahan yang memanfaatkan TIK untuk memberikan layanan kepada instansi pemerintah, aparatur sipil negara, pelaku bisnis, masyarakat dan pihak-pihak lainnya. SPBE memberi peluang untuk mendorong dan mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang terbuka, partisipatif, inovatif, dan akuntabel, meningkatkan kolaborasi antar instansi pemerintah dalam melaksanakan urusan dan tugas pemerintahan untuk mencapai tujuan bersama, meningkatkan kualitas dan jangkauan pelayanan publik kepada masyarakat luas, dan menekan tingkat penyalahgunaan kewenangan dalam bentuk kolusi, korupsi, dan nepotisme melalui penerapan sistem pengawasan dan pengaduan masyarakat berbasis elektronik. Sehingga dirumuskan Indeks SPBE sebagai salah satu indikator untuk mengukur keberhasilan Sasaran Mengingatnya Birokrasi Yang Kapabel.

Pada Tahun 2024 Pemerintah Kabupaten Badung memperoleh Indeks SPBE sebesar 3,87 dengan predikat “sangat baik” dari target 3,30 dengan predikat “baik” sehingga capaian kinerja sebesar 117%. Jika dibandingkan dengan tahun 2023 Pemerintah Kabupaten Badung memperoleh Indeks SPBE sebesar 3,66 dan pada tahun 2022 sebesar 2,48. Dengan demikian untuk indeks SPBE Kabupaten Badung mengalami tren peningkatan dan pada tahun 2024 mengalami peningkatan dengan jumlah 0,21 dan capaian kinerja juga melebihi target yang telah ditetapkan. Adapun perbandingan indeks SPBE Tahun 2021-2024 yang terus mengalami peningkatan seperti dalam gambar berikut :

Gambar 3.7

Perbandingan Indeks SPBE Kabupaten Badung Tahun 2021-2024

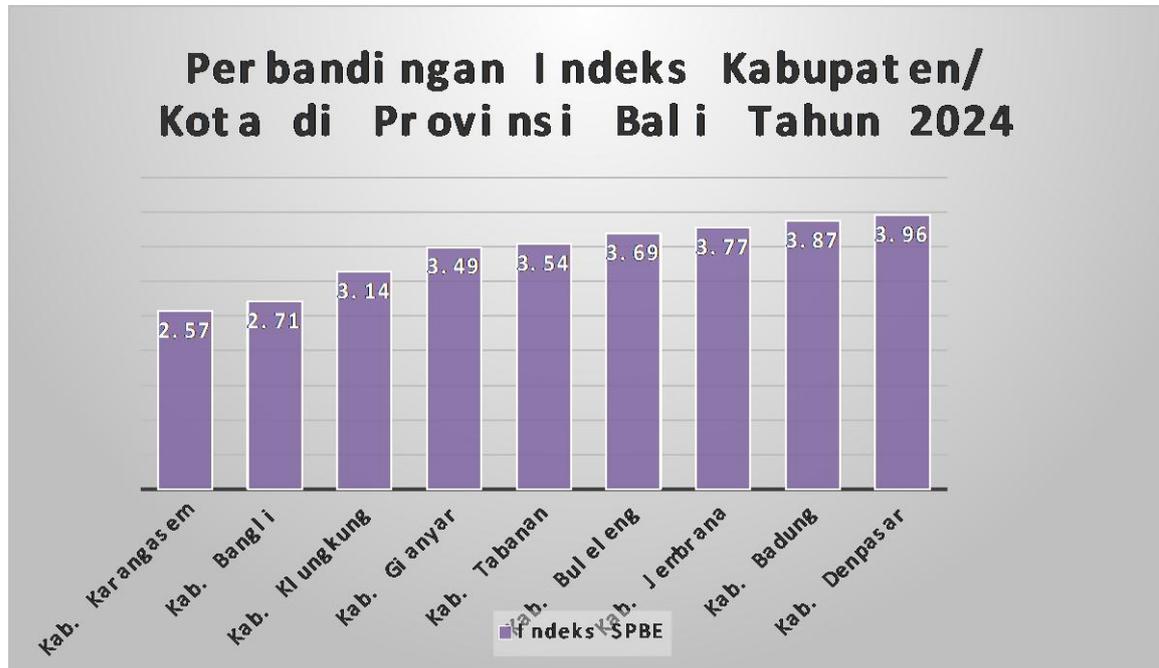


Sumber data : Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Badung

Sebagai perbandingan Indeks SPBE Nasional Tahun 2024 sebesar 3,12 dengan predikat baik. Evaluasi SPBE Tahun 2024 dilaksanakan terhadap 615 instansi pusat dan pemerintah daerah. Hasil tersebut tertuang dalam Keputusan Menteri PANRB No.663/2024 tentang Hasil Evaluasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Pada Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah Tahun 2024. Capaian tersebut telah melampaui Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020-2024 yaitu sebesar 2,60. Sedangkan dari data perbandingan Kabupaten/Kota di Provinsi Bali Indeks SPBE Kabupaten Badung menempati posisi kedua seperti terlihat pada gambar berikut :

Gambar 3.8

Perbandingan Indeks SPBE Kabupaten/Kota di Provinsi Bali Tahun 2024



Sumber data : Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Badung

Upaya untuk mewujudkan sasaran meningkatnya birokrasi yang kapabel dengan indikator ke-satu yaitu Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) pada tahun 2024 didukung oleh 8 program. Program pendukung meliputi: Program Informasi dan Komunikasi Publik, Program Aplikasi Informatika, Program Penyelenggaraan Statistik Sektor, Program Penyelenggaraan persandian Untuk Pengamanan Informasi, Program Perekonomian dan Pembangunan, Program Kepegawaian, Program Pengelolaan Arsip dan Program Urusan Penunjang Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota. Pagu anggaran yang dialokasikan sebesar Rp. 710.205.677.844,- dengan realisasi sebesar Rp. 473.653.079.865,- dengan serapan anggaran sebesar 66,69%.

Faktor pendorong dalam pencapaian sasaran meningkatnya birokrasi yang kapabel dengan indikator ke-satu yaitu Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) meliputi : komitmen yang kuat dari pimpinan daerah, telah diterapkan kebijakan tata kelola SPBE, reviu berkala sudah dilaksanakan pada pembangunan aplikasi SPBE, Layanan pusat data sudah dilakukan secara menyeluruh, tim koordinasi SPBE telah berjalan dengan baik

sesuai tugas dan fungsinya dan pemanfaatan Sumber Daya Manusia (SDM) yang tersedia dengan optimal sehingga mampu dalam penyelenggaraan SPBE yang terpadu sehingga nantinya dapat menghasilkan Layanan SPBE yang berkualitas, terintegrasi, berkesinambungan, dan mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi bagi Aparatur Sipil Negara, instansi pusat, pemerintah Daerah, serta bermanfaat bagi pelaku usaha dan masyarakat luas.

Faktor penghambat dalam pencapaian sasaran meningkatnya birokrasi yang kapabel dengan indikator ke-satu yaitu Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) meliputi : belum ada tindak lanjut pada aspek perencanaan strategis SPBE, penerapan manajemen SPBE sudah terlaksana namun belum maksimal dan reviu pelaksanaan audit belum optimal dikarenakan masih ada di level 3 (internal), jika bisa melibatkan pihak eksternal, ada kemungkinan untuk bisa naik ke level 4 (empat) atau 5 (lima).

Strategi yang telah dilakukan untuk pencapaian sasaran strategis ini dengan indikator Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) antara lain : Menyusun Arsitektur SPBE dan Peta Rencana SPBE, Melaksanakan Audit SPBE, menerapkan Kebijakan Tata Kelola SPBE dan menerapkan SPBE terutama pada Aspek Tata Kelola Internal dan Pemanfaatan Teknologi Informasi. Sedangkan upaya yang akan dilakukan yaitu Memperkuat Tata Kelola SPBE melalui Penyusunan Kebijakan Internal yang lebih terintegrasi dalam aspek interoperabilitas antar unit kerja untuk memastikan koordinasi yang efektif dan efisien, Meningkatkan kapabilitas Infrastruktur TIK dengan penerapan standar keamanan data yang lebih baik, Mengoptimalkan layanan Pusat Data melalui pengembangan SOP yang mendukung pengelolaan data secara efisien dan Menyusun Manajemen Resiko SPBE untuk mendorong terwujudnya penyelenggaraan SPBE di Kabupaten Badung yang efisien, efektif, transparan dan akuntabel. Berikut beberapa dokumentasi program kegiatan yang mendukung indikator SPBE.



Pembinaan data statistik sektoral oleh BPS Kab.Badung bersama Produsen data



Apel Bulanan Tim CSIRT (Computer Security Incident Response Team) bersama dengan BSSN

Indikator 2 : Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara (ASN)

Menurut UU No 5 Tahun 2014, penyelenggaraan kebijakan dan manajemen ASN berdasarkan pada asas salah satunya adalah profesionalitas. Sumber Daya Manusia (SDM) di lingkungan birokrasi harus dapat mengikuti perkembangan organisasi yang kompetitif dalam rangka mewujudkan Aparatur Negara yang profesional. Profesionalitas ASN merupakan kunci keberhasilan ASN dalam melaksanakan fungsinya sebagai pelaksana kebijakan publik, pelayan publik, serta perekat dan pemersatu bangsa. Untuk mengetahui tingkat profesionalitas ASN diperlukan pengukuran Indeks Profesionalitas ASN. Hal ini diatur dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 38 Tahun 2018 tentang Pengukuran Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara dan Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 8 Tahun 2019 tentang Pedoman Tata Cara dan

Pelaksanaan Pengukuran Indeks Profesionalitas ASN. Pengukuran indeks profesionalitas ASN akan menghasilkan peta atau potret tentang tingkat profesionalitas ASN dengan menggunakan kriteria tertentu sebagai standar profesionalitas ASN yaitu kesesuaian kualifikasi, kompetensi, tingkat kinerja, dan kedisiplinan pegawai ASN dalam melaksanakan tugas jabatannya. Pengukuran Indeks Profesionalitas ASN diharapkan mampu memotret tingkat profesionalitas ASN pada Instansi Pemerintah dan ASN itu sendiri serta sebagai dasar pemetaan pengembangan kompetensi ASN yang diharapkan mampu meningkatkan nilai Reformasi Birokrasi. Berikut contoh rumus penghitungan Indeks Profesionalitas ASN :

Gambar 3.9
Rumus Penghitungan Indeks Profesionalitas ASN

FORMULA

Rumus Pengukuran Indeks Profesionalitas ASN yaitu **jumlah total hasil perkalian dari bobot indikator dikalikan nilai masing-masing jawaban indikator**

$$IP = \sum_{i=1}^4 IP_i$$

$$= IP_1 + IP_2 + IP_3 + IP_4$$

$$IP_1 = W_{1j} * R_{1j}$$

$$IP_2 = W_{2k} * R_{2k}$$

$$IP_3 = W_{3l} * R_{3l}$$

$$IP_4 = W_{4m} * R_{4m}$$

SUMBER

1. Sistem Aplikasi Pelayanan Kepegawaian (SAPK)
2. Pendataan Ulang PNS (e-PUPNS)
3. Penilaian prestasi kerja PNS
4. Data hukuman disiplin pegawai

Sumber : Buku Saku IP ASN unggahan BKN

Gambar 3.10
Kategori Tingkat IP ASN

KATEGORI TINGKAT IP ASN	
Nilai	Tingkat Profesionalitas
91-100	Sangat Tinggi
81-90	Tinggi
71-80	Sedang
61-70	Rendah
≤ 60	Sangat Rendah

HASIL PENGUKURAN INDEKS PROFESIONALITAS ASN MENGGAMBARKAN

- Indeks Profesionalitas ASN Nasional
- Indeks Profesionalitas ASN Instansi Pusat dan Instansi Daerah
- Indeks Profesionalitas ASN kelompok jabatan

Sumber : Buku Saku IP ASN unggahan BKN

Pemerintah Kabupaten Badung pada tahun 2024 memperoleh Indeks Profesionalitas ASN sebesar 83,61 dengan kategori “tinggi” dari target yang ditetapkan yaitu 62,57 dengan kategori “rendah” , sehingga capaian kinerja pada tahun 2024 sebesar 134% melebihi target yang telah ditetapkan. Jika dibandingkan pada tahun 2023 memperoleh Indeks Profesionalitas ASN sebesar 74,84 dengan kategori “Sedang” dari target 57,65 dengan kategori “Sangat Rendah”. Sedangkan pada tahun 2022 memperoleh Indeks Profesionalitas ASN sebesar 65,87 dengan kategori “Rendah” dari target 52,7 dengan kategori “Sangat Rendah”. Hal tersebut menunjukkan bahwa pada tahun 2024 Indeks Profesionalitas ASN di Kabupaten Badung mengalami peningkatan sebesar 4%. Perbandingan indeks Profesionalitas ASN di Kabupaten Badung tahun 2022-2024 seperti gambar berikut :

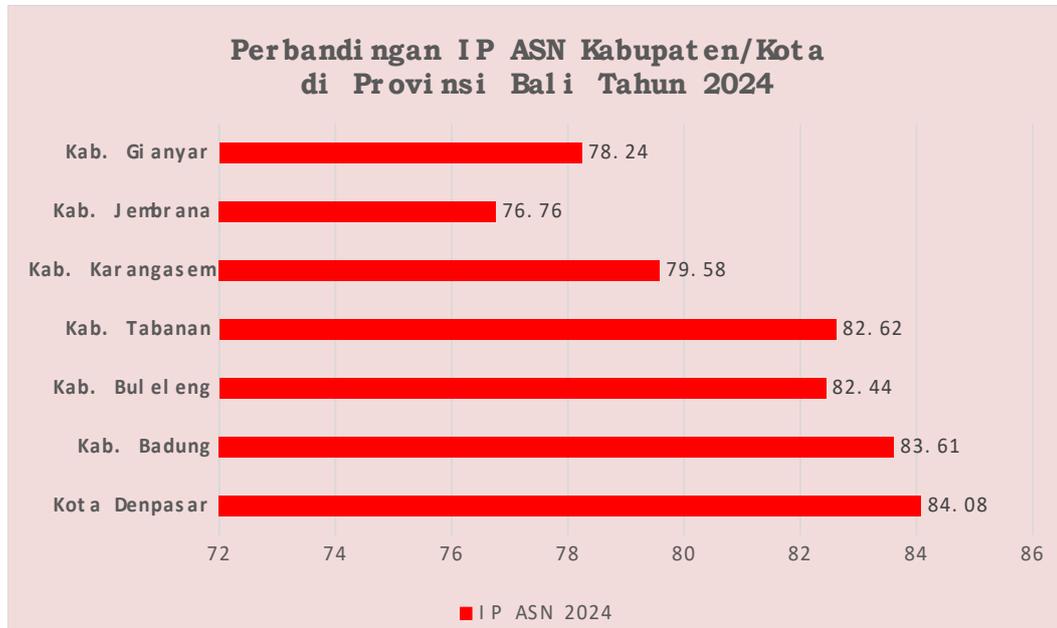
Gambar 3.11
Perbandingan Indeks Profesionalitas ASN di Kabupaten Badung
Tahun 2022 dan 2024



Sumber data : BKPSDM Kabupaten Badung

Sebagai perbandingan dengan kabupaten/kota di Provinsi Bali, Kabupaten Badung menempati posisi kedua setelah Kota Denpasar, dimana Kota Denpasar memperoleh Indeks Profesionalitas ASN sebesar 84,08. Sedangkan untuk Pemerintah Provinsi Bali memperoleh Indeks Profesionalitas ASN sebesar 89,82. Berikut gambar perbandingan Indeks Profesionalitas ASN Tahun 2024 Kabupaten/Kota di lingkungan Provinsi Bali

Gambar 3.12
Perbandingan IP ASN Kabupaten/Kota
di Provinsi Bali Tahun 2024



Sumber : BKPSDM Kabupaten Badung

Upaya untuk mewujudkan sasaran meningkatnya birokrasi yang kapabel dengan indikator Indeks Profesionalitas ASN didukung oleh 2 program. Program pendukung meliputi : Program Kepegawaian dan Program Pengembangan Sumber Daya Manusia. Pagu anggaran yang dialokasikan pada tahun 2024 sebesar Rp. 19.077.391.356,- dengan realisasi sebesar Rp. 9.585.315.275,- dengan serapan anggaran sebesar 50,24%.

Faktor pendorong dalam pencapaian sasaran meningkatnya birokrasi yang kapabel dengan indikator ke-dua yaitu Indeks Profesionalitas ASN meliputi : komitmen yang kuat dari pimpinan daerah, telah dilaksanakan kegiatan-kegiatan Sosialisasi yang melibatkan seluruh ASN di Kabupaten Badung baik secara online maupun offline, diselenggarakannya pelatihan-pelatihan baik teknis, fungsional dan manajerial dengan memberikani sertifikat pengembangan kompetensi diakhir kegiatan, seluruh operator SIMPEG OPD telah melaksanakan penginputan data dimensi IPASN dengan

baik atau sesuai dengan ketentuan serta dilaksanakannya rekonsiliasi data secara rutin serta penginputan ulang data kualifikasi dan kompetensi di SAPK.

Faktor penghambat dalam pencapaian sasaran meningkatnya birokrasi yang kapabel dengan indikator ke-dua yaitu Indeks Profesionalitas ASN meliputi : Informasi tentang Nilai Indeks Profesionalitas ASN Instansi sepenuhnya ada pada SIASN yang dikelola oleh Badan Kepegawaian Negara, sehingga terkendala ketika sistem pusat ada *maintanance* dan informasi hasil Pengukuran Indeks Profesionalitas ASN tidak ditemukan oleh Instansi serta masih kurangnya kesadaran ASN untuk menginput / mengupdate data kompetensi dan kinerja pada SIASN yang merupakan dimensi-dimensi pokok dalam pengukuran Indeks Profesionalitas ASN.

Upaya-upaya yang akan dilakukan untuk pencapaian sasaran strategis dengan indikator Indeks Profesionalitas ASN antara lain : melaksanakan sosialisasi dan rekonsiliasi data secara berkala , update data kompetensi dan kinerja ke SIASN dan Menginformasikan hasil Pengukuran IP ASN masing-masing Unit Organisasi dan masing-masing individu ASN.

Berikut beberapa foto kegiatan yang mendukung indikator Indeks Profesionalitas ASN di Kabupaten Badung.



Foto pelaksanaan workshop penghitungan indeks profesionalitas ASN



Foto Peserta Pelaksanaan Workshop penghitungan indeks profesionalitas ASN

**Analisis Kinerja Sasaran 4 :
Meningkatnya Pelayanan Publik Menuju Pelayanan Yang Prima
dan Berintegritas**

Pelayanan publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa, dan/atau pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik. Upaya untuk meningkatkan kualitas dan menjamin penyediaan pelayanan publik sesuai dengan asas-asas umum pemerintahan dan korporasi yang baik serta untuk memberi perlindungan bagi setiap warga negara dan penduduk dari penyalahgunaan wewenang di dalam penyelenggaraan pelayanan publik, maka diterbitkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang pelayanan publik. Salah satu evaluasi implementasi pelayanan publik terhadap penyelenggaraan pelayanan publik melalui Survei Kepuasan Masyarakat (SKM).

Indeks kepuasan masyarakat dihitung dari jumlah nilai rata-rata setiap unsur pelayanan. Sedangkan nilai indeks komposit (gabungan) untuk setiap unit pelayanan, merupakan jumlah nilai rata-rata dari setiap unsur pelayanan dikalikan dengan penimbang yang sama, yaitu 0,11 (untuk 9 unsur). Unsur Survei Kepuasan Masyarakat dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan

Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik ini meliputi: 1) persyaratan 2) Sistem, Mekanisme, dan Prosedur 3) Waktu Penyelesaian 4) Biaya/Tarif 5) Produk Spesifikasi jenis pelayanan 6) Kompetensi pelaksana 7) Perilaku pelaksana 8) Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan dan 9) Sarana dan Prasarana. Berdasarkan kesembilan unsur maka diperoleh nilai indeks kepuasan masyarakat seperti tabel berikut :

Tabel 3.2
Nilai Persepsi, Nilai Interval, Nilai Interval Konversi, Mutu Pelayanan dan Kinerja Unit Pelayanan

NILAI PERSEPSI	NILAI INTERVAL (NI)	NILAI INTERVAL KONVERSI (NIK)	MUTU PELAYANAN (x)	KINERJA UNIT PELAYANAN (y)
1	1,00 – 2,5996	25,00 – 64,99	D	Tidak Baik
2	2,60 – 3,064	65,00 – 76,60	C	Kurang Baik
3	3,0644 – 3,532	76,61 – 88,30	B	Baik
4	3,5324 – 4,00	88,31 – 100,00	A	Sangat Baik

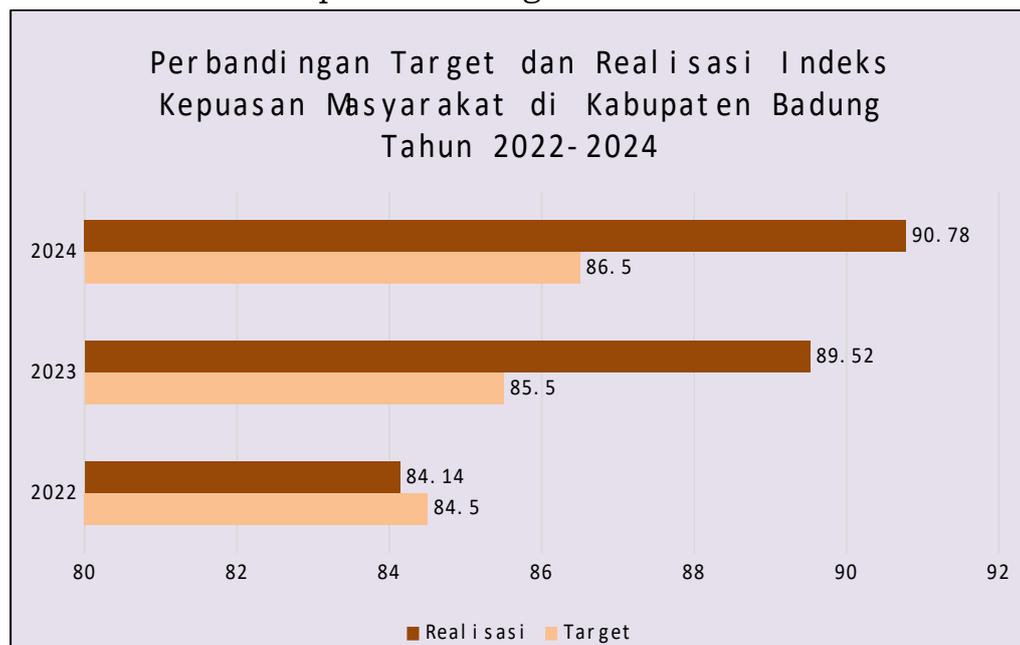
Sumber data : Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik

Sasaran meningkatnya pelayanan publik menuju pelayanan yang prima dan berintegritas dengan indikator indeks kepuasan masyarakat (IKM) diharapkan dapat mendorong seluruh pemangku kepentingan untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat agar masyarakat mendapatkan pelayanan sesuai standar yang cepat, mudah, murah, nyaman dan ramah sebagai wujud pelayanan prima.

Hasil pengukuran sasaran strategis meningkatnya pelayanan publik menuju pelayanan yang prima dan berintegritas dengan indikator indeks kepuasan masyarakat (IKM) tahun 2024 sebesar 90,78 dengan kategori “sangat baik” dari target 86,50 kategori “baik” sehingga capaian kinerja

menjadi 105% melebihi target. Dibandingkan dengan tahun 2023 sebesar 89,52 dari target 85,50. Sedangkan pada tahun 2022 indeks kepuasan masyarakat (IKM) sebesar 84,14 dari target yang ditetapkan 84,5. Hasil capaian Indeks kepuasan masyarakat sebesar 90,78 termasuk indeks kepuasan masyarakat kategori sangat baik (interval nilai 88,31 – 100). Hasil capaian indikator Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) tahun 2024 lebih tinggi 1,26 jika dibandingkan tahun 2023. Sebagai pembandingan lainnya terdapat Kota Madiun Provinsi Jawa Timur dengan indeks kepuasan masyarakat tahun 2024 sebesar 88,74. Perbandingan indeks kepuasan masyarakat di Kabupaten Badung tahun 2022-2024 seperti gambar berikut:

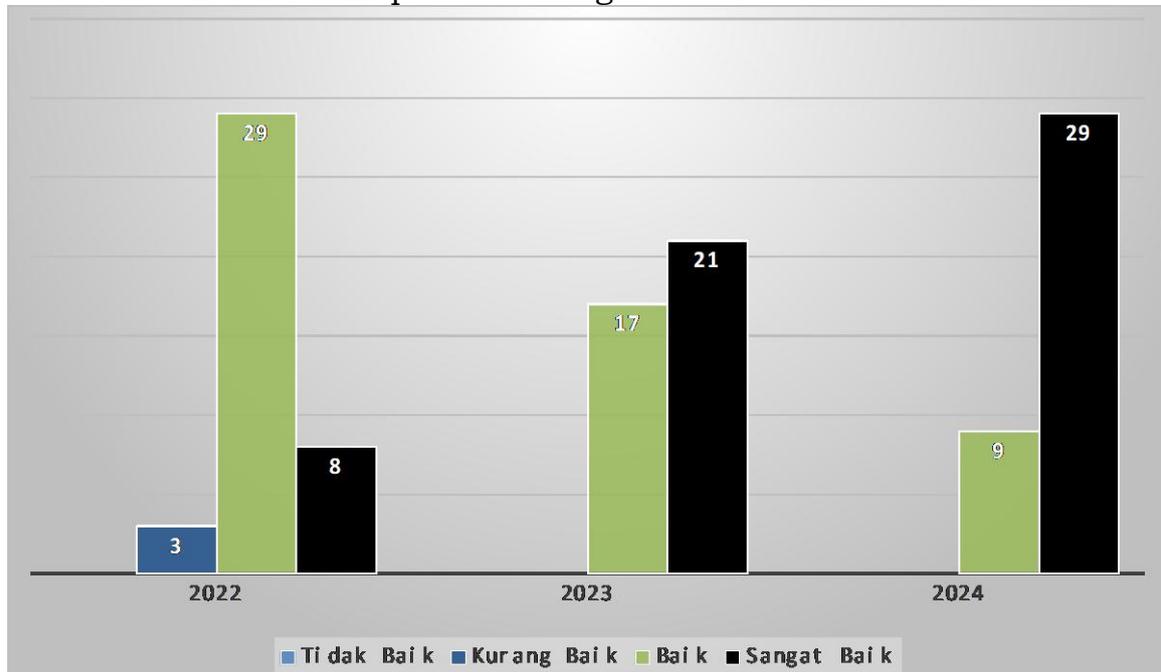
Gambar 3.13
Target dan Realisasi Indikator Indeks Kepuasan Masyarakat
di Kabupaten Badung Tahun 2022-2024



Sumber data : Badan Riset dan inovasi Daerah Tahun 2024

Indeks Kepuasan Masyarakat di Kabupaten Badung tahun 2024 berdasarkan perangkat daerah menunjukkan bahwa perangkat daerah lebih banyak termasuk Indeks Kepuasan Masyarakat kategori sangat baik dibandingkan tahun 2023. Ini menunjukkan bahwa pada tahun 2024 Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Perangkat Daerah mengalami peningkatan kearah yang lebih baik. Secara lengkap kategori indeks kepuasan masyarakat menurut perangkat daerah sebagai berikut:

Gambar 3.14
Kategori Perangkat Daerah Berdasarkan Indeks Kepuasan Masyarakat
di Kabupaten Badung Tahun 2022-2024



Sumber data : Badan Riset dan inovasi Daerah Tahun 2024

Penilaian pelayanan publik di Kabupaten Badung juga mendapat apresiasi dari Pemerintah Pusat. Beberapa penghargaan yang diraih oleh Pemerintah Kabupaten Badung antara lain sebagai berikut :

- Anugerah Layanan Investasi (ALI) Terbaik Tahun 2024
- Penghargaan Kategori Pelayanan Publik, Daya Saing Daerah dan Kinerja Total pada Aspek Fiskal Tinggi tingkat Kabupaten
- Sertifikat Kepatuhan tinggi dari Ombudsman dalam kegiatan penyampaian hasil penilaian kepatuhan standar pelayanan publik tahun 2024.

Berdasarkan survei kepuasan masyarakat yang dilakukan oleh Badan Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Badung diperoleh hasil indeks kepuasan masyarakat menurut perangkat daerah. Perangkat daerah dengan indeks kepuasan masyarakat paling tinggi dicapai oleh Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja sebesar 99,25. Secara lengkap nilai indeks kepuasan masyarakat menurut perangkat daerah seperti tabel berikut:

Tabel 3.3
Indeks Kepuasan Masyarakat Kabupaten Badung Tahun 2023-2024

No	Organisasi Perangkat Daerah (OPD)	Tahun 2023	Tahun 2024
1	Sekretariat Daerah	86,25	89,34
2	Inspektorat	85,22	91,18
3	Sekretariat DPRD	90,67	94,54
4	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	98,40	91,87
5	Badan Pendapatan Daerah	86,53	85,64
6	Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM	86,00	87,20
7	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	84,10	89,42
8	Badan Riset dan Inovasi Daerah	92,69	88,89
9	Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat	85,68	94,82
10	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	88,41	87,94
11	Dinas Pariwisata	95,66	88,01
12	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	83,38	88,35
13	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	88,89	96,33
14	Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan	82,55	97,67
15	Dinas Kebudayaan	98,75	97,21
16	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	94,03	94,86
17	Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja	94,64	99,25
18	Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perdagangan	84,15	91,78
19	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga	83,65	86,94
20	Dinas Pertanian dan Pangan	93,79	91,39
21	Dinas Komunikasi dan Informatika	88,74	85,46
22	Dinas Pengendalian Penduduk, KB, Pemberdayaan Perempuan & Perlindungan Anak	89,82	93,29
23	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	85,35	91,37
24	Dinas Kesehatan	86,42	89,77
25	Dinas Sosial	99,09	92,38



No	Organisasi Perangkat Daerah (OPD)	Tahun 2023	Tahun 2024
26	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	91,93	97,69
27	Dinas Perikanan	82,99	84,44
28	Dinas Perhubungan	90,43	88,54
29	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	86,91	86,65
30	Dinas Kebakaran dan Penyelamatan	89,44	89,90
31	Satuan Polisi Pamong Praja	93,58	89,31
32	RSUD Mangusada	94,42	91,69
33	Kecamatan Petang	83,79	87,32
34	Kecamatan Abiansemal	84,51	91,06
35	Kecamatan Mengwi	94,34	88,76
36	Kecamatan Kuta Utara	93,22	90,68
37	Kecamatan Kuta	87,74	88,51
38	Kecamatan Kuta Selatan	94,47	90,14

Sumber data : Badan Riset dan inovasi Daerah Tahun 2024

Program inovatif dalam pelayanan publik yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Badung secara nyata dilapangan mendapat apresiasi positif dari berbagai lapisan masyarakat. Melalui sasaran ini diharapkan mampu mendorong seluruh Perangkat Daerah untuk terus menumbuhkan dan mengembangkan berbagai program inovatif dalam pelayanan publik. Upaya yang dilakukan melalui pembinaan dan evaluasi bekerjasama dengan ORI dan akademisi Perguruan Tinggi dalam upaya meningkatkan kepatuhan terhadap UU 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik dan memperkuat kualitas SDM pelayanan publik. Hasil penilaian dari ombudsman Republik Indonesia (ORI) termasuk kategori kepatuhan tinggi (hijau).

Gambar 3.15
Piagam Penghargaan Predikat Kepatuhan Pelayanan Publik dari Ombudsman
Tahun 2024



Upaya untuk mewujudkan sasaran meningkatnya kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik didukung oleh 34 program. Program pendukung antara lain: Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat, Program Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan, Program Pengelolaan Tanah Kosong, Program Penyelesaian Ganti Kerugian dan Santunan Tanah Untuk Pembangunan, Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa, Program pemerintahan dan kesejahteraan rakyat, Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota, Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota, Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat, Program Penanggulangan Bencana, Program Kebakaran Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan, Program Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD, Program Pendaftaran Penduduk, Program Pencatatan Sipil, Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan, Program Pelayanan Penanaman Modal, Program Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal, Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ), Program Penataan Desa, Program Administrasi Pemerintahan Desa, Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat,

Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik dan Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum. Pagu anggaran yang dialokasikan sebesar Rp.1.287.256.105.689,- dengan realisasi sebesar Rp. 879.201.385.655,- dengan serapan anggaran sebesar 68,30%.

Faktor yang menjadi pendorong tercapainya indeks kepuasan masyarakat antara lain sebagai berikut :

- a. Komitmen pimpinan dalam pelayanan publik mampu mendorong perangkat daerah meningkatkan kualitas pelayanannya
- b. Tingkat kepatuhan perangkat daerah terhadap amanat Undang-Undang Nomor 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik ada dalam katagori Baik. Hampir sebagian besar perangkat daerah telah menyusun Standar Pelayanan sebagai tolok ukur kinerja pelayanan
- c. Dukungan sarana dan prasarana pelayanan publik termasuk jaringan layanan internet untuk memudahkan perangkat daerah memberikan pelayanan secara online.
- d. Pelaksanaan survei menggunakan aplikasi *google form*.

Faktor yang menjadi penghambat tercapainya indeks kepuasan masyarakat antara lain sebagai berikut :

- a. Sumber Daya Manusia di bidang pemeliharaan perangkat keras dan jaringan komputer yang mendukung sistem informasi perizinan online masih terbatas
- b. Sistem Informasi Manajemen / SIM belum seluruhnya terintegrasi dengan perangkat daerah terkait.

Upaya upaya yang dilakukan untuk meningkatkan indeks kepuasan masyarakat adalah :

- a. Melakukan sosialisasi kepada seluruh organisasi perangkat daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Badung terkait prosedur dan mekanisme pelaksanaan Survei Kepuasan Masyarakat
- b. Hasil Survey Kepuasan Masyarakat menunjukkan bahwa rata-rata tertinggi adalah pada unsur Biaya/Tarif (98.85) namun belum 100 persen. Oleh karena itu Perangkat Daerah yang melaksanakan



- pemberlakuan Biaya/Tarif layanan agar melakukan evaluasi dan pemutahiran (update) terhadap besaran Biaya/Tarif Pelayanan dan mensosialisasikannya kepada pengguna layanan secara berkala
- c. Hasil Survey Kepuasan Masyarakat menunjukkan bahwa rata-rata terendah adalah pada unsur Waktu Pelayanan (87.10), oleh karena itu Perangkat Daerah sebaiknya melakukan evaluasi standar waktu pelayanannya sehingga dapat memberikan pelayanan dengan waktu tunggu masyarakat (pengguna layanan) yang lebih singkat. Pelayanan secara online dilaksanakan untuk mengatasi faktor penghambat peniadaan layanan tatap muka. Pelayanan online memungkinkan masyarakat dapat memanfaatkan layanan pemerintah tanpa harus datang ke kantor pemerintahan
 - d. Meningkatkan survei kepuasan masyarakat pada seluruh perangkat daerah berbasis teknologi informasi sehingga lebih update dan dapat terukur secara teratur seperti *google form*.
 - e. Meningkatkan pembinaan kepada unit pelayanan publik.
 - f. Meningkatkan inovasi pelayanan publik sehingga lebih responsive, cepat, akurat dan berkeadilan
 - g. Meningkatkan kedisiplinan dan rasa tanggung jawab petugas melalui pemberian pelatihan *service excellent* (pelayanan prima), untuk meningkatkan keterampilan dan etos kerja atau motivasi petugas serta menetapkan standarisasi internal mengenai sikap layanan dan disiplin kerja.
 - h. Melakukan reviu Standar Operasional Prosedur (SOP) yang telah dibuat dan Standar Pelayanan Publik (SPP) dalam memberikan pelayanan serta menindaklanjuti dengan Maklumat Pelayanan sebagai bentuk janji/komitmen untuk memberikan pelayanan yang lebih baik dan berkualitas kepada pengguna layanan.
 - i. Membuat kebijakan pemberian *reward* kepada pengguna layanan apabila pelayanan diluar ketentuan/SOP/SP.
 - j. Meningkatkan kemudahan pelanggan dalam mengajukan keluhan melalui pembentukan Tim Kerja yang berfungsi menerima dan

memproses keluhan pelanggan serta menyediakan media yang mudah diakses oleh masyarakat pengguna layanan seperti memanfaatkan *website* resmi, telepon, *SMS center*, *Email*, dan atau penempatan Kotak Saran.

Berikut beberapa foto kegiatan pendukung pelaksanaan program dalam pemenuhan indikator Indeks Kepuasan Masyarakat.



Kepala Bagian Organisasi Sekretariat Daerah I Wayan Putra Yadnya, S.K.M, M.Si didampingi Kepala Bidang Social dan Pemerintahan serta Pejabat Fungsional Analisis Kebijakan pada Badan Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Badung memberikan arahan dalam rapat persiapan dan pembekalan bagi pengawas dan petugas Survei Kepuasan Masyarakat tanggal 30 April 2024 di Ruang Rapat Badan Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Badung



Pelayanan Publik yang dilaksanakan oleh Dinas Kebakaran dan Penyelamatan dalam memadamkan api



Pelayanan uji KIR yang dilaksanakan oleh Dinas Perhubungan Kabupaten Badung



Analisis Kinerja Sasaran 5 : Meningkatnya Kepatuhan Masyarakat Dalam Mentaati Perda dan Perkada

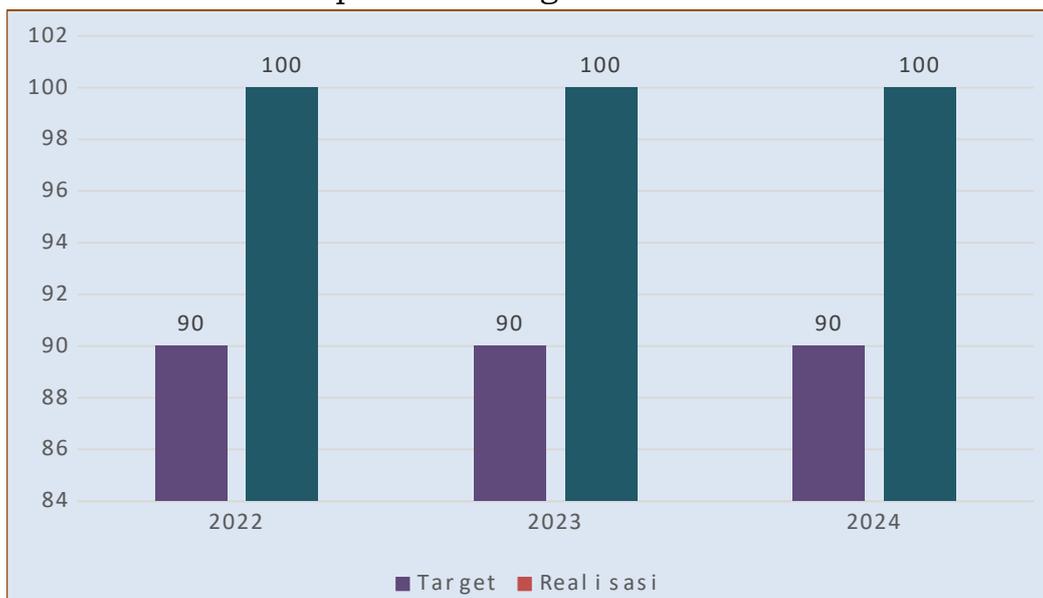
Sesuai visi RPJMD Semesta Berencana 2021-2026 Kabupaten Badung berkomitmen untuk mewujudkan kedamaian dalam masyarakat, artinya pemerintah menjamin masyarakat untuk merasa aman dan nyaman terhadap terjadinya berbagai pelanggaran terhadap Perda dan Perkada khususnya yang berkaitan dengan ketentraman dan ketertiban masyarakat serta kebersihan lingkungan. Komitmen tersebut tertuang dalam sasaran strategis RPJMD yaitu meningkatnya kepatuhan

masyarakat dalam mentaati Perda dan Perkada dengan indikator persentase penegakan perda dan perkada.

Hasil capaian sasaran strategis meningkatnya kepatuhan masyarakat dalam mentaati Perda dan Perkada dengan indikator persentase penegakan perda dan perkada tahun 2024 sebesar 100% dari target yang ditetapkan sebesar 90%, sehingga kinerjanya sebesar 111% berarti telah melampaui target RPJMD tahun 2024.

Hasil capaian indikator persentase penegakan perda dan perkada tahun 2024 sama dengan capaian pada tahun 2022 dan 2023. Gambaran target dan capaian indikator penegakan perda dan perkada tahun 2022-2024 seperti gambar berikut :

Gambar 3.16
Target dan Realisasi Indikator Persentase Penegakan Perda dan Perkada
di Kabupaten Badung Tahun 2022-2024



Sumber Data : Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Badung Tahun 2024

Sebagai pembandingan dengan daerah lainnya yaitu sebagai contoh Kabupaten Klaten Provinsi Jawa Tengah dengan capaian persentase penegakan perda dan perkada sebesar 100%. Angka ini menunjukkan antara Kabupaten Badung dan Kabupaten Klaten memiliki perolehan yang sama terhadap indikator tersebut.

Berdasarkan data yang ada selama tahun 2024 terdapat indikasi pelanggaran perda/perkada sebanyak 1.730 potensi pelanggaran. Dari 1.730

kasus potensi pelanggaran yang ada maka yang dapat dicegah sebanyak 1.730 atau sebesar 100%. Berbagai upaya pencegahan dilakukan terhadap indikasi pelanggaran melalui tindakan preventif serta menjaga ketentraman dan ketertiban umum. Secara lengkap jenis potensi pelanggaran yang dapat dicegah seperti tabel berikut:

Tabel 3.4
Jenis Potensi Pelanggaran yang dapat di Cegah Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Badung Tahun 2024

No	KECAMATAN	JENIS POTENSI PELANGGARAN								JML	Realisasi
		1	2	3	4	5	6	7	8		
1	Petang	0	0	0	0	0	0	12	0	12	
2	Abiansemal	1	0	1	0	0	0	189	0	191	
3	Mengwi	113	0	6	6	0	0	603	0	728	
4	Kuta Utara	191	0	2	0	0	4	499	0	696	
5	Kuta	0	0	0	0	0	0	73	0	73	
6	Kuta Selatan	11	0	0	0	0	0	19	0	30	
	Kabupaten	316	0	9	6	0	4	1395	0	1730	
NO	KECAMATAN	POTENSI PELANGGARAN DI CEGAH								JML	
1	Petang	0	0	0	0	0	0	12	0	12	100
2	Abiansemal	1	0	1	0	0	0	189	0	191	100
3	Mengwi	113	0	6	6	0	0	603	0	728	100
4	Kuta Utara	191	0	2	0	0	4	499	0	696	100
5	Kuta	0	0	0	0	0	0	73	0	73	100
6	Kuta Selatan	11	0	0	0	0	0	19	0	30	100
	Kabupaten	316	0	9	6	0	4	1395	0	1730	100

Keterangan : 1. IMB + Usaha tanpa ijin 2. Jalur Hijau 3. Reklame 4. Gepeng dan orang terlantar 5. Usaha Pariwisata 6. Pencemaran Lingkungan 7. Pelanggaran Trotoar 8. Pelanggaran Prokes



Distribusi jenis potensi pelanggaran yang paling banyak berupa potensi pelanggaran trotoar sebanyak 1.395 pelanggaran. Sedangkan berdasarkan kecamatan maka pelanggaran yang paling banyak di Kecamatan Mengwi dengan potensi pelanggaran sebanyak 728 pelanggaran.

Upaya untuk mewujudkan sasaran meningkatnya kepatuhan masyarakat dalam mentaati Perda dan Perkada didukung oleh 7 program. Program pendukung meliputi: Program Peningkatan Ketenteraman Dan Ketertiban Umum dan Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum yang diampu oleh masing-masing dari 6 jumlah Kecamatan di kabupaten Badung. Pagu anggaran yang dialokasikan sebesar Rp. 7.855.269.196,- dengan realisasi sebesar Rp. 6.534.019.923,- dengan serapan anggaran sebesar 83,18%.

Beberapa faktor pendorong dalam pencapaian indikator persentase penegakan perda dan perkada yaitu :

- a. Komunikasi dan strategi yang cukup baik antar lingkungan, desa/Kelurahan serta Dinas teknis terkait yang terlibat didalam pengaduan masyarakat
- b. Jalannya Sidak Tipiring harus selaras dengan Desa-desa atau Kelurahan sehingga mendapatkan hasil yang optimal
- c. Keterpaduan antar instansi terkait guna mewujudkan masyarakat Kabupaten Badung yang taat dan tertib dalam setiap tindakan
- d. Memberikan Hukuman yang sesuai dengan tingkat pelanggaran untuk memberi efek jera
- e. Sarana dan Prasarana kerja cukup bagus dan lengkap
- f. Loyalitas personil yang baik dengan adanya jaminan keselamatan kerja oleh Pemerintah Kabupaten Badung

Dengan capaian yang sudah melebihi target namun masih terdapat beberapa faktor penghambat dalam indikator persentase penegakan perda dan perkada tahun 2024 yaitu :

- a. Belum semua personil memiliki sertipikat Diklatsar Polisi Pamong Praja

- b. Kurangnya pemahaman terhadap perkembangan peraturan perundang – undangan
- c. Belum optimal ketaatan masyarakat terhadap perda dan perkada

Upaya – upaya yang dilakukan untuk pencapaian sasaran strategis ini melalui:

- a. Sinergitas semua perangkat Daerah, Instansi vertikal, Instansi Penegak Peraturan dalam pelaksanaan operasional di lapangan (Satpol PP)
- b. Secara bersama untuk menjaga Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat (Satpol PP)
- c. Sosialisasi tentang peraturan daerah atau peraturan kepala daerah
- d. Patroli keliling secara rutin
- e. Meningkatkan kemitraan dengan satuan keamanan lainnya
- f. Koordinasi dengan lintas sektor seperti Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu pintu, Dinas Pariwisata, Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan serta perangkat daerah lainnya.

Berikut beberapa dokumentasi yang mendukung dalam pelaksanaan program kegiatan dalam pencapaian sasaran strategis Meningkatkan Kepatuhan Masyarakat Dalam Mentaati Perda dan Perkada.



Penghargaan Karya
Bhakti Satuan Polisi
Pamong Praja Tingkat
Provinsi



Penghargaan Karya Bhakti Satuan Polisi Pamong Praja Tingkat Nasional



PEMERINTAH KABUPATEN BADUNG
KECAMATAN KUTA SELATAN



Kamis, 10 Oktober 2024

Melalui inovasi MADULANGSAT Trantib Kecamatan Kuta Selatan melaksanakan pengendalian lingkungan atas laporan masyarakat atas limbah rumah tangga di lingkungan anggaswara kelurahan jimbaran

Analisis Kinerja Sasaran 6 : Terwujudnya Pemenuhan HAM

Hak asasi manusia adalah hak dan kebebasan fundamental bagi semua orang, tanpa memandang kebangsaan, jenis kelamin, asal kebangsaan atau etnis, ras, agama, bahasa atau status lainnya. Hak asasi manusia mencakup hak sipil dan politik, seperti hak untuk hidup, kebebasan dan kebebasan berekspresi. Selain itu, ada juga hak sosial, budaya dan ekonomi, termasuk hak untuk berpartisipasi dalam kebudayaan, hak atas pangan, hak untuk

bekerja dan hak atas pendidikan. Berdasarkan hal tersebut maka dirumuskan sasaran strategis Terwujudnya Pemenuhan HAM pada RPJMD Semesta Berencana Kabupaten Badung Tahun 2021-2026 dengan indikator Capaian atas Kepedulian HAM.

Kriteria Kabupaten/Kota Peduli HAM didasarkan pada terpenuhinya:

- a. Hak Atas Kesehatan
- b. Hak Atas Pendidikan
- c. Hak Perempuan dan Anak
- d. Hak Atas Kependudukan
- e. Hak Atas Pekerjaan
- f. Hak Atas Perumahan Yang Layak
- g. Hak Atas Lingkungan Yang Berkelanjutan

Penilaian kriteria daerah kabupaten/kota Peduli HAM diukur berdasarkan indikator struktur, proses dan hasil capaian kinerja pemerintah daerah yang dilaporkan setiap tahunnya untuk memotivasi pemerintah daerah dan mengembangkan sinergitas satuan kerja perangkat daerah dalam upaya penghormatan, perlindungan, pemenuhan, penegakan, dan pemajuan HAM.

Dalam setiap pengisian data penilaian semua perangkat daerah yang terlibat selalu melakukan koordinasi dan komunikasi yang efektif sehingga data yang dibuat sesuai dengan format isian data. Selain pengisian data wajib juga menyertakan dokumen pendukung yang disahkan oleh Kepala Satuan Perangkat Daerah dan Sekretaris Daerah Kabupaten untuk selanjutnya diverifikasi oleh tim penilai dari Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Provinsi Bali dan selanjutnya dilaporkan ke tim verifikasi pusat untuk dinilai.

Koordinasi dengan kantor wilayah dalam verifikasi juga sangat mempengaruhi karena dalam setiap pengisian data jika ada data yang tidak sesuai maka kantor wilayah segera menginformasikan ke kabupaten untuk diperbaiki. Hal ini sangat membantu sehingga Kabupaten Badung dapat memenuhi capaian nilai dari target yang sudah dipasang.

Hasil indikator Capaian atas Kepedulian HAM tahun 2024 sebesar 87,80 dengan kategori Peduli HAM dari target yang ditetapkan sebesar 75,00 sehingga capaian kinerjanya sebesar 117%. Jika dibandingkan tahun 2023 capaian tahun 2024 mengalami penurunan sebesar 1,75 dimana capaian pada tahun 2023 sebesar 89,55 dari target 75,00 dengan capaian kinerja 119%. Sedangkan pada tahun 2022 capaian atas kepedulian HAM sebesar 80,5 dari target 75,00. Penurunan nilai tersebut diakibatkan oleh adanya ketidaksesuaian data dari Perangkat Daerah. Adapun perbandingan target dan realisasi capaian atas kepedulian HAM di Kabupaten Badung tahun 2022 dan 2024 seperti pada gambar berikut:

Gambar 3.17

Target dan Capaian Indikator Capaian Atas Kepedulian HAM di Kabupaten Badung Tahun 2022-2024



Sumber data : Bagian Hukum Setda Kabupaten Badung Tahun 2024

Penilaian HAM dilaksanakan oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, dengan rincian parameter penilaian seperti gambar berikut :

Gambar 3.18

Parameter Penilaian Capaian atas Kepedulian HAM di Kabupaten Badung

 KEMENTERIAN HAK ASASI MANUSIA
DIREKTORAT JENDERAL HAK ASASI MANUSIA
Jalan H.F. Rasuna Said Kav. 4-5 Kuningan, Jakarta Selatan 12940
Telepon (021) 2521344 Faksimile (021) 2525045
Laman : ham.go.id Surel : informasi@ham.go.id

HASIL PENILAIAN DAERAH KABUPATEN /KOTA PEDULI HAM
KABUPATEN BADUNG TAHUN 2023

NO	PARAMETER PENILAIAN	NILAI CAPAIAN
A	KELOMPOK HAK	
1	HAK ATAS BANTUAN HUKUM	80.00
2	HAK ATAS INFORMASI	85.00
3	HAK TURUT SERTA DALAM PEMERINTAHAN	90.00
4	HAK ATAS KEBERAGAMAN DAN PLURALISME	40.00
5	HAK ATAS KEPENDUDUKAN	90.00
6	HAK ATAS KESEHATAN	94.00
7	HAK ATAS PENDIDIKAN	79.00
8	HAK ATAS PEKERJAAN	75.00
9	HAK ATAS LINGKUNGAN YANG BAIK DAN SEHAT SERTA HAK ATAS PERUMAHAN YANG LAYAK	91.00
10	HAK PEREMPUAN DAN ANAK	84.00
	Rata-rata Nilai Sub Kelompok A	80.80
B	IMPLEMENTASI AKSI HAM 2023	
	Sub Total Nilai Kelompok B	7.00
C	PENGURANGAN NILAI	0.00
D	TOTAL NILAI	87.80
E	KRITERIA: PEDULI HAM	

05 Oktober 2024
Direktur Jenderal HAM

Dr. Dharma Putra
NIP. 1963091993031001

Sumber data : Bagian Hukum Setda Kabupaten Badung

Upaya untuk mewujudkan sasaran terwujudnya pemenuhan HAM didukung oleh 8 program. Program pendukung meliputi: Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat, Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan dan Makanan Minuman, Program Perlindungan Perempuan, Program Peningkatan Kualitas Keluarga, Program Pemenuhan Hak Anak, Program Pembinaan Dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan Dan Izin Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH), Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup dan Program Hubungan Industrial. Pagu anggaran yang dialokasikan sebesar Rp.11.344.125.014,- dengan realisasi sebesar Rp. 9.256.280.401,- dengan serapan anggaran sebesar 81,60%.

Beberapa faktor pendorong dalam pencapaian indikator Capaian atas kepedulian HAM yaitu : Adanya komitmen pimpinan dalam kepedulian HAM di Kabupaten Badung dan kesadaran seluruh elemen baik pemerintah dan masyarakat di Kabupaten Badung pada Hak Asasi Manusia. Beberapa faktor penghambat dalam pencapaian indikator Capaian atas kepedulian HAM yaitu : masih adanya segelintir elemen yang kurang paham dan peduli terhadap Hak Asasi Manusia

Upaya – upaya yang dilakukan untuk pencapaian sasaran strategis ini melalui: Sinergitas semua elemen pemerintah dan masyarakat dalam meningkatkan kepedulian HAM di wilayah Kabupaten Badung. Berikut beberapa dokumentasi kegiatan pelaksanaan program yang mendukung Capaian atas kepedulian HAM di Kabupaten Badung.

	Penyerahan Klaim Manfaat Jaminan Sosial Ketenagakerjaan bagi pekerja rentan secara simbolis
	Penyerahan sertifikat penghargaan Kabupaten Peduli HAM

**Analisis Kinerja Sasaran 7:
Meningkatnya Kreativitas Serta Pelestarian Seni dan Budaya**

Kebudayaan berasal dari bahasa sansekerta yaitu buddayah, yang merupakan bentuk jamak dari buddhi (budia atau akal). Bentuk lain dari kata budaya dalam bahasa inggris disebut *culture*. Budaya adalah suatu pola hidup menyeluruh. Budaya bersifat kompleks, abstrak dan luas. Unsur-unsur budaya seperti bahasa, sistem pengetahuan, sistem teknologi, dan peralatan, sistem kesenian, sistem mata pencarian hidup, sistem religi serta sistem kekerabatan dan organisasi kemasyarakatan.

Kabupaten Badung yang merupakan bagian dari Provinsi Bali memiliki kebudayaan yang adiluhung bersifat local genius sehingga perlu dilestarikan. Di era globalisasi dewasa ini kebudayaan lokal (kearifan lokal) sangat dipengaruhi oleh kebudayaan asing yang membawa dampak positif maupun negatif terhadap eksistensi budaya tersebut. Kabupaten Badung merupakan daerah tujuan wisata, sehingga secara langsung akan beradapan dengan budaya asing. Demikian juga dengan perkembangan teknologi informasi akan membawa dampak langsung terhadap eksistensi kebudayaan masyarakat Kabupaten Badung.

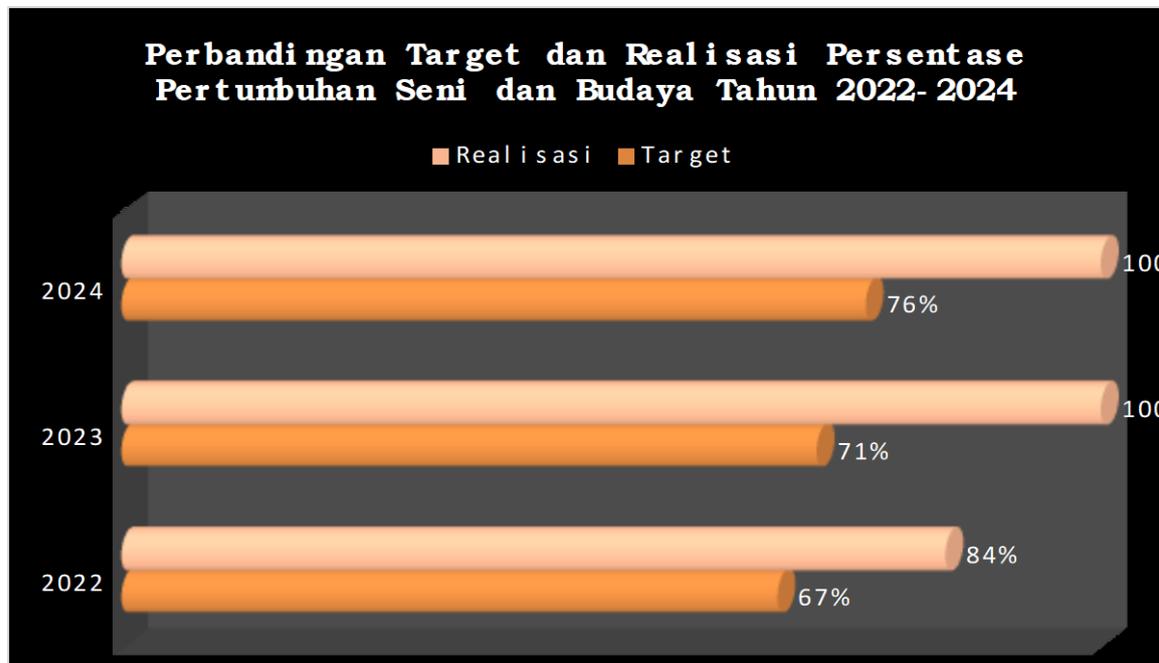
Penetapan sasaran meningkatnya pelestarian adat dan budaya dengan indikator derajat partisipasi masyarakat dalam pengembangan dan pelestarian budaya diharapkan dapat menumbuhkan sinergitas/harmonis antara pelaksanaan pembangunan dengan lestarnya budaya, seperti pengembangan pariwisata dipadukan dengan nilai-nilai budaya masyarakat.

Hasil capaian sasaran strategis Meningkatkan Kreativitas Serta Pelestarian Seni dan Budaya dengan indikator persentase pertumbuhan seni dan budaya tahun 2024 sebesar 100% dari target yang telah ditetapkan sebesar 76% sehingga capaian kinerja sebesar 131%. Jika dibandingkan dengan tahun 2023 capaian indikator persentase pertumbuhan seni dan budaya sebesar 100% dari target yang telah ditetapkan sebesar 71% dengan

capaian kinerja sebesar 141%. Sedangkan pada tahun 2022 capaian kinerjanya sebesar 84,14% dari target yang ditetapkan sebesar 67% sehingga capaian kinerja sebesar 125,58%. Berikut target dan realisasi capaian sasaran strategis Meningkatnya Kreativitas Serta Pelestarian Seni dan Budaya tahun 2022-2024 seperti pada gambar berikut:

Gambar 3.19

Target dan Realisasi Indikator Persentase Pertumbuhan Seni dan Budaya Tahun 2022-2024



Sumber Data : Dinas Kebudayaan Kabupaten Badung tahun 2024

Derajat partisipasi masyarakat dalam pengembangan dan pelestarian budaya ditinjau dari kategori tingkat kemajuan desa adat menunjukkan bahwa semua desa adat (124 desa adat) di Kabupaten Badung termasuk kategori desa adat maju dan berkembang.

Sedangkan berdasarkan pengelolaan cagar budaya di Kabupaten Badung menunjukkan dari 43 cagar budaya yang ada, 24 dalam kategori lestari. Secara Kategori desa adat dan pengelolaan cagar budaya di Kabupaten Badung seperti tabel berikut:

Tabel 3.5
Kategori Desa Adat dan Cagar Budaya di Kabupaten Badung Tahun 2024

No	KECAMATAN	JUMLAH	JML DESA ADAT		JUMLAH	JML. CAGAR
		DESA ADAT	BERKEMBANG	MAJU	CAGAR BUDAYA	BUDAYA LESTARI
1	Petang	27	27	27	14	5
2	Abiansemal	35	35	35	8	5
3	Mengwi	39	39	39	15	8
4	Kuta Utara	8	8	8	1	1
5	Kuta	6	6	6		-
6	Kuta Selatan	9	9	9	5	5
	Kabupaten	124	124	124	43	24

Sumber Data : Dinas Kebudayaan Kabupaten Badung Tahun 2024

Subak merupakan suatu sistem swadaya masyarakat yang berfungsi mengatur pembagian aliran irigasi yang mengairi setiap petak areal persawahan. Sistem ini dikelola secara berkelompok dan bertingkat disertai pembagian peran yang spesifik bagi setiap anggotanya. Dalam organisasi subak, dikenal adanya beberapa perangkat. Perangkat-perangkat yang ada dalam subak adalah pekaseh (ketua subak), petajuh (wakil pekaseh), penyarikan (juru tulis), petengen (juru raksa), kasinoman (kurir), dan beberapa yang lainnya. Subak merupakan salah satu warisan dunia yang diakui oleh UNESCO.

Keberadaan subak di Kabupaten Badung menunjukkan bahwa seluruhnya termasuk dalam kategori lestari atau dari 214 kelompok seni semuanya (100%) lestari. Sedangkan menurut komponen jumlah sekaa/kelompok tari, tabuh dan Kidung/Kekawin telah mendapatkan pembinaan, dari 2.063 sekaa/kelompok yang aktif sebanyak 1.825 sekaa atau 88%. Secara Lengkap jumlah subak dan sekaa/kelompok seni menurut kecamatan di Kabupaten Badung, seperti tabel berikut:

Tabel 3.6
Kategori Subak Lestari dan Sekaa yang Berkembang
di Kabupaten Badung Tahun 2024

N O	KECAMATAN	JML SUBAK	JUMLAH SUBAK LESTARI	JUMLAH SEKAA YANG ADA			JUMLAH SEKAA YANG AKTIF		
				TARI	TABUH	KIDUNG/ KEKAWIN	TARI	TABU H	KIDUNG/ KEKAWIN
1	Petang	43	43	24	72	13	24	72	6
2	Abiansemal	52	52	120	350	108	120	350	65
3	Mengwi	66	66	107	431	310	107	431	143
4	Kuta Utara	19	19	71	67	40	71	67	31
5	Kuta	7	7	19	33	11	19	33	12
6	Kuta Selatan	27	27	36	192	59	36	192	46
	Kabupaten	214	214	377	1145	541	377	1145	303

Sumber Data : Dinas Kebudayaan Kabupaten Badung Tahun 2024

Upaya untuk mewujudkan sasaran meningkatnya pelestarian adat dan budaya didukung oleh 11 program. Program pendukung meliputi: Program Pengembangan Kebudayaan, Program Pengembangan Kesenian Tradisional, Program Pembinaan Sejarah, Program Pelestarian dan Pengelolaan Cagar Budaya, Program Pengelolaan Permuseuman, Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan yang diampu oleh masing-masing kecamatan di Kabupaten Badung. Pagu anggaran yang dialokasikan sebesar Rp. 756.377.094.272,- dengan realisasi sebesar Rp. 381.579.514.538,- dengan serapan anggaran sebesar 50,45%.

Faktor-faktor yang mendorong keberhasilan dalam pencapaian target Indikator Persentase Pertumbuhan Seni dan Budaya meliputi: Adanya Kelengkapan Sarana dan Prasarana yang memadai sehingga dalam pelaksanaan tugas dapat berjalan lancar, Peningkatan Sumber Daya Manusia, sehingga tercipta SDM yang handal dan unggul, meningkatnya komitmen pemerintah terhadap eksistensi budaya, adat dan seni, meningkatnya eksistensi adat masyarakat, menguatnya nilai-nilai kearifan lokal masyarakat setempat, meningkatnya pelestarian seni dan warisan budaya melakukan inventarisasi, Subak di Bali pada umumnya merupakan kelembagaan sosioagraris-religius di sektor pertanian, tetapi sangat menarik sebagai daya tarik wisata dari beragam atraksi yang bisa dikembangkan seperti lanskap

persawahan, ritual agama, produk pertanian, dan kehidupan sosial petaninya serta sosialisasi terhadap situs budaya daerah serta pelestarian warisan budaya daerah yang baik.

Terdapat faktor penghambat terhadap keberhasilan Indikator Persentase Pertumbuhan Seni dan Budaya antara lain : Pengaruh digitalisasi yang menyebabkan tidak semua lapisan masyarakat mampu menerapkan kesenian, budaya, dan adat dengan baik.

Strategi yang akan dilaksanakan untuk terus meningkatkan indikator ini meliputi :

- a. Pemberian bantuan kepada desa adat dalam pelaksanaan upacara yadnya pemberian bantuan kepada lembaga adat, lembaga kesenian, dan pelaku seni.
- b. Melakukan pembinaan secara terus menerus kepada desa adat dan lembaga kesenian dengan *crosscutting* program dengan OPD lain dalam hal pelestarian adat, seni dan Budaya.
- c. Pemberian bantuan operasional terhadap subak di Kabupaten Badung
- d. Melakukan pembinaan secara terus menerus terhadap seluruh subak yang ada di Kabuapten Badung.
- e. Adanya *crosscutting* program dengan OPD lainnya dalam hal pelestarian subak.

Berikut beberapa dokumentasi pendukung pencapaian indikator Persentase Pertumbuhan Seni dan Budaya.

	<p>Penyerahan Dan Kreativitas untuk Sekaa Truna oleh Bupati Badung</p>
	<p>Kegiatan Pesta Kesenian Bali yang diikuti oleh Kabupaten Badung</p>
	<p>Kegiatan Sosialisasi Museum kepada siswa atau pelajar</p>

 <p>Senin, 1 Juli 2024</p> <p>Pembinaan Utsawa Dharma Gita Kecamatan Kuta Selatan</p> <p>BerAKHLAK bangga melayani bangsa kutaselatan.badungkab.go.id Kecamatan Kuta Selatan @kutsel.official</p>	<p>Pembinaan Utsawa Dharma Gita Kecamatan Kuta Selatan</p>
	<p>Juara I Utsawa Dharma Gita Tahun 2024 di Kecamatan Kuta Utara</p>

**Analisis Kinerja Sasaran 8:
Meningkatnya Kualitas Sumber Daya Manusia**

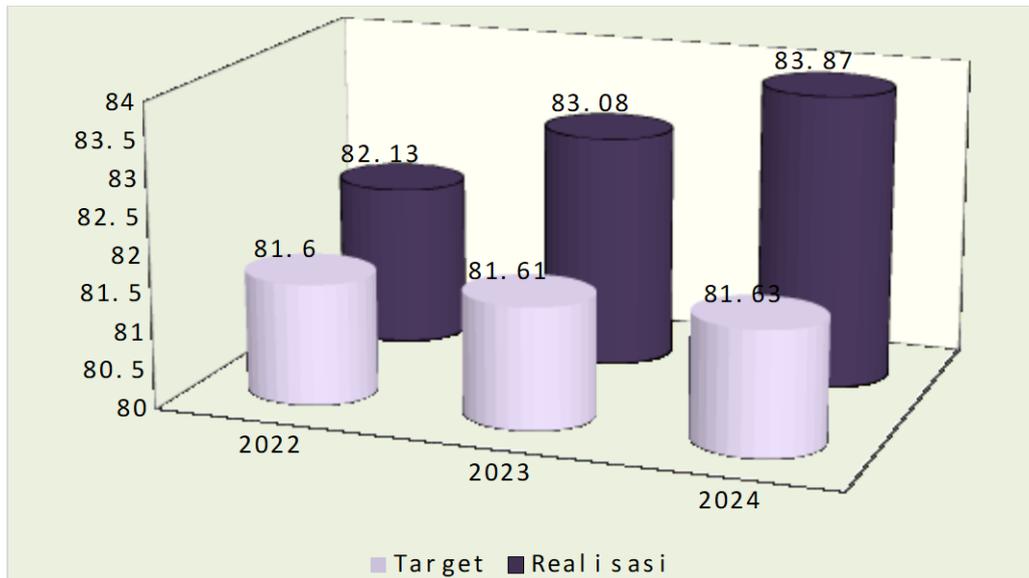
Indeks Pembangunan Manusia (IPM) mengukur capaian pembangunan manusia berbasis sejumlah komponen dasar kualitas hidup. Sebagai ukuran kualitas hidup, IPM dibangun melalui pendekatan tiga dimensi dasar, mencakup umur panjang dan sehat; pengetahuan, dan kehidupan yang layak. Ketiga dimensi tersebut memiliki pengertian sangat luas karena terkait banyak faktor. Untuk mengukur dimensi kesehatan, digunakan angka harapan hidup waktu lahir. Selanjutnya untuk mengukur dimensi pengetahuan digunakan gabungan indikator harapan lama sekolah dan rata-rata lama sekolah. Adapun untuk mengukur dimensi hidup layak digunakan indikator kemampuan daya beli masyarakat terhadap sejumlah kebutuhan pokok yang dilihat dari rata-rata besarnya pengeluaran per kapita sebagai pendekatan pendapatan yang mewakili capaian pembangunan untuk hidup layak. Kategori nilai indeks pembangunan manusia dikategorikan menjadi 4 kelompok, meliputi :

- | | |
|------------------|-----------------------------|
| a. Sangat tinggi | : IPM >80 |
| b. Tinggi | : $70 \leq \text{IPM} < 80$ |
| c. Sedang | : $60 \leq \text{IPM} < 70$ |
| d. Rendah | : IPM <60 |

Hasil capaian indikator Indeks Pembangunan Manusia (IPM) pada tahun 2024 sebesar 83,87 dengan kategori “Sangat Tinggi” dari target yang telah ditetapkan sebesar 81,63 dengan kategori “Sangat Tinggi” sehingga capaian kerjanya sebesar 103% melebihi target yang telah ditetapkan. Jika dibandingkan pada tahun 2023 capaian indikator Indeks Pembangunan Manusia (IPM) sebesar 83,08 dari target 81,61. Sedangkan pada tahun 2022 capaian indikator sebesar 82,13 dari target yang telah ditetapkan sebesar 81,6. Hal ini membuktikan bahwa capaian kinerja tahun 2024 lebih tinggi 0,79 jika dibandingkan tahun 2023. Hasil capaian sasaran strategis RPJMD

meningkatnya kualitas sumber daya manusia dengan indikator Indeks Pembangunan Manusia (IPM) seperti gambar berikut:

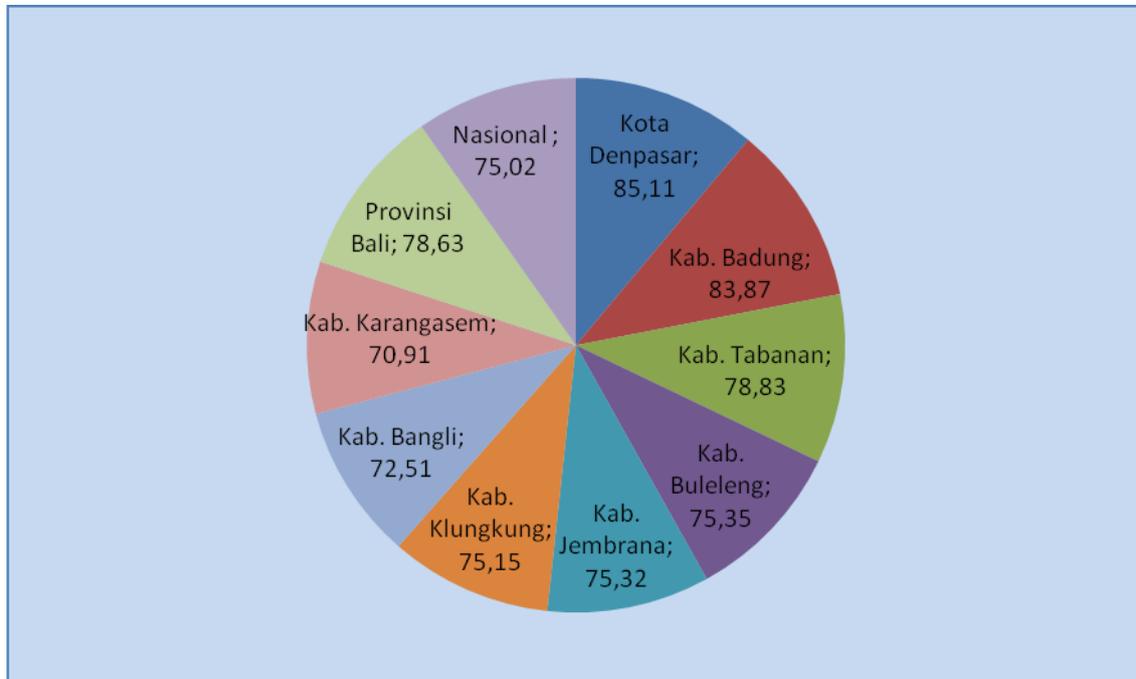
Gambar 3.20
Target dan Realisasi Indeks Pembangunan Manusia (IPM)
Kabupaten Badung Tahun 2022-2024



Sumber data :Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kab.Badung Tahun 2024

Sebagai Pembanding dengan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten/Kota di Provinsi Bali dan Nasional. Penilaian Kabupaten/ Kota, Kabupaten Badung menempati posisi kedua setelah Kota Denpasar, dimana Kota Denpasar pada tahun 2024 memperoleh Indeks Pembangunan Manusia (IPM) sebesar 85,11, sedangkan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) terendah ada di Kabupaten Karangasem dengan capaian sebesar 70,91. Hasil capaian Indikator Indeks Pembangunan Manusia (IPM) menurut Kabupaten/Kota, Provinsi Bali dan Nasional seperti gambar berikut :

Gambar 3.21
Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten/Kota, Provinsi Bali,
dan Nasional Tahun 2024



Sumber data :Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kab.Badung Tahun 2024

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) memiliki tiga dimensi yang digunakan sebagai dasar perhitungannya:

- **Kesehatan**, diukur dengan angka harapan hidup saat kelahiran
- **Pendidikan**, dihitung dari angka harapan sekolah dan angka rata-rata lama sekolah
- **Standar hidup layak**, dihitung dari produk nasional bruto per kapita

Keberhasilan Pemerintah Kabupaten Badung dalam pencapaian indikator IPM tidak terlepas dari upaya yang sungguh-sungguh dalam melaksanakan program untuk meningkatkan ketiga aspek indeks pembangunan manusia. Salah satu dimensinya yaitu Bidang Pendidikan telah melakukan langkah-langkah untuk mendukung Indeks Pembangunan Manusia dengan adanya sekolah yang tersedia untuk para pelajar di lingkungan Kabupaten Badung. Berikut tabel distribusi sekolah dan jumlah siswa di Kabupaten Badung Tahun 2024

Tabel 3.7

Distribusi Sekolah dan Siswa Menurut Kecamatan
di Kabupaten Badung Tahun 2024

No	Kecamatan	Jumlah Sekolah			TOTAL
		TK	SD	SMP	
1	Petang	12	27	4	43
2	Abiansemal	38	65	6	109
3	Mengwi	45	72	12	129
4	Kuta Utara	58	43	18	119
5	Kuta	27	23	8	58
6	Kuta Selatan	62	56	17	135
	Kabupaten	242	286	65	593

No	Kecamatan	Jumlah Siswa			TOTAL
		TK	SD	SMP	
	Petang	370	2.274	1.213	3.857
	Abiansemal	1.697	8.544	4.463	14.704
	Mengwi	2.641	12.227	6.277	21.145
	Kuta Utara	3.290	12.671	5.724	21.685
	Kuta	1.878	7.078	3.958	12.914
	Kuta Selatan	3.308	13.959	5.815	23.082
	Kabupaten	13.184	56.753	27.450	97.387

Sumber data :Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kab.Badung Tahun 2024

Upaya untuk mewujudkan sasaran meningkatnya kualitas sumber daya manusia didukung oleh 6 program. Program pendukung meliputi: Program Pengelolaan Pendidikan, Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan, Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan, Program Pengembangan Kapasitas Kepramukaan, Program Perekonomian dan Pembangunan dan Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan

Upaya Kesehatan Masyarakat. Pagu anggaran yang dialokasikan untuk menunjang pencapaian sasaran meningkatnya kualitas sumber daya manusia sebesar Rp. 1.427.470.741.653,- dengan realisasi sebesar Rp. 1.078.409.687.791,- dengan serapan anggaran sebesar 75,55%.

Faktor pendorong meningkatnya indeks pembangunan manusia antara lain: Adanya Pengakuan dan kepercayaan dari masyarakat terhadap kualitas pendidikan di Kabupaten Badung yang sangat berkomitmen menangani kualitas pendidikan. Adanya keharmonisan antara pihak penyelenggara pendidikan, pelaku pendidikan dan orang tua didik atas kepeduliannya terhadap pendidikan pada keluarga masing-masing, dan mulai menyadari bahwa pendidikan anak itu tidak hanya tanggung jawab guru tetapi orang tua juga mempunyai andil terhadap perkembangan pendidikan anak, peningkatan kualitas pelayanan kesehatan masyarakat melalui pelayanan kesehatan untuk seluruh masyarakat (*total coverage*) yang ditanggung pemerintah daerah bekerja sama dengan BPJS kesehatan, pelayanan kesehatan tambahan untuk penyakit yang diluar tanggungan BPJS, pembangunan gedung rumah sakit dan puskesmas rawat inap, peningkatan kualitas pendidikan dengan peningkatan ruang kelas belajar, pendidikan formal dan non formal paket A,B dan C serta peningkatan kesempatan kerja pada sektor pertanian dan pariwisata.

Faktor penghambat meningkatnya indeks pembangunan manusia dari bidang kesehatan antara lain Sinkronisasi antara perencanaan pengembangan layanan serta kebutuhan alat kesehatan guna memenuhi standar pelayanan dengan ketersediaan referensi alat alat kesehatan pada sistem e- katalog belum dapat diupayakan dengan segera karena keterbatasan waktu dalam penyusunan perencanaan anggaran alat kesehatan, belum tersedianya sarana penyimpanan obat dan BMHP yang representatif dari sisi kapasitas dan pesyaratan penyimpanan dan kebutuhan alat kesehatan yang sesuai dengan perencanaan pengembangan layanan masih banyak membutuhkan alat kesehatan import

Upaya-upaya kedepan yang akan dilaksanakan untuk meningkatkan indeks pembangunan manusia melalui: Meningkatkan pemerataan kesempatan belajar bagi masyarakat dan meningkatkan mutu pendidikan pada semua jenjang, jalur dan jenis pendidikan, meningkatkan pelayanan masyarakat memperoleh pendidikan yang lebih baik dan mendukung kesempatan belajar hingga pendidikan menengah, peningkatan akses pelayanan kesehatan kepada masyarakat melalui pendirian puskesmas dan rumah sakit, peningkatan kualitas layanan kesehatan, peningkatan kualitas kesehatan ibu, bayi dan anak, evaluasi program pengembangan pelayanan Rumah Sakit pada RSB, serta optimalisasi pelayanan guna peningkatan pendapatan dan menginfokan pada user untuk alat kesehatan yang merupakan PDN (Produk Dalam Negeri).

Berikut beberapa dokumentasi kegiatan yang mendukung tercapainya indikator Indeks Pembangunan Manusia.

	Pembangunan Sarana Prasarana dan Utilitas Sekolah SD No. 4 Kuta di Kecamatan Kuta
	Kegiatan Pemberian Makanan Tambahan Sehat (PMT) bagi Pendidikan Anak Usia Dini se-Kabupaten



Diklat Pendampingan Belajar bagi Siswa Berkebutuhan Khusus pada Sekolah Menengah Pertama di Kabupaten Badung Tahun 2024



Pembangunan SMP Negeri 3 Kuta, di Kecamatan Kuta



Pelayanan paramedis RSD Mangusada dalam memastikan sterilitas, memilih vena yang tepat, serta memantau kondisi pasien agar tidak terjadi komplikasi seperti infeksi atau pembengkakan. Perawat berperan penting dalam memastikan infus berjalan dengan baik dan memberikan perawatan terbaik bagi pasien.



Pelayanan endoscopy pada RSD Mangusada



Pelayanan rehabilitasi medik di RSD Mangusada

Analisis Kinerja Sasaran 9: Meningkatnya Persentase Koperasi Sehat

Koperasi adalah sebuah organisasi ekonomi yang dimiliki dan dioperasikan oleh orang-seorang demi kepentingan bersama. Koperasi melandaskan kegiatan berdasarkan prinsip gerakan ekonomi rakyat yang berdasarkan asas kekeluargaan. Prinsip koperasi adalah suatu sistem ide-ide abstrak yang merupakan petunjuk untuk membangun koperasi yang efektif dan tahan lama. Prinsip koperasi terbaru yang dikembangkan *International Cooperative Alliance* (Federasi koperasi non-pemerintah internasional) adalah :

1. Keanggotaan yang bersifat terbuka dan sukarela
2. Pengelolaan yang demokratis,
3. Partisipasi anggota dalam ekonomi,
4. Kebebasan dan otonomi,
5. Pengembangan pendidikan, pelatihan, dan informasi.

Di Indonesia sendiri telah dibuat UU no. 25 tahun 1992 tentang Perkoperasian. Prinsip koperasi menurut UU no. 25 tahun 1992 adalah:

1. Keanggotaan bersifat sukarela dan terbuka;
2. Pengelolaan dilakukan secara demokratis;

3. Pembagian sisa hasil usaha dilakukan secara adil sebanding dengan besarnya jasa usaha masing-masing anggota;
4. Pemberian balas jasa yang terbatas terhadap modal;
5. Kemandirian.

Dalam mengembangkan Koperasi, maka Koperasi melaksanakan pula prinsip Koperasi sebagai berikut :

1. Pendidikan perkoperasian;
2. Kerjasama antar koperasi;

Jenis Koperasi Menurut Fungsinya :

- Koperasi pembelian/pengadaan/konsumsi adalah koperasi yang bergerak dalam penyediaan kebutuhan pokok bagi para anggotanya. Di sini anggota berperan sebagai pemilik dan pembeli atau konsumen bagi koperasinya.
- Koperasi penjualan/pemasaran adalah koperasi yang anggotanya para produsen atau pemilik barang atau penyedia jasa dan kegiatan atau jasa utamanya melakukan pemasaran bersama. Di sini anggota berperan sebagai pemilik dan pemasok barang atau jasa kepada koperasinya.
- Koperasi Produksi adalah koperasi yang bergerak dalam bidang produksi barang-barang baik yang dilaksanakan oleh koperasi itu maupun para anggotanya. Di sini anggota berperan sebagai pemilik dan pekerja koperasi.
- Koperasi Jasa adalah koperasi yang berusaha di bidang penyediaan jasa tertentu bagi para anggota maupun masyarakat umum, misalnya: simpan pinjam, asuransi, angkutan, dan sebagainya. Di sini anggota berperan sebagai pemilik dan pengguna layanan jasa koperasi.

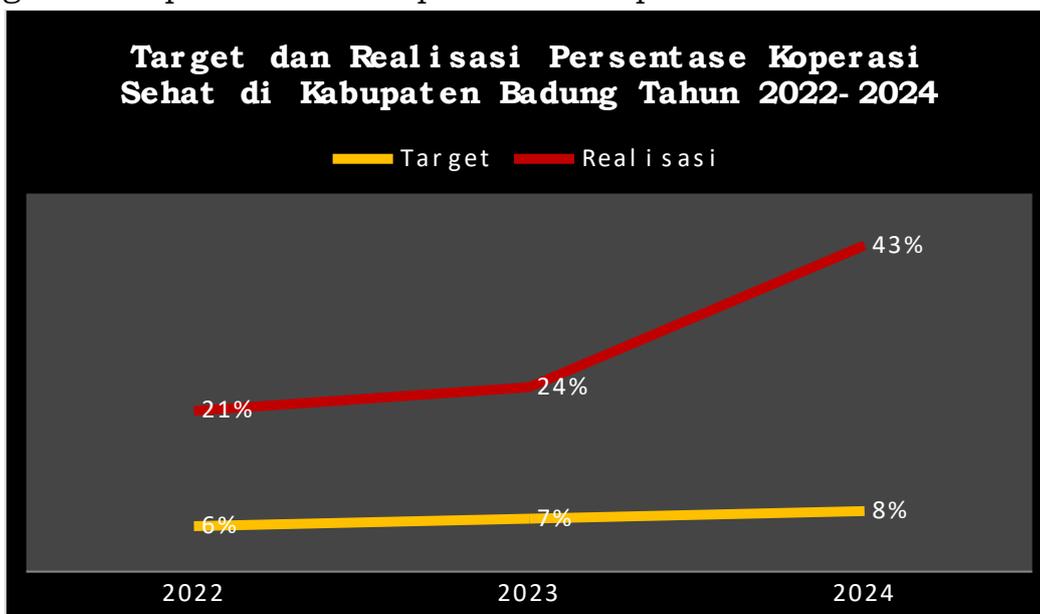
Pembentukan koperasi ditandai dengan adanya akta pendirian dengan memuat anggaran dasar dan mempunyai kedudukan dalam wilayah Negara Indonesia. Keberadaan koperasi khususnya di Kabupaten Badung masih mendapat kepercayaan tinggi dari masyarakat, sehingga untuk dapat mengawasi jalannya koperasi di Kabupaten Badung dirumuskan sasaran strategis meningkatnya persentase koperasi sehat pada RPJMD Semesta

Berencana Kabupaten Badung Tahun 2021-2026 dengan indikator persentase jumlah koperasi sehat.

Capaian sasaran strategis meningkatnya persentase koperasi sehat dengan indikator persentase jumlah koperasi sehat di Kabupaten Badung Tahun 2024 sebesar 43,13% dari target yang ditetapkan sebesar 8,0% sehingga capaian kinerja 539% jauh melebihi target yang telah ditetapkan. Jika dibandingkan dengan tahun 2023 sebesar 24,38% dari target yang ditetapkan sebesar 7%. Sedangkan pada tahun 2022 indikator persentase jumlah koperasi sehat sebesar 21,88% dari target 6%. Berikut gambar target dan capaian indikator persentase koperasi sehat tahun 2022-2024:

Gambar 3.22

Target dan capaian indikator persentase koperasi sehat tahun 2022-2024



Sumber data : Dinas Koperasi UMKM Kabupaten Badung Tahun 2024

Keberadaan koperasi sehat hampir menyeluruh di setiap kecamatan Kabupaten Badung. Jumlah koperasi sehat di Kabupaten Badung Tahun 2024 sebanyak 69 koperasi, dengan rincian per kecamatan sesuai pada tabel berikut :

Tabel 3.8
Koperasi Sehat Per-Kecamatan Kabupaten Badung Tahun 2024

NO	KECAMATAN	JUMLAH KOPERASI	KOPERASI SEHAT
1	PETANG	5	1
2	ABIANSEMAL	52	21
3	MENGWI	47	24
4	KUTA UTARA	20	8
5	KUTA	8	2
6	KUTA SELATAN	28	13
	KABUPATEN	160	69

Sumber data : Dinas Koperasi UMKM Kabupaten Badung Tahun 2024

Upaya untuk mewujudkan sasaran meningkatnya persentase koperasi sehat dengan indikator persentase jumlah koperasi sehat didukung oleh 5 program. Program pendukung meliputi: Program Pelayanan Izin Usaha Simpan Pinjam, Program Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi, Program Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi, Program Pendidikan dan Latihan Perkoperasian dan Program Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi. Pagu anggaran yang dialokasikan untuk menunjang pencapaian sasaran meningkatnya persentase koperasi sehat sebesar Rp. 1.238.604.810,- dengan realisasi sebesar Rp. 859.542.492,- dengan serapan anggaran sebesar 69,40%.

Faktor pendorong meningkatnya persentase koperasi sehat antara lain: adanya komitmen pimpinan daerah untuk meningkatkan jumlah koperasi sehat di Kabupaten Badung, Kegiatan Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi digunakan untuk mengukur kinerja koperasi secara keseluruhan sehingga dapat menggambarkan kondisi koperasi secara lengkap, jelas dan akurat, Adanya pendampingan dari akademisi dan praktisi yang ahli dibidangnya dalam pembinaan dan pendampingan koperasi, pada tahun 2024 telah ditetapkan formasi untuk Jabatan Fungsional Pengawas Koperasi Ahli Pertama, Muda dan Madya di Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan Kabupaten Badung oleh Kementerian PAN dan RB sehingga diharapkan kekurangan SDM untuk melaksanakan penilaian kesehatan koperasi dapat segera terpenuhi.

Faktor pengambat dalam pencapaian sasaran meningkatnya persentase koperasi sehat antara lain : Masih adanya Koperasi yang tidak kooperatif dalam mengisi dan mengembalikan kuisioner yang diberikan oleh dinas dalam melaksanakan penilaian kesehatan koperasi, Masih ada Koperasi yang belum menerapkan laporan keuangan koperasi sesuai standar, kurang Konsistennya koperasi dalam melaksanakan RAT (Rapat Anggota Tahunan) secara teratur, kurangnya tindak lanjut oleh koperasi yang telah mendapatkan pendampingan dan belum maksimalnya gerakan koperasi untuk memenuhi legalitas usahanya sesuai permenkop 8 tahun 2023, dan kurangnya jumlah SDM dalam melaksanakan penilaian kesehatan koperasi.

Upaya-upaya kedepan yang akan dilaksanakan untuk meningkatkan persentase koperasi sehat yaitu melakukan jemput bola kepada koperasi yang belum memiliki izin usaha simpan pinjam dan pembukaan kantor cabang, cabang pembantu dan kantor kas koperasi simpan pinjam, melakukan validasi data baik secara *online* maupun *offline* dan melakukan konsolidasi internal dan koordinasi di Bidang Pemberdayaan Usaha Koperasi dengan para praktisi Koperasi seperti Dekopinda dan Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Bali.

Tim Penilai Koperasi Sehat di Kabupaten Badung selalu berupaya mengoptimalkan kinerjanya dengan kegiatan evaluasi dan monitoring ke koperasi-koperasi di wilayah Kabupaten Badung. Berikut beberapa foto kegiatan monitoring dan evaluasi koperasi di Kabupaten Badung Tahun 2024.



Kegiatan Monitoring dan Evaluasi Koperasi di Kabupaten Badung Tahun 2024

Analisis Kinerja Sasaran 10: Meningkatnya Jumlah Wirausaha

Wirausaha adalah penggabungan dari dua kata, yaitu 'wira' dan 'usaha'. Wira artinya pejuang, pahlawan, berbudi luhur, manusia unggul, berwatak agung, dan gagah berani. Sedangkan, usaha merupakan perbuatan atau amalan, berbuat sesuatu dan bekerja. Jika diartikan secara harfiah, maka makna dari wirausaha adalah orang yang membuat suatu produk, menentukan cara produksi, menyusun operasi untuk mengadakan produk baru hingga mengatur permodalan serta pemasarannya. Secara umum, definisi wirausaha adalah suatu kegiatan usaha atau bisnis mandiri dengan kondisi seluruh sumber daya dan upaya dibebankan kepada pelaku usaha (wirausahawan) dalam mengenali produk baru, menentukan konsep dan proses produksi, menyusun strategi hingga memasarkan serta mengatur permodalannya. Tujuan adanya kegiatan ini adalah untuk menghasilkan sesuatu yang bernilai lebih tinggi dibandingkan saat sebelum diolah.

Tujuan utama dari wirausaha tentu saja adalah untuk mendapatkan keuntungan. Namun, ternyata masih ada beberapa tujuan lainnya, antara lain:

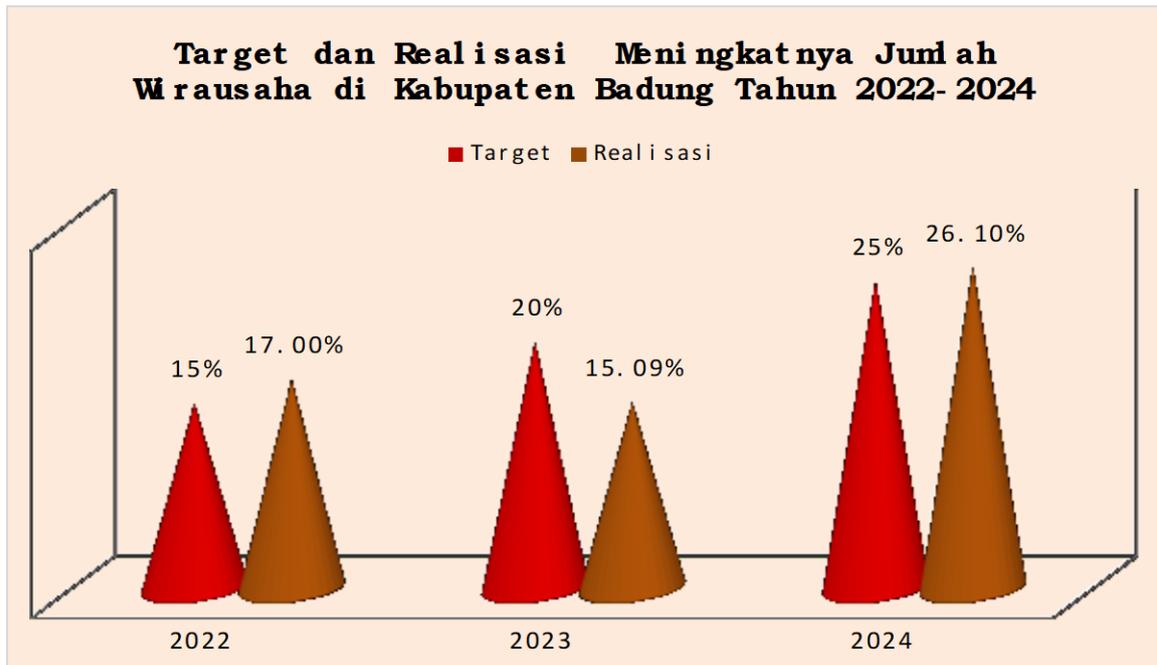
- Untuk menghasilkan sesuatu yang memiliki nilai lebih tinggi dibandingkan sebelum diolah.
- Untuk mendorong semangat atau mensosialisasikan pengaruh wirausaha kepada orang lain.
- Untuk membantu membangun karakteristik wirausaha yang baik dan kompeten.
- Untuk menghasilkan banyak wirausaha yang berkualitas.
- Untuk membantu membangun kesejahteraan masyarakat.

Beberapa waktu belakangan, pemerintah menganjurkan pada masyarakat untuk coba memulai profesi sebagai wirausaha. Hal ini dilakukan bukannya tanpa alasan, wirausaha adalah salah satu faktor yang mampu mendorong perekonomian negara, terutama di masa *new normal* seperti sekarang ini. Bukan hanya sebagai pendorong perekonomian negara, wirausaha adalah faktor yang membantu menurunkan angka pengangguran dengan membuka peluang kerja dari sektor UMKM. Lantaran itulah banyak jalan dibuka oleh pemerintah untuk membantu perkembangan dan kemandirian wirausaha, antara lain dengan mempermudah pembuatan surat izin usaha, pemberian pinjaman modal untuk usaha kecil dan menengah, sampai pada membantu pemasaran produknya.

Pemerintah Kabupaten Badung memiliki komitmen yang kuat terhadap peningkatan jumlah wirausaha, sehingga dirumuskanlah sasaran strategis Meningkatnya Jumlah Wirausaha dengan indikator Persentase Pertumbuhan Jumlah Wirausaha pada RPJMD Semesta Berencana Kabupaten Badung Tahun 2021-2026 agar Pemerintah Kabupaten Badung dapat melihat perkembangan wirausaha khususnya di Kabupaten Badung.

Capaian sasaran strategis meningkatnya jumlah wirausaha Tahun 2024 di Kabupaten Badung sebesar 26,10% dari target yang ditetapkan sebesar 25,00% sehingga capaian kinerjanya 104% melebihi target yang telah ditetapkan. Jika dibandingkan tahun 2023 capaian indikator pertumbuhan jumlah wirausaha sebesar 15,09% dari target 20% sedangkan pada Tahun 2022 meningkatnya jumlah wirausaha di Kabupaten Badung sebesar 17% dari target 15%. Hal ini menunjukkan bahwa pada tahun 2024 jumlah wirausaha mengalami peningkatan jika dibandingkan tahun 2023. Berikut target dan capaian sasaran meningkatnya jumlah wirausaha tahun 2022-2024 dalam gambar :

Gambar 3.23
Target dan Capaian Meningkatnya Jumlah Wirausaha
di Kabupaten Badung Tahun 2022-2024



Sumber data : Dinas Koperasi UMKM Kab. Badung Tahun 2024

Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) mempunyai peran yang strategis dalam pembangunan ekonomi nasional dan khususnya di Kabupaten Badung, oleh karena selain berperan dalam pertumbuhan ekonomi dan penyerapan tenaga kerja juga berperan dalam pendistribusian hasil-hasil pembangunan. Berkembangnya UMKM di Kabupaten Badung merupakan bukti meningkatnya jumlah wirausaha. Karena dengan semakin banyaknya UMKM diharapkan mampu meningkatkan penghasilan dan mengurangi angka pengangguran karena semakin banyaknya lowongan pekerjaan yang tersedia. Jumlah UMKM maju di Kabupaten Badung sebanyak 10.359 dengan rincian per kecamatan dalam tabel berikut :

Tabel 3.9
Jumlah UMKM maju di Kabupaten Badung Tahun 2024

NO	KECAMATAN	JUMLAH UMKM	
		ADA	MAJU
1	PETANG	1.660	428
2	ABIANSEMAL	5.425	1.381
3	MENGWI	8.627	2.100
4	KUTA UTARA	10.930	2.469
5	KUTA	8.096	1.789
6	KUTA SELATAN	9.510	2.192
TOTAL KABUPATEN BADUNG		44.248	10.359

Sumber data : Dinas Koperasi UMKM Tahun 2024

Upaya untuk mewujudkan sasaran meningkatnya jumlah wirausaha dengan indikator persentase pertumbuhan jumlah wirausaha didukung oleh 3 program. Program pendukung meliputi: Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil dan Usaha Mikro (UMKM), Program Pengembangan UMKM dan Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten Badung. Pagu anggaran yang dialokasikan untuk menunjang pencapaian sasaran meningkatnya jumlah wirausaha sebesar Rp. 23.937.043.060,- dengan realisasi sebesar Rp. 17.189.403.174,- dengan serapan anggaran sebesar 71,81%.

Faktor pendorong meningkatnya jumlah wirausaha antara lain: adanya komitmen pimpinan daerah untuk meningkatkan jumlah wirausaha di Kabupaten Badung, dukungan yang diberikan oleh pemerintah baik pusat ,daerah maupun pihak swasta sangat besar terhadap proses perkembangan UMKM baik itu dalam hal bantuan permodalan,pemasaran,dan promosi produk UMKM, Sesuai amanat Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 Fasilitas publik wajib menyediakan pojok UMKM untuk medisplay dan mempromosikan produk UMKM.

Faktor pengambat dalam pencapaian sasaran meningkatnya jumlah wirausaha yaitu UMKM belum sepenuhnya mampu berinovasi dalam proses produksi, pemasaran dan menerapkan proses digitalisasi keuangan sehingga sering terjadi keuangan perusahaan belum terpisah dengan keuangan rumah tangga sehingga mempersulit menghitung omset penjualan /keuntungan dan masih minimnya pelatihan-pelatihan ketenagakerjaan.

Upaya-upaya kedepan yang akan dilaksanakan untuk meningkatkan jumlah wirausaha yaitu Program kemitraan dengan perusahaan besar/toko modern untuk membantu mempromosikan dan memasarkan produk UMKM, Program Pameran Badung UMKM Week adalah bentuk dukungan pemerintah melalui pameran yang dilaksanakan di Mall /Pusat perbelanjaan untuk memasarkan produk UMKM agar dikenal lebih luas baik ditingkat domestik maupun mancanegara, Program Sosialisasi Kemudahan perizinan usaha mikro, Program Pendampingan kepada UMKM dengan melibatkan tenaga

pendamping yang memiliki sertifikasi untuk meningkatkan dan pengembangan UMKM dan Melakukan konsolidasi internal dan koordinasi di Bidang pengembangan UMKM dengan para praktisi Koperasi seperti Dekopinda dan Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Bali. Berikut beberapa dokumentasi kegiatan Kewirausahaan di Kabupaten Badung Tahun 2024.



**Analisis Kinerja Sasaran 11:
Meningkatnya Kontribusi Sektor Perdagangan Terhadap PDRB**

Kemajuan perekonomian suatu daerah dapat dilihat dari pertumbuhan ekonomi secara agregat yang dapat dihitung melalui Produk Domestik Regional Bruto (PDRB). Produk Domestik Regional Bruto adalah tingkat pendapatan masyarakat yang diukur dari total pendapatan wilayah maupun pendapatan rata-rata masyarakat. Semakin besar jumlah nilai PDRB maka semakin besar pendapatan masyarakat daerah dan digunakan untuk proses pembangunan dan pengembangan daerah tersebut.

Produk Domestik Bruto pada tingkat regional (provinsi/kabupaten/kota) menggambarkan kemampuan suatu wilayah untuk menciptakan nilai tambah pada suatu waktu tertentu. Untuk menyusun PDRB digunakan 2 pendekatan, yaitu lapangan usaha dan pengeluaran. Keduanya menyajikan komposisi data nilai tambah dirinci menurut sumber kegiatan ekonomi (lapangan usaha) dan menurut komponen penggunaannya. PDRB dari sisi lapangan usaha merupakan penjumlahan seluruh komponen nilai tambah bruto yang mampu diciptakan oleh sektor-sektor ekonomi atas berbagai aktivitas produksinya. Sedangkan dari sisi pengeluaran menjelaskan tentang penggunaan dari nilai tambah tersebut.

Perdagangan adalah kegiatan yang terkait dengan transaksi barang dan atau jasa di dalam negeri dan melampaui batas wilayah Negara dengan tujuan pengalihan hak atas barang dan/atau jasa untuk memperoleh imbalan atau kompensasi. Dan sektor perdagangan merupakan salah satu bagian dari sistem mata rantai perekonomian suatu wilayah yang pengaruhnya sangat kuat terhadap perkembangan dan pertumbuhan wilayah baik secara internal dan eksternal.

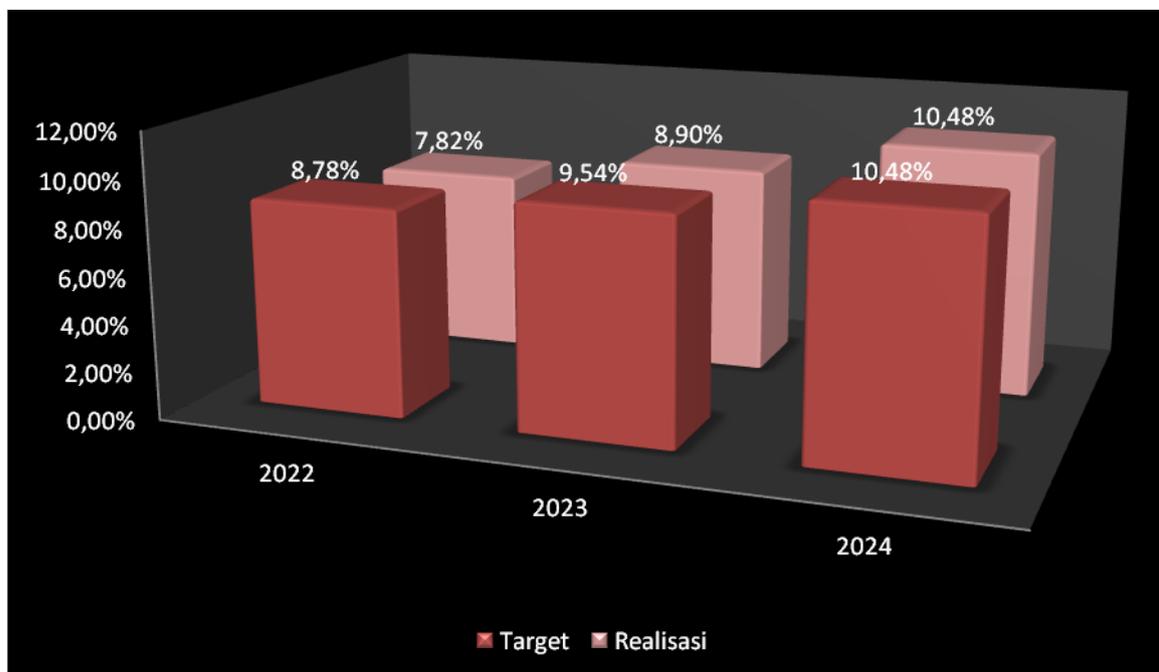
Pemerintah Kabupaten Badung memiliki komitmen yang kuat untuk meningkatkan tingkat pendapatan salah satunya melalui sektor perdagangan.

Sehingga dirumuskan sasaran strategis meningkatnya kontribusi sektor perdagangan terhadap PDRB dengan indikator Persentase Kontribusi Sektor Perdagangan Terhadap PDRB pada RPJMD Semesta Berencana Kabupaten Badung Tahun 2021-2026.

Capaian sasaran strategis meningkatnya kontribusi sektor perdagangan terhadap PDRB pada tahun 2024 sebesar 10,48% dari target yang ditetapkan pada dokumen RPJMD sebesar 10,48% sehingga capaian kinerjanya sebesar 100% mencapai target yang telah ditetapkan. Jika dibandingkan dengan tahun 2023, meningkatnya kontribusi sektor perdagangan terhadap PDRB sebesar 8,9% dari target 9,54% sehingga capaian kinerjanya menjadi 93%. Sedangkan sasaran strategis meningkatnya kontribusi sektor perdagangan terhadap PDRB pada tahun 2022 sebesar 7,82% dari target 8,78% sehingga capaian kinerjanya 89%. Berikut target dan capaian meningkatnya kontribusi sektor perdagangan terhadap PDRB tahun 2022-2024 di dalam gambar :

Gambar 3.24

Target dan capaian meningkatnya kontribusi sektor perdagangan terhadap PDRB tahun 2022-2024



Sumber data : Dinas Koperasi UMKM Tahun 2024

Upaya untuk mewujudkan sasaran meningkatnya kontribusi sektor perdagangan terhadap PDRB dengan indikator persentase kontribusi sektor perdagangan terhadap PDRB didukung oleh 5 program. Program pendukung meliputi: Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan , Program Stabilitas Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting , Program Pengembangan Ekspor, Program Standarisasi dan Perlindungan Konsumen dan Program Penggunaan dan pemasaran Produk Dalam Negeri. Pagu anggaran yang dialokasikan untuk menunjang pencapaian sasaran meningkatnya kontribusi sektor perdagangan terhadap PDRB sebesar Rp. 2.081.172.038,- dengan realisasi sebesar Rp. 1.486.112.823,- dengan serapan anggaran sebesar 71,41%.

Faktor pendorong meningkatnya kontribusi sektor perdagangan terhadap PDRB antara lain: adanya komitmen pimpinan daerah untuk meningkatkan jumlah pendapatan di Kabupaten Badung, Badung adalah daerah internasional (Daerah Tujuan Wisata Dunia) sehingga lebih mudah memasarkan dan menjual produk, memberikan edukasi untuk mengoptimalkan teknologi informasi dalam metode transaksi di sektor perdagangan, dan Kemudahan administrasi dalam proses penerbitan ijin perusahaan di Kabupaten Badung.

Faktor pengambat dalam pencapaian sasaran meningkatnya kontribusi sektor perdagangan terhadap PDRB yaitu dilapangan banyak produk-produk daerah luar seperti dari Pulau Jawa yang masuk ke Kabupaten Badung.

Upaya-upaya kedepan yang akan dilaksanakan untuk meningkatnya kontribusi sektor perdagangan terhadap PDRB yaitu mengikuti ajang pameran di tingkat nasional, mengadakan pelatihan ekspor bagi pelaku usaha UMKM, Pihak Dinas juga melakukan verifikasi biaya perkiraan revitalisasi pasar yang diajukan oleh pihak desa sehingga diperoleh angka yang lebih realistis, tujuannya adalah efisiensi penggunaan anggaran sebaik mungkin. Berikut beberapa dokumentasi kegiatan di sektor perdagangan Kabupaten Badung Tahun 2024.



**Analisis Kinerja Sasaran 12 :
Meningkatkan Kebahagiaan Masyarakat**

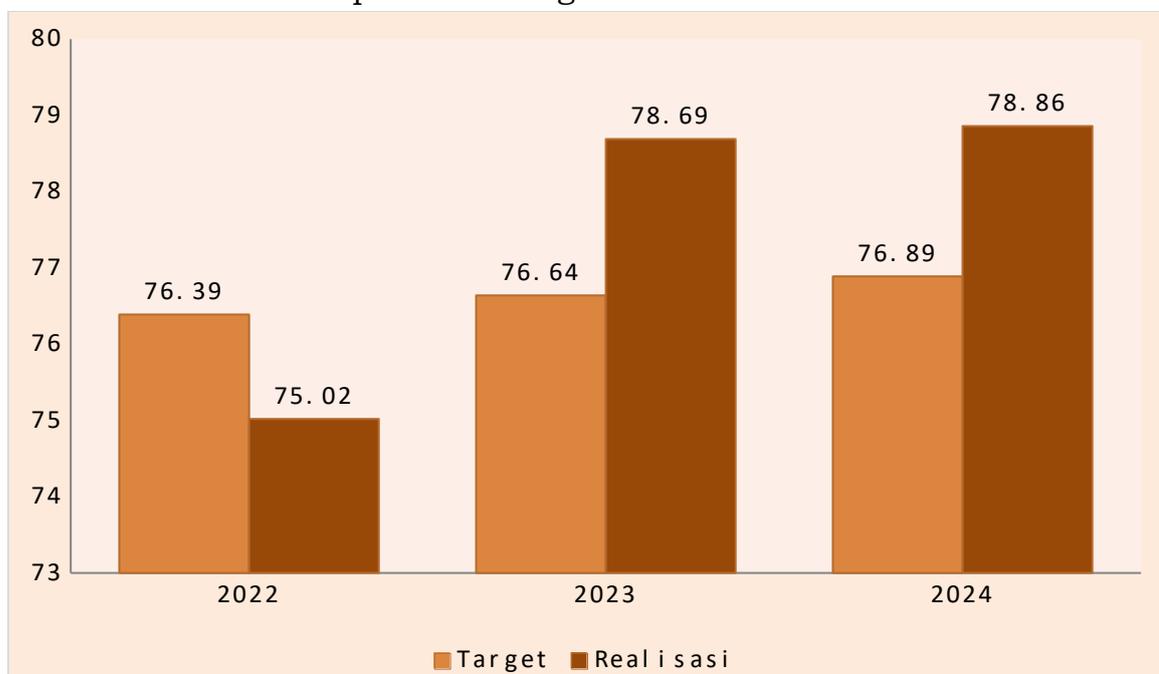
Kabupaten Badung merupakan Kabupaten di Bali yang memiliki bentuk unik menyerupai sebilah "Keris" yang merupakan senjata khas masyarakat Bali. Keunikan ini diangkat menjadi lambang daerah yang merupakan simbol semangat dan jiwa ksatria yang memiliki hubungan erat dengan perjalanan sejarah Kabupaten Badung yaitu peristiwa "Puputan Badung". Semangat perjuangan ini kemudian melandasi semboyan Kabupaten Badung yaitu "*Cura Dharma Raksaka*" yang artinya kewajiban pemerintah adalah untuk melindungi kebenaran dan rakyatnya, yang tercermin dalam visi Pemerintah Kabupaten Badung "Melanjutkan Kebahagiaan Masyarakat Badung Melalui Pembangunan yang Berlandaskan Tri Hita Karana". Berdasarkan visi tersebut, pembangunan di Kabupaten Badung memiliki tujuan akhir yaitu terciptanya kehidupan dan penghidupan masyarakat yang bahagia sejalan dengan capaian Tingkat (indeks) kebahagiaannya.

Indeks Kebahagiaan merupakan indeks komposit yang disusun oleh tiga dimensi yaitu : kepuasan hidup (*life satisfaction*), perasaan (*Affect*) dan makna hidup (*Eudaimonia*) dengan skala 0 sampai 100. Semakin tinggi nilai indeks menunjukkan tingkat kehidupan yang semakin bahagia, demikian pula sebaliknya semakin rendah nilai indeks, maka penduduk semakin tidak bahagia. Beberapa variabel utama, dalam menentukan Indeks Kebahagiaan antara lain : Kepuasan terhadap kondisi kesehatan, Kepuasan terhadap pendidikan dan keterampilan, Kepuasan terhadap pekerjaan, Kepuasan terhadap pendapatan rumah tangga, Kepuasan terhadap kondisi keamanan, Kepuasan terhadap hubungan sosial, Kepuasan terhadap ketersediaan waktu luang, Kepuasan terhadap kondisi rumah, Kebahagiaan hidup,

Harapan/keinginan yang sudah tercapai, Kepuasan hidup, Kepuasan terhadap kondisi lingkungan, Kepuasan terhadap keharmonisan keluarga.

Pengukuran sasaran meningkatkan kebahagiaan masyarakat diukur dengan indikator indeks kebahagiaan dengan capaian pada tahun 2024 sebesar 78,86 dari target 76,89 sehingga capaian kinerjanya 102% melebihi target yang telah ditetapkan. Jika dibandingkan tahun 2023, indeks kebahagiaan Kabupaten Badung sebesar 78,69 dari target 76,64 dengan capaian kinerja melebihi target yaitu 103%. Sedangkan pada tahun 2022 diperoleh indeks kebahagiaan sebesar 75,02 dari target yang ditetapkan dalam RPJMD sebesar 76,39. Hal ini menandakan Indeks Kebahagiaan di Kabupaten Badung mengalami peningkatan setiap tahunnya. Sebagai perbandingan hasil pengukuran indikator Indeks kebahagiaan tahun 2022-2024 secara lengkap target dan capaian indikator indeks kebahagiaan Kabupaten Badung seperti gambar berikut:

Gambar 3.25
Target dan Capaian Indikator Indeks Kebahagiaan
Kabupaten Badung Tahun 2022-2024



Sumber Data : Badan Riset dan Inovasi Daerah Tahun 2024

Berdasarkan Laporan Indeks Kebahagiaan Tahun 2024 diperoleh beberapa hasil sebagai berikut :

1. Nilai indeks kebahagiaan tertinggi terdapat pada penduduk dalam kelompok umur 25-40 tahun dan nilai terendah pada warga lansia berusia 65 tahun ke atas. Data tersebut dapat bermakna diperlukan upaya perluasan kesempatan-kesempatan kerja agar warga usia produktif untuk yang sedang berada pada puncak kebahagiaannya dapat meraih peluang kesuksesan sebagai fondasi pada tahap kehidupan berikutnya, agar ketika memasuki usia lanjut dapat mengisi masa tuanya dengan bahagia. Intervensi program yang menasar warga lanjut usia di atas 65 tahun juga diperlukan agar tidak mengalami kesenjangan dengan generasi yang lebih muda.
2. Penduduk yang bermukim di wilayah pedesaan memiliki tingkat kebahagiaan yang lebih tinggi daripada yang bermukim di wilayah perkotaan. Kondisi ini dapat diasosiasikan dengan kondisi kehidupan di wilayah perkotaan yang membuat warganya kurang berbahagia. Data tersebut berimplikasi pada kebijakan pembangunan wilayah, agar lebih memperhatikan hal-hal yang bisa berpengaruh pada kebahagiaan penduduk.
3. Penduduk yang tidak bekerja ternyata tingkat kebahagiaannya tidak terpaut jauh dengan yang bekerja. Kondisi ini tidak kemudian diinterpretasikan sebagai tidak bekerja pun bahagia, melainkan dapat saja terjadi karena tinggi modal sosial yang dimiliki masyarakat Badung. Dengan demikian maka modal sosial inilah yang perlu dijaga dan diperkuat.
4. Tingkat kebahagiaan penduduk yang bekerja pada lapangan usaha pertanian adalah yang terendah. Hal ini tentunya menjadi sinyal masih besarnya tantangan yang dihadapi untuk membangkitkan sektor pertanian. Sepanjang sektor ini tidak menarik bahkan kurang membahagiakan bila dibandingkan lapangan usaha lainnya, maka minat masyarakat untuk berkiprah di sektor pertanian susah untuk dibangkitkan. Padahal sektor ini merupakan sektor strategis yang

menjadi pilar kesejahteraan daerah.

5. Nilai indeks kebahagiaan tertinggi dimiliki oleh keluarga dengan tiga anggota rumah tangga. Ini dapat menjadi pertanyaan kebijakan, apakah ini menunjukkan kecenderungan masyarakat Badung lebih menyukai/lebih merasa berbahagia dengan cukup memiliki satu orang anak. Dampaknya ke depan tentu akan besar karena menyangkut keseimbangan demografis dari sisi sosial budaya, mengingat di sisi lain tingkat migrasi penduduk ke Kabupaten Badung tergolong tinggi.

Upaya untuk mewujudkan sasaran Meningkatnya Kebahagiaan Masyarakat didukung oleh 6 program. Program pendukung meliputi: Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan, Program Pengendalian Penduduk, Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB), Program Pemberdayaan Dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS), Program Pelatihan Kerja Dan Produktivitas Tenaga Kerja, Program Penempatan Tenaga Kerja. Pagu anggaran yang dialokasikan sebesar Rp. 14.479.112.157,- dengan realiasi sebesar Rp. 13.477.723.583,- dengan serapan anggaran sebesar 93,08%.

Faktor Pendorong pencapaian sasaran ini yaitu adanya komitmen yang kuat dari Pimpinan Daerah untuk meningkatkan kebahagiaan masyarakat di Kabupaten Badung dengan mengalokasikan pagu anggaran agar dapat mendukung pemberian layanan kepada masyarakat.

Upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk lebih meningkatkan kebahagiaan masyarakat yaitu lebih aktif melaksanakan program atau aksi nyata yang dimana masyarakat menjadi sasaran utamanya sehingga memberikan keuntungan dan dampak yang positif bagi masyarakat. Berikut beberapa dokumentasi yang mendukung Indeks Kebahagiaan di Kabupaten Badung.



Penandatanganan dan Serah Terima Dokumen Perjanjian Kerjasama Kegiatan Survei Pengukuran Tingkat Kebahagiaan Masyarakat Tahun 2024 di Kabupaten Badung



Pelayanan pada Sub Kegiatan Informasi Pasar Kerja Online yang dilaksanakan oleh Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja

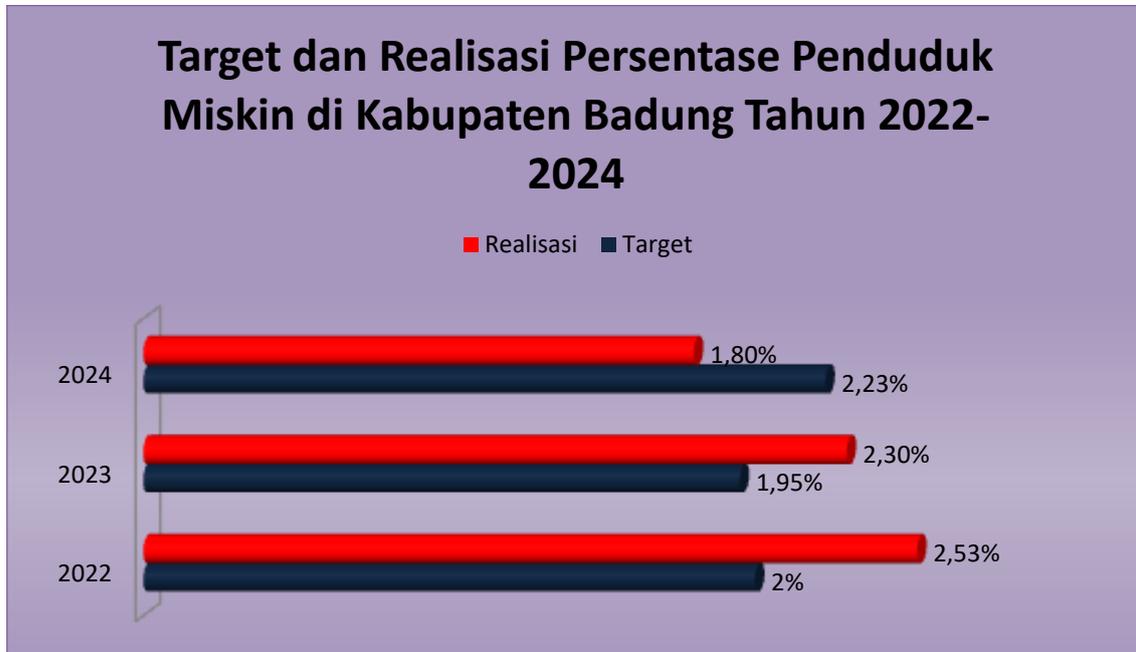
Analisis Kinerja Sasaran 13 : Menurunnya angka kemiskinan

Kemiskinan dipandang sebagai ketidakmampuan dari sisi ekonomi untuk memenuhi kebutuhan dasar makanan dan bukan makanan yang diukur dari sisi pengeluaran. Jadi Penduduk Miskin adalah penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran perkapita perbulan dibawah garis kemiskinan. Faktor kemiskinan bukan saja akibat masalah fisik atau rumah semata-mata, namun dipengaruhi faktor kemudahan akses dan mentalitas.

Pemerintah Kabupaten Badung sangat serius dalam pengentasan kemiskinan sebagai upaya untuk lebih mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat. Sebagai bentuk komitmen maka sasaran strategis RPJMD salah satunya untuk menurunkan angka kemiskinan dengan indikator persentase penduduk miskin dengan formula jumlah penduduk miskin dibagi dengan jumlah penduduk kali 100.

Hasil capaian indikator persentase penduduk miskin tahun 2024 sebesar 2,23% dari target 1,80% sehingga capaian kinerja menjadi -124% yang artinya belum mencapai target yang ditetapkan.. Jika dibandingkan Tahun 2023 sebesar 2,30% dari target yang ditetapkan pada RPJMD sebesar 1,95% dengan capaian kinerja masih belum mencapai target yaitu -118%. Sedangkan pada tahun 2022 indikator persentase penduduk miskin sebesar 2,53% dari target sebesar 2% berarti capaian kinerjanya sebesar -126,5. Hasil capaian indikator persentase penduduk miskin tahun 2024 lebih rendah capaiannya dibandingkan tahun 2023. Hal ini menggambarkan bahwa walaupun belum mencapai target, namun persentase penduduk miskin setiap tahunnya mengalami penurunan. Secara lengkap target dan realisasi indikator persentase penduduk miskin di Kabupaten Badung tahun 2022-2024 seperti gambar berikut:

Gambar 3.26
Target dan Realisasi Indikator Persentase Penduduk Miskin
di Kabupaten Badung Tahun 2022-2024



Sumber Data : Dinas Sosial Kabupaten Badung Tahun 2024

Data jumlah dan persentase penduduk tergolong miskin di Kabupaten Badung pada tahun 2024 masih terkendali 2,23%, menjadi Kabupaten dengan persentase penduduk miskin urutan nomor 9 wilayah Provinsi Bali. Adapun rincian perbandingan jumlah penduduk miskin pada Kabupaten/Kota di Wilayah Provinsi Bali periode Tahun 2024 seperti gambar berikut :

Gambar 3.27
Perbandingan Jumlah Penduduk Miskin Pada Kabupaten/Kota Di Wilayah
Provinsi Bali Tahun 2024



Sumber Data : Dinas Sosial Kabupaten Badung Tahun 2024

Pemerintah Kabupaten Badung melaksanakan program-program strategis dalam penanganan kemiskinan. Program tersebut dapat memberikan nilai yang strategis dan bermanfaat dalam meningkatkan efektivitas penetapan sasaran untuk program perlindungan sosial.

Upaya untuk mewujudkan sasaran menurunnya angka kemiskinan didukung oleh 4 program. Program pendukung meliputi: Program Pemberdayaan Sosial, Program Rehabilitasi Sosial, Program Perlindungan Jaminan Sosial dan Program Penanganan Bencana. Pagu anggaran yang dialokasikan sebesar Rp. 14.148.210.254,- dengan realisasi sebesar Rp. 10.580.633.633,- dengan serapan anggaran sebesar 74,78%.

Faktor penghambat dalam pencapaian sasaran ini yaitu Kemajuan sosial dan ekonomi Kabupaten Badung masih terdapat penyandang disabilitas yang perlu mendapatkan penanganan dikarenakan belum terdata secara valid dan belum maksimalnya pemulihan ekonomi akibat pandemi sehingga memerlukan berbagai strategi untuk pemulihan ekonomi dan kesejahteraan sosial masyarakat.

Faktor pendorong dalam pencapaian indikator ini yaitu Komitmen Pimpinan dalam hal ini Bupati Badung beserta jajarannya selalu melaksanakan program/kegiatan pengentasan kemiskinan serta kesejahteraan sosial masyarakat secara menyeluruh, Pemulihan Ekonomi di Kabupaten Badung yang cukup masif, khususnya di sektor Pariwisata dan Meningkatnya kesadaran dan peran serta dunia usaha dalam program *Corporate Social Responsibility* (CSR).

Upaya-upaya yang akan dilakukan dalam upaya untuk menurunkan angka kemiskinan di Kabupaten Badung melalui : Memperluas akses kesejahteraan sosial, Peningkatan kuantitas dan kualitas program kesejahteraan sosial, Mengoptimalkan sarana dan prasarana kesejahteraan sosial, Memberikan Bantuan sosial kepada masyarakat Kabupaten Badung sebagai *social safety net* sebagai bentuk dukungan dalam mengurangi beban keluarga miskin dan rentan.

Berikut beberapa dokumentasi pelaksanaan kegiatan yang mendukung pengentasan kemiskinan di Kabupaten Badung.

	Penyerahan Bantuan kepada korban kebakaran di Br. Silayukti Kerobokan
	Menindaklanjuti Lansia yang di telantarkan di Taman Griya, Jimbaran Kuta Selatan.

**Analisis Kinerja Sasaran 14 :
Meningkatnya Pengembangan Daya Tarik Destinasi Pariwisata
Berorientasi Pertanian**

Sektor pariwisata sangat berperan dalam pembentukan besarnya nilai tambah ini, termasuk keberadaan DTW (Daya Tarik Wisata) turut memberi sumbangan besar terhadap perkembangan perekonomian Kabupaten Badung. Hal ini dapat dilihat dari total kunjungan wisatawan ke Kabupaten Badung sepanjang Tahun 2024 sebanyak 8.568.282 terdiri atas 6.438.123 orang kunjungan wisatawan mancanegara dan 2.130.159 orang kunjungan wisatawan domestik. Sedangkan pada tahun 2023 sebanyak 7.298.643 terdiri atas 5.386.878 orang kunjungan wisata mancanegara dan 1.911.765 kunjungan wisata domestik. Berdasarkan data tersebut bahwa pada tahun 2024 total kunjungan wisatawan lebih tinggi dibandingkan tahun 2023.

Kondisi geografis Kabupaten Badung yang memiliki dataran rendah berupa kawasan pantai kemudian dataran tinggi yang di dominasi oleh wilayah pertanian khususnya Badung bagian utara. Dengan total luas lahan pertanian kurang lebih 20.283 Hektar, hal ini menjadi potensi wisata dimana Kabupaten Badung gencar dalam pembangunan desa wisata dan wisata berbasis agro.

Hasil capaian sasaran Meningkatkan Pengembangan Daya Tarik Destinasi Pariwisata Berorientasi Pertanian tahun 2024 sebesar 7,69% dari target yang telah ditetapkan di RPJMD sebesar 7,69% sehingga capaian kinerja 100%. Dibandingkan tahun 2023 capaian sasaran sebesar 5,12% dari target 5,12%. Sedangkan pada tahun 2022 capaian sasaran Meningkatkan Pengembangan Daya Tarik Destinasi Pariwisata Berorientasi Pertanian sebesar 2,56% dan telah mencapai target yang telah ditetapkan dengan capaian kinerja 100%. Adapun capaian sasaran Meningkatkan Pengembangan Daya Tarik Destinasi Pariwisata Berorientasi Pertanian tahun 2022-2024 secara lengkap dapat dilihat gambar dibawah ini:

Gambar 3.28

Capaian indikator Meningkatnya Pengembangan Daya Tarik Destinasi Pariwisata Berorientasi Pertanian tahun 2022-2024



Sumber data : Dinas Pariwisata Kabupaten Badung Tahun 2024

Upaya untuk mewujudkan sasaran Meningkatnya Pengembangan Daya Tarik Destinasi Pariwisata Berorientasi Pertanian didukung oleh 4 program. Program pendukung meliputi: program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata, Program Pengembangan Ekonomi kreatif melalui pemanfaatan dan perlindungan hak kekayaan intelektual, Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif dan Program Perekonomian dan Pembangunan. Pagu anggaran yang dialokasikan sebesar Rp. 31.711.978.112,- dengan realisasi sebesar Rp. 1.262.051.569,- dengan serapan anggaran sebesar 3,98%.

Faktor pendorong dalam pencapaian sasaran ini yaitu Kondisi Kabupaten Badung yang kondusif menarik minat wisatawan untuk berkunjung ke Kabupaten Badung, Adanya koordinasi/kerja sama yang baik antara Dinas Pariwisata dengan *Stakeholder* pariwisata dalam menjalankan berbagai program kepariwisataan yang telah direncanakan, Adanya berbagai ragam daya tarik wisata baik budaya maupun wisata buatan, adanya dukungan masyarakat terhadap pengembangan dan pembangunan pariwisata

di Kabupaten Badung. Sedangkan faktor penghambat dalam pencapaian sasaran ini yaitu belum optimalnya pengembangan desa wisata yang merupakan pariwisata yang berbasis masyarakat (*Based community Tourism*) dan Pelatihan Sumber Daya Manusia di Bidang Pariwisata belum maksimal.

Upaya-upaya yang akan dilakukan untuk mendukung sasaran Meningkatkan Pengembangan Daya Tarik Destinasi Pariwisata Berorientasi Pertanian yaitu Penataan DTW pantai Pandawa, lanjutan penataan DTW Uluwatu, Pantai Jimbaran dan Pancoran Solas, Pelatihan SDM pariwisata untuk manajemen keuangan ekraf,sertifikasi pengolahan makanan, pelatihan dan Pendataan usaha ekonomi kreatif.

Berikut beberapa dokumentasi kegiatan yang mendukung sasaran Meningkatkan Pengembangan Daya Tarik Destinasi Pariwisata Berorientasi Pertanian.

	Penataan DTW Nungnung
	Penataan DTW Uluwatu



Pelatihan SDM Pariwisata
Agrowisata

**Analisis Kinerja Sasaran 15 :
Meningkatnya Pengembangan Agroindustri yang Berorientasi
Pada Pelestarian Sumber Daya Alam**

Percepatan pemulihan ekonomi Daerah menjadi hal yang mendasar yang harus diwujudkan pada tahun 2024. Guna mewujudkan tercapainya percepatan pemulihan ekonomi perlu dilakukan revitalisasi sektor-sektor unggulan dan penguatan ekonomi kerakyatan. Fokus kebijakan perekonomian Kabupaten Badung tahun 2024 salah satu diantaranya adalah meningkatkan produktivitas pertanian dalam arti luas, yang berorientasi pada sistem agrobisnis dan agroindustri guna mempertahankan swasembada pangan, ketahanan pangan daerah, menjaga kelestarian lingkungan dan menunjang pariwisata.

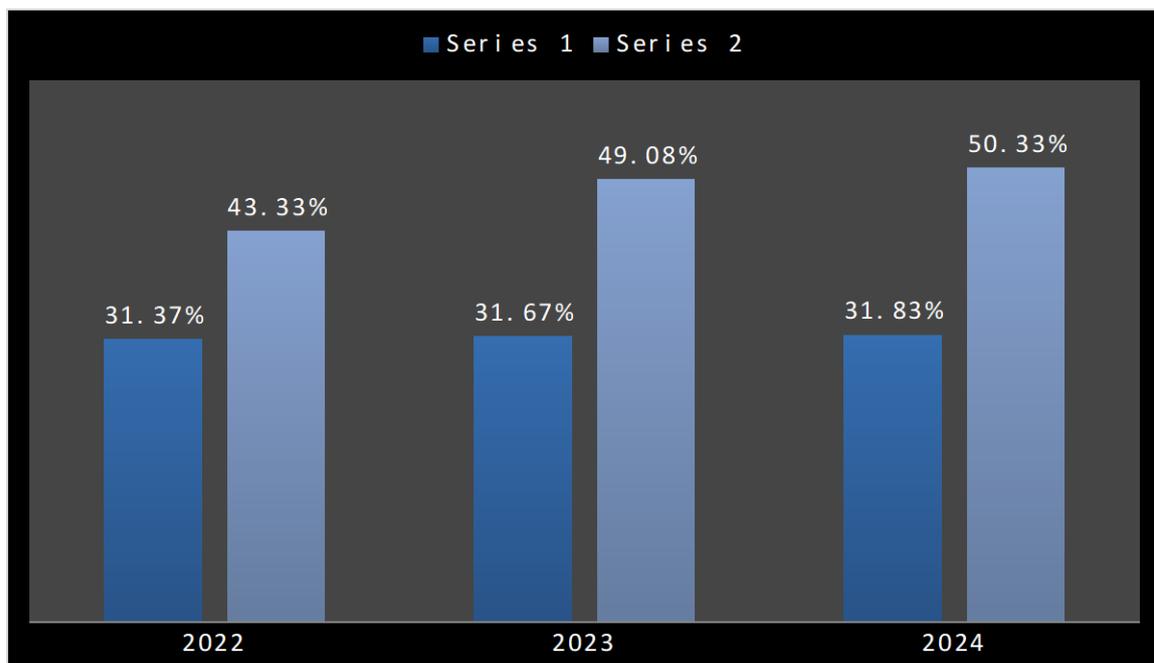
Strategi yang tengah dilakukan oleh Kabupaten Badung dalam Meningkatkan Pengembangan Agroindustri yang Berorientasi Pada Pelestarian Sumber Daya Alam yakni Meningkatkan Jumlah pelaku dan produk agro industri yang berorientasi pada pelestarian sumber daya alam dan Peningkatan Pengendalian Sumber - Sumber Pencemaran Lingkungan Hidup.

Hasil capaian sasaran Meningkatkan Pengembangan Agroindustri yang Berorientasi Pada Pelestarian Sumber Daya Alam tahun 2024 sebesar 50,33% dari target yang ditetapkan sebesar 31,83% sehingga capaian kinerja menjadi

158%. Dibandingkan tahun 2023 capaian sasaran sebesar 49,08% dari target yang ditetapkan sebesar 31,67% yang artinya capaian kinerja melebihi target yaitu 155%. Sedangkan pada tahun 2022 capaian sasaran Meningkatnya Pengembangan Agroindustri yang Berorientasi Pada Pelestarian Sumber Daya Alam sebesar 43,33% dan telah melampaui target yang ditetapkan yakni sebesar 31,37% dengan capaian kinerja 138,12%. Adapun capaian sasaran Meningkatnya Pengembangan Agroindustri yang Berorientasi Pada Pelestarian Sumber Daya Alam tahun 2022-2024 secara lengkap dapat dilihat gambar dibawah ini :

Gambar 3.29

Capaian Sasaran Meningkatnya Pengembangan Agroindustri yang Berorientasi Pada Pelestarian Sumber Daya Alam tahun 2022-2024



Sumber data : Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Tahun 2024

Upaya untuk mewujudkan sasaran Meningkatnya Pengembangan Agroindustri yang Berorientasi Pada Pelestarian Sumber Daya Alam didukung oleh 3 program. Program pendukung meliputi: program Perencanaan Dan Pembangunan Industri, Program Pengendalian Izin Usaha Industri Kabupaten/Kota Dan Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (Kehati). Pagu anggaran yang dialokasikan sebesar Rp. 144.743.702.489,- dengan

realisasi sebesar Rp. 21.128.599.611,- dengan serapan anggaran sebesar 14,60%.

Faktor Pendorong dalam pencapaian sasaran ini yaitu Memberikan sosialisasi dan pemahaman terhadap kegiatan pembinaan dan pelatihan serta pentingnya langkah perbaikan yang dilakukan oleh IKM (Industri Kecil Menengah) dan Koordinasi internal yang baik dengan EO maupun IKM (Industri Kecil Menengah) yang akan dilibatkan pada kegiatan pameran. Sedangkan faktor penghambatnya yaitu Kurangnya kesadaran dari pelaku IKM untuk mendaftarkan usahanya pada SIINAS.

Upaya yang akan dilaksanakan untuk mendukung sasaran Meningkatnya Pengembangan Agroindustri yang Berorientasi Pada Pelestarian Sumber Daya Alam yaitu Menyusun rencana pelatihan yang jelas, mencakup tujuan, materi, metode, dan durasi pelatihan. Rencana ini harus disesuaikan dengan tingkat pemahaman dan kemampuan peserta, pendampingan Pasca pelatihan, setelah pelatihan selesai, melakukan tindak lanjut untuk memastikan bahwa peserta dapat mengimplementasikan pengetahuan dan keterampilan yang diperoleh dalam pekerjaan menenun songket. Berikut beberapa dokumentasi kegiatan yang mendukung sasaran Pengembangan Agroindustri.



Pelaksanaan Pengawasan dan Pembinaan ke IKM Protex Indo, alamat : Banjar Tegal Permai Blok P3/61, Kel. Kerobokan Kaja, Kec. Kuta Utara, dengan produk Kosmetik, Pada Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan terhadap Perizinan Berusaha sektor perindustrian yang menjadi kewenangan Kabupaten/Kota



Penutupan Pelatihan Pembuatan Jajan Upacara pada Sub Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri di Desa Pendarungan, Kecamatan Mengwi



Pembukaan Kegiatan Pembinaan Gugus Kendali Mutu (GKM) di CV. Aridarma Sejahtera (Bali Garmen) pada Hari Selasa, 9 Juli 2024

Analisis Kinerja Sasaran 16 : Meningkatnya Kuantitas, Kualitas, dan Kontinuitas Produk Pertanian

Pemerintah Kabupaten Badung mempunyai komitmen yang tinggi untuk mewujudkan kualitas produk pertanian dan perikanan yang baik, hal ini terlihat dalam RPJMD 2021-2026 dengan perumusan sasaran strategis Meningkatkan Kuantitas, Kualitas dan Kontinuitas Produk Pertanian.

Indikator 1 : Nilai Tukar Usaha Petani (NTUP)

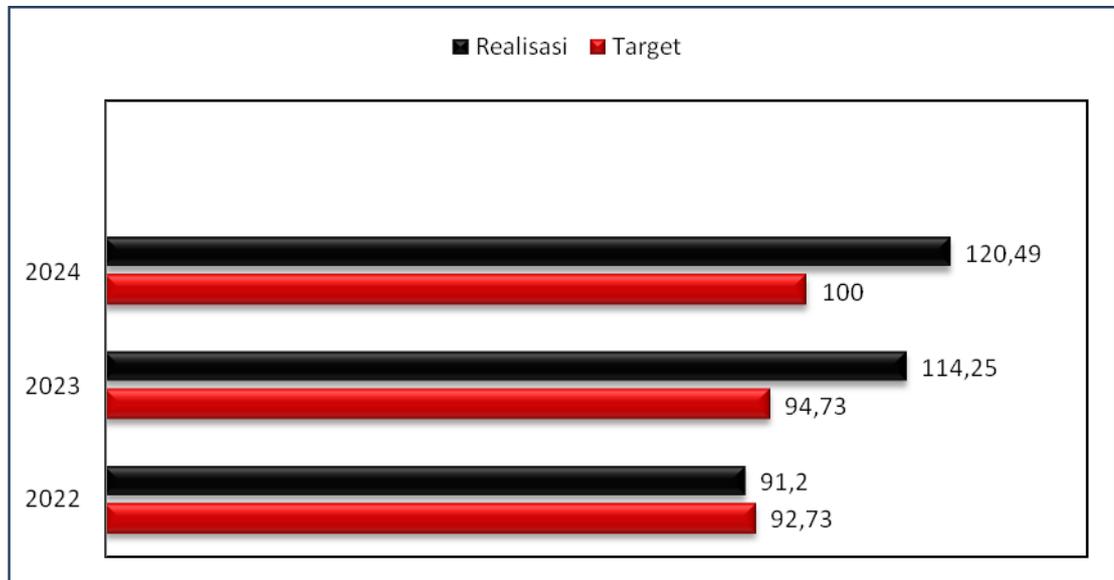
Pertanian merupakan kegiatan mengelola sumber daya alam hayati dengan bantuan teknologi, modal, tenaga kerja, dan manajemen untuk menghasilkan komoditas pertanian yang mencakup tanaman pangan,

hortikultura, perkebunan, dan/atau peternakan dalam suatu agroekosistem. Sektor pertanian mempunyai peranan yang sangat penting dalam membangun perekonomian nasional termasuk perekonomian daerah, karena sektor pertanian berfungsi sebagai penyedia bahan pangan untuk ketahanan pangan masyarakat, sebagai instrumen pengentasan kemiskinan, penyedia lapangan kerja.

Sebagai wujud dukungan pemerintah dalam mempertahankan aktivitas sektor pertanian, maka Pemerintah Kabupaten Badung berkomitmen untuk selalu memberikan perhatian bagi kebutuhan dasar para petani. Salah satu diantaranya adalah pemberian subsidi pupuk kepada para petani, selain untuk meringankan beban pengeluaran bagi para petani hal ini juga untuk mendorong peningkatan Nilai Tukar Usaha Petani (NTUP). Sehingga dirumuskan indikator Nilai Tukar Usaha Petani dalam RPJMD Semesta Berencana Tahun 2021-2026.

Hasil capaian indikator Nilai Tukar Usaha Petani (NTUP) pada sasaran Meningkatnya Kuantitas, Kualitas, dan Kontinuitas Produk Pertanian dengan indikator Nilai Tukar Usaha Petani tahun 2024 sebesar 120,49 dari target yang ditetapkan sebesar 100 sehingga capaian kinerjanya 120%. Dibandingkan tahun 2023, capaian indikator sebesar 114,25% dari target yang ditetapkan sebesar 94,73%. Sedangkan pada tahun 2022 capaian indikator Nilai Tukar Usaha Petani (NTUP) sebesar 91,2% atas target yang telah ditetapkan yakni sebesar 92,73%. Adapun capaian indikator Nilai Tukar Usaha Petani (NTUP) tahun 2022-2024 secara lengkap dapat dilihat gambar dibawah ini :

Gambar 3.30
Capaian Indikator Nilai Tukar Usaha Petani (NTUP)
Tahun 2022-2024



Sumber data : Dinas Pertanian dan Pangan Tahun 2024

Upaya untuk meningkatkan Nilai Tukar Usaha Petani (NTUP) didukung oleh 8 program. Program pendukung meliputi: program Peningkatan Diversifikasi Dan Ketahanan Pangan Masyarakat, Program Penanganan Kerawanan Pangan, Program Pengawasan Keamanan Pangan, Program Penyediaan Dan Pengembangan Sarana Pertanian, Program Penyediaan Dan Pengembangan Prasarana Pertanian, Program Pengendalian Kesehatan Hewan Dan Kesehatan Masyarakat Veteriner, Program Pengendalian Dan Penanggulangan Bencana Pertanian Dan Program Penyuluhan Pertanian. Pagu anggaran yang dialokasikan sebesar Rp. 52.490.123.063,- dengan realisasi sebesar Rp. 40.114.610.464,- dengan serapan anggaran sebesar 76,42%.

Faktor pendorong dalam pencapaian indikator Nilai Tukar Usaha Petani (NTUP) yaitu adanya komitmen yang kuat dari pimpinan daerah, keingintahuan masyarakat tentang peningkatan gizi sangat tinggi dan Badung mempunyai keaneka ragaman pangan yang melimpah

Faktor penghambat dalam pencapaian indikator Nilai Tukar Usaha Petani (NTUP) meliputi : Luas lahan pertanian yang semakin menyusut, Kesuburan lahan yang semakin berkurang, Rata-rata umur petani sawah diatas 50 tahun (kurang produktif), Penanganan Pasca panen yang kurang memadai, Adanya aturan PDN yang menyebabkan serapan anggaran kecil (vaksin hewan), Minat kelompok tani untuk memperpanjang sertifikat dan registrasi rendah dan Kurangnya dukungan sebagian kelompok aspirasi dalam pelaksanaan kegiatan sesuai pedoman.

Upaya yang akan dilakukan dalam pencapaian indikator ini meliputi :

1. Intervensi di peningkatan provitas di setiap musim tanam
2. Pengecekan pH, pola tanam dan perlakuan pupuk berimbang spesifikasi lokasi
3. Pendampingan penerapan budidaya secara intens
4. Pelatihan, monitoring dan penerapan teknologi mekanisasi
5. Mensosialisasikan kepada poktan pentingnya registrasi dan sertifikasi produk serta mengusulkan kegiatan di APBD Kabupaten dan Pemerintah Provinsi
6. Memastikan terhadap kelompok aspirasi yang mendapat alokasi kegiatan dapat melaksanakan kegiatan sesuai dengan ketentuan yang ada jika tidak ada akan dicarikan lokasi yang lain.

Berikut beberapa dokumentasi kegiatan yang mendukung indikator Nilai Tukar Usaha Petani (NTUP) di Kabupaten Badung Tahun 2024.



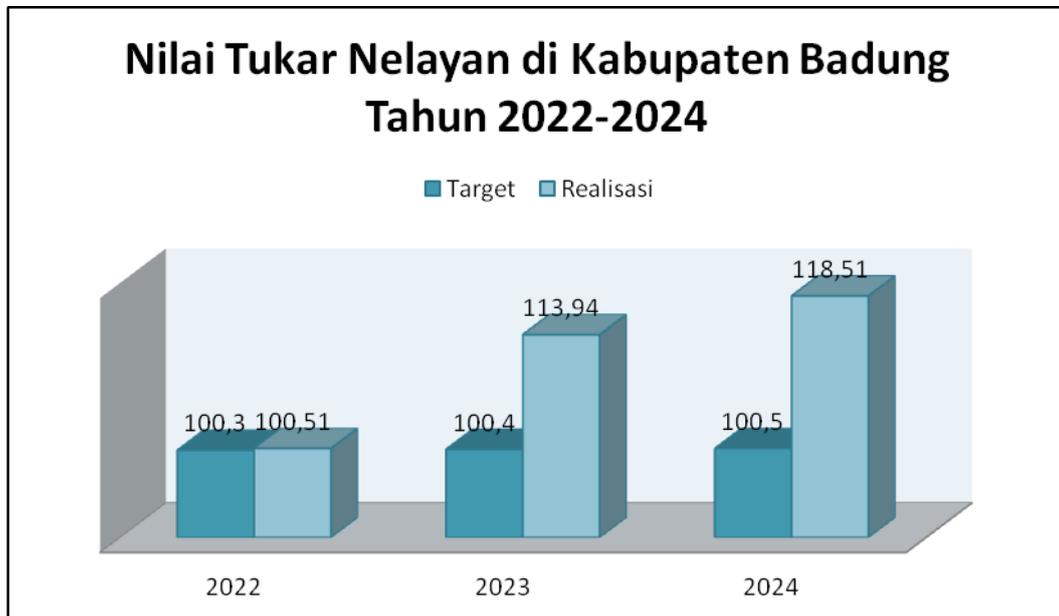
Indikator 2 : Nilai Tukar Nelayan (NTN)

Nilai Tukar Nelayan (NTN) adalah rasio antara indeks harga yang diterima nelayan dengan indeks harga yang dibayar nelayan dan dinyatakan dalam persentase. Pemerintah sangat memberikan perhatian terhadap keberadaan nelayan di wilayahnya, hal ini diwujudkan dengan dikembangkan nya aplikasi Fish Go oleh Badan Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Badung. Dimana dengan aplikasi ini nelayan dapat mengetahui posisi ikan berkumpul, sehingga nelayan dapat melakukan efisiensi bahan bakar karna pergerakan kapal nelayan menjadi lebih tepat sasaran. Dan yang paling penting adalah jumlah tangkapan nelayan menjadi meningkat dan dapat meningkatkan kesejahteraan nelayan.

Hasil capaian indikator Nilai Tukar Nelayan (NTN) pada sasaran Meningkatnya Kuantitas, Kualitas, dan Kontinuitas Produk Pertanian tahun 2024 sebesar 118,51 dari target yang ditetapkan sebesar 100,50 sehingga capaian kinerja sebesar 118%. Dibandingkan tahun 2023 capaian Indikator Nilai Tukar Nelayan sebesar 113,94% dari target yang ditetapkan sebesar 100,40% dengan capaian kinerja melebihi target yaitu 113%. Sedangkan pada tahun 2022 indikator Nilai Tukar Nelayan (NTN) sebesar 100,51% dan telah melampaui target yang telah ditetapkan yakni sebesar 100,3% dengan capaian kinerja 100,2%. Adapun capaian indikator Nilai Tukar Nelayan (NTN) tahun 2022-2023 secara lengkap dapat dilihat gambar dibawah ini :

Gambar 3.31

Capaian Indikator Nilai Tukar Nelayan (NTN) Tahun 2022-2024



Sumber data : Dinas Perikanan Tahun 2024

Pengukuran Indikator Nilai Tukar Nelayan (NTN) Tahun 2024 dilaksanakan melalui pihak ketiga yaitu Badan Pusat Statistik. Dimana pada tahun 2023 pengukuran indikator masih dilaksanakan oleh Dinas Perikanan Kabupaten Badung, sehingga formula yang digunakan untuk penghitungan berbeda. Dinas perikanan menangani produksi ikan ataupun wisata bahari di lingkungan Kabupaten Badung. Berikut data target dan realisasi Produksi Perikanan:

Tabel 3.10

Target dan Produksi Perikanan di Kabupaten Badung
Tahun 2022-2024

No	Tahun	Target	Realisasi
1	2022	8.074 ton	8.115,39
2	2023	8.636 ton	9.839,71
3	2024	8.809 ton	11.867,55

Sumber data : Dinas Perikanan Tahun 2024

Upaya untuk meningkatkan Nilai Tukar Nelayan (NTN) didukung oleh 4 program. Program pendukung meliputi: Program Pengelolaan Perikanan Tangkap, Program Pengelolaan Perikanan Budidaya, Program Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan, Program Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan. Pagu anggaran yang dialokasikan sebesar Rp. 5.219.006.882,- dengan realisasi sebesar Rp. 4.451.962.565,- dengan serapan anggaran sebesar 85,30%%.

Faktor pendorong dalam pencapaian indikator Nilai Tukar Nelayan (NTN) meliputi : Support dan bimbingan pimpinan serta koordinasi dengan instansi pengampu dinas dalam penyelesaian masalah, peluang pasar untuk produk hasil perikanan budidaya yang cukup besar khususnya untuk jenis ikan lele dan nila, Pendampingan tenaga penyuluh perikanan dan sarana dan prasarana yang tersedia memadai dan Responsip Nelayan dan Pembudidaya Ikan sangat baik.

Faktor penghambat dalam pencapaian indikator ini yaitu : Terbatasnya ketersediaan sumber daya aparatur pada Dinas Perikanan sehingga mengalami keterbatasan dalam pelaksanaan program dan kegiatan, Terbatasnya kualitas SDM Pembudidaya Ikan dalam penguasaan dan penerapan teknologi budidaya perikanan dan Fluktuasi harga pakan ikan yang cukup tinggi.

Upaya yang akan dilakukan dalam pencapaian indikator Nilai Tukar Nelayan (NTN) meliputi :

1. Kunjungan dan Pembinaan Kelompok Nelayan dan Pembudidaya Ikan
2. Rehabitasi Kolam perbenihan ikan air tawar
3. Hibah Sarana dan Prasarana kepada kelompok nelayan
4. Hibah Sarana dan Prasarana kepada kelompok pembudidaya ikan
5. Pendistribusian benih ikan air tawar

Berikut beberapa dokumentasi kegiatan yang mendukung indikator Nilai Tukar Nelayan (NTN) di Kabupaten Badung Tahun 2024.

	<p>Restocking diseluruh Irigasi di Kecamatan Mengwi, Kita Utara dan Petang</p>
	<p>Penebaran Benih pada Bioplok di Kelompok GS Mina Abadi Banjar Pande, Abiansmal, Badung</p>
	<p>Uji Sampel Ikan utk Pengecekan Formalin dan Histamin</p>



Pemberian bibit benih ikan gratis kepada masyarakat di Kabupaten Badung

**Analisis Kinerja Sasaran 17:
Meningkatnya Kontribusi Sektor Pariwisata Terhadap PDRB**

Sektor pariwisata merupakan salah satu sektor primadona dan motor penggerak roda pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Badung, sehingga menjadi prioritas utama dalam pembangunan daerah. Sektor Pariwisata merupakan sumber tambahan penghasilan bagi masyarakat dan pemerintah di Kabupaten Badung. Pada saat virus COVID-19, sepihnya pariwisata sangat berdampak di Provinsi Bali dan khususnya Kabupaten Badung. Oleh karena itu, sasaran meningkatnya Kontribusi Sektor Pariwisata Terhadap PDRB dengan indikator Persentase Kontribusi Sektor Pariwisata Terhadap PDRB merupakan bentuk komitmen menjaga keberlangsungan sektor kepariwisataan.

Destinasi wisata di Kabupaten Badung merupakan salah satu tujuan utama wisatawan baik domestik atau mancanegara. Berikut jumlah data kunjungan wisawatan Tahun 2022-2024 dan jumlah usaha sarana pariwisata per kecamatan di Kabupaten Badung :

Tabel 3.11

Jumlah kunjungan wisatawan pada tahun 2022-2024

NO	TAHUN	JUMLAH KUNJUNGAN	
		Domestik	Mancanegara
1	2022	1.573.429	2.212.789
2	2023	1.911.765	5.386.878
3	2024	2.130.159	6.438.123

Sumber data : Dinas Pariwisata Kabupaten Badung 2021-2024

Tabel 3.12

Jumlah usaha sarana pariwisata per kecamatan di Kabupaten Badung Tahun 2024

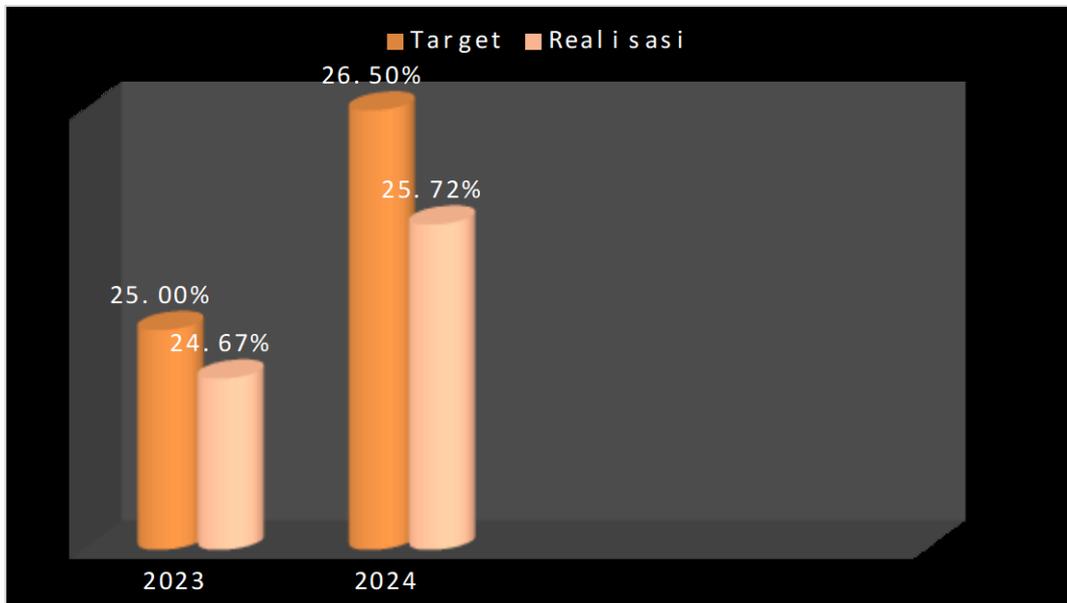
NO	KECAMATAN	JUMLAH USAHA SARANA PARIWISATA			
		RESTORAN	RUMAH MAKAN	BAR	CATERING
1	PETANG	-	25	-	-
2	ABIANSEMAL	6	108	-	2
3	MENGWI	111	152	16	4
4	KUTA UTARA	392	163	52	10
5	KUTA	354	155	41	16
6	KUTA SELATAN	286	211	36	5
TOTAL KABUPATEN BADUNG		1.149	814	143	37

Sumber data : Dinas Pariwisata Kabupaten Badung 2024

Hasil capaian sasaran strategis meningkatnya kontribusi sektor pariwisata terhadap PDRB dengan indikator persentase kontribusi sektor pariwisata terhadap PDRB pada tahun 2024 sebesar 25,72% dari target yang ditetapkan sebesar 26,50% sehingga capaian kinerja 97%. Jika dibandingkan dengan tahun 2023 capaian indikator sebesar 24,67% dari target 25%. Perbandingan target dan realisasi tahun 2023 dan 2024 di Kabupaten Badung seperti gambar berikut :

Gambar 3.32

Target dan Capaian Sasaran Meningkatnya Kontribusi Sektor Pariwisata terhadap PDRB di Kabupaten Badung Tahun 2023-2024



Sumber data : Dinas Pariwisata Kabupaten Badung 2024

Upaya untuk mewujudkan sasaran meningkatnya kontribusi sektor pariwisata terhadap PDRB didukung oleh 1 program. Program pendukung meliputi: Program Pemasaran pariwisata. Pagu anggaran yang dialokasikan sebesar Rp. 14.140.140.325,- dengan realisasi sebesar Rp. 7.452.945.940,- dengan serapan anggaran sebesar 52,71%. Serapan anggaran sebesar 52,71% disebabkan karena adanya pergeseran anggaran untuk kegiatan prioritas lainnya.

Faktor pendorong dalam pencapaian sasaran ini yaitu Kondisi Kabupaten Badung yang kondusif menarik minat wisatawan untuk berkunjung ke Kabupaten Badung, Adanya koordinasi/kerja sama yang baik antara Dinas Pariwisata dengan Stakeholder pariwisata dalam menjalankan berbagai program kepariwisataan yang telah direncanakan, Adanya berbagai ragam daya tarik wisata baik dalam budaya dan buatan, Adanya dukungan masyarakat terhadap pengembangan dan pembangunan pariwisata di Kabupaten Badung. Sedangkan Faktor penghambat dalam pencapaian persentase kontribusi sektor pariwisata terhadap PDRB adalah Belum

optimalnya pengembangan desa wisata yang merupakan pariwisata yang berbasis masyarakat (*Based community Tourism*)

Strategi dan upaya-upaya yang akan dilakukan untuk meningkatkan capaian indikator ini meliputi: Meningkatkan kunjungan wisatawan ke Kabupaten Badung , meningkatkan kualitas SDM pariwisata dan ekonomi kreatif , meningkatkan Pendapatan dari retribusi obyek wisata dan meningkatkan kualitas Industri Pariwisata . Berikut beberapa dokumentasi kegiatan yang mendukung peningkatan Pariwisata di Kabupaten Badung Tahun 2024.



Analisis Kinerja Sasaran 18: Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup Berkelanjutan

Indeks Kualitas lingkungan hidup merupakan data dan informasi mengenai kualitas lingkungan hidup di Kabupaten Badung terkait dengan Tiga indikator yaitu kualitas udara, air dan tutupan hutan. IKLH disusun berdasarkan basis data hasil pengamatan yang dilakukan setiap tahun dengan menggunakan parameter yang telah ditetapkan. IKLH menjadi hal yang sangat penting diketahui mengingat saat ini tantangan yang dihadapi para pihak dalam pelaksanaan pembangunan semakin berat dan kompleks.

IKLH berfungsi untuk memberikan informasi kepada para pengambil keputusan Pemerintah Kabupaten Badung tentang kondisi lingkungan, sebagai bahan untuk evaluasi terhadap kebijakan pembangunan berkelanjutan dan bentuk pertanggungjawaban tentang pencapaian target program-program Pemerintah Kabupaten Badung di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Perhitungan IKLH meliputi Indeks Kualitas Air (IKA) dengan bobot 30%, Indeks Kualitas Udara (IKU) dengan bobot 30% dan Indeks Tutupan Lahan (ITL) dengan bobot sebesar 40%. Klasifikasi indeks kualitas lingkungan hidup seperti berikut:

- 1) Sangat Baik : > 90
- 2) Baik : 70 - 90
- 3) Sedang : 50 - 70
- 4) Buruk : 25 - 50
- 5) Sangat Buruk : 0 - 25

Hasil capaian sasaran strategis meningkatnya kualitas lingkungan hidup berkelanjutan dengan indikator indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) tahun 2024 sebesar 69,44 dengan klasifikasi (sedang) dari target yang ditetapkan sebesar 61,72 sehingga capaian kinerjanya 112% melebihi target. Jika dibandingkan dengan tahun 2023 sebesar 69,06 dari target yang ditetapkan sebesar 61,64. Sedangkan pada tahun 2022 capaian indikator

indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) sebesar 67,12 dari target sebesar 61,55. Hasil capaian indikator IKLH tahun 2023 termasuk kategori sedang karena nilainya berkisar antara 50 - 70. Gambaran target dan realisasi indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) tahun 2022-2024 seperti gambar berikut:

Gambar 3.33
Target dan Capaian Indikator IKLH Kabupaten Badung
Tahun 2022-2024

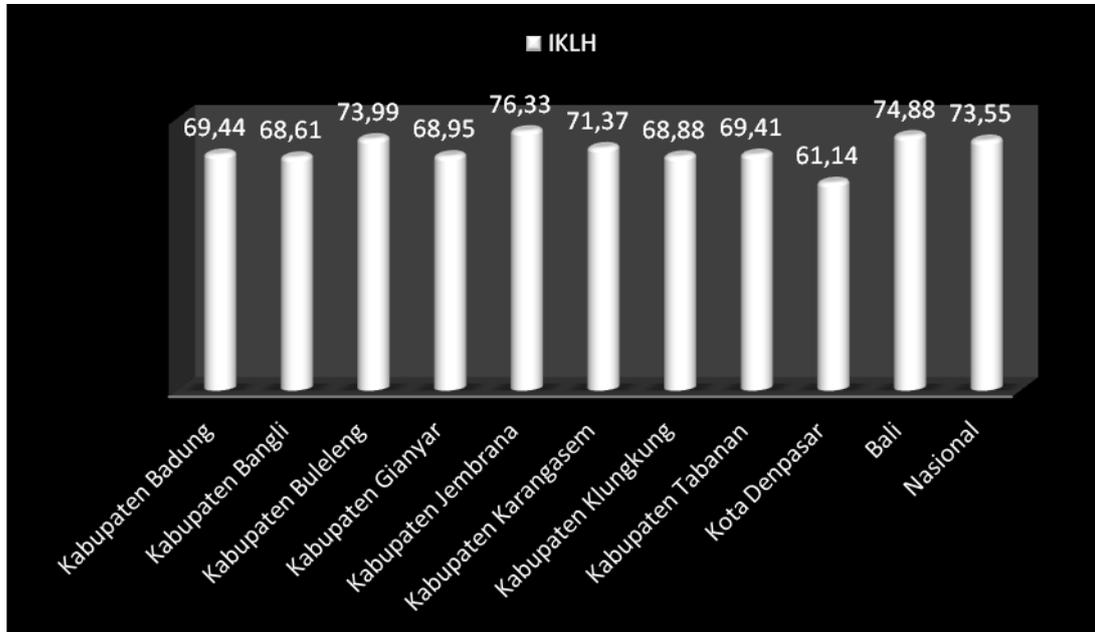


Sumber Data : Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kab. Badung, 2024

Berdasarkan variabel IKLH pada tahun 2024 menunjukkan capaian variabel Indeks Kualitas Udara (IKU), Indeks Kualitas Air (IKA) dan Indeks Kualitas Lahan (IKL) capaiannya meningkat. Nilai IKLH Kabupaten Badung didapatkan hasil sebesar 69,44 yang merupakan kategori SEDANG.

Distribusi hasil capaian indikator IKLH menurut kabupaten/kota di Provinsi Bali tahun 2024 menunjukkan bahwa capaian IKLH tertinggi Kabupaten Jembrana sebesar 76,33 dan yang terendah Kota Denpasar sebesar 61,14 dan capaian IKLH Provinsi Bali sebesar 74,88 serta IKLH nasional sebesar 73,55. Perbandingan IKLH menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Bali dan Nasional seperti gambar berikut :

Gambar 3.34
Perbandingan IKLH Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Bali dan Nasional
Tahun 2024



Sumber Data : Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kab. Badung 2024
Upaya untuk mewujudkan sasaran meningkatnya indeks kualitas lingkungan hidup didukung oleh 4 program. Program yang mendukung pencapaian sasaran ini meliputi: Program Pengendalian Pencemaran Dan/Atau Kerusakan Lingkungan Hidup, Program Pengendalian Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) Limbah Bahan Berbahaya dan Limbah Beracun, Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan Dan Penyuluhan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat, dan Program Pengelolaan Persampahan. Pagu anggaran yang dialokasikan sebesar Rp. 173.930.984.859,- dengan realisasi sebesar Rp. 109.202.508.821,- dengan serapan anggaran sebesar 62,78%.

Faktor pendorong meningkatnya indeks kualitas lingkungan hidup di Kabupaten Badung antara lain :

1. Komitmen kepala daerah dalam menjaga kelestarian lingkungan dengan menerapkan kebijakan pro environment dalam pembangunan di Kabupaten Badung.
2. Kesadaran masyarakat dan pengusaha untuk melakukan pengelolaan air limbah sehingga kualitas air bisa terjaga



3. Kesadaran masyarakat dan pengusaha untuk mengikuti ketentuan Koefisien Dasar Hijau (KDH) yang tertuang dalam peraturan tata ruang pada saat melakukan pembangunan
4. Kerjasama antar Desa/Kelurahan binaan tentang Lingkungan Hidup sesuai dengan target
5. Beroperasinya Pusat Daur Ulang (PDU) untuk mengurangi volume sampah yang dibawa ke TPA yang berkapasitas 10 ton/hari.
6. Optimalisasi TPS3R, TPST dan pengelolaan sampah di Rumah Tangga dengan penyediaan dana OP untuk TPS3R dan tersedianya DED Rumah kompos di TPST Mengwitani
7. Kesadaran masyarakat untuk menggunakan bahan bakar non subsidi dan melakukan uji emisi kendaraan sehingga kualitas udara bisa dijaga
8. Kerjasama antar desa binaan Proklamasi berjalan sesuai target
9. Adanya apresiasi dari Pemerintah Pusat ke desa/kelurahan yang melaksanakan Proklamasi dengan baik

Sedangkan faktor yang menjadi penghambat dalam peningkatan IKLH di Kabupaten Badung adalah :

1. Masifnya pembangunan usaha dan/atau kegiatan yang berimplikasi terhadap menurunnya kualitas air dan udara serta berkurangnya tutupan lahan
2. Meningkatnya daya beli masyarakat terhadap kendaraan bermotor sehingga menyebabkan menurunnya kualitas udara
3. Terbatasnya pengetahuan dan peran serta masyarakat dalam menjaga Lingkungan Hidup
4. Tidak adanya kegiatan monitoring dan evaluasi secara berkala terhadap pelaksanaan kegiatan
5. Meningkatnya besaran perkapita sampah masyarakat Badung dari 0,57 kg/org/hari (2021) menjadi 0,91 kg/org/hari (2024) sehingga jumlah volume sampah maupun karakteristiknya terus meningkat
6. Bertambahnya jumlah penduduk dan meningkatnya aktivitas perekonomian masyarakat khususnya di Kabupaten Badung,

berdampak pula pada peningkatan volume sampah serta jenis sampah yang dihasilkan, salah satunya adalah sampah plastik

7. Masih banyaknya pelaku usaha yang membuang air limbah tanpa melakukan pengolahan ke badan air
8. Kerjasama antar Desa/Kelurahan binaan tentang Lingkungan Hidup sesuai dengan target
9. Banyak ditemui desa yang tidak memiliki data terkait kegiatan Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan serta data Pemulihan Lingkungan. Padahal sesungguhnya mereka telah/pernah melaksanakan kegiatan dimaksud namun tidak tercatat dan/atau tidak terdokumentasi dengan baik. Hal ini cukup menjadi hambatan ketika kita bermaksud menyerap informasi awal di desa bersangkutan.

Strategi dan Upaya yang ditempuh untuk lebih optimalnya peningkatan IKLH di Kabupaten Badung yaitu:

1. Rekomendasi Kualitas Air:

- Melakukan aksi/program kegiatan pengendalian pencemaran air limbah yang berkelanjutan, khusus terkait dengan penghasil limbah cair.
- Membangun IPAL komunal di kawasan pariwisata dan permukiman padat dekat bagian tengah dan hilir sungai pada lokasi yang nilai BOD, COD, dan fecal coli melebihi baku mutu.
- Merencanakan pembuatan Kawasan peternakan terpadu, untuk mengendalikan jumlah fecal coli
- Melakukan identifikasi, analisa dan pemetaan usaha/bisnis/rumah tangga yang melakukan aktivitas pembuangan limbah langsung ke badan air/sungai
- Meningkatkan peran dunia usaha dalam pelaksanaan pembuangan air limbah ke badan air sesuai dengan perizinan mempertimbangkan alokasi beban pencemar
- Membangun Kerjasama pengelolaan sungai, khususnya pada sungai-sungai lintas kabupaten



- Melakukan sosialisasi untuk mendorong masyarakat berperan aktif menjaga sungai

2. Rekomendasi Kualitas Udara:

- Melakukan perencanaan program untuk pengoptimalan dan pembuatan *central parking* di pusat Kawasan wisata dan pemerintahan
- Perencanaan pembuatan jalur sepeda seperti di SAMIGITA untuk Kawasan perkantoran pemerintahan dan juga Kawasan pariwisata lainnya
- Perlu adanya penerapan kebijakan "*no private car day*" dan program bersepeda di kawasan kantor pemerintahan
- Melakukan uji emisi rutin pada Kawasan terminal, pariwisata dan pemerintahan
- Pembuatan program pengadaan kendaraan listrik sebagai mobil operasional pemerintah daerah
- Optimalisasi Transportasi Umum di Kawasan pariwisata

3. Rekomendasi Kualitas Lahan:

- Identifikasi serta perlu adanya program peningkatan luasan Rehabilitasi Hutan dan Lahan (RHL) di wilayah non Kawasan hutan
- Terus melakukan identifikasi, inventarisasi, dan penetapan lahan yang berpotensi menjadi RTH dan RHL di perkotaan, di Areal Penggunaan Lain (APL), serta di sempadan sungai/pantai/waduk
- Melakukan perencanaan program untuk dapat membuat kebun raya dan taman keanekaragaman hayati.
- Merencanakan dan menetapkan masterplan RTH
- Terus merawat dan melakukan penghijauan atau aforestasi di sekitar hutan mangrove di luar Kawasan TAHURA sehingga bisa di klaim sebagai tutupan hutan atau RTH milik Pemda Badung
- Mengendalikan Pencemaran dan/Atau Kerusakan Lingkungan Hidup Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten Badung

4. Desa/Kelurahan yang belum menyangand status Proklam akan diusulkan dan dibina di Tahun 2025
5. Perlu diadakan upaya-upaya pengelolaan sampah melalui sistem 3R (Reuse, Reduce, Recycle), sebagai salah satu cara pengelolaan sampah dari tingkat sumber sampah, sehingga mengurangi pembuangan sampah ke tempat pemrosesan akhir (TPA).
6. Melakukan Optimalisasi pengelolaan sampah dengan dukungan sarana dan prasarana yang memadai untuk mendukung kebersihan destinasi pariwisata yang terdapat di Kabupaten Badung.

Berikut dokumentasi kegiatan yang mendukung indikator IKLH di Kabupaten Badung Tahun 2024.



Pengelolaan Sampah, Sub Kegiatan Penanganan Sampah Melalui Pemilahan dan Pengolahan Sampah di Instalasi Pengolahan Sampah TPS3R, PDU, TPST, SPA, PSEL/PLTSa, RDF, Pusat Pengomposan, Biodigester, Bank Sampah dan Fasilitas Lainnya Sesuai dengan Peraturan Perundangan



Pencegahan/Penanggulangan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota



Pengumpulan Limbah B3 Dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota, Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengelolaan Limbah B3 dengan Pemerintah Provinsi dalam rangka Pengangkutan, Pemanfaatan, Pengolahan, dan/atau Penimbunan

Analisis Kinerja Sasaran 19: Meningkatnya Inovasi dan Kemandirian Daerah

Inovasi Daerah merupakan sarana Pemerintah untuk mendorong terciptanya penyelenggaraan Pemerintahan dan pembangunan masyarakat yang lebih produktif, efisien dan efektif. Penyelenggaraan Inovasi Daerah bertujuan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan publik; pemberdayaan dan peran serta masyarakat; dan peningkatan daya saing daerah. Manfaat dengan adanya suatu inovasi antara lain :

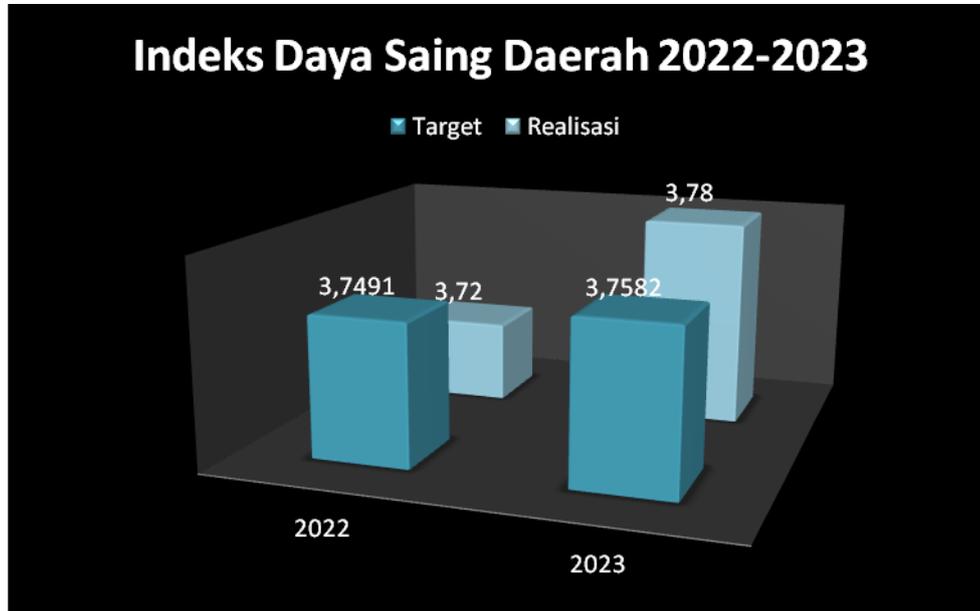
1. Menciptakan Peluang, hadirnya inovasi bisa menjadi peluang bagi seluruh orang untuk berlomba-lomba menunjukkan kreativitasnya agar menghasilkan suatu inovasi yang visioner.
2. Meningkatkan Produktivitas, sebab akan lebih banyak pekerjaan yang harus diselesaikan dengan cepat, sebelum ide-ide tersebut malah direbut orang lain.
3. Meningkatkan Kreativitas dan Percaya Diri, membuat sebuah inovasi mampu meningkatkan kreativitas serta mendorong rasa percaya diri yang tinggi. Sebab, sebuah inovasi bisa gagal jika seorang inovator malah ragu atas inovasi yang telah dibuatnya
4. Mampu Memecahkan Masalah, seorang inovator harus berpikir jernih agar bisa memecahkan masalah serta menemukan solusi terbaik agar inovasi yang diciptakan dapat berhasil
5. Bisa Meraih Kesuksesan, inovasi yang diciptakan menjadi salah satu jalan untuk meraih kesuksesan. Sebab, inovasi yang dibuat bisa menjadi kunci agar lebih sukses dari para pesaing lainnya, sehingga bisa mendapat keuntungan yang lebih besar dan mempercepat kesuksesan

Pemerintah Kabupaten Badung berkomitmen dalam meningkatkan inovasi daerah sehingga dirumuskan sasaran strategis meningkatnya inovasi dan kemandirian daerah dengan indikator Indeks Daya Saing Daerah (IDSD) dalam RPJMD Semesta Berencana Kabupaten Badung Tahun 2021-2026.

Indeks Daya Saing Daerah (IDSD) menjelaskan posisi relatif suatu daerah terhadap daerah lainnya dengan memperhatikan semua faktor-faktor pembentuk daya saing yang dimilikinya serta seberapa jauh daerah tersebut dapat merealisasikan potensi dari faktor-faktor tersebut. Daya saing adalah kemampuan perusahaan, industri, daerah, negara, atau antar daerah menghasilkan faktor pendapatan dan faktor pekerjaan yang relatif lebih tinggi dan berkesinambungan untuk menghadapi persaingan internasional. Oleh karena itu dalam konteks kabupaten/kota sebagai sebuah organisasi, daya saing diartikan sebagai kemampuan kabupaten/kota untuk mengembangkan kemampuan ekonomi sosial wilayahnya guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat di wilayahnya.

Capaian sasaran strategis meningkatnya inovasi dan kemandirian daerah dengan indikator Indeks Daya Saing Daerah (IDSD) tahun 2024 sampai dengan penyusunan dokumen LKjIP Kabupaten Badung Tahun 2024 tanggal 11 Maret 2025 belum rilis dari Badan Riset Inovasi Nasional (BRIN). Sehingga capaian yang tersedia terakhir yaitu capaian tahun 2023. Pada tahun 2023 capaian sebesar 3,78 dari target 3.7582 sehingga capaian kinerja melebihi target yaitu 100%. Sedangkan pada tahun 2022 capaian indikator Indeks Daya Saing Daerah (IDSD) sebesar 3,72 dari target 3,7491 sehingga capaiannya sebesar 99,22% dari target yang ditetapkan dalam RPJMD. Target dan Capaian indikator Indeks Daya Saing Daerah (IDSD) Tahun 2022-2023 dalam gambar berikut :

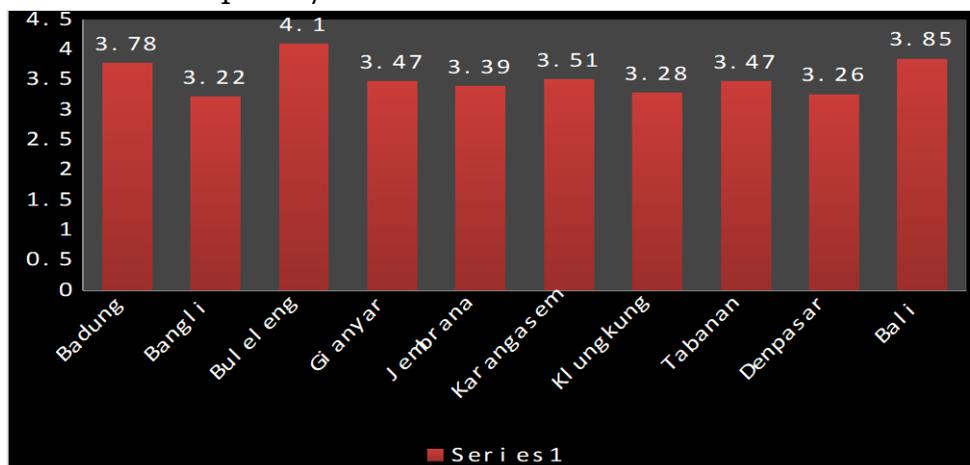
Gambar 3.35
Target dan Capaian indikator Indeks Daya Saing Daerah (IDSD)
Tahun 2022-2023



Sumber data : Badan Riset dan Inovasi Daerah Tahun 2022-2023

Pemerintah Kabupaten Badung menempati peringkat kedua untuk IDSD yaitu sebesar 3,78 dan peringkat pertama dengan nilai 4,10 yang ditempati oleh Kabupaten Buleleng. Nilai terendah ada pada Kabupaten Bangli dengan nilai 3,22. Berikut perbandingan IDSD kabupaten/kota di Provinsi Bali Tahun 2023:

Gambar 3.36
Perbandingan Indeks Daya Saing Daerah (IDSD)
Kabupaten/Kota di Provinsi Bali Tahun 2023



Sumber data : Badan Riset dan Inovasi Daerah Tahun 2023

Upaya untuk meningkatnya inovasi dan kemandirian daerah dengan indikator Indeks Daya Saing Daerah (IDSD) tahun 2024 didukung oleh 20 program. Program pendukung meliputi: Program Penelitian dan Pengembangan Daerah, Program Pengelolaan Pendapatan Daerah, Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA), Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum, Program Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan Regional, Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah, Program Penataan Bangunan Gedung, Program Penataan Bangunan dan Lingkungannya, Program Penyelenggaraan Jalan, Program Pengembangan Jasa Kontruksi, Program Penyelenggaraan Penataan Ruang, Program Pengembangan Perumahan, Program Kawasan Permukiman, Program Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh, Program Peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU), Program Peningkatan Sumber Daya Manusia Kesehatan, Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal, Program Promosi Penanaman Modal, Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal dan Program Penunjang Pemerintahan Daerah. Pagu anggaran yang dialokasikan sebesar Rp. 2.663.138.526.763,- dengan realisasi sebesar Rp. 2.310.111.381.801,- dengan serapan anggaran sebesar 86,74%.

Faktor Pendorong indikator Indeks Daya Saing Daerah (IDSD) yaitu Adanya Komitmen bersama antara Kepala Daerah bersama Kepala Perangkat Daerah terkait Penguatan dan Pengembangan Inovasi Daerah. Sedangkan Faktor penghambatnya adalah Keterbatasan Sumber Daya dan Kurangnya kolaborasi dan Komunikasi antar *stakeholder* terkait.

Upaya-upaya yang sudah dan akan dilaksanakan guna mendorong capaian sasaran strategis ini diantaranya :

1. Melaksanakan Sosialisasi Inovasi di Seluruh Perangkat Daerah dan Pemerintah Desa di Kabupaten Badung
2. Melaksanakan pendampingan Inovasi di 38 Perangkat Daerah di Kabupaten Badung
3. Adanya koordinasi dan pendampingan langsung terkait Indikator Inovasi di Perangkat Daerah oleh Tim Penguatan Inovasi Kabupaten Badung

Berikut beberapa dokumentasi kegiatan program yang mendukung indikator Indeks Daya Saing Daerah (IDSD) Kabupaten Badung Tahun 2024.



High Level Meeting Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (P2DD) Kabupaten Badung



SEPEKAN PBB: jemput bola biar bayar pajak dan urusan pbb lainnya makin mudah dan nyaman



Penghargaan IGA Tahun 2024

3.3 Analisis Akuntabilitas Keuangan

Kebijakan umum pengelolaan keuangan daerah didasari atas komitmen anggaran yang disediakan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Badung. Oleh karena itu kebijakan pengelolaan keuangan daerah dalam konteks memantapkan otonomi daerah desentralisasi fiskal yang menganut prinsip “ *Money Follows Program*” yaitu perubahan paradigma pendekatan anggaran yang lebih fokus pada program dan kegiatan yang terkait langsung dengan prioritas nasional serta memberikan dampak langsung bagi masyarakat. Dengan *money follows program*, belanja tidak lagi dibagi secara merata kepada setiap tugas dan fungsi (*money follows function*).

Alokasi anggaran untuk pencapaian sasaran strategis tahun 2024 sebesar Rp. 10.078.885.160.993,- dengan realisasi sebesar Rp. 7.369.149.732.848,- sehingga persentase penyerapan anggaran sebesar 73,11%. Sedangkan pada tahun 2023 alokasi anggaran sebesar Rp. 6.583.329.971.972,- dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 4.961.656.893.759 sehingga persentase penyerapan sebesar 75%. Sasaran strategis pada tahun 2024 didukung sebanyak 135 program prioritas sebagaimana tertuang pada table 6.3 RPJMD Semesta Berencana Kabupaten Badung Tahun 2021-2026. Alokasi dan realisasi anggaran dari masing-masing program kegiatan untuk pencapaian sasaran strategis tahun 2024 seperti tabel berikut:

Tabel 3.13
Sasaran Strategis, Jumlah Program, Pagu dan Realisasi Anggaran
Kabupaten Badung Tahun 2024

NO	SASARAN STRATEGIS		INDIKATOR KINERJA UTAMA (Perbup No. 11 Tahun 2022)	TARGET	JML. PROGRAM	JML. PAGU ANGGARAN	JLM. REALISASI ANGGARAN	%
1.	Meningkatnya toleransi hidup beragama	1	Indek kerukunan umat beragama	83 (Sangat Tinggi)	1	65.961.954.460	41.962.593.394,00	63,62



NO	SASARAN STRATEGIS		INDIKATOR KINERJA UTAMA (Perbup No. 11 Tahun 2022)	TARGET	JML. PROGRAM	JML. PAGU ANGGARAN	JLM. REALISASI ANGGARAN	%
2.	Meningkatnya Birokrasi Yang Bersih dan Akuntabel	2.	Nilai SAKIP	79,50 (BB)	5	13.171.710.305	4.948.321.858	37,57
		3.	Opini BPK	WTP	5	2.638.906.486.392	1.946.702.057.672	73,77
3.	Meningkatnya Birokrasi Yang Kapabel	4.	Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)	3,30 (Baik)	8	710.205.677.844	473.653.079.865	66,69
		5.	Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara (ASN)	62,57 (Rendah)	2	19.077.391.356	9.585.315.275	50,24
4.	Meningkatnya Pelayanan Publik Menuju Pelayanan Yang Prima dan Berintegritas	6.	Indeks Kepuasan Masyarakat	86,50 (Baik)	34	1.287.256.105.689	879.201.385.655	68,30
5.	Meningkatnya Kepatuhan Masyarakat Dalam Mentaati Perda dan Perkada	7.	Persentase Penegakan Perda dan Perkada	90,00 %	7	7.855.269.196	6.534.019.923	83,18
6.	Terwujudnya Pemenuhan HAM	8.	Capaian Atas Kepedulian HAM	75,00 (Peduli HAM)	8	11.344.125.014	9.256.280.401	81,60
7.	Meningkatnya kreativitas serta pelestarian seni dan budaya	9.	Persentase Pertumbuhan Seni dan Budaya	76,00 %	11	756.377.094.272	381.579.514.538	50,45
8.	Meningkatnya kualitas sumber daya manusia	10.	Indeks Pembangunan Manusia	81,63 (Sangat Tinggi)	7	1.427.470.741.653	1.078.409.687.791	75,55
9.	Meningkatnya persentase koperasi sehat	11.	Persentase Jumlah Koperasi Sehat	8,00%	5	1.238.604.810	859.542.492	69,40



NO	SASARAN STRATEGIS		INDIKATOR KINERJA UTAMA (Perbup No. 11 Tahun 2022)	TARGET	JML. PROGRAM	JML. PAGU ANGGARAN	JLM. REALISASI ANGGARAN	%
10.	Meningkatnya jumlah wirausaha	12.	Persentase Pertumbuhan jumlah wirausaha	25,00 %	3	23.937.043.060	17.189.403.174	71,81
11.	Meningkatnya kontribusi sector perdagangan terhadap PDRB	13.	Persentase Kontribusi Sektor Perdagangan terhadap PDRB	10,48 %	5	2.081.172.038	1.486.112.823	71,41
12.	Meningkatnya kebahagiaan masyarakat	14.	Indeks Kebahagiaan	76,89	6	14.479.112.157	13.477.723.583	93,08
13.	Menurunnya angka kemiskinan	15.	Persentase Penduduk Miskin	1,80%	4	14.148.210.254	10.580.633.633	74,78
14.	Meningkatnya pengembangan daya Tarik destinasi pariwisata berorientasi pertanian	16.	Persentase pengembangan daya Tarik destinasi pariwisata berorientasi pertanian	7,69%	4	31.711.978.112	1.262.051.569	3,98
15.	Meningkatnya pengembangan agroindustri yang berorientasi pada pelestarian sumber daya alam	17.	Persentase Pengembangan Agroindustri yang berorientasi pada Pelestarian Sumber Daya Alam	31,83 %	3	144.743.702.489	21.128.599.611	14,60
16.	Meningkatnya kuantitas, kualitas dan kontinuitas produk pertanian	18.	Nilai Tukar Usaha Petani (NTUP)	100 (Impas)	8	52.490.123.063	40.114.610.464	76,42
		19.	Nilai Tukar Nelayan (NTN)	100,50	4	5.219.006.882	4.451.962.565	85,30
17.	Meningkatnya kontribusi sector pariwisata terhadap PDRB	20.	Persentase Kontribusi Sektor Pariwisata terhadap PDRB	26,50 %	1	14.140.140.325	7.452.945.940	52,71

NO	SASARAN STRATEGIS		INDIKATOR KINERJA UTAMA (Perbup No. 11 Tahun 2022)	TARGET	JML. PROGRAM	JML. PAGU ANGGARAN	JLM. REALISASI ANGGARAN	%
18.	Meningkatnya kualitas lingkungan hidup yang berkelanjutan	21.	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	61,72 (Sedang)	4	173.930.984.859	109.202.508.821	62,78
19.	Meningkatnya Inovasi dan Kemandirian Daerah	22.	Indeks Daya Saing Daerah (IDSD)	3.7673 (Sangat Tinggi)	20	2.663.138.526.763	2.310.111.381.801	86,74
TOTAL					155	10.078.885.160.993	7.369.149.732.848	73,11

3.4 Analisis Efisiensi Penggunaan Anggaran

Analisis efisiensi penggunaan anggaran dilakukan dengan cara membandingkan persentase rata-rata capaian kinerja sasaran dengan persentase realisasi atau penyerapan anggaran. Kriteria penilaian dari analisis efisiensi penggunaan anggaran sebagai berikut :

- Efisien, jika persentase rata-rata capaian kinerja sasaran mencapai 99% atau lebih dan persentase penyerapan anggaran kurang dari persentase rata-rata capaian kinerja sasaran
- Tidak efisien, jika persentase rata-rata capaian kinerja sasaran kurang dari 99%, dan persentase penyerapan anggaran lebih besar dari persentase rata-rata capaian kinerja sasaran.

Analisis efektivitas dilakukan dengan cara membandingkan realisasi sasaran dengan realisasi anggaran. Kriteria penilaian analisis efektifitas yaitu: Nilai positif berarti efektif (semakin tinggi nilainya berarti semakin efektif program dan kegiatan dalam mencapai sasaran), sedangkan nilai minus

(negatif) berarti tidak efektif. Hasil Analisis efektivitas dan efisiensi program dan kegiatan untuk mencapai sasaran seperti tabel berikut :

Tabel 3.14
Hasil analisis Efektivitas dan Efisiensi Program
di Kabupaten Badung Tahun 2024

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA (Perbup No. 11 Tahun 2022)	REALISASI SASARAN	REALISASI ANGGARAN	EFEKTIVITAS	EFISIENSI
1.	Meningkatnya toleransi hidup beragama	Indek kerukunan umat beragama	116	63,62	52	Efisien
2.	Meningkatnya Birokrasi Yang Bersih dan Akuntabel	Nilai SAKIP	96	37,57	58	Efisien
		Opini BPK	100 (data 2023)	73,77	26	Efisien
3.	Meningkatnya Birokrasi Yang Kapabel	Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)	117	66,69	50	Efisien
		Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara (ASN)	134	50,24	84	Efisien
4.	Meningkatnya Pelayanan Publik Menuju Pelayanan Yang Prima dan Berintegritas	Indeks Kepuasan Masyarakat	105	68,30	37	Efisien
5.	Meningkatnya Kepatuhan Masyarakat Dalam	Persentase Penegakan Perda dan Perkada	111	83,18	28	Efisien



NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA (Perbup No. 11 Tahun 2022)	REALISASI SASARAN	REALISASI ANGGARAN	EFEKTIVITAS	EFISIENSI
	Mentaati Perda dan Perkada					
6.	Terwujudnya Pemenuhan HAM	Capaian Atas Kepedulian HAM	117	81,60	35	Efisien
7.	Meningkatnya kreativitas serta pelestarian seni dan budaya	Persentase Pertumbuhan Seni dan Budaya	132	50,45	82	Efisien
8.	Meningkatnya kualitas sumber daya manusia	Indeks Pembangunan Manusia	103	75,55	27	Efisien
9.	Meningkatnya persentase koperasi sehat	Persentase Jumlah Koperasi Sehat	539	69,40	470	Efisien
10.	Meningkatnya jumlah wirausaha	Persentase Pertumbuhan jumlah wirausaha	104	71,81	32	Efisien
11.	Meningkatnya kontribusi sector perdagangan terhadap PDRB	Persentase Kontribusi Sektor Perdagangan terhadap PDRB	100	71,41	152	Efisien



NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA (Perbup No. 11 Tahun 2022)	REALISASI SASARAN	REALISASI ANGGARAN	EFEKTIVITAS	EFISIENSI
12.	Meningkatnya kebahagiaan masyarakat	Indeks Kebahagiaan	103	93,08	10	Efisien
13.	Menurunnya angka kemiskinan	Persentase Penduduk Miskin	-124	74,78	-49	Tidak Efisien
14.	Meningkatnya pengembangan daya Tarik destinasi pariwisata berorientasi pertanian	Persentase pengembangan daya Tarik destinasi pariwisata berorientasi pertanian	100	3,98	96	Efisien
15.	Meningkatnya pengembangan agroindustri yang berorientasi pada pelestarian sumber daya alam	Persentase Pengembangan Agroindustri yang berorientasi pada Pelestarian Sumber Daya Alam	158	14,60	143	Efisien
16.	Meningkatnya kuantitas, kualitas dan kontinuitas produk pertanian	Nilai Tukar Usaha Petani (NTUP)	120	76,42	44	Efisien
		Nilai Tukar Nelayan (NTN)	118	85,30	33	Efisien
17.	Meningkatnya kontribusi sector pariwisata terhadap PDRB	Persentase Kontribusi Sektor Pariwisata terhadap PDRB	97	52,71	44	Efisien



NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA (Perbup No. 11 Tahun 2022)	REALISASI SASARAN	REALISASI ANGGARAN	EFEKTIVITAS	EFISIENSI
18.	Meningkatnya kualitas lingkungan hidup yang berkelanjutan	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	113	62,78	50	Efisien
19.	Meningkatnya Inovasi dan Kemandirian Daerah	Indeks Daya Saing Daerah (IDSD)	100 (data 2023, belum rilis dari BRIN)	86,74	14	Efisien
	Total Kinerja		2.659	1.414	1.411	Efisien

3.5 Prestasi dan Penghargaan

Program pembangunan yang dilaksanakan Pemerintah Kabupaten Badung memprioritaskan kepentingan masyarakat untuk mewujudkan kesejahteraan. Upaya yang sungguh-sungguh tersebut diapresiasi oleh pemerintah pusat serta pihak-pihak terkait dalam bentuk penghargaan dan prestasi. Kabupaten Badung tahun 2024 mendapat 29 penghargaan/prestasi, secara rinci seperti tabel berikut :

Tabel 3.15
Penghargaan/Prestasi Kabupaten Badung Tahun 2024

No	Penghargaan	Kegiatan	Tanggal	Keterangan
1	Sabet Satyalancana Karya Bhakti Praja Nugraha Dari Presiden	Prestasi kinerja yang sangat tinggi dalam penyelenggaraan pemerintah daerah, penilaian untuk penghargaan ini didasarkan hasil Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (EPPD) 2022 terhadap Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) 2021.	25-Apr-24	Mendagri Tito Karnavian
2	Best Social Engagement	Ajang CNN Indonesia Awards Bali 2024 Kategori Public Sector	13 Mei 2024	Direktur Utama CNN Indonesia
3	Outstanding Public Service Innovation	Ajang CNN Indonesia Awards Bali 2024 Kategori Public Sector	13 Mei 2024	Direktur Utama CNN Indonesia



No	Penghargaan	Kegiatan	Tanggal	Keterangan
4	Best Environmental Policy & Sustainability	Ajang CNN Indonesia Awards Bali 2024 Kategori Public Sector	13 Mei 2024	Direktur Utama CNN Indonesia
5	Best Economic Development	Ajang CNN Indonesia Awards Bali 2024 Kategori Public Sector	13 Mei 2024	Direktur Utama CNN Indonesia
6	Best Financial Management Transparency	Ajang CNN Indonesia Awards Bali 2024 Kategori Public Sector	13 Mei 2024	Direktur Utama CNN Indonesia
7	Best Women Empowerment	Ajang CNN Indonesia Awards Bali 2024 Kategori Public Sector	13 Mei 2024	Direktur Utama CNN Indonesia
8	Best Disaster & Crisis Management	Ajang CNN Indonesia Awards Bali 2024 Kategori Public Sector	13 Mei 2024	Direktur Utama CNN Indonesia
9	Outstanding Public Infrastructure Management	Ajang CNN Indonesia Awards Bali 2024 Kategori Public Sector	13 Mei 2024	Direktur Utama CNN Indonesia
10	Outstanding Integrity and Transparency	Ajang CNN Indonesia Awards Bali 2024 Kategori Public Sector	13 Mei 2024	Direktur Utama CNN Indonesia
11	Outstanding Cultural Tourism Promotion	Ajang CNN Indonesia Awards Bali 2024 Kategori Public Sector	13 Mei 2024	Direktur Utama CNN Indonesia
12	Outstanding Sustainable Tourism	Ajang CNN Indonesia Awards Bali 2024 Kategori Public Sector	13 Mei 2024	Direktur Utama CNN Indonesia



No	Penghargaan	Kegiatan	Tanggal	Keterangan
13	Outstanding Innovative Tourism Destination	Ajang CNN Indonesia Awards Bali 2024 Kategori Public Sector	13 Mei 2024	Direktur Utama CNN Indonesia
14	Best Water Sports Destination	Ajang CNN Indonesia Awards Bali 2024 Kategori Public Sector	13 Mei 2024	Direktur Utama CNN Indonesia
15	Outstanding Green Energy Initiative dan Best Stunting Prevention.	Ajang CNN Indonesia Awards Bali 2024 Kategori Public Sector	13 Mei 2024	Direktur Utama CNN Indonesia
16	Penghargaan Special Reward pada kategori Outstanding Leadership Governance	Dalam Ajang Special Reward pada kategori Outstanding Leadership Governance	13 Mei 2024	Founder CT Corp.
17	Pemkab Badung Raih Opini WTP 10 Kali Berturut-turut	penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota se-Bali Tahun Anggaran 2023 telah sesuai dengan SAP, kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan serta efektivitas sistem pengendalian intern.	22 Mei 2024	Kepala Perwakilan BPK Provinsi Bali
18	Pemkab Badung Raih Penghargaan dari BPJS Ketenagakerjaan	Badung berkomitmen 100 persen mengcover BPJS Ketenagakerjaan kepada pekerja di Badung	30 Mei 2024	Dirut Utama BPJS Ketenagakerjaan



No	Penghargaan	Kegiatan	Tanggal	Keterangan
19	Penghargaan Bali Leader In Innovative Government	Indonesia Travel and Tourism Awards (ITTA)	6 Agustus 2024	Menparekraf RI
20	Penghargaan UHC Kategori Utama 2024	Universal Health Coverage (UHC) Tahun 2024	8 Agustus 2024	Wakil Presiden RI
21	Pemkab Badung Raih Penghargaan Produktivitas Padi Tertinggi Tingkat Nasional	Peringatan HUT Kemerdekaan RI ke 79	17 Agustus 2024	Wakil Menteri Pertanian
22	Pemkab Badung Raih Anugerah PANDU Negeri 2024 kategori Gold		05-Sep-24	Indonesian Institute for Public Governance (IIPG)
23	Pemkab Badung Raih Penghargaan Wahana Tata Nugraha Tahun 2024	Penghargaan Wahana Tata Nugraha	07-Sep-24	Menteri Perhubungan RI
24	Pemkab Badung Raih Anugerah Layanan Investasi (ALI) Terbaik Tahun 2024		30-Sep-24	Menteri Investasi / Kepala BKPM
25	Penghargaan Percontohan Kabupaten / Kota Antikorupsi Tahun 2024	Peringatan Harkodia Tahun 2024	9 Desember 2024	KPK RI
26	Penghargaan STBM Award		10 Desember 2024	Wakil Menteri Kesehatan RI
27	Penghargaan Kategori Pelayanan Publik, Daya Saing Daerah dan Kinerja Total pada Aspek	Malam Apresiasi Kinerja Pemerintahan Daerah 2024	12 Desember 2024	Menteri Dalam Negeri



No	Penghargaan	Kegiatan	Tanggal	Keterangan
	Fiskal Tinggi tingkat Kabupaten			
28	Penghargaan APBD Award 2024	Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Keuangan Daerah dan Penganugerahan APBD Award Tahun 2024	18 Desember 2024	
29	Penghargaan Kategori Penerapan Sistem Merit ASN Tahun 2024	Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Keuangan Daerah	19 Desember 2024	Menteri Investasi / Kepala BKPM

Sumber data : Bagian Prokopim Setda Kab. Badung Tahun 2024

FOTO-FOTO PENGHARGAAN





Malam Apresiasi Kinerja Pemerintahan Daerah 2024, Pemkab Badung Raih 3 Penghargaan

prokompimbadung



PENYERAHAN PENGHARGAAN UNIVERSAL HEALTH CO

"Satu Dekade Program JKN-KIS Untuk Negeri Sebagai wujud nyata komitmen Pemerintah Daerah dalam Memberikan Perlindungan Kesehatan Bagi Masyarakat Indonesia"

Jakarta, 8 Agustus 2024



IBULAU DEWATA MENUJU KE

prokompimbadung



Pemkab Badung Raih Penghargaan Percontohan Kabupaten/Kota Antikorupsi Tahun 2024

prokompimbadung

BAB IV PENUTUP

4.1 Kesimpulan

Berdasarkan analisis akuntabilitas kinerja dan analisis akuntabilitas keuangan maka dapat disimpulkan hasil capaian kinerja Pemerintah Kabupaten Badung tahun 2024, seperti berikut :

1. Laporan kinerja instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2024 merupakan gambaran Pemerintah Kabupaten Badung terhadap capaian kinerja sasaran strategis sesuai RPJMD Semesta Berencana 2021-2026.
2. RPJMD Semesta Berencana Kabupaten Badung tahun 2021-2026 mencakup 9 misi yang dijabarkan menjadi 11 tujuan, 19 sasaran dan 22 indikator kinerja utama (IKU).
3. Hasil capaian kinerja sasaran RPJMD terhadap 22 indikator yaitu sebesar 2.659 dengan rata-rata capaian kinerja sebesar 121. Terdapat satu indikator dengan nilai minus diatas 100% yaitu persentase penduduk miskin sebesar -124%.
4. Hasil pengukuran indikator sasaran sebanyak 22 indikator kinerja diperoleh hasil seperti berikut :
 - a. Melebihi target (>100%) sebanyak 15 indikator kinerja utama
 - b. Sesuai Target (100%) sebanyak 4 indikator kinerja utama
 - c. Dibawah target (<100%) sebanyak 3 indikator kinerja utama
5. Hasil pengukuran indikator dengan nilai minus yaitu persentase penduduk miskin. Kondisi ini disebabkan Kemajuan sosial dan ekonomi Kabupaten Badung meskipun di masa Pandemi Covid-19 tetap menjadi daya tarik bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) seperti Gepeng dan PSK untuk melakukan aktivitasnya di Kabupaten Badung, hal ini mengakibatkan Kabupaten Badung belum bisa terbebas dari gelandangan, pengemis serta PSK dan belum maksimalnya

- pemulihan ekonomi akibat pandemi sehingga memerlukan berbagai strategi untuk pemulihan ekonomi dan kesejahteraan sosial masyarakat.
6. Alokasi anggaran untuk pencapaian sasaran strategis tahun 2024 sebesar Rp. 10.078.885.160.993,- dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 7.369.149.732.848,- sehingga persentase penyerapan sebesar 73,11%.
 7. Hasil capaian indikator kinerja utama (IKU) RPJMD semesta berencana 2021-2026 untuk tahun 2024 seperti berikut :



4.2 Upaya Perbaikan

Secara keseluruhan capaian kinerja pada tahun 2024 sudah mencapai target bahkan sampai melebihi target yang ditetapkan. Berdasarkan pengukuran indikator kinerja, terdapat 3 indikator sasaran strategis capaiannya masih dibawah 100%, maka Pemerintah Kabupaten Badung akan melakukan langkah-langkah perbaikan untuk meningkatkan capaian kinerja sesuai target RPJMD semesta berencana 2021-2026 antara lain :

1. Upaya perbaikan untuk pencapaian sasaran strategis Meningkatkan Birokrasi Yang Bersih dan Akuntabel dengan indikator nilai SAKIP melalui :
 - a. Menyusun pedoman pelaksanaan SAKIP di Kabupaten Badung melalui penyusunan peraturan bupati tentang implementasi SAKIP
 - b. Melaksanakan pembinaan/bimtek SAKIP kepada kepala perangkat daerah/pejabat yang membidangi SAKIP
 - c. Pelaksanaan evaluasi internal capaian kinerja masing-masing perangkat daerah
 - d. Pemanfaatan aplikasi e-SAKIP Badung dengan baik untuk implementasi SAKIP dan pemberian Reward dan punishment bagi perangkat daerah.
 - e. Menindaklanjuti rekomendasi-rekomendasi atas Hasil Evaluasi Tahun 2024 dari Kementerian PAN dan RB Bersama Tim SAKIP Kabupaten Badung, agar apa yang menjadi kekurangan dalam indikator nilai SAKIP dapat dioptimalkan ditahun berikutnya.
2. Upaya perbaikan untuk pencapaian sasaran strategis menurunnya angka kemiskinan melalui :
 - a. Memperluas akses kesejahteraan sosial
 - b. Peningkatan kuantitas dan kualitas program kesejahteraan sosial
 - c. Mengoptimalkan sarana dan prasarana kesejahteraan sosial

- d. Memberikan Bantuan sosial kepada masyarakat Kabupaten Badung sebagai *social safety net* sebagai bentuk dukungan dalam mengurangi beban keluarga miskin dan rentan.
3. Upaya perbaikan untuk pencapaian sasaran strategis Meningkatnya Kontribusi Sektor Pariwisata Terhadap PDRB melalui :
 - a. Melakukan perbaikan akses jalan menuju tempat pariwisata
 - b. Meningkatkan kunjungan wisatawan ke Kabupaten Badung
 - c. Meningkatkan kualitas SDM pariwisata dan ekonomi kreatif
 - d. Meningkatkan Pendapatan dari retribusi obyek wisata dan meningkatkan kualitas Industri Pariwisata.

Mangupura, 25 Maret 2025

 **Bupati Badung.**

I WAYAN ADI ARNAWA,SH

Lampiran I :

**PROGRAM PRIORITAS SESUAI TABEL 6.3 RPJMD SEMESTA BERENCANA KABUPATEN BADUNG
TAHUN 2021-2026 BESERTA ANGGARAN TAHUN 2024**

No.	Misi	Sasaran	Sasaran Indikator	Program	PD	Pagu Anggaran 2024	Realisasi Anggaran 2024	Persentase Serapan Anggaran
1	Memperkokoh Kerukunan Hidup Bermasyarakat Dalam Bingkai Keragaman Adat, Budaya dan Agama	Meningkatnya Toleransi Hidup Beragama	Indeks Kerukunan Umat Beragama		Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	65.961.954.460,00	41.962.593.394,00	63,62
2	Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Berdasarkan Prinsip Good Governance dan Clean Government yang berbasis Teknologi Informasi dan Komunikasi	Meningkatnya Birokrasi yang Bersih dan Akuntabel	Nilai SAKIP	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Sekretariat Daerah (Bagian Organisasi)	510.684.360	314.577.238	61,60
		Meningkatnya Birokrasi yang Bersih dan Akuntabel	Nilai SAKIP	PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	750.617.249	439.695.770	58,58
		Meningkatnya Birokrasi yang Bersih dan Akuntabel	Nilai SAKIP	PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	1.415.259.552	1.447.581.810	102,28
		Meningkatnya Birokrasi yang Bersih dan Akuntabel	Nilai SAKIP	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN	Inspektorat	1.699.647.890	1.058.019.900	62,25
		Meningkatnya Birokrasi yang Bersih dan Akuntabel	Nilai SAKIP	PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI	Inspektorat	8.795.501.254	1.688.447.140	19,20
		Meningkatnya Birokrasi yang Bersih dan Akuntabel	Opini BPK	PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	2.518.135.237.025	1.848.686.211.827	73,41
		Meningkatnya Birokrasi yang Bersih dan Akuntabel	Opini BPK	PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	7.460.387.340	4.483.392.883	60,10
		Meningkatnya Birokrasi yang Bersih dan Akuntabel	Opini BPK	PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	Sekretariat Daerah (Bagian Adm. Pembangunan)	1.129.009.208	899.905.620	79,71
		Meningkatnya Birokrasi yang Bersih dan Akuntabel	Opini BPK	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Sekretariat Daerah (Bagian Perencanaan dan Keuangan)	112.166.602.387	92.620.141.842	82,57
		Meningkatnya Birokrasi yang Bersih dan Akuntabel	Opini BPK	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN	Inspektorat	15.250.432	12.405.500	81,35
		Meningkatnya Birokrasi yang Kapabel	Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	Dinas Komunikasi dan Informatika	8.934.054.210	7.630.867.680	85,41
		Meningkatnya Birokrasi yang Kapabel	Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)	PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA	Dinas Komunikasi dan Informatika	72.005.458.764	41.298.259.355	57,35
		Meningkatnya Birokrasi yang Kapabel	Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)	PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL	Dinas Komunikasi dan Informatika	79.759.415	70.305.100	88,15
		Meningkatnya Birokrasi yang Kapabel	Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)	PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI	Dinas Komunikasi dan Informatika	16.985.225	13.888.500	81,77
		Meningkatnya Birokrasi yang Kapabel	Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)	PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	Sekretariat Daerah (Bagian PBJ)	615.764.152	503.499.028	81,77
		Meningkatnya Birokrasi yang Kapabel	Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)	PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	180.791.300	180.339.100	99,75
		Meningkatnya Birokrasi yang Kapabel	Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)	PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	554.009.072		-

No.	Misi	Sasaran	Sasaran Indikator	Program	PD	Pagu Anggaran 2024	Realisasi Anggaran 2024	Persentase Serapan Anggaran
		Meningkatnya Birokrasi yang Kapabel	Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Dinas Kesehatan	627.818.855.706	423.955.921.102	67,53
		Meningkatnya Birokrasi yang Kapabel	Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara	PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	1.183.045.700	1.090.885.400	92,21
		Meningkatnya Birokrasi yang Kapabel	Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	17.894.345.656	8.494.429.875	47,47
		Meningkatnya Pelayanan Publik Menuju Pelayanan Yang Prima dan Berintegritas	Indeks Kepuasan Masyarakat	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Badan Riset dan Inovasi Daerah	16.785.618.864	11.052.017.959	65,84
		Meningkatnya Pelayanan Publik Menuju Pelayanan Yang Prima dan Berintegritas	Indeks Kepuasan Masyarakat	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	Sekretariat Daerah (Bagian Tata Pemerintahan)	8.946.205.400	4.764.403.781	53,26
		Meningkatnya Pelayanan Publik Menuju Pelayanan Yang Prima dan Berintegritas	Indeks Kepuasan Masyarakat	PROGRAM PENYELESAIAN SENGKETA TANAH GARAPAN	Sekretariat Daerah (Bagian Tata Pemerintahan)	1.458.165	1.274.000	87,37
		Meningkatnya Pelayanan Publik Menuju Pelayanan Yang Prima dan Berintegritas	Indeks Kepuasan Masyarakat	PROGRAM PENGELOLAAN TANAH KOSONG	Sekretariat Daerah (Bagian Tata Pemerintahan)	158.797.862	58.574.700	36,89
		Meningkatnya Pelayanan Publik Menuju Pelayanan Yang Prima dan Berintegritas	Indeks Kepuasan Masyarakat	PROGRAM PENYELESAIAN GANTI KERUGIAN DAN SANTUNAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN	Sekretariat Daerah (Bagian Tata Pemerintahan)	57.751.348	57.055.200	98,79
		Meningkatnya Pelayanan Publik Menuju Pelayanan Yang Prima dan Berintegritas	Indeks Kepuasan Masyarakat	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Sekretariat Daerah (Bagian Tata Pemerintahan)	445.513.084	443.403.000	99,53
		Meningkatnya Pelayanan Publik Menuju Pelayanan Yang Prima dan Berintegritas	Indeks Kepuasan Masyarakat	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	Sekretariat Daerah (Bagian Kerjasama)	310.653.243	300.975.244	96,88
		Meningkatnya Pelayanan Publik Menuju Pelayanan Yang Prima dan Berintegritas	Indeks Kepuasan Masyarakat	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Sekretariat Daerah (Bagian Umum)	172.948.512.744	130.917.489.017	75,70
		Meningkatnya Pelayanan Publik Menuju Pelayanan Yang Prima dan Berintegritas	Indeks Kepuasan Masyarakat	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Sekretariat Daerah (Bagian Prokopim)	21.928.797.651	21.601.331.973	98,51
		Meningkatnya Pelayanan Publik Menuju Pelayanan Yang Prima dan Berintegritas	Indeks Kepuasan Masyarakat	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	Sekretariat Daerah (Bagian Kesra)	852.053.421.223	538.364.033.986	63,18
		Meningkatnya Pelayanan Publik Menuju Pelayanan Yang Prima dan Berintegritas	Indeks Kepuasan Masyarakat	PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	5.183.875.499	4.255.463.675	82,09
		Meningkatnya Pelayanan Publik Menuju Pelayanan Yang Prima dan Berintegritas	Indeks Kepuasan Masyarakat	PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENVELAMATAN KEBAKARAN DAN PENVELAMATAN NON KEBAKARAN	Dinas Kebakaran dan Penyelamatan	28.381.793.835	25.827.022.025	91,00
		Meningkatnya Pelayanan Publik Menuju Pelayanan Yang Prima dan Berintegritas	Indeks Kepuasan Masyarakat	PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	78.105.774.407	60.352.683.522	77,27
		Meningkatnya Pelayanan Publik Menuju Pelayanan Yang Prima dan Berintegritas	Indeks Kepuasan Masyarakat	PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	2.995.122.848	2.653.096.417	88,58
		Meningkatnya Pelayanan Publik Menuju Pelayanan Yang Prima dan Berintegritas	Indeks Kepuasan Masyarakat	PROGRAM PENCATATAN SIPIL	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	1.678.101.190	1.657.534.215	98,77
		Meningkatnya Pelayanan Publik Menuju Pelayanan Yang Prima dan Berintegritas	Indeks Kepuasan Masyarakat	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	333.736.559	301.215.283	90,26
		Meningkatnya Pelayanan Publik Menuju Pelayanan Yang Prima dan Berintegritas	Indeks Kepuasan Masyarakat	PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL	Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	2.478.818.652	1.760.377.466	71,02
		Meningkatnya Pelayanan Publik Menuju Pelayanan Yang Prima dan Berintegritas	Indeks Kepuasan Masyarakat	PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL	Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	1.303.400.850	1.245.172.690	95,53

No.	Misi	Sasaran	Sasaran Indikator	Program	PD	Pagu Anggaran 2024	Realisasi Anggaran 2024	Persentase Serapan Anggaran
		Meningkatnya Pelayanan Publik Menuju Pelayanan Yang Prima dan Berintegritas	Indeks Kepuasan Masyarakat	PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	Dinas Perhubungan	60.176.363.718	43.699.663.842	72,62
		Meningkatnya Pelayanan Publik Menuju Pelayanan Yang Prima dan Berintegritas	Indeks Kepuasan Masyarakat	PROGRAM PENATAAN DESA	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	18.616.900	15.931.100	85,57
		Meningkatnya Pelayanan Publik Menuju Pelayanan Yang Prima dan Berintegritas	Indeks Kepuasan Masyarakat	PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	2.856.885.164	2.491.567.895	87,21
		Meningkatnya Pelayanan Publik Menuju Pelayanan Yang Prima dan Berintegritas	Indeks Kepuasan Masyarakat	PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	3.546.222.391	1.546.450.444	43,61
		Meningkatnya Pelayanan Publik Menuju Pelayanan Yang Prima dan Berintegritas	Indeks Kepuasan Masyarakat	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Kecamatan Kuta	4.694.123.261	4.560.416.983	97,15
		Meningkatnya Pelayanan Publik Menuju Pelayanan Yang Prima dan Berintegritas	Indeks Kepuasan Masyarakat	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Kecamatan Kuta	274.272.600,00	210.881.400	76,89
		Meningkatnya Pelayanan Publik Menuju Pelayanan Yang Prima dan Berintegritas	Indeks Kepuasan Masyarakat	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Kecamatan Kuta Utara	6.085.764.907	5.956.157.054	97,87
		Meningkatnya Pelayanan Publik Menuju Pelayanan Yang Prima dan Berintegritas	Indeks Kepuasan Masyarakat	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Kecamatan Kuta Utara	477.671.581	342.646.600	71,73
		Meningkatnya Pelayanan Publik Menuju Pelayanan Yang Prima dan Berintegritas	Indeks Kepuasan Masyarakat	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Kecamatan Kuta Selatan	5.658.925.679	5.634.357.352	99,57
		Meningkatnya Pelayanan Publik Menuju Pelayanan Yang Prima dan Berintegritas	Indeks Kepuasan Masyarakat	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Kecamatan Kuta Selatan	376.335.010	329.047.500	87,43
		Meningkatnya Pelayanan Publik Menuju Pelayanan Yang Prima dan Berintegritas	Indeks Kepuasan Masyarakat	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Kecamatan Mengwi	6.675.780.314	6.634.158.302	99,38
		Meningkatnya Pelayanan Publik Menuju Pelayanan Yang Prima dan Berintegritas	Indeks Kepuasan Masyarakat	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Kecamatan Mengwi	543.985.581	465.651.000	85,60
		Meningkatnya Pelayanan Publik Menuju Pelayanan Yang Prima dan Berintegritas	Indeks Kepuasan Masyarakat	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Kecamatan Abiansemal	590.937.656	588.125.090	99,52
		Meningkatnya Pelayanan Publik Menuju Pelayanan Yang Prima dan Berintegritas	Indeks Kepuasan Masyarakat	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Kecamatan Abiansemal	443.114.977	408.145.500	92,11
		Meningkatnya Pelayanan Publik Menuju Pelayanan Yang Prima dan Berintegritas	Indeks Kepuasan Masyarakat	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Kecamatan Petang	614.191.176	588.401.240	95,80
		Meningkatnya Pelayanan Publik Menuju Pelayanan Yang Prima dan Berintegritas	Indeks Kepuasan Masyarakat	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Kecamatan Petang	125.561.350	116.660.200	92,91
3	Mewujudkan Tatanan Masyarakat Yang Tertib, Taat Azas Serta Menjunjung Tinggi Penegakan Hukum Dan Hak Asasi Manusia (HAM)	Meningkatnya Kepatuhan Masyarakat dalam Mentaati Perda dan Perkada	Persentase penegakan Perda dan Perkada	PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Satuan Polisi Pamong Praja	7.124.904.074	6.222.346.723	87,33
		Meningkatnya Kepatuhan Masyarakat dalam Mentaati Perda dan Perkada	Persentase penegakan Perda dan Perkada	PROGRAM KOORDINASI KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Kecamatan Kuta	98.906.400	70.262.200	71,04
		Meningkatnya Kepatuhan Masyarakat dalam Mentaati Perda dan Perkada	Persentase penegakan Perda dan Perkada	PROGRAM KOORDINASI KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Kecamatan Kuta Utara	71.871.942	33.952.200	47,24

No.	Misi	Sasaran	Sasaran Indikator	Program	PD	Pagu Anggaran 2024	Realisasi Anggaran 2024	Persentase Serapan Anggaran
		Meningkatnya Kepatuhan Masyarakat dalam Mentaati Perda dan Perkada	Persentase penegakan Perda dan Perkada	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Kecamatan Kuta Selatan	419.756.480	112.110.900	26,71
		Meningkatnya Kepatuhan Masyarakat dalam Mentaati Perda dan Perkada	Persentase penegakan Perda dan Perkada	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Kecamatan Mengwi	67.156.600	42.831.000	63,78
		Meningkatnya Kepatuhan Masyarakat dalam Mentaati Perda dan Perkada	Persentase penegakan Perda dan Perkada	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Kecamatan Abiansemal	27.562.500	24.170.700	87,69
		Meningkatnya Kepatuhan Masyarakat dalam Mentaati Perda dan Perkada	Persentase penegakan Perda dan Perkada	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Kecamatan Petang	45.111.200	28.346.200	62,84
		Terwujudnya Pemenuhan HAM	Capaian Atas Kepedulian HAM	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	Sekretariat Daerah (Bagian Hukum)	2.983.489.643	2.655.734.500	89,01
		Terwujudnya Pemenuhan HAM	Capaian Atas Kepedulian HAM	PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN	Dinas Kesehatan	590.103.572	571.287.617	96,81
		Terwujudnya Pemenuhan HAM	Capaian Atas Kepedulian HAM	PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	863.233.900	398.126.464	46,12
		Terwujudnya Pemenuhan HAM	Capaian Atas Kepedulian HAM	PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	566.585.380	255.870.280	45,16
		Terwujudnya Pemenuhan HAM	Capaian Atas Kepedulian HAM	PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	140.860.940	109.099.072	77,45
		Terwujudnya Pemenuhan HAM	Capaian Atas Kepedulian HAM	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)	Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan	569.959.888	564.221.072	98,99
		Terwujudnya Pemenuhan HAM	Capaian Atas Kepedulian HAM	PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP	Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan	507.995.711	495.728.416	97,59
		Terwujudnya Pemenuhan HAM	Capaian Atas Kepedulian HAM	PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL	Dinas Perindustrian Dan Tenaga Kerja	5.121.895.980	4.206.212.980	82,12
4	Memantapkan Kreativitas Seni dan Budaya Masyarakat yang Berorientasi pada Pelestarian Kearifan Lokal	Meningkatnya Kreativitas Serta Pelestarian Seni dan Budaya	Persentase pertumbuhan seni dan budaya	PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN	Dinas Kebudayaan	204.365.253.622	151.300.624.339	74,03
		Meningkatnya Kreativitas Serta Pelestarian Seni dan Budaya	Persentase pertumbuhan seni dan budaya	PROGRAM PENGEMBANGAN KESENIAN TRADISIONAL	Dinas Kebudayaan	72.191.896.362	43.254.644.416	59,92
		Meningkatnya Kreativitas Serta Pelestarian Seni dan Budaya	Persentase pertumbuhan seni dan budaya	PROGRAM PEMBINAAN SEJARAH	Dinas Kebudayaan	10.827.804.340	9.150.699.297	84,51
		Meningkatnya Kreativitas Serta Pelestarian Seni dan Budaya	Persentase pertumbuhan seni dan budaya	PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA	Dinas Kebudayaan	357.236.952.612	98.795.307.179	27,66
		Meningkatnya Kreativitas Serta Pelestarian Seni dan Budaya	Persentase pertumbuhan seni dan budaya	PROGRAM PENGELOLAAN PERMUSEUMAN	Dinas Kebudayaan	66.171.022.962	64.529.883.329	97,52
		Meningkatnya Kreativitas Serta Pelestarian Seni dan Budaya	Persentase pertumbuhan seni dan budaya	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Kecamatan Kuta	3.603.881.526	1.288.502.462	35,75

No.	Misi	Sasaran	Sasaran Indikator	Program	PD	Pagu Anggaran 2024	Realisasi Anggaran 2024	Persentase Serapan Anggaran
		Meningkatnya Kreativitas Serta Pelestarian Seni dan Budaya	Persentase pertumbuhan seni dan budaya	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Kecamatan Kuta Utara	8.097.370.581	2.785.205.360	34,40
		Meningkatnya Kreativitas Serta Pelestarian Seni dan Budaya	Persentase pertumbuhan seni dan budaya	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Kecamatan Kuta Selatan	6.420.213.011	721.633.300	11,24
		Meningkatnya Kreativitas Serta Pelestarian Seni dan Budaya	Persentase pertumbuhan seni dan budaya	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Kecamatan Abiansemal	3.798.671.600	850.227.700	22,38
		Meningkatnya Kreativitas Serta Pelestarian Seni dan Budaya	Persentase pertumbuhan seni dan budaya	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Kecamatan Mengwi	22.344.217.184	8.356.239.506	37,40
		Meningkatnya Kreativitas Serta Pelestarian Seni dan Budaya	Persentase pertumbuhan seni dan budaya	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Kecamatan Petang	1.319.810.472	546.547.650	41,41
5	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia Yang Berlandaskan Pada Penguatan Pendidikan, Kesehatan, dan Perekonomian Masyarakat	Meningkatnya Kualitas Sumber Daya Manusia	Indeks Pembangunan Manusia	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olah Raga	760.412.673.610	521.393.647.999	68,57
		Meningkatnya Kualitas Sumber Daya Manusia	Indeks Pembangunan Manusia	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olah Raga	949.641.556	614.420.600	64,70
		Meningkatnya Kualitas Sumber Daya Manusia	Indeks Pembangunan Manusia	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olah Raga	62.678.155.476	51.473.838.650	82,12
		Meningkatnya Kualitas Sumber Daya Manusia	Indeks Pembangunan Manusia	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPRAMUKAAN	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olah Raga	2.190.532.610	1.584.959.260	72,35
		Meningkatnya Kualitas Sumber Daya Manusia	Indeks Pembangunan Manusia	PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	Sekretariat Daerah (Bagian Perekonomian)	298.966.900	287.450.102	96,15
		Meningkatnya Kualitas Sumber Daya Manusia	Indeks Pembangunan Manusia	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Dinas Kesehatan	344.462.869.943	262.012.405.075	76,06
		Meningkatnya Kualitas Sumber Daya Manusia	Indeks Pembangunan Manusia	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Dinas Kesehatan (Rumah Sakit)	256.477.901.558	241.042.966.105	93,98
6	Pemberdayaan Ekonomi Kreatif dan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) Berdasarkan Potensi Wilayah dan Masyarakat	Meningkatnya Persentase Koperasi Sehat	Persentase Jumlah Koperasi Sehat	PROGRAM PELAYANAN IZIN USAHA SIMPAN PINJAM	Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perdagangan	14.450.100	11.447.100	79,22
		Meningkatnya Persentase Koperasi Sehat	Persentase Jumlah Koperasi Sehat	PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI	Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perdagangan	438.823.700	234.393.200	53,41
		Meningkatnya Persentase Koperasi Sehat	Persentase Jumlah Koperasi Sehat	PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI	Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perdagangan	103.744.310	99.705.692	96,11
		Meningkatnya Persentase Koperasi Sehat	Persentase Jumlah Koperasi Sehat	PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATHAN PERKOPERASIAN	Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perdagangan	583.619.900	417.587.000	71,55
		Meningkatnya Persentase Koperasi Sehat	Persentase Jumlah Koperasi Sehat	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI	Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perdagangan	97.966.800	96.409.500	98,41
		Meningkatnya Jumlah Wirausaha	Persentase pertumbuhan jumlah wirausaha	PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL DAN USAHA MIKRO (UMKM)	Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perdagangan	558.014.890	540.722.741	96,90
		Meningkatnya Jumlah Wirausaha	Persentase pertumbuhan jumlah wirausaha	PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM	Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perdagangan	1.679.000.085	1.247.247.732	74,29
		Meningkatnya Jumlah Wirausaha	Persentase pertumbuhan jumlah wirausaha	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perdagangan	21.700.028.085	15.401.432.701	70,97

No.	Misi	Sasaran	Sasaran Indikator	Program	PD	Pagu Anggaran 2024	Realisasi Anggaran 2024	Persentase Serapan Anggaran
		Meningkatnya Kontribusi Sektor Perdagangan Terhadap PDRB	Persentase kontribusi sektor perdagangan terhadap PDRB	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN	Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perdagangan	125.181.600	114.668.431	91,60
		Meningkatnya Kontribusi Sektor Perdagangan Terhadap PDRB	Persentase kontribusi sektor perdagangan terhadap PDRB	PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING	Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perdagangan	493.759.474	476.145.300	96,43
		Meningkatnya Kontribusi Sektor Perdagangan Terhadap PDRB	Persentase kontribusi sektor perdagangan terhadap PDRB	PROGRAM PENGEMBANGAN EKPOR	Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perdagangan	689.662.300	315.680.200	45,77
		Meningkatnya Kontribusi Sektor Perdagangan Terhadap PDRB	Persentase kontribusi sektor perdagangan terhadap PDRB	PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN	Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perdagangan	521.562.564	482.152.892	92,44
		Meningkatnya Kontribusi Sektor Perdagangan Terhadap PDRB	Persentase kontribusi sektor perdagangan terhadap PDRB	PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI	Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perdagangan	251.006.100	97.466.000	38,83
7	Meningkatkan Kebahagiaan Masyarakat Melalui Sistem Jaminan Sosial Yang Komprehensif	Meningkatnya Kebahagiaan Masyarakat	Indeks Kebahagiaan	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	Dinas Kesehatan	2.217.057.612	2.190.590.862	98,81
		Meningkatnya Kebahagiaan Masyarakat	Indeks Kebahagiaan	PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	271.177.520	266.622.640	98,32
		Meningkatnya Kebahagiaan Masyarakat	Indeks Kebahagiaan	PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	3.045.031.785	3.040.518.519	99,85
		Meningkatnya Kebahagiaan Masyarakat	Indeks Kebahagiaan	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	3.115.057.900	3.016.377.650	96,83
		Meningkatnya Kebahagiaan Masyarakat	Indeks Kebahagiaan	PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	Dinas Perindustrian Dan Tenaga Kerja	4.516.849.000	4.356.712.700	96,45
		Meningkatnya Kebahagiaan Masyarakat	Indeks Kebahagiaan	PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA	Dinas Perindustrian Dan Tenaga Kerja	1.313.938.340	606.901.212	46,19
		Menurunnya Angka Kemiskinan	Persentase penduduk miskin	PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	Dinas Sosial	2.887.490.290	1.926.667.065	66,72
		Menurunnya Angka Kemiskinan	Persentase penduduk miskin	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	Dinas Sosial	9.113.842.148	6.892.112.096	75,62
		Menurunnya Angka Kemiskinan	Persentase penduduk miskin	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	Dinas Sosial	1.819.925.148	1.631.701.572	89,66
		Menurunnya Angka Kemiskinan	Persentase penduduk miskin	PROGRAM PENANGANAN BENCANA	Dinas Sosial	326.952.668	130.152.900	39,81
8	Memperkuat Sinergi Pariwisata dengan Pertanian yang Berorientasi Kepada Agroindustri dan Pelestarian Sumber Daya Alam	Meningkatnya Pengembangan Daya Tarik Destinasi Pariwisata Berorientasi Pertanian	Persentase pengembangan daya tarik destinasi pariwisata berorientasi pertanian	PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA	Dinas Pariwisata	29.958.242.316	26785804381,74	89,41
		Meningkatnya Pengembangan Daya Tarik Destinasi Pariwisata Berorientasi Pertanian	Persentase pengembangan daya tarik destinasi pariwisata berorientasi pertanian	PROGRAM PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF MELALUI PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL	Dinas Pariwisata	132.434.260	72.225.060	54,54
		Meningkatnya Pengembangan Daya Tarik Destinasi Pariwisata Berorientasi Pertanian	Persentase pengembangan daya tarik destinasi pariwisata berorientasi pertanian	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF	Dinas Pariwisata	853.200.041	683.737.300	80,14
		Meningkatnya Pengembangan Daya Tarik Destinasi Pariwisata Berorientasi Pertanian	Persentase pengembangan daya tarik destinasi pariwisata berorientasi pertanian	PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	Sekretariat Daerah (Bagian SDA)	768.101.495	506.089.209	65,89

No.	Misi	Sasaran	Sasaran Indikator	Program	PD	Pagu Anggaran 2024	Realisasi Anggaran 2024	Persentase Serapan Anggaran
		Meningkatnya Pengembangan Agroindustri yang Berorientasi pada Pelestarian Sumber Daya Alam	Persentase pengembangan agroindustri yang berorientasi pada pelestarian sumber daya alam	PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI	Dinas Perindustrian Dan Tenaga Kerja	5.110.598.444	4.834.735.595	94,60
		Meningkatnya Pengembangan Agroindustri yang Berorientasi pada Pelestarian Sumber Daya Alam	Persentase pengembangan agroindustri yang berorientasi pada pelestarian sumber daya alam	PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI	Dinas Perindustrian Dan Tenaga Kerja	85.824.620	85.751.220	99,91
		Meningkatnya Pengembangan Agroindustri yang Berorientasi pada Pelestarian Sumber Daya Alam	Persentase pengembangan agroindustri yang berorientasi pada pelestarian sumber daya alam	PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)	Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan	139.547.279.425	16.208.112.796	11,61
		Meningkatnya Kuantitas, Kualitas, dan Kontinuitas Produk Pertanian	Nilai Tukar Usaha Petani (NTUP)	PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT	Dinas Pertanian dan Pangan	8.269.990.215	7.960.347.210	96,26
		Meningkatnya Kuantitas, Kualitas, dan Kontinuitas Produk Pertanian	Nilai Tukar Usaha Petani (NTUP)	PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN	Dinas Pertanian dan Pangan	2.248.200	617.000	27,44
		Meningkatnya Kuantitas, Kualitas, dan Kontinuitas Produk Pertanian	Nilai Tukar Usaha Petani (NTUP)	PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN	Dinas Pertanian dan Pangan	98.812.484	83.777.000	84,78
		Meningkatnya Kuantitas, Kualitas, dan Kontinuitas Produk Pertanian	Nilai Tukar Usaha Petani (NTUP)	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	Dinas Pertanian dan Pangan	15.811.184.139	12.214.799.816	77,25
		Meningkatnya Kuantitas, Kualitas, dan Kontinuitas Produk Pertanian	Nilai Tukar Usaha Petani (NTUP)	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	Dinas Pertanian dan Pangan	20.419.622.539	13.169.645.547	64,50
		Meningkatnya Kuantitas, Kualitas, dan Kontinuitas Produk Pertanian	Nilai Tukar Usaha Petani (NTUP)	PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER	Dinas Pertanian dan Pangan	3.869.121.276	3.162.447.250	81,74
		Meningkatnya Kuantitas, Kualitas, dan Kontinuitas Produk Pertanian	Nilai Tukar Usaha Petani (NTUP)	PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN	Dinas Pertanian dan Pangan	2.133.555.040	1.924.505.861	90,20
		Meningkatnya Kuantitas, Kualitas, dan Kontinuitas Produk Pertanian	Nilai Tukar Usaha Petani (NTUP)	PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN	Dinas Pertanian dan Pangan	1.885.589.170	1.598.470.780	84,77
		Meningkatnya Kuantitas, Kualitas, dan Kontinuitas Produk Pertanian	Nilai Tukar Nelayan (NTN)	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP	Dinas Perikanan	2.050.031.529	1.849.901.090	90,24
		Meningkatnya Kuantitas, Kualitas, dan Kontinuitas Produk Pertanian	Nilai Tukar Nelayan (NTN)	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	Dinas Perikanan	1.653.290.603	1.271.294.677	76,89
		Meningkatnya Kuantitas, Kualitas, dan Kontinuitas Produk Pertanian	Nilai Tukar Nelayan (NTN)	PROGRAM PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN	Dinas Perikanan	207.644.763	178.162.337	85,80
		Meningkatnya Kuantitas, Kualitas, dan Kontinuitas Produk Pertanian	Nilai Tukar Nelayan (NTN)	PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN	Dinas Perikanan	1.308.039.987	1.152.604.461	88,12
		Meningkatnya Kontribusi Sektor Pariwisata Terhadap PDRB	Persentase Kontribusi Sektor Pariwisata Terhadap PDRB	PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA	Dinas Pariwisata	14.140.140.325	7.452.945.940	52,71
		Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup Yang Berkelanjutan	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan	1.585.744.115	1.142.741.288	72,06
		Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup Yang Berkelanjutan	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)	Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan	352.954.639	279.517.576	79,19
		Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup Yang Berkelanjutan	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan	25.764.591	22.925.100	88,98

No.	Misi	Sasaran	Sasaran Indikator	Program	PD	Pagu Anggaran 2024	Realisasi Anggaran 2024	Persentase Serapan Anggaran
		Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup Yang Berkelanjutan	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan	171.966.521.514	107.757.324.857	62,66
9	Meningkatkan Daya Saing Daerah Yang Berbasis Kreativitas dan Inovasi	Meningkatnya Inovasi dan Kemandirian Daerah	Indeks Daya Saing Daerah (IDSD)	PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	Badan Riset dan Inovasi Daerah	9.013.653.121	7.672.970.755	85,13
		Meningkatnya Inovasi dan Kemandirian Daerah	Indeks Daya Saing Daerah (IDSD)	PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	Badan Pendapatan Daerah	12.086.418.013	10.596.103.559	87,67
		Meningkatnya Inovasi dan Kemandirian Daerah	Indeks Daya Saing Daerah (IDSD)	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	176.135.775.940	141.121.519.384	80,12
		Meningkatnya Inovasi dan Kemandirian Daerah	Indeks Daya Saing Daerah (IDSD)	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	8.831.046.082	7.229.525.367	81,86
		Meningkatnya Inovasi dan Kemandirian Daerah	Indeks Daya Saing Daerah (IDSD)	PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM DAN PENGELOLAAN PERSAMPAHAN REGIONAL	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	3.655.906.912	2.350.840.664	64,30
		Meningkatnya Inovasi dan Kemandirian Daerah	Indeks Daya Saing Daerah (IDSD)	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	13.191.380.347	11.456.285.975	86,85
		Meningkatnya Inovasi dan Kemandirian Daerah	Indeks Daya Saing Daerah (IDSD)	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	222.330.260.525	160.109.993.548	72,01
		Meningkatnya Inovasi dan Kemandirian Daerah	Indeks Daya Saing Daerah (IDSD)	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	898.784.287.757	884.306.146.849	98,39
		Meningkatnya Inovasi dan Kemandirian Daerah	Indeks Daya Saing Daerah (IDSD)	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	993.286.426.285	803.978.977.230	80,94
		Meningkatnya Inovasi dan Kemandirian Daerah	Indeks Daya Saing Daerah (IDSD)	PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	1.714.788.715	1.519.377.495	88,60
		Meningkatnya Inovasi dan Kemandirian Daerah	Indeks Daya Saing Daerah (IDSD)	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	2.085.163.613	1.407.359.690	67,49
		Meningkatnya Inovasi dan Kemandirian Daerah	Indeks Daya Saing Daerah (IDSD)	PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	4.111.767.747	3.607.587.790,00	87,74
		Meningkatnya Inovasi dan Kemandirian Daerah	Indeks Daya Saing Daerah (IDSD)	PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	10.859.208.260	8.036.921.032,00	74,01
		Meningkatnya Inovasi dan Kemandirian Daerah	Indeks Daya Saing Daerah (IDSD)	PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	2.450.953.831	2.442.217.860,00	99,64
		Meningkatnya Inovasi dan Kemandirian Daerah	Indeks Daya Saing Daerah (IDSD)	PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	274.557.765.886	253.955.831.913,00	92,50
		Meningkatnya Inovasi dan Kemandirian Daerah	Indeks Daya Saing Daerah (IDSD)	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	Dinas Kesehatan	10.686.439.288	9.986.450.186	93,45
		Meningkatnya Inovasi dan Kemandirian Daerah	Indeks Daya Saing Daerah (IDSD)	PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL	Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	384.807.600	367.288.400	95,45
		Meningkatnya Inovasi dan Kemandirian Daerah	Indeks Daya Saing Daerah (IDSD)	PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL	Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	2.250.069.050	1.121.772.914	49,86
		Meningkatnya Inovasi dan Kemandirian Daerah	Indeks Daya Saing Daerah (IDSD)	PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL	Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	469.410.800	304.055.140	64,77
		Meningkatnya Inovasi dan Kemandirian Daerah	Indeks Daya Saing Daerah (IDSD)	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	16.252.996.991	12.626.882.732	77,69

LAMPIRAN II :

**FORMULASI PENGHITUNGAN INDIKATOR SESUAI PERATURAN BUPATI BADUNG NOMOR 11 TAHUN 2022
TENTANG INDIKATOR KINERJA UTAMA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BADUNG
TAHUN 2021-2026**

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PENJELASAN/ FORMULASI PENGHITUNGAN	SUMBER DATA	PENANGGUNG JAWAB
1	Meningkatnya toleransi hidup beragama	Indeks Kerukunan Umat Beragama	Indeks Kerukunan Umat Beragama dari 3 (tiga) dimensi yaitu Toleransi, Kesetaraan, dan Kerja Sama. Rumus formulasi penghitungan indeks kerukunan umat beragama sebagai berikut : (Y).= (X1) + (X2) + (X3) Dimana : (Y) : Indeks kerukunan umat beragama (X1) : Pola Pendidikan Keluarga (X2) : Peran Kementerian Agama (X3) : Implementasi Kearifan Lokal Hasil Pengukuran Indeks Kerukunan Umat Beragama adalah 0-100.	Laporan Hasil Survei Kerukunan Umat Beragama	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
2	Meningkatnya Birokrasi yang bersih dan Akuntabel	Nilai SAKIP	Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) berpedoman pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pedoman Evaluasi Atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah atau perubahannya. Penilaian Akuntabilitas kinerja terhadap 5 Aspek sesuai Lembar Kerja Evaluasi (LKE) meliputi : 1. Perencanaan Kinerja 2. Pengukuran Kinerja 3. Pelaporan Kinerja 4. Evaluasi Kinerja 5. Capaian Kinerja Hasil Pengukuran nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) adalah 0-100	Laporan Hasil Evaluasi Pelaksanaan AKIP Oleh Kementerian PAN dan RB RI	Sekretariat Daerah Kab. Badung

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PENJELASAN/ FORMULASI PENGHITUNGAN	SUMBER DATA	PENANGGUNG JAWAB
		Opini BPK	<p>Pernyataan Profesional Pemeriksa mengenai kewajaran informasi keuangan yang disajikan dalam Laporan Keuangan yang didasarkan pada empat kriteria yakni kesesuaian dengan standar akuntansi pemerintah, kecukupan pengungkapan (<i>adequate disclosures</i>), kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, dan efektivitas sistem pengendalian intern.</p> <p>Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah berpedoman pada Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan Dan Tanggung Jawab Keuangan Negara, atau perubahannya.</p> <p>Hasil Pengukuran Opini BPK dikategorikan menjadi 4 (empat) jenis Opini atas Pemeriksaan Laporan Keuangan Pemerintah yaitu WTP, WDP, Opini Tidak Wajar atau <i>adversed opinion</i>, dan Pernyataan menolak memberikan opini (<i>disclaimer of opinion</i>) atau Tidak Memberikan Pendapat (TMP).</p>	Laporan Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah oleh BPK RI	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Badung
3	Meningkatnya Birokrasi yang Kapabel	Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)	<p>Penilaian evaluasi SPBE berpedoman pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 59 Tahun 2020 tentang Pemantauan dan Evaluasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) atau perubahannya. Nilai indeks SPBE merupakan nilai indeks yang merepresentasikan tingkat kematangan penerapan SPBE secara keseluruhan. Nilai indeks SPBE dihitung berdasarkan penjumlahan dari penghitungan perkalian antara nilai indeks domain dan bobot domain. Rumus penghitungan nilai indeks SPBE dijabarkan sebagai berikut:</p>	Laporan Hasil Evaluasi Pelaksanaan SPBE Oleh Kementerian PAN dan RB RI	Dinas Komunikasi dan Informatika Kab. Badung

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PENJELASAN/ FORMULASI PENGHITUNGAN	SUMBER DATA	PENANGGUNG JAWAB
			$\text{Indeks SPBE} = \sum_{j=1}^n ND_j \times BD_j$ <p>dimana:</p> <ul style="list-style-type: none"> • ND_j adalah nilai indeks domain ke-j; • BD_j adalah nilai bobot domain ke-j. <p>Nilai indeks yang merepresentasikan tingkat kematangan penerapan SPBE adalah 0 – 5.</p>		
		Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara (ASN)	<p>Pengukuran Indeks Profesionalitas ASN berpedoman pada Peraturan Badan Kepegawaian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2019 Tentang Pedoman Tata Cara Dan Pelaksanaan Pengukuran Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara atau perubahannya.</p> <p>Pengukuran Indeks Profesionalitas adalah suatu instrumen yang digunakan untuk mengukur secara kuantitatif tingkat profesionalitas pegawai ASN yang hasilnya dapat digunakan sebagai dasar penilaian dan evaluasi dalam upaya pengembangan profesionalisme ASN. Rumus formulasi penghitungan nilai indeks profesionalitas pegawai ASN sebagai berikut:</p> $IP = \sum_{i=1}^4 IP_i$ $= IP_1 + IP_2 + IP_3 + IP_4$ <p>Keterangan :</p> <p>IP = Indeks Profesionalisme</p> <p>IP_i = Indeks Profesionalisme k-i</p> <p>IP1 = Indeks Profesionalisme Dimensi Kualifikasi</p> <p>IP2 = Indeks Profesionalisme Dimensi Kompetensi</p>	Laporan Hasil Penilaian Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara (ASN) oleh BKN	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PENJELASAN/ FORMULASI PENGHITUNGAN	SUMBER DATA	PENANGGUNG JAWAB
			IP3 = Indeks Profesionalisme Dimensi Kinerja IP4 = Indeks Profesionalisme Dimensi Disiplin Hasil Pengukuran indeks profesionalisme Aparatur Sipil Negara (ASN) adalah 0-100		
4	Meningkatnya pelayanan publik menuju pelayanan yang prima dan berintegritas	Indeks Kepuasan Masyarakat	Penilaian survei Kepuasan Masyarakat berpedoman pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik atau perubahannya. Rumus formulasi penghitungan Indeks Kepuasan Masyarakat pada unit pelayanan yaitu : <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin: 10px auto; width: fit-content;"> $SKM = \frac{\text{Total dari Nilai Persepsi Per Unsur}}{\text{Total Unsur yang Terisi}} \times \text{Nilai Penimbang}$ </div> Hasil Pengukuran Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) adalah Nilai interval (NI): 1-4 atau Nilai Interval Konversi (NIK): 25-100.	Laporan Hasil survei kepuasan masyarakat	Badan Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Badung
5	Meningkatnya kepatuhan masyarakat dalam mentaati Perda dan Perkada	Persentase Penegakan Perda dan Perkada	Rumus formulasi penghitungan persentase penegakan Perda dan Perkada adalah : $\frac{\sum \text{Penyelesaian Penegakan Perda dan perkada}}{\sum \text{Pelanggaran Perda dan Perkada}} \times 100\%$ Hasil Pengukuran Persentase Penegakan Perda dan Perkada adalah 0 – 100%	Laporan Pelanggaran Perda dan Perkada	Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Badung
6	Terwujudnya Pemenuhan HAM	Capaian Atas Kepedulian HAM	Penilaian daerah Kabupaten/Kota peduli hak asasi manusia guna mewujudkan kewajiban dan tanggung jawab pemerintah dalam penghormatan, perlindungan, pemenuhan, penegakan, dan pemajuan hak asasi manusia berpedoman pada Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia	Laporan Hasil Penilaian Pemenuhan Layanan Hak-hak Dasar Manusia oleh	Sekretariat Daerah Kabupaten Badung

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PENJELASAN/ FORMULASI PENGHITUNGAN	SUMBER DATA	PENANGGUNG JAWAB
			<p>Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2021 Tentang Kriteria Daerah Kabupaten/Kota Peduli Hak Asasi Manusia atau perubahannya. Penilaian kriteria daerah kabupaten/kota Peduli HAM diukur berdasarkan indikator struktur, proses dan hasil. Kriteria daerah kabupaten/kota Peduli HAM didasarkan pada terpenuhinya: a. hak atas kesehatan; b. hak atas pendidikan; c. hak perempuan dan anak; d. hak atas kependudukan; e. hak atas pekerjaan; f. hak atas perumahan yang layak; dan g. hak atas lingkungan yang berkelanjutan.</p> <p>Rumus formulasi penghitungan penilaian daerah Kabupaten/Kota peduli HAM adalah:</p> $\bar{x} = \sum x / n$ <p>x : Nilai Rata-rata x : Jumlah capaian seluruh indikator n : Jumlah kriteria</p> <p>Hasil Pengukuran penilaian daerah Kabupaten/Kota peduli HAM adalah 0-100</p>	Kementerian Hukum dan HAM RI	
7	Meningkatnya kreativitas serta pelestarian seni dan budaya	Persentase Pertumbuhan Seni dan Budaya	<p>Rumus formulasi penghitungan persentase penegakan pertumbuhan seni dan budaya adalah :</p> $\frac{\sum \text{Kreativitas Seni yang Sudah Ada}}{\sum \text{Kreativitas Seni}} \times 100 \%$ <p>Hasil Pengukuran persentase penegakan pertumbuhan seni dan budaya adalah 0 – 100%</p>	Data Pertumbuhan Seni dan Budaya	Dinas Kebudayaan Kabupaten Badung
8	Meningkatnya kualitas sumber daya manusia	Indeks Pembangunan Manusia	<p>IPM dihitung sebagai rata-rata geometrik dari indeks kesehatan, pendidikan, dan pengeluaran. Rumus Formulasi penghitungan IPM sebagai berikut:</p>	Data Capaian Indikator IPM dari BPS	Dinas Kesehatan Kab. Badung. Dinas

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PENJELASAN/ FORMULASI PENGHITUNGAN	SUMBER DATA	PENANGGUNG JAWAB
			$IPM = \sqrt[3]{I_{kesehatan} \times I_{pendidikan} \times I_{pengeluaran}} \times 100$ <p>Menghitung Indeks Komponen Setiap komponen IPM distandardisasi dengan nilai minimum dan maksimum sebelum digunakan untuk menghitung IPM. Rumus yang digunakan sebagai berikut.</p> <p>1. Dimensi Kesehatan</p> $I_{kesehatan} = \frac{AHH - AHH_{min}}{AHH_{maks} - AHH_{min}}$ <p>2. Dimensi Pendidikan</p> $I_{HLS} = \frac{HLS - HLS_{min}}{HLS_{maks} - HLS_{min}}$ $I_{RLS} = \frac{RLS - RLS_{min}}{RLS_{maks} - RLS_{min}}$ $I_{pendidikan} = \frac{I_{HLS} + I_{RLS}}{2}$ <p>3. Dimensi Pengeluaran</p> $I_{pengeluaran} = \frac{\ln(pengeluaran) - \ln(pengeluaran_{min})}{\ln(pengeluaran_{maks}) - \ln(pengeluaran_{min})}$ <p>Hasil Pengukuran Indeks Pembangunan Manusia adalah 0-100.</p>		Pendidikan, Kepemudaan dan Olah Raga Kab. Badung

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PENJELASAN/ FORMULASI PENGHITUNGAN	SUMBER DATA	PENANGGUNG JAWAB
9	Meningkatnya persentase koperasi sehat	Persentase Jumlah Koperasi Sehat	<p>Pengukuran terhadap kesehatan koperasi dilakukan melalui kegiatan hasil pengawasan koperasi berpedoman pada Peraturan Menteri Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah RI Nomor 9 Tahun 2020 tentang pengawasan koperasi atau perubahannya. Rumus formulasi penghitungan persentase koperasi sehat adalah :</p> $\frac{Pn}{P1} \times 100\%$ <p>Keterangan : Pn = Jumlah koperasi sehat P1 = Jumlah koperasi yang dinilai Hasil Pengukuran persentase jumlah koperasi sehat adalah 0-100 %.</p>	Data Jumlah Koperasi Sehat	Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perdagangan Kab. Badung
10	Meningkatnya jumlah wirausaha	Persentase Pertumbuhan jumlah wirausaha	<p>Rumus formulasi penghitungan persentase Pertumbuhan jumlah wirausaha adalah :</p> $\frac{Pn - P1}{P1} \times 100\%$ <p>Keterangan : Pn = Jumlah tahun ini Jumlah tahun Sebelumnya Hasil Pengukuran Persentase Pertumbuhan an jumlah wirausaha adalah 0 – 100%.</p>	Data Pertumbuhan jumlah wirausaha	Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perdagangan Kab. Badung
11	Meningkatnya kontribusi sector perdagangan terhadap PDRB	Persentase Kontribusi Sektor Perdagangan terhadap PDRB	<p>Rumus perhitungan kontribusi sektor perdagangan terhadap PDRB Kab. Badung adalah :</p> $\frac{Pn}{P1} \times 100\%$ <p>Keterangan :</p>	Data Persentase Kontribusi Sektor Perdagangan terhadap PDRB berasal	Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perdagangan Kab. Badung

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PENJELASAN/ FORMULASI PENGHITUNGAN	SUMBER DATA	PENANGGUNG JAWAB
			<p>Pn = Kontribusi sektor perdagangan P1 = Kontribusi seluruh sektor</p> <p>Hasil pengukuran persentase Kontribusi Sektor Perdagangan terhadap PDRB adalah 0 – 100%.</p>	dari BPS	
12	Meningkatnya kebahagiaan masyarakat	Indeks Kebahagiaan	<p>Indeks kebahagiaan merupakan gambaran umum tingkat kepuasan penduduk terhadap keseluruhan domain kehidupan manusia yang dianggap esensial dengan memperhitungkan pula aspek perasaan dan makna hidup seseorang.</p> <p>Kriteria penilaian tingkat kebahagiaan terdiri dari tiga dimensi kehidupan, yaitu Dimensi Kepuasan Hidup (<i>Life Satisfaction</i>), Dimensi Perasaan (<i>Affect</i>), Dimensi Makna Hidup (<i>Eudaimonia</i>).</p> <p>Aspek secara substansi merefleksikan tingkat kebahagiaan meliputi kepuasan terhadap kesehatan, pendidikan, pekerjaan, pendapatan rumah tangga, dan keharmonisan keluarga, ketersediaan waktu luang, hubungan sosial, kondisi rumah dan aset, keadaan lingkungan, dan kondisi keamanan.</p> <p>Rumus Formulasi penghitungan indeks Kebahagiaan sebagai berikut :</p> $IKH = \frac{W_1 \times I_{KepuasanHidup} + W_2 \times I_{Perasaan} + W_3 \times I_{MaknaHidup}}{W_1 + W_2 + W_3}$ <p>W₁ = Penimbang dimensi kepuasan hidup W₂ = Penimbang dimensi perasaan W₃ = Penimbang dimensi makna hidup W₁+W₂+W₃=1 I_{Kepuasan Hidup} = Indeks Dimensi Kepuasan Hidup I_{Perasaan} = IndeksDimensi Perasaan (Afeksi) I_{Makna Hidup} = Indeks Dimensi Makna Hidup</p>	Laporan Hasil Survei Indeks Kebahagiaan	Badan Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Badung

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PENJELASAN/ FORMULASI PENGHITUNGAN	SUMBER DATA	PENANGGUNG JAWAB
13	Menurunnya angka kemiskinan	Persentase Penduduk Miskin	<p>Persentase penduduk miskin yang berada di suatu wilayah. Rumus Formulasi penghitungan persentase penduduk miskin sebagai berikut :</p> $\frac{\sum \text{Penduduk Miskin}}{\sum \text{Total Penduduk}} \times 100\%$ <p>Hasil Pengukuran Persentase penduduk miskin adalah 0 – 100%.</p>	Data Persentase Penduduk Miskin dari BPS Kabupaten Badung	Dinas Sosial Kabupaten Badung
14	Meningkatnya pengembangan daya Tarik destinasi pariwisata berorientasi pertanian	Persentase pengembangan daya Tarik destinasi pariwisata berorientasi pertanian	<p>Rumus Formulasi penghitungan Persentase pengembangan daya Tarik destinasi pariwisata berorientasi pertanian sebagai berikut :</p> $\frac{\sum \text{Daya Tarik Pariwisata yang Berorientasi pertanian}}{\sum \text{Daya Tarik Wisata}} \times 100\%$ <p>Hasil pengukuran Persentase pengembangan daya Tarik destinasi pariwisata berorientasi pertanian adalah 0 – 100%.</p>	Data pengembangan daya Tarik destinasi pariwisata	Dinas Pariwisata Kabupaten Badung
15	Meningkatnya pengembangan agroindustry yang berorientasi pada pelestarian sumber daya alam	Persentase Pengembangan Agroindustry yang berorientasi pada Pelestarian Sumber Daya Alam	<p>Rumusan Formulasi penghitungan Persentase Pengembangan Agroindustry yang berorientasi pada Pelestarian Sumber Daya Alam, seperti berikut :</p> $\frac{\sum \text{Usaha Agroindustry yang Berorientasi Pada Pelestarian Sumber Daya Alam}}{\sum \text{Usaha Agroindustry}}$ <p>Hasil pengukuran Persentase Pengembangan Agroindustry yang berorientasi pada Pelestarian Sumber Daya Alam adalah 0 – 100%.</p>	Data Pengembangan agroindustry Kabupaten Badung	Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Badung, Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kabupaten Badung
16	Meningkatnya kuantitas, kualitas dan kontinuitas produk	Nilai Tukar Usaha Petani (NTUP)	<p>NTUP merupakan indikator proxy kesejahteraan petani. Rumus formulasi penghitungan NTUP melalui perbandingan antara indeks harga yang diterima petani (It) dengan Indeks harga yang dibayar petani untuk produksi dan penambahan</p>	Data Nilai Tukar Usaha Petani dari BPS Kabupaten	Dinas Pertanian dan Pangan Kab.

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PENJELASAN/ FORMULASI PENGHITUNGAN	SUMBER DATA	PENANGGUNG JAWAB
	pertanian		<p>barang modal (IbBPPBM). Indeks harga yang diterima oleh petani (It) dan Indeks Harga yang dibayar oleh petani untuk produksi dan penambahan barang modal (IbBPPBM) dihitung dengan menggunakan formula <i>Modified Laspeytes Index</i></p> $NTUP = \frac{It}{Ib_{BPPBM}} \times 100$ <p>Keterangan : NTUP=Nilai Tukar Usaha Petani It=Indeks harga yang diterima petani IbBPPBM=Indeks harga yang dibayar petani Hasil pengukuran kisaran nilainya adalah $100 \leq NTP \leq 100$.</p>	Badung	Badung
		Nilai Tukar Nelayan (NTN)	<p>NTN merupakan salah satu indikator untuk mengukur tingkat kesejahteraan nelayan dalam memenuhi kehidupan subsistennya. NTN adalah rasio total pendapatan terhadap total pengeluaran rumah tangga nelayan selama periode waktu tertentu. Pengukuran NTN berpedoman pada Peraturan Menteri Kelautan Dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 35/Permen-Kp/2014 Tentang Pedoman Umum Arsitektur Data Kelautan Dan Perikanan Di Lingkungan Kementerian Kelautan Dan Perikanan atau perubahannya. Rumusan formulasi penghitungan Nilai Tukar Nelayan sebagai berikut : $NTN = (It/Ib) \times 100$ Dimana : It = Jumlah total pendapatan dari hasil produk budidaya di kali bobot harga produk dibagi total harga dan produk pada tahun dasar dikali 100 Ib = Jumlah total pengeluaran rumah tangga</p>	Data Nilai Tukar Nelayan dari BPS Kabupaten Badung	Dinas Perikanan Kab. Badung

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PENJELASAN/ FORMULASI PENGHITUNGAN	SUMBER DATA	PENANGGUNG JAWAB														
			<p>pembudidaya yang terdiri dari pengeluaran pengeluaran konsumsi rumah tangga dan pengeluaran biaya usaha budidaya di kali bobot harga konsumsi dibagi total harga dan konsumsi pada tahun dasar dikali 100</p> <p>Hasil Pengukuran kisaran nilainya adalah $100 \leq \text{NTN} \leq 100$.</p>																
17	Meningkatnya kontribusi sector pariwisata terhadap PDRB	Persentase Kontribusi Sektor Pariwisata terhadap PDRB	<p>PDRB adalah jumlah nilai tambah atas barang dan jasa yang dihasilkan oleh berbagai unit produksi di wilayah suatu negara dalam jangka waktu tertentu (biasanya satu tahun). Rumus formulasi penghitungan sebagai berikut:</p> $Y = C + G + GFCF + \Delta \text{Invent} + X - M$ <p>di mana:</p> <table border="0"> <tr> <td>Y (<i>Income</i>)</td> <td>= PDRB</td> </tr> <tr> <td>C (<i>Consumption</i>)</td> <td>= Konsumsi akhir rumah tangga dan LNPRT</td> </tr> <tr> <td>G (<i>Government</i>)</td> <td>= Konsumsi pemerintah</td> </tr> <tr> <td>GFCF (<i>Gross Fixed Capital Formation</i>)</td> <td>= Pembentukan modal tetap bruto</td> </tr> <tr> <td>Δ Invent</td> <td>= Perubahan inventori</td> </tr> <tr> <td>X</td> <td>= Ekspor</td> </tr> <tr> <td>M</td> <td>= Impor</td> </tr> </table> <p>Hasil pengukuran Persentase Kontribusi Sektor Pariwisata terhadap PDRB adalah 0 – 100%</p>	Y (<i>Income</i>)	= PDRB	C (<i>Consumption</i>)	= Konsumsi akhir rumah tangga dan LNPRT	G (<i>Government</i>)	= Konsumsi pemerintah	GFCF (<i>Gross Fixed Capital Formation</i>)	= Pembentukan modal tetap bruto	Δ Invent	= Perubahan inventori	X	= Ekspor	M	= Impor	Data PDRB dari BPS Kabupaten Badung	Dinas Pariwisata Kab. Badung
Y (<i>Income</i>)	= PDRB																		
C (<i>Consumption</i>)	= Konsumsi akhir rumah tangga dan LNPRT																		
G (<i>Government</i>)	= Konsumsi pemerintah																		
GFCF (<i>Gross Fixed Capital Formation</i>)	= Pembentukan modal tetap bruto																		
Δ Invent	= Perubahan inventori																		
X	= Ekspor																		
M	= Impor																		
18	Meningkatnya kualitas lingkungan hidup yang berkelanjutan	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	<p>IKLH (Indeks Kualitas Lingkungan Hidup) merupakan gambaran atau indikasi awal yang memberikan kesimpulan cepat dari suatu kondisi lingkungan hidup pada lingkup dan periode tertentu. Kriteria dalam penghitungan IKLH meliputi: Indeks Kualitas Udara, Indeks Kualitas Air, dan Indeks Tutupan Lahan.</p> <p>Rumus formulasi penghitungan untuk IKLH adalah :</p>	Laporan Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Kabupaten Badung	Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kabupaten Badung														

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PENJELASAN/ FORMULASI PENGHITUNGAN	SUMBER DATA	PENANGGUNG JAWAB
			IKLH = (30% x IKA) + (30% x IKU) + (40% x IKTL) IKA = Indeks Kualitas Air IKU = Indeks Kualitas Udara IKTL= Indeks Kualitas Tutupan Lahan Hasil Pengukuran Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) adalah 0-100		
19	Meningkatnya Inovasi dan Kemandirian Daerah	Indeks Daya Saing Daerah (IDSD)	Pengukuran Indeks Daya Saing Daerah terhadap 4 Aspek Meliputi : <ol style="list-style-type: none"> 1. Aspek Faktor Penguat/ <i>Enabling Evironment</i> 2. Aspek Sumber Daya Manusia/ <i>Human Capital</i> 3. Aspek Pasar/ <i>Market</i> 4. Aspek Ekosistem Inovasi Rumus Formulasi penghitungan Indeks Daya Saing Daerah adalah : $Indeks = \frac{\sum_{i=1}^n Aspek_i}{n}$ Hasil pengukuran Indeks Daya Saing Daerah (IDSD) adalah 0 - 5	Hasil penilaian Indeks Daya Saing Daerah (IDSD) dari Kemenristek/ BRIN	Badan Penelitian dan Pengembangan Kab. Badung